

**KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM  
KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA  
(Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019,  
dan 2024 di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD NADHIFUL HAKIM**

NIM: 2102056015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat)

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Nadhiful Hakim  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Nadhiful Hakim

NIM : 2102056015

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : "KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS  
DEMOKRASI PANCASILA (Praktik Golput Pada Pemilu 2014,  
2019, dan 2024 di Indonesia)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 24 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyitoh SH.,MH.  
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Ali Maskur SH., M.H.  
NIP. 198912172019031010

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohammad Nadhiful Hakim  
NIM : 2102056015  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : “ Konstitusionalitas Golput Dalam Konteks Demokrasi Pancasila: Praktik Golput Pada Pemilu 2014, 2019, Dan 2024 Di Indonesia”

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Fenny Bintarawati, M.H  
NIP. 198907262019032011

Sekretaris Sidang

Ali Maskuzi, SH, M.H,  
NIP. 198807172019031010

Penguji Utama I

Dr. Ismail Marzuki, M.A., HK,  
NIP. 19830809 201503 1002



Penguji Utama II

Arina Hukmu Adila, M.H  
NIP. 199401182019032022

Pembimbing 1

Dr. Novita Dewi Masvithoh, SH, MH  
NIP. 197910222007012011

Pembimbing 2

Ali Maskuzi, SH, M.H,  
NIP. 198910172019031010

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nadhiful Hakim

NIM : 2102056015

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : **"KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA (Praktik Golput Pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2025



Muhammad Nadhiful Hakim  
NIM 2102056034



## MOTTO

{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ }

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.” [Surat Al-Ankabut: 69]

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap pencapaian dalam hidup bukanlah hasil dari usaha sendiri, melainkan merupakan buah dari dukungan, kasih sayang, dan bimbingan dari banyak pihak. Skripsi ini menjadi salah satu bukti perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, almarhum Abah Ali Muntono dan Ibu Robiatul Adawiyah, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, kasih sayang, serta motivasi dalam setiap langkah perjalanan akademik saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dorongan yang telah diberikan. Doa dan cinta kalian akan selalu menjadi bagian dari setiap langkah hidup saya.
2. Kedua saudara kandung, Mohammad Faiz Khoiruz Zaki dan Mohammad Fadhil Ainun Naim, terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang selalu menyertai. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan hidup saya, dan kehadiran kalian selalu menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan.
3. Para dosen dan pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ilmu yang diberikan sangat berharga bagi

perkembangan akademik dan pemahaman saya tentang dunia hukum.

4. Sahabat saya, Alvian Varihul Mustavid, terima kasih telah menemani penulis sejak awal masa perkuliahan hingga sekarang, dalam setiap suka maupun duka. Dukungan, kebersamaan, dan persahabatan yang kita bangun akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
5. Teman-teman pondok, Huda, Arju, Aqil, Maya, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan akademik maupun dalam keseharian. Kebersamaan kita menjadi pengalaman yang begitu berarti.
6. Teman-teman IH A 2021, terima kasih telah menemani perjalanan akademik saya sejak awal kuliah hingga saat ini. Kebersamaan kita dalam menghadapi berbagai tantangan perkuliahan menjadi kenangan yang tak terlupakan.
7. Sahabat PKY sekaligus HTN, Abi Umaroh, Marisa Bahaj, Hafida Aristya, Intan Putri, terima kasih telah menjadi teman yang supportif dalam berbagai hal. Dukungan, kebersamaan, dan diskusi yang kita lakukan telah memberikan banyak pelajaran dan semangat dalam menjalani perkuliahan.
8. Keluarga besar KKN Moderasi Beragama Posko 99, terimakasih atas pembelajaran selama pengabdian

masyarakat, terimakasih telah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih atas canda tawanya dan pengalamannya selama penulis berada di bangku perkuliahan. Terimakasih telah menjadi *support system* penulis

9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan dalam berbagai cara. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, sangat berarti dalam perjalanan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam dunia keilmuan. Segala kekurangan dalam penelitian ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang terus berlanjut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                    |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan      |
| ب          | Ba   | B                  | Be                      |
| ت          | Ta   | T                  | Te                      |
| ث          | Şa   | Ş                  | Es (dengan titikdiatas) |
| ج          | Jim  | J                  | Je                      |
| ح          | Ha   | Ĥ                  | Ha (dengan titikdiatas) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha               |
| د          | Dal  | D                  | De                      |

|   |      |     |                            |
|---|------|-----|----------------------------|
| ذ | Żal  | Ż   | Zet (dengan titikdiatas)   |
| ر | Ra   | R   | Er                         |
| ز | Zai  | Z   | Zet                        |
| س | Sin  | S   | Es                         |
| ش | Syin | Sy  | Es dan ye                  |
| ص | Şad  | ş   | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Đad  | Đ   | De (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | Ṭ   | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Ża   | ż   | Zet (dengan titikdi bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ — | apostrof terbalik          |
| غ | Gain | G   | Ge                         |
|   | Fa   | F   | Ef                         |

|   |        |     |          |
|---|--------|-----|----------|
| ف |        |     |          |
| ق | Qof    | Q   | Qi       |
| ك | Kaf    | K   | Ka       |
| ل | Lam    | L   | El       |
| م | Mim    | M   | Em       |
| ن | Nun    | N   | En       |
| و | Wau    | W   | We       |
| ه | Ha     | H   | Ha       |
| ء | Hamzah | — , | Apostrof |
| ي | Ya     | Y   | Ye       |

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' )

#### A. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

## B. Vocal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ    | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أُ    | <i>Ḍammah</i> | U           | U    |

## C. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| النِّتْمِ | Ditulis | a'antum   |
| نُتْ اِعد | Ditulis | 'u 'iddat |

## D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| ن الْقُرْ   | Ditulis | al Qur'an |
| الْقِيَّاسِ | Ditulis | al- Qiyas |

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءِ | Ditulis | as-Samaa' |
| الشَّمْسِ  | Ditulis | asy-Syams |



**E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

|               |         |                    |
|---------------|---------|--------------------|
| المجتهد بداية | Ditulis | bidayatul mujtahid |
| يعة الذر سد   | Ditulis | sadd adz dzariah   |

**F. Pengecualian**

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang xiv menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menegaskan kedaulatan rakyat. Dalam beberapa periode pemilu terakhir, fenomena golongan putih (golput) semakin meningkat, menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses elektoral di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 serta mengkaji konstusionalitas golput. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta bahan hukum utama yaitu Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka golput cenderung meningkat dalam setiap pemilu, mengindikasikan adanya persoalan dalam partisipasi politik masyarakat. Selain itu, golput merupakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum, tingginya angka golput dapat berdampak pada legitimasi pemerintahan serta stabilitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi politik, seperti memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, serta memperkuat pendidikan politik bagi pemilih.

**Kata Kunci:** golput, pemilu, hak politik, konstusionalitas.

## ABSTRACT

*General elections are the cornerstone of democracy, affirming the sovereignty of the people. In recent election periods, the phenomenon of abstention (golput) has increased, reflecting public distrust in Indonesia's political system and electoral process.*

*This study aims to analyze the practice of abstention in the 2014, 2019, and 2024 elections and examine its constitutionality. This research employs a normative legal method with a statutory and literature review approach. The data sources include the General Election Commission (KPU) and the Central Bureau of Statistics (BPS), with the Constitution as the primary legal reference.*

*The findings indicate that abstention rates have tended to increase in each election, highlighting issues in political participation. Furthermore, abstention is a constitutionally protected political right as part of freedom of expression. Although not legally prohibited, a high abstention rate can impact government legitimacy and democratic stability in Indonesia. Therefore, systematic efforts are needed to increase political participation, such as improving the electoral system, restoring public trust in political institutions, and strengthening voter education.*

**Keywords:** *abstention, elections, political rights, constitutionality.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih tidak pernah pilih kasih dan maha penyayang sayangnya tak terhingga atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang penulis buat dengan judul “Konstitusionalitas Golput Dalam Konteks Demokrasi Pancasila (Praktik Golput Pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat ini.

Alhamdulillah, penulis mendapatkan banyak ilmu, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dari berbagai pihak. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya di kemudian hari.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;

4. Ibu Maria Anna Muryani SH.,M.H selaku wali dosen penulis;
5. Kepada pembimbing Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh SH.,MH., dan Bapak Ali Maskur SHI. M.H yang telah meluangkan waktu dengan sangat sabar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap dosen, tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
7. Kedua orang tua tercinta almarhum Abah Ali Muntono dan Ibu Robiatul Adawiyah, yang sudah mendukung, mendoakan dan membiayai kuliah anaknya tanpa mengeluh sepatah kata. Dengan do'a dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam dunia keilmuan. Segala kekurangan dalam penelitian ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang terus berlanjut.

Semarang, 24 Maret 2025



**MUHAMMAD NADHIFUL HAKIM**

**2102056015**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                  | ii         |
| DEKLARASI.....                                | iii        |
| MOTTO .....                                   | v          |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                     | vi         |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b> | <b>ix</b>  |
| ABSTRAK.....                                  | xiv        |
| ABSTRACT.....                                 | xv         |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>xvi</b> |
| DAFTAR ISI.....                               | xviii      |
| BAB I.....                                    | 1          |
| PENDAHULUAN .....                             | 1          |
| A. Latar Belakang.....                        | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 21         |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 21         |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 22         |
| E. Tinjauan Pustaka .....                     | 24         |
| F. Metode Penelitian .....                    | 29         |
| <b>G. Sistematika Penulisan .....</b>         | <b>43</b>  |
| BAB II.....                                   | 46         |

|   |     |
|---|-----|
| TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI<br>PANCASILA DAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)                    | 46  |
| A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi .....  | 46  |
| B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Pancasila ..   | 71  |
| C. Hak Politik Warga Negara .....   | 99  |
| D. Golongan Putih (Golput).....   | 105 |
| E. Teori Kedaulatan Rakyat.....   | 120 |
| BAB III .....   | 126 |
| PRAKTIK GOLPUT PADA PEMILU 2014, 2019, DAN<br>2024 DI INDONESIA.....                        | 126 |
| A. Profil Negara Kesatuan Republik Indonesia...   | 124 |
| B. Pemilihan Umum di Indonesia.....   | 133 |
| C. Praktik Golput Pemilu 2014 di Indonesia .....  | 140 |
| D. Praktik Golput Pemilu 2019 di Indonesia .....  | 154 |
| E. Praktik Golput Pemilu 2024 di Indonesia .....  | 163 |
| F. Perbandingan Praktik Golput antara Pemilu Tahun<br>2014, 2019 dan Pemilu Tahun 2024..... | 174 |
| BAB IV .....  | 181 |
| KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM<br>KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA .....                        | 181 |
| A. Makna dan Relevansi Golput.....  | 181 |

|  |     |
|--|-----|
| B. Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 Menurut Konstitusi ..... | 182 |
| C. Implikasi Hukum dan Politik terhadap Fenomena Golput.....               | 193 |
| BAB V.....   | 196 |
| PENUTUP.....   | 196 |
| A. Kesimpulan .....  | 196 |
| B. Saran .....   | 202 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 202 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....  | 226 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....  | 226 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diadaptasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip dasar dari demokrasi ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pada pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa setiap keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat dan memperhatikan kepentingan bersama<sup>1</sup>.

Selain itu, demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, proses deliberatif lebih diutamakan daripada suara mayoritas semata, dengan tujuan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mencerminkan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana keberagaman harus dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, demokrasi Pancasila berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan masyarakat, sehingga dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial yang berkelanjutan<sup>2</sup>.

Demokrasi Pancasila menempatkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak memilih dan dipilih, sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, hak memilih (aktif) dan hak dipilih (pasif) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait pemilu, yang menjamin setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.<sup>3</sup> Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan pemerintah.

Hak memilih dan dipilih dalam pemilu adalah manifestasi dari demokrasi Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan

---

<sup>2</sup> Hidayah, Y., Ulfa, N., Aprillio, & Belladonna, P. (2022). *Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat"*. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), 1(2), 110-123.

<sup>3</sup> Chika Irmala Deria, *Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 1, No. 4 (Desember 2021): 1-13.

pemerintah. Pemilu yang bebas, adil, dan transparan mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hubungan antara Demokrasi Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dan memastikan bahwa suara rakyat menjadi bagian integral dalam proses politik. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang mengatur hak-hak tersebut dan menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjalankan demokrasi.<sup>4</sup>

Pemilihan umum (pemilu) berperan krusial dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan representatif. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya dan memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Proses ini memastikan bahwa suara rakyat didengar, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Dengan adanya pemilu yang adil, beragam kepentingan dalam masyarakat dapat terwakili, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan semua lapisan masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, pemilu berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap

---

<sup>4</sup> Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(2), 16-24.

<sup>5</sup> Muhadam labolo & Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: RajaGrafindo, hal 45.

kekuasaan, mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Dengan pemilu yang reguler, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan membuat keputusan berdasarkan hasil tersebut. Proses ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial, karena memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam politik dan merasa dihargai. Melalui pendidikan politik yang terjadi selama kampanye dan debat publik, pemilu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam konteks Demokrasi Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Dalam sistem ini, pemilu tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Melalui pemilu yang adil dan transparan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghambat pencapaian kedaulatan rakyat secara optimal. Kekuasaan yang terpusat di tangan kelompok

---

<sup>6</sup> Yulianto, Otto Adi, Subono, Nur Iman, & Asgart, Sofian M. (2022). *Demokrasi tanpa representasi*. Jakarta: Demos, hal 76

elit oligarkis dapat mengurangi efektivitas pemilu sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemilu tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok marginal. Dengan demikian, pemilu dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila<sup>7</sup>. Golput, atau "golongan putih," merujuk pada sekelompok pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Istilah ini muncul sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat, sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan suara. Golput sering kali diartikan sebagai simbol ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia atau terhadap proses pemilihan itu sendiri.

Kemunculan golput di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke pemilu 1971. Dalam pemilu tersebut, golput muncul sebagai reaksi terhadap sistem politik Orde Baru yang dianggap otoriter dan tidak demokratis. Masyarakat merasa bahwa pilihan yang ada tidak mencerminkan aspirasi mereka. Fenomena ini semakin berkembang pada pemilu-pemilu

---

<sup>7</sup> HMIP FISIP UI. (n.d.). *Populisme: Potensi untuk Mengalahkan Dominasi Oligarki di Indonesia?* Retrieved from <https://hmip.fisip.ui.ac.id/populisme-potensi-untuk-mengalahkan-dominasi-oligarki-di-indonesia/>

berikutnya, termasuk pemilu 1999 setelah reformasi, ketika lebih banyak orang mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap politik yang ada. Golput menjadi simbol perlawanan dan harapan akan perubahan dalam struktur politik Indonesia.<sup>8</sup>

Penyebab utama munculnya golput di Indonesia seringkali berkaitan dengan ketidakpercayaan pada kandidat yang ada. Banyak pemilih merasa bahwa calon yang diusung dalam pemilihan umum tidak mewakili aspirasi atau kepentingan mereka. Ketidakpuasan ini diperparah oleh persepsi bahwa para kandidat sering kali terlibat dalam praktik korupsi atau tidak memiliki rekam jejak yang jelas dalam pelayanan publik. Akibatnya, pemilih merasa tidak ada pilihan yang layak dan lebih memilih untuk tidak memberikan suara sama sekali daripada memilih kandidat yang dianggap tidak kredibel.<sup>9</sup>

Selain itu, kekecewaan terhadap sistem politik juga menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya golput. Banyak orang merasa bahwa sistem politik yang ada tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dan cenderung mengabaikan suara rakyat. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakadilan dalam proses politik turut memicu keputusan untuk golput. Dalam konteks

---

<sup>8</sup> Hidayat, R. (2020). *Politik Identitas dan Golput di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2), 45-58.

<sup>9</sup> Mardani, A. (2021). *Dampak Ketidakpercayaan Publik Terhadap Pemilih di Indonesia*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 8(1), 1-15.

ini, golput bukan hanya sekadar pilihan individu, tetapi juga merupakan bentuk protes kolektif terhadap sistem yang dianggap tidak memadai dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Relevansi golput dalam perkembangan pemilu di Indonesia sangat signifikan, terutama sebagai indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Sejak kemunculannya pada pemilu 1971, golput telah mencerminkan suara minoritas yang merasa terpinggirkan dalam proses politik. Fenomena ini menjadi lebih menonjol pasca-reformasi 1998, ketika masyarakat mulai lebih kritis terhadap kandidat dan partai politik. Dalam setiap pemilu, angka golput sering kali menjadi refleksi dari tingkat kepercayaan publik terhadap calon dan proses pemilihan, menunjukkan bahwa meski pemilu diadakan secara reguler, tidak selalu menjamin partisipasi yang aktif dari masyarakat.<sup>10</sup>

Selain itu, golput juga berfungsi sebagai alat untuk menekan partai politik dan calon agar lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Meningkatnya angka golput dalam beberapa pemilu menunjukkan bahwa masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka melalui abstain. Hal ini dapat memicu partai-partai untuk memperbaiki diri dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, golput tidak hanya

---

<sup>10</sup> Pramudito, I. (2022). *Golput dan Dinamika Pemilih di Indonesia Pasca-Reformasi*. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 10(3), 15-30.

sekadar pilihan untuk tidak memilih, tetapi juga merupakan bagian penting dari dinamika politik yang dapat memengaruhi arah perkembangan pemilu di Indonesia.<sup>11</sup> Analisis terkait golput sebagai bentuk kebebasan berekspresi menyoroti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Golput dapat dilihat sebagai ekspresi dari ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia, yang mencerminkan keinginan individu untuk mengekspresikan pandangan dan sikap politik mereka. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada hak untuk memberikan suara, tetapi juga mencakup hak untuk menolak berpartisipasi dalam proses pemilihan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan pribadi.<sup>12</sup>

Di sisi lain, golput juga menegaskan hak politik warga negara untuk mengambil sikap kritis terhadap sistem politik yang ada. Dalam masyarakat yang demokratis, keputusan untuk golput menjadi bentuk protes terhadap ketidakadilan atau kegagalan sistem dalam memenuhi harapan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hak politik bukan hanya diukur dari partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menolak opsi yang ada

---

<sup>11</sup> Rahmawati, S. (2020). *Peran Golput dalam Mendorong Akuntabilitas Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6(1), 50-67.

<sup>12</sup> Tengku Irmayani, *Partisipasi Milenial dalam Dinamika Politik* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal 95.



sebagai bentuk pernyataan politik. Dengan demikian, golput memperkuat argumen bahwa hak politik seharusnya meliputi berbagai bentuk partisipasi, termasuk abstain sebagai pilihan yang sah.<sup>13</sup>

Posisi golput dalam kerangka hukum dan konstitusi Indonesia dapat dianggap sebagai hak konstitusional yang sah, mengingat UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam pemilihan umum. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, keputusan untuk golput, sebagai pilihan tidak untuk memberikan suara, dapat dilihat sebagai manifestasi dari hak politik warga negara untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon atau sistem yang ada.<sup>14</sup>

Namun, meskipun golput diakui sebagai hak konstitusional, posisi ini seringkali menimbulkan perdebatan dalam konteks tanggung jawab warga negara terhadap demokrasi. Beberapa pihak berargumen bahwa golput dapat melemahkan legitimasi pemilihan umum dan mengurangi akuntabilitas para calon. Di sisi lain, golput juga bisa dilihat sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap calon

---

<sup>13</sup> Djoko Sumanto & Amelia Haryanti. (2021). Pendidikan Politik. Banten: Unpam Press, hal 85.

<sup>14</sup> Sihombing, E. (2022). *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

dan sistem politik yang ada, yang mendorong perbaikan dalam representasi dan kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, golput berfungsi sebagai indikator penting bagi kesehatan demokrasi di Indonesia.<sup>15</sup>

Perspektif hukum mengenai kewajiban untuk menggunakan hak pilih di Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara harus memberikan suara dalam pemilihan umum. Namun, undang-undang pemilu mengatur bahwa partisipasi dalam pemilihan adalah hak yang dilindungi dan dianjurkan. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada sanksi hukum bagi yang memilih untuk golput, konsekuensi dari keputusan tersebut dapat berimplikasi pada legitimasi proses pemilihan dan representasi politik.<sup>16</sup> Golput sering kali diinterpretasikan sebagai bentuk protes yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kandidat atau sistem yang ada, sehingga dapat memengaruhi orientasi kebijakan politik di masa depan.

Implikasi bagi warga negara yang memilih untuk golput berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan politik mereka. Meskipun golput merupakan hak konstitusional, bagi sebagian orang, keputusan ini

---

<sup>15</sup> Djoko Sumanto & Amelia Haryanti. *Ibid*, hal 175.

<sup>16</sup> Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). *Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*. Journal homepage: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/6825>

dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab untuk turut serta dalam proses demokrasi. Di sisi lain, golput dapat berfungsi sebagai sinyal bagi partai politik dan calon untuk memperbaiki diri dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak ada konsekuensi hukum langsung, golput memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia dan mendorong diskusi tentang kualitas demokrasi dan representasi.<sup>17</sup>

Fenomena golput dalam pemilu di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Pada Pemilu 2014, angka golput mencapai sekitar 25%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, minimnya kepercayaan terhadap partai politik, dan kurangnya alternatif calon yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam sosialisasi dan edukasi politik juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka golput.<sup>18</sup>

Pada Pemilu 2019, angka golput mengalami sedikit penurunan, dengan hanya sekitar 20% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Peningkatan partisipasi ini didorong oleh meningkatnya kesadaran

---

<sup>17</sup> Sarbaini, Sarbaini. (2020) *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum 12.1 107-136.

<sup>18</sup> Subanda, N. (2020). *Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu*. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60-72.

politik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, serta meningkatnya peran media sosial dalam mengkampanyekan pentingnya pemilu. Selain itu, situasi politik yang lebih kompetitif dan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat turut mendorong keterlibatan pemilih.<sup>19</sup>

Namun, pada Pemilu 2024, angka golput kembali meningkat, mencapai sekitar 20,18%. Beberapa faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan partai politik, kurangnya kepercayaan pada sistem politik, serta dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi partisipasi pemilih, di mana masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada mengikuti proses politik. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang efektif masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka.<sup>20</sup>

Tingginya angka golput dalam beberapa periode pemilu ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

---

<sup>19</sup> Evelina, L. W., & Angeline, M. (2019). *Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014*. *Humaniora*, 6(1), 97-105.

<sup>20</sup> Lestari, K. A. P. (2021). *Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan Ham*. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37-45.

Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan transparansi politik, reformasi sistem pemilu, penguatan peran partai politik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kampanye sosialisasi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi, diharapkan angka golput dapat ditekan, sehingga proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih representatif dan kuat.<sup>21</sup>

Isu-isu hukum seputar legalitas dan konstitusionalitas golput (golongan putih) dalam pemilu di Indonesia terus menjadi topik perdebatan yang kompleks dan multifaset. Hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin secara eksplisit oleh konstitusi dan undang-undang. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Lebih lanjut, Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu serta berpartisipasi dalam pemerintahan, dengan prinsip pelaksanaan yang adil, termasuk pemungutan

---

<sup>21</sup> Ristania, T. W., Shofa, G. Z., Lestari, R. I., & Hasanah, N. (2024). Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: *Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih*. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 2(1), 112-120. Diakses dari <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL>

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan transparan.<sup>22</sup>

Namun, interpretasi terhadap hak ini dan kaitannya dengan kewajiban berpartisipasi dalam pemilu masih diperdebatkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa golput dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, merujuk pada semangat Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara.<sup>23</sup> Argumen ini diperkuat oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".<sup>24</sup> Ketika individu memilih untuk golput, dapat diargumentasikan bahwa mereka mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh pasal tersebut.

Di sisi lain, pendukung golput menyatakan bahwa abstain dari pemungutan suara juga merupakan bentuk ekspresi politik yang sah dan dilindungi oleh kebebasan berekspresi, sebagaimana dijamin dalam

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

<sup>23</sup> Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa meskipun undang-undang menjamin hak untuk memilih, tidak ada kewajiban eksplisit untuk menggunakan hak tersebut, dan bahwa golput bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi politik pasif yang juga memiliki nilai dalam demokrasi. Perdebatan ini semakin kompleks dengan adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghukum mereka yang memilih untuk golput, mengingat tidak adanya sanksi eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pihak lain menyatakan bahwa golput dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dan kewajiban konstitusional, merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi landasan sistem politik Indonesia.<sup>25</sup>

Kontroversi ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif dalam sistem demokrasi Indonesia. Lebih lanjut, permasalahan ini juga bersinggungan dengan pertanyaan tentang apakah hak pilih seharusnya dipandang sebagai hak positif yang mengharuskan partisipasi aktif, atau hak negatif yang memungkinkan abstain. Resolusi terhadap isu ini akan

---

<sup>25</sup>Alfarisi, H., Aisyah, V. N., & Kom, M. I. (2022). *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta) hal 45.

memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.<sup>26</sup>

Praktik golput dalam konteks Demokrasi Pancasila dan kebebasan politik yang dilindungi konstitusi menciptakan dilema konstitusional yang kompleks. Di satu sisi, golput dapat dianggap bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai manifestasi tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, golput bisa dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban moral dan sipil untuk berkontribusi dalam proses demokratis.

Di sisi lain, golput juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ekspresi kebebasan politik yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan untuk mengeluarkan

---

<sup>26</sup> Farinuddin, H., Hum, S., Ilwafa, A. R., Hum, S., Al Ghiffari, A. A., Putri, A. L. L., ... & Sos, S. (2024). *Meninjau Kembali Demokrasi Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 76-78.

<sup>27</sup> Suparto, D. (2021). *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, hal 65



pendapat, yang dapat diartikan termasuk kebebasan untuk tidak memilih sebagai bentuk pernyataan sikap politik. Beberapa ahli hukum dan politik berpendapat bahwa golput merupakan hak asasi yang tidak dapat dikriminalisasi dan bahkan bisa dilihat sebagai mekanisme kontrol terhadap sistem politik yang ada. Dalam perspektif ini, golput bukan hanya sekedar abstain dari pemungutan suara, tetapi juga bisa menjadi sinyal ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat atau sistem politik yang berlaku, yang pada gilirannya dapat mendorong perbaikan dalam proses demokrasi.<sup>28</sup> Dengan demikian, meskipun golput mungkin tidak sejalan dengan interpretasi sempit Demokrasi Pancasila, ia dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang lebih luas yang mencakup berbagai bentuk partisipasi dan ekspresi politik.

Dampak golput terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dan multidimensi. Tingginya angka golput dapat mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih, karena representasi yang dihasilkan dari pemilu mungkin tidak mencerminkan kehendak mayoritas penduduk.<sup>29</sup> Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik

---

<sup>28</sup> Hidayat, A. (2023). *Hak Pilih dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jurnal Konstitusi, 20(3), 501-520.

<sup>29</sup> Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 46.

terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memperlemah stabilitas politik. Lebih jauh, ketika sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, hal ini dapat membuka peluang bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap hasil pemilu, yang berpotensi mengancam prinsip kesetaraan politik dalam demokrasi.<sup>30</sup>

Di sisi lain, golput juga dapat dipandang sebagai indikator adanya masalah sistemik dalam proses demokrasi yang perlu diatasi. Tingginya angka golput dapat menjadi sinyal bagi para pemangku kepentingan politik untuk melakukan introspeksi dan perbaikan terhadap sistem pemilu, kualitas kandidat, atau kebijakan-kebijakan yang diusung. Dalam konteks ini, golput dapat berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang mendorong peningkatan kualitas demokrasi dalam jangka panjang. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, ketidakpuasan yang tercermin dalam tingginya angka golput dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk protes politik yang lebih ekstrem, yang pada akhirnya dapat mengancam

---

<sup>30</sup> Putra, A. (2024). *Golput dan Krisis Legitimasi: Analisis Pasca Pemilu 2024*. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 45-60.

stabilitas politik dan kohesi sosial.<sup>31</sup> Oleh karena itu, memahami dan mengelola fenomena golput menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk tidak memilih dan kebutuhan kolektif akan legitimasi dan stabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Urgensi penelitian mengenai golput dalam konteks konstusionalitas, khususnya pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia, memiliki relevansi yang mendalam dalam mengkaji dinamika demokrasi Pancasila. Fenomena golput yang terjadi dalam tiga periode pemilu berturut-turut mencerminkan perkembangan partisipasi politik masyarakat sekaligus menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Mengingat demokrasi Pancasila menekankan pada partisipasi aktif rakyat dalam sistem politik, tingkat golput yang tinggi dapat menjadi indikator adanya ketidakpuasan atau persoalan dalam mekanisme pemilu yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam konteks konstusional, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hak memilih dan hak untuk tidak memilih diakomodasi dalam sistem demokrasi Indonesia. UUD 1945 menjamin kebebasan politik bagi setiap warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi maupun tidak dalam pemilu. Namun,

---

<sup>31</sup> Nugroho, H. (2012). *Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1(1), 1-15.

tingginya angka golput dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pemilu dalam mencerminkan aspirasi rakyat dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik golput dalam tiga pemilu terakhir dapat memberikan gambaran mengenai pola-pola abstain politik, faktor penyebabnya, serta implikasi konstitusionalnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik yang sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Faktor-faktor seperti efektivitas sosialisasi pemilu, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan partai politik, serta dinamika politik nasional menjadi variabel penting yang perlu dikaji. Dengan pendekatan yang komprehensif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi proses demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh, relevansi penelitian ini juga terletak pada potensinya untuk mengungkap tren partisipasi politik dalam tiga periode pemilu, sehingga dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem pemilu yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis bagaimana golput berkembang dari Pemilu 2014, 2019, hingga 2024, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pergeseran pola

politik masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasar dari latar belakang yang ada rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik golput pada Pemilu 2014, 2019 hingga 2024 di Indonesia?
2. Bagaimana Konstitusionalitas Golput dalam konteks Demokrasi Pancasila di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik golput dari Pemilu 2014, 2019 hingga 2024 di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat golput serta dampaknya terhadap hasil pemilu dan representativitas pemimpin yang terpilih.
2. Untuk menganalisis konstitusionalitas golput (golongan putih) dalam kerangka demokrasi Pancasila di Indonesia. Memahami arti golput, dampaknya terhadap keterlibatan politik

masyarakat, serta pengaruhnya terhadap legitimasi pemilu dan representasi politik. Memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hak memilih dan mendorong peningkatan partisipasi politik di kalangan warga negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami konstusionalitas golput dalam konteks demokrasi Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori yang ada mengenai partisipasi politik dan hak asasi manusia, serta menambah wawasan akademis mengenai dinamika pemilu di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan membantu dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum dan politik, terutama terkait dengan hak memilih dan golput sebagai fenomena sosial.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah tentang pentingnya memahami alasan di balik golput dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, pemerintah dapat

merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memperbaiki sistem pemilu, dan memperkuat legitimasi demokrasi.

- b. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pilih mereka dan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk memahami implikasi dari keputusan untuk golput, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu terkait golput, partisipasi politik, dan demokrasi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan teori dan metodologi yang lebih baik dalam penelitian selanjutnya di bidang hukum dan politik.
- d. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi LSM yang berfokus pada pendidikan pemilih dan advokasi hak-hak politik. Dengan memahami alasan di balik golput, LSM dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran untuk

meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi oleh Riqi Andika Maulana (2023) dengan judul "Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020" mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi golput di Kelurahan Purwodadi. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa pandemi COVID-19 dan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu menjadi alasan utama tingginya angka golput. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran, di mana pemilih lebih memilih untuk melakukan aktivitas ekonomi daripada datang ke TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Rational Choice dan Non-Voting Behavior, yang menekankan bahwa keputusan golput didasarkan pada pertimbangan rasional, baik teknis maupun ekonomis.<sup>32</sup> Meskipun penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku golput di Pilkada, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda karena akan lebih berfokus pada konstusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila, serta

---

<sup>32</sup> Andika Maulana, *Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).



membahas praktik golput pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 di Indonesia, yang lebih menyoroti hak konstitusional warga negara dalam menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih mereka.

2. Skripsi oleh Merkorius Tele (2022) berjudul "Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020" menganalisis fenomena golput dalam Pilkada Ngada tahun 2020, di mana angka golput mencapai 26.013 suara atau 23,34% dari daftar pemilih tetap, bahkan melebihi jumlah suara pasangan pemenang. Berdasarkan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk golput, yaitu golput teknis, golput politis, dan golput pragmatis. Adapun faktor penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (seperti pekerjaan dan pendidikan) dan faktor eksternal (seperti faktor politik dan persepsi terhadap manfaat pemilu).<sup>33</sup> Penelitian ini penting sebagai telaah pustaka untuk memahami pola dan penyebab golput dalam pemilihan daerah, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia.
3. Skripsi oleh Septi Novita (2024) yang berjudul "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada

---

<sup>33</sup> Merkorius Tele, *Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020* (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022).

Pilkada Tahun 2024" membahas langkah-langkah KPU Kabupaten Kepahiang dalam menghadapi tingkat golput pada Pilkada sebelumnya, yang mencapai sekitar 19%. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada upaya sosialisasi dan penggunaan media sosial untuk mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, serta menekan praktik politik uang. Skripsi ini relevan sebagai telaah pustaka untuk memahami strategi institusi pemilihan dalam menekan angka golput di tingkat daerah, sekaligus memperlihatkan penerapan fiqh siyasah dusturiyyah dalam pandangan KPU terhadap golput.<sup>34</sup>

4. Skripsi oleh Muhammad Nur Rizqi (2024) yang berjudul "Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)" mengkaji fenomena golput di Bandar Lampung dari perspektif fiqh siyasah. Dalam penelitian ini, teridentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan golput, yaitu ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kesadaran politik masyarakat, intimidasi, dan faktor teknis.

---

<sup>34</sup> Septi Novita, *Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

Skripsi ini juga menyoroti upaya pemerintah kelurahan dalam mengurangi angka golput melalui sosialisasi dan pemasangan poster. Penelitian ini penting untuk kajian pustaka karena memberikan perspektif syariah mengenai golput dan membantu memahami faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di pemilihan daerah.<sup>35</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Taun, dkk. dalam jurnal yang berjudul "Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa" (2023) mengkaji penyebab golput di Indonesia dari era Orde Baru hingga masa kini. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena golput merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kegagalan sistem politik dalam memenuhi harapan publik, seperti merajalelanya korupsi, peningkatan amoralitas, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.<sup>36</sup> Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan sosialisasi sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun

---

<sup>35</sup> Muhammad Nur Rizqi, *Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

<sup>36</sup> Taun, N. A. K., Sari, N. N., dkk (2023). *Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, 11(2), 9-13.

penelitian ini membahas penyebab umum golput dalam jangka panjang, penelitian penulis akan lebih terfokus pada konstiusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila dan bagaimana hal ini tercermin dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia

6. Penelitian oleh Panjaitan et al. (2022) dalam artikel berjudul "Golput dan Pemilu 2024" membahas fenomena golput sebagai bentuk ketidakpuasan politik masyarakat, dengan menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, seperti yang terjadi di Kota Medan, di mana angka golput mencapai 70 persen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap calon pemimpin dan persepsi negatif terhadap sistem politik berkontribusi pada meningkatnya golput.<sup>37</sup> Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini sangat relevan untuk analisis praktik golput di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu 2014, 2019, dan 2024, serta memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik di kalangan warga.

---

<sup>37</sup> Panjaitan, M., Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., & Gulo, R. S. (2022). *Golput dan Pemilu 2024*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2(2).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*), bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konstusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena golput, bukan pada penghitungan atau kuantifikasi data seperti dalam penelitian kuantitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum kualitatif meliputi dua pendekatan utama: normatif dan empiris. Pendekatan normatif atau kepastasaan digunakan untuk meneliti norma-norma hukum dan kaidah yang mengatur hak pilih dalam konteks Pancasila, sedangkan pendekatan empiris diterapkan untuk mendapatkan data langsung terkait perilaku golput di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>38</sup> Meskipun penelitian ini lebih mengutamakan pendekatan normatif, pemilihan penelitian kualitatif tetap relevan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi keputusan masyarakat

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 22

untuk tidak memilih, serta analisis aspek konstitusional yang menjadi dasar kajian ini.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap golput sebagai hak konstitusional dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam kerangka Demokrasi Pancasila.<sup>39</sup> Jenis penelitian ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji aspek-aspek non-numerik yang penting, seperti interpretasi hukum dan pandangan masyarakat terhadap golput. Melalui analisis deskriptif yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis, penelitian kualitatif ini membantu mengungkap dimensi yang lebih kompleks, termasuk alasan di balik keputusan untuk golput serta dampaknya terhadap prinsip demokrasi dalam konteks Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum normatif (*doctrinal*), untuk mengkaji konstitusionalitas golput dalam Demokrasi Pancasila serta dampaknya dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia.

---

<sup>39</sup> Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 167-168

Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur hak pilih dalam konteks Pancasila. Pendekatan ini mencakup dua aspek penting. Pertama, penelitian inventarisasi hukum terkait golput, yang berfokus pada identifikasi aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan hak pilih dan hak untuk tidak memilih sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan hak memilih dalam sistem Demokrasi Pancasila. Kedua, penelitian asas-asas hukum yang mendasari hak pilih sebagai hak konstitusional, yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi dalam konteks hak warga negara untuk memilih atau tidak memilih sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam sebuah sistem demokrasi.<sup>40</sup>

### **3. Pembatasan Penelitian**

Penelitian ini akan fokus pada praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk memahami fenomena golput secara lebih luas

---

<sup>40</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 25.

dalam rentang waktu tiga pemilu berturut-turut, sehingga dapat mengidentifikasi pola serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih untuk tidak memberikan suara dalam skala nasional. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada tiga pemilu tersebut, analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan aspek demografis tertentu, seperti usia dan tingkat pendidikan, untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan pemilih dalam memilih golput. Penelitian ini akan mencakup pemilih muda (usia 17-25 tahun) dan pemilih dewasa (usia 26-40 tahun) guna memahami perbedaan sikap terhadap golput berdasarkan generasi. Dengan membandingkan kelompok usia ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana perubahan sosial dan politik memengaruhi partisipasi pemilih dari waktu ke waktu.

Aspek pendidikan juga menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan membandingkan pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan rendah. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadaran politik, serta dampaknya terhadap keputusan untuk menggunakan hak pilih atau



memilih golput. Dengan pembatasan lingkup dan karakteristik penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konstitusionalitas golput dalam konteks demokrasi Pancasila serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia.

#### **4. Sumber data dan Bahan Hukum**

##### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, perbedaan antara data yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi fokus utama. Penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku rujukan yang relevan, karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, ciri umum dari

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 12.

data sekunder adalah bahwa data tersebut sudah siap digunakan dan dapat langsung diakses<sup>42</sup>, tentu saja yang relevan untuk menggali pemahaman tentang konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pemilu 2014, 2019, dan 2024, termasuk jumlah pemilih terdaftar, tingkat partisipasi pemilih, serta statistik pemilu yang relevan, publikasi paper di jurnal nasional dan internasional, laporan, skripsi, serta data-data dari website resmi KPU yang berkaitan dengan judul skripsi. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber resmi dan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena golput.

#### **b. Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis sumber yang relevan untuk mendukung analisis. Bahan hukum primer meliputi undang-undang pemilu,

---

<sup>42</sup> Ibid, 12

peraturan terkait, berikut adalah Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
4. Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
5. Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
7. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
8. Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan perundang-undangan yang saya gunakan dalam skripsi ini mencakup pasal-pasal yang memberikan landasan hukum penting terkait partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Dimulai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, memperlihatkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk berpendapat dan memilih tanpa tekanan, mencerminkan kebebasan dalam proses demokrasi. Pasal 28 D Ayat 3 UUD 1945

mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk memilih atau tidak memilih. UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga berperan penting dalam mengatur berbagai aspek pemilihan umum, di mana Pasal 515 nya merinci sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Terakhir, Ayat 1 dan 2 UU HAM menegaskan hak asasi manusia yang mencakup partisipasi dalam pemerintahan dan pilihan politik, mendukung kebebasan individu untuk memilih atau tidak dalam pemilu. Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menegaskan hak dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi serta pentingnya edukasi untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, artikel, dan buku yang membahas topik golput dan partisipasi pemilih, memberikan perspektif teoritis dan informasi tambahan. Sementara itu, bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia atau sumber referensi lain yang memberikan informasi tambahan tentang konteks hukum dan sosial. Dengan memadukan data primer dan

sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik golput dan faktor-faktor yang memengaruhinya golput di Indonesia. Selain itu, analisis dokumen akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi politik dan sosial setempat.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena menentukan keberhasilan atau validitas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), di mana data yang dikumpulkan berasal dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang relevan.

Dalam studi kepustakaan, peneliti memperoleh informasi dengan menelaah dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan guna mendapatkan data yang bersifat teoritis dan analitis. Proses ini diawali dengan identifikasi sumber data yang dapat dijadikan objek kajian dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah artikel jurnal,

laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konstusionalitas golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Artikel dan dokumen yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, dengan fokus pada sumber yang diterbitkan dalam rentang waktu 2010-2024.

Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai platform akademik dan sumber resmi, termasuk Google Scholar, database jurnal hukum dan politik, serta laporan resmi dari KPU dan lembaga survei. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data meliputi: golongan putih, demokrasi Pancasila, hak memilih dalam konstitusi, teori kedaulatan rakyat, serta partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia.

Setelah artikel jurnal terkumpul, peneliti mengelompokkan jurnal berdasarkan relevansi topik. Artikel jurnal yang diutamakan berasal dari penelitian lima tahun terakhir, namun jika diperlukan untuk memperluas pembahasan, maka akan digunakan artikel jurnal dengan tahun penelitian hingga sepuluh tahun terakhir.

Adapun jumlah artikel jurnal yang diperoleh dalam proses pencarian masih dalam tahap identifikasi dan seleksi lebih lanjut. Jumlah akhir akan ditentukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jurnal

internasional dan nasional yang membahas konstitusionalitas golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia.

Selanjutnya, artikel jurnal yang telah dikelompokkan akan dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan topik penelitian. Peneliti kemudian membandingkan jurnal yang memiliki keterkaitan tematik guna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan temuan sebelumnya. Penambahan artikel jurnal lainnya hanya bersifat memperkaya pembahasan hasil penelitian guna memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar teori dan data yang kuat dalam mengkaji konstitusionalitas golput dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dengan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi golput serta implikasi hukumnya dalam sistem demokrasi Indonesia.

## **6. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh untuk mencari dan menyusun informasi secara sistematis mengenai konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Proses pengorganisasian data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori,

menjabarkannya ke dalam unit-unit kecil untuk penggabungan, menyusun pola, memilih informasi yang penting, dan menyusun kesimpulan agar lebih mudah dipahami.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup publikasi paper di jurnal nasional dan internasional, laporan, skripsi, serta website yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen resmi yang digunakan meliputi undang-undang pemilu, peraturan terkait, serta publikasi yang mengkaji dampak golput. Selain itu, laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pemilu 2014, 2019, dan 2024, termasuk informasi mengenai jumlah pemilih terdaftar, tingkat partisipasi pemilih, serta statistik pemilu yang relevan, juga akan dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu suatu analisis yang dimulai dari teori atau hipotesis yang telah ada, kemudian diuji melalui data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami situasi sosial terkait golput dengan membaginya ke dalam bagian-bagian, memahami hubungan antarbagian, serta kaitannya dengan keseluruhan konteks sosial yang diteliti.

Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk menguji teori yang sudah ada dan melihat apakah data mendukung atau menolak teori tersebut,



memberikan struktur yang jelas dalam penelitian, serta memfokuskan pencarian bukti yang relevan untuk menentukan validitas hipotesis. Hasil dari penelitian deduktif cenderung lebih mudah untuk digeneralisasi karena didasarkan pada teori yang telah teruji sebelumnya, dan pendekatan ini sering kali lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya, karena peneliti menggunakan kerangka kerja yang sudah ada untuk memandu penelitian mereka.<sup>43</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber, dan setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Teknik analisis data yang digunakan meliputi beberapa metode berikut:

a. Analisis Tematik

Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti dapat menemukan dan memahami isu-isu kunci terkait golput serta persepsi masyarakat terhadap hak konstitusional dalam konteks demokrasi Pancasila. Teknik ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema seperti alasan di balik golput, pandangan terhadap pemilu,

---

<sup>43</sup> Habsy, Bakhrudin All. "Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1.2 (2017): 90-100.

serta faktor sosial-politik yang memengaruhi keputusan masyarakat.

b. Kategorisasi Data

Data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan berdasarkan isu-isu hukum dan sosial yang muncul dari berbagai sumber, seperti hak konstitusional terkait golput, pandangan masyarakat tentang pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi atau ketidakikutsertaan dalam pemilu. Kategorisasi ini membantu menyusun data menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan analisis lanjutan.

c. Penggunaan Kerangka Teoritis Teori Kedaulatan Rakyat

Analisis ini menggunakan teori kedaulatan rakyat sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti keputusan untuk memilih atau tidak memilih adalah hak fundamental setiap individu dalam demokrasi. Dengan kerangka ini, peneliti dapat menafsirkan data dalam konteks yang lebih luas, termasuk hak konstitusional masyarakat dalam pemilu dan prinsip partisipasi politik dalam demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi data secara kritis guna memahami implikasi praktik golput terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan untuk

golput dapat dilihat sebagai bentuk pernyataan kedaulatan rakyat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing bab tersebut saling berkaitan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, bab ini menguraikan pentingnya penelitian tentang fenomena golput dalam konteks Demokrasi Pancasila, khususnya dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Latar belakang membahas meningkatnya relevansi golput sebagai respons politik, diikuti perumusan masalah tentang praktik golput dan konstitusionalitasnya. Tujuan dan manfaat penelitian bagi akademisi dan masyarakat juga dijelaskan. Bab ini mencakup tinjauan pustaka yang relevan, kerangka teori tentang hak politik dan Demokrasi Pancasila, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan isi keseluruhan skripsi.
2. BAB II: Tinjauan Umum tentang konsep-konsep dasar hak politik warga negara, konstitusionalitas golput, dan prinsip Demokrasi Pancasila, serta faktor-faktor yang mendorong golput. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan landasan

teoretis yang penting untuk memahami bagaimana golput dapat muncul dalam kerangka demokrasi yang diatur oleh Pancasila dan konstitusi Indonesia.

3. BAB III: Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia, Bab ini membahas terkait data-data tentang praktik golput pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Penelitian mencakup deskripsi mengenai pola golput di masyarakat, faktor-faktor penyebabnya, dan persepsi masyarakat terhadap golput sebagai bentuk pilihan politik. Bab ini akan membandingkan dan menganalisis praktik golput di Indonesia pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, memberikan wawasan tentang konteks sosial dan politik yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memberikan suara dalam kedua pemilu tersebut. Analisis ini akan mengidentifikasi perubahan tren, faktor-faktor yang berkontribusi, serta implikasinya terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
4. BAB IV: Konstitusionalitas Golput dalam Demokrasi Pancasila, Pada bab ini, akan dibahas tentang analisis konstitusionalitas golput dalam kerangka Demokrasi Pancasila di Indonesia. Analisis akan dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip konstitusi melindungi hak-hak politik individu, termasuk hak untuk tidak memilih. Bab ini juga akan menggunakan teori-

teori hukum yang relevan, serta pandangan pakar hukum mengenai golput. Implikasi dari temuan ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Bab IV ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu konstitusionalitas golput.

5. BAB V: Penutup, bab terakhir ini merangkum temuan utama dari penelitian mengenai konstitusionalitas golput dan implikasinya dalam konteks demokrasi Pancasila di Indonesia. Penulis akan memberikan kesimpulan yang jelas tentang hasil penelitian, serta saran untuk pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat praktik demokrasi. Selain itu, penulis juga akan menyarankan area penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang fenomena golput dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI PANCASILA DAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)

#### A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Secara etimologis, istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dijalankan berdasarkan keputusan bersama rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi sering diungkapkan dengan frasa "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."<sup>44</sup>

Secara terminologis, demokrasi memiliki berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Joseph A. Schumpeter, misalnya, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-

---

<sup>44</sup> Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17-29.

individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>45</sup> Sidney Hook menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Sementara itu, Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.<sup>46</sup>

Affan Ghaffar membagi pemaknaan demokrasi menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sementara demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Dalam konteks ini, demokrasi normatif lebih bersifat idealis, sedangkan demokrasi empirik

---

<sup>45</sup> Zamri, Ahmad Rizaldin. *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>46</sup> Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina, 2022.

lebih realistis dan mengacu pada praktik-praktik demokrasi yang terjadi di lapangan.<sup>47</sup>

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara menekankan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Hal ini mengandung tiga pengertian utama, yaitu pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Pemerintahan dari rakyat mengacu pada pengakuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa kekuasaan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri.<sup>48</sup> Sedangkan pemerintahan untuk rakyat mengimplikasikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi juga dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang dinamis. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, melainkan

---

<sup>47</sup> Tamrin, Abu. *Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.

<sup>48</sup> Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8.2 (2016).



kata kerja yang mengandung makna sebagai proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi dianggap sebagai suatu proses yang terus berkembang dan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan demokratis.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, antara lain pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, permufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga, dan pendidikan demokrasi. Kesadaran akan pluralisme sangat penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana terdapat berbagai perbedaan etnis, bahasa, budaya, dan agama. Musyawarah dan permufakatan yang jujur dan sehat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang demokratis, sementara pertimbangan moral dan kerjasama antar warga menjadi penopang utama dalam mewujudkan keadilan sosial.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Moko, Catur Widiat. "Pluralisme agama menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) dalam konteks keindonesiaan." *Medina-Te* 13.1 (2017): 61-78.

<sup>50</sup> Mamantung, Yery Yosua, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow. "Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).

Secara keseluruhan, demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, melainkan juga suatu nilai dan pandangan hidup yang harus diinternalisasi oleh seluruh elemen masyarakat. Demokrasi menuntut partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin kebebasan dan hak-hak asasi manusia.<sup>51</sup> Dengan demikian, demokrasi menjadi landasan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## 2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah berkembang sejak ribuan tahun lalu, dengan akar sejarahnya yang dapat ditelusuri ke zaman Yunani dan Romawi Kuno. Konsep demokrasi mulai muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi di negara-kota Athena, Yunani. Pada masa itu, demokrasi diterapkan dalam bentuk *direct democracy*, di mana warga negara laki-laki yang memiliki status resmi dapat langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.<sup>52</sup> Namun, sistem ini tidak mencakup seluruh populasi, karena perempuan, anak-anak, budak, dan pendatang tidak memiliki hak politik. Meskipun demikian,

---

<sup>51</sup> Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.

<sup>52</sup> Strong, C. F. *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. Nusamedia, 2019.

demokrasi Athena menjadi dasar bagi perkembangan konsep demokrasi di berbagai belahan dunia.

Setelah Yunani Kuno, konsep demokrasi juga ditemukan dalam sistem politik Romawi. Bangsa Romawi mengadopsi beberapa prinsip demokrasi dari Yunani, tetapi menerapkannya dalam bentuk republik, di mana perwakilan rakyat dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan masuknya Abad Pertengahan, sistem demokrasi mengalami kemunduran. Pada periode ini, pemerintahan didominasi oleh sistem feodal di mana kekuasaan terpusat pada raja dan para bangsawan. Struktur politik saat itu lebih bersifat otoriter, dengan sedikit ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, gagasan demokrasi tidak sepenuhnya hilang. Pada tahun 1215, Magna Charta dikeluarkan di Inggris sebagai bentuk pembatasan kekuasaan raja dan pengakuan terhadap hak-hak rakyat. Dokumen ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan demokrasi modern karena memberikan dasar bagi prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>53</sup> Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, and Enis Khaerunnisa. "Demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma filosofische grondslag." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 232-245.

Selanjutnya, pada abad ke-16 dan ke-17, gerakan Renaissance dan Reformasi semakin memperkuat ide kebebasan individu dan pemerintahan berbasis hukum.<sup>54</sup>

Pada abad ke-18, muncul pemikiran-pemikiran baru mengenai demokrasi yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf seperti John Locke dan Montesquieu. John Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak-hak alami yang tidak dapat diganggu gugat oleh pemerintah, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Sementara itu, Montesquieu memperkenalkan konsep trias politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran ini menjadi dasar bagi berbagai revolusi demokrasi, termasuk Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789, yang menuntut pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat.<sup>55</sup>

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, demokrasi mengalami perkembangan pesat seiring dengan munculnya negara-negara yang menerapkan sistem

---

<sup>54</sup> Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.

<sup>55</sup> Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

pemerintahan demokratis. Demokrasi perwakilan (*representative democracy*) mulai menggantikan demokrasi langsung karena meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas pemerintahan. Sistem pemilihan umum pun diperkenalkan sebagai mekanisme utama untuk memastikan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Selain itu, muncul berbagai bentuk demokrasi, seperti demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu dan supremasi hukum, serta demokrasi sosial yang mengutamakan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari sistem pemerintahan.<sup>56</sup>

Di Indonesia, demokrasi mengalami berbagai fase sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, sistem demokrasi parlementer diterapkan, tetapi tidak bertahan lama karena ketidakstabilan politik. Selanjutnya, Indonesia mengalami berbagai perubahan sistem demokrasi, mulai dari Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga Demokrasi Reformasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional yang menekankan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memilih

---

<sup>56</sup> Suryana, Cecep, et al. "Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki." (2022).

pemimpin, serta menjamin hak-hak politik warga negara.<sup>57</sup>

Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa konsep ini terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi sosial serta politik di berbagai negara. Meskipun telah mengalami banyak perubahan, prinsip dasar demokrasi tetap bertumpu pada kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendukung hak dan kebebasan individu dalam kehidupan bernegara.<sup>58</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Demokrasi**

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki sejumlah prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan cara yang adil, transparan, serta menjamin hak-hak individu. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam sistem demokrasi:

#### **a. Kedaulatan Rakyat**

---

<sup>57</sup> Samosir, Osbin. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*. UKI Press, 2022.

<sup>58</sup> Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.

Prinsip utama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam praktiknya, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang bebas dan adil. Kedaulatan rakyat juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

b. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Demokrasi tidak hanya bergantung pada kehendak mayoritas, tetapi juga harus berlandaskan hukum yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Konstitusi menjadi dokumen fundamental yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, setiap kebijakan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

c. Pemilu yang Bebas, Jujur, dan Adil

Salah satu mekanisme utama dalam demokrasi adalah pemilu yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan

adil agar mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya tekanan, kecurangan, atau manipulasi. Selain itu, pemilu harus diselenggarakan secara berkala agar pemerintahan tetap mendapatkan legitimasi dari rakyat.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan berpendapat. Hak-hak ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak yang berkuasa. Selain itu, demokrasi juga memberikan jaminan terhadap hak-hak minoritas agar tidak tertindas oleh kehendak mayoritas. Dengan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi dapat berfungsi sebagai sistem yang adil dan inklusif bagi semua warga negara.

e. Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*)

Prinsip demokrasi juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan atau trias politica, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan dalam negara demokratis terbagi menjadi tiga lembaga utama, yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengadilan). Pembagian kekuasaan ini



bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan adanya mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) di antara lembaga-lembaga negara.

f. Supremasi Hukum

Dalam demokrasi, semua warga negara, termasuk pemimpin pemerintahan, harus tunduk pada hukum. Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.

g. Partisipasi Politik Masyarakat

Demokrasi tidak hanya sebatas pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat dapat berupa kebebasan menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam organisasi politik, melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi yang luas, demokrasi dapat berkembang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

#### h. Pluralisme dan Toleransi

Sistem demokrasi menghargai keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun pandangan politik. Pluralisme dan toleransi menjadi prinsip penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki perbedaan. Dalam demokrasi, tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan sosial. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang sehat, asalkan tetap dalam koridor penghormatan terhadap hak orang lain.

Prinsip-prinsip demokrasi ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, demokrasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat serta menjaga stabilitas negara dalam jangka panjang.<sup>59</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi memiliki berbagai bentuk dan istilah yang mencerminkan

---

<sup>59</sup> Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.

karakteristik serta implementasinya dalam suatu negara. Beberapa istilah yang umum digunakan dalam konteks demokrasi antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Meskipun seluruh konsep ini menggunakan istilah demokrasi, makna serta penerapannya dalam sistem pemerintahan suatu negara bisa sangat berbeda tergantung pada landasan ideologi dan struktur politik yang dianut.<sup>60</sup>

Dari berbagai aliran pemikiran demokrasi yang ada, terdapat dua kelompok utama yang memiliki perbedaan fundamental dalam prinsip dan pelaksanaannya. Kelompok pertama adalah demokrasi konstitusional, yang menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum dan supremasi konstitusi. Kelompok kedua adalah demokrasi yang berlandaskan komunisme, yang pada dasarnya menolak adanya batasan kekuasaan pemerintah dan cenderung bersifat totaliter. Demokrasi konstitusional bertujuan menciptakan negara hukum (*rechtstaat*) yang tunduk pada prinsip rule of law, sementara demokrasi dalam sistem komunis justru menciptakan pemerintahan yang tidak terbatas (*machtstaat*), dengan menempatkan negara sebagai alat pemaksa yang

---

<sup>60</sup> Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

diharapkan akan lenyap ketika masyarakat komunis terbentuk secara sempurna.<sup>61</sup>

a. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem demokrasi yang menekankan bahwa pemerintahan harus memiliki batasan kekuasaan yang jelas dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sistem ini memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi melalui konstitusi, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi konstitusional, hak-hak individu, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berserikat dijamin dan tidak dapat dilanggar oleh pemerintah.

Selain itu, demokrasi konstitusional juga memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam proses politik dan tidak mengalami diskriminasi. Demokrasi konstitusional juga menekankan kerja sama yang erat antara kelompok-kelompok elit yang mewakili berbagai kepentingan budaya dan politik dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengatur mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga memastikan

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

adanya perlindungan hak-hak individu serta stabilitas sosial dalam suatu negara.

b. Demokrasi dalam Sistem Komunis

Berbeda dengan demokrasi konstitusional, demokrasi yang berlandaskan pada ideologi komunis memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran negara. Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai alat pemaksa yang digunakan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu. Namun, penganut demokrasi komunis meyakini bahwa seiring dengan terbentuknya masyarakat komunis yang sempurna, negara sebagai alat pemaksa akan lenyap dengan sendirinya.

Pandangan ini berakar pada teori Karl Marx, yang menyatakan bahwa negara hanya diperlukan selama kelas sosial masih ada. Ketika masyarakat tanpa kelas tercipta, negara dianggap tidak lagi memiliki fungsi yang relevan. Oleh karena itu, demokrasi dalam sistem komunis cenderung memiliki sifat ambivalen terhadap peran negara—di satu sisi, negara memiliki kendali penuh atas masyarakat, tetapi di sisi lain, tujuan akhirnya adalah menghapus keberadaan negara itu sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dugis, Visensio, ed. *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press, 2018.

Model Demokrasi Berdasarkan Pelaksanaannya Berdasarkan cara pelaksanaannya, demokrasi dapat dibagi menjadi dua model utama, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan).<sup>63</sup>

c. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui perwakilan. Model ini pernah diterapkan dalam negara-kota Athena pada zaman Yunani Kuno, di mana warga negara secara langsung berpartisipasi dalam sidang majelis untuk menentukan kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks modern, demokrasi langsung jarang diterapkan dalam skala nasional, tetapi masih digunakan dalam beberapa bentuk tertentu, seperti referendum dan pemilihan langsung. Contoh penerapan demokrasi langsung saat ini dapat dilihat dalam pemilihan eksekutif, seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan walikota, serta pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang dilakukan langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu.

d. Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan)

Demokrasi tidak langsung, atau yang dikenal sebagai demokrasi perwakilan, adalah

---

<sup>63</sup> Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika, 2021.

sistem pemerintahan di mana rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, melainkan melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilu. Perwakilan rakyat yang terpilih bertugas menjalankan pemerintahan serta membuat kebijakan politik atas nama rakyat.

Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara modern karena lebih efisien dalam mengelola pemerintahan yang kompleks dengan jumlah penduduk yang besar. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memberikan mandat kepada anggota parlemen dan pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan kepentingan rakyat.

Selain berdasarkan pelaksanaannya, demokrasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara badan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Berdasarkan kategori ini, demokrasi terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial.<sup>64</sup>

#### a. Demokrasi Sistem Parlementer

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang menempatkan badan legislatif sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan eksekutif. Dalam sistem ini,

---

<sup>64</sup> Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20.2 (2020): 81-94.

kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari partai politik atau koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen.

Perdana menteri dan para menteri dalam kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika kebijakan pemerintah tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas parlemen, parlemen memiliki hak untuk menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengganti pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden biasanya hanya berperan sebagai kepala negara yang bersifat seremonial, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri.

b. Demokrasi Sistem Presidensial

Demokrasi presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dalam sistem ini tidak hanya berperan sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kebijakan negara.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam demokrasi presidensial, presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme konstitusional tertentu, seperti pemakzulan (impeachment). Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap berkuasa. Sistem ini bertujuan menciptakan keseimbangan



kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi memiliki banyak bentuk dan model yang berkembang sesuai dengan kebutuhan serta sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Demokrasi konstitusional menekankan pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, sedangkan demokrasi yang berlandaskan komunisme lebih menitikberatkan pada kendali penuh negara dengan tujuan akhir menghapus keberadaan negara itu sendiri.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan), yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, dalam hubungan antar lembaga negara, demokrasi dapat berbentuk sistem parlementer, yang mengutamakan supremasi parlemen, atau sistem presidensial, yang menempatkan presiden sebagai pemimpin eksekutif utama. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep yang bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi yang luas sesuai dengan konteks sosial dan politik suatu negara.

## **5. Ciri-Ciri Demokrasi**

---

<sup>65</sup> Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem otoriter dalam berbagai aspek. Menurut Bingham Powl, Jir, ada beberapa ciri yang menjadi indikator utama dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Berikut adalah ciri-ciri demokrasi beserta penjelasan lebih rinci.<sup>66</sup> Ciri-ciri Demokrasi menurut Bingham Powl, Jir:

- a. Legitimasi Pemerintah: Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan pemerintah didasarkan pada keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat. Artinya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu mengacu pada hukum yang berlaku. Tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya, harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga tercipta hubungan saling percaya antara pemerintah dan warga negara.
- b. Pengaturan Musyawarah Mufakat dan Perundingan: Demokrasi mengharuskan adanya mekanisme musyawarah atau perundingan untuk mencapai keputusan yang diterima oleh banyak pihak. Pemilihan umum yang bersifat kompetitif juga merupakan salah satu cara untuk

---

<sup>66</sup> Bistara, Raha. "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim." *Politea* 4.1 (2021): 95.

mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Ini artinya, semua pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu yang terbuka, adil, dan memungkinkan adanya pilihan yang beragam.

- c. **Pemilihan Secara Rahasia dan Tanpa Paksaan:** Salah satu ciri utama dari demokrasi adalah proses pemilu yang dilakukan dengan cara rahasia, bebas dari ancaman atau tekanan. Rakyat bebas memilih siapa yang mereka anggap paling mampu memimpin tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Keamanan dan kebebasan dalam memilih ini menjamin integritas proses demokrasi.
- d. **Hak-hak Dasar yang Terjamin:** Demokrasi menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti kebebasan berbicara, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, bergabung dalam kelompok yang sesuai dengan minatnya, serta mempublikasikan informasi yang penting tanpa takut diintimidasi atau dihalangi oleh pemerintah.

Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa aspek penting yang juga menggambarkan

karakteristik sistem demokrasi dalam konteks pemerintahan, di antaranya:<sup>67</sup>

- a. Pemerintah Berdasarkan Kehendak Rakyat: Pemerintah dalam sistem demokrasi berfungsi untuk mengatur negara berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sistem ini mengharuskan adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik itu melalui pemilu, referendum, ataupun bentuk partisipasi lainnya.
- b. Konstitusional: Demokrasi berjalan dengan landasan hukum yang jelas dan tegas, yaitu konstitusi. Semua kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang tertulis dalam konstitusi dan undang-undang negara. Dengan adanya aturan yang tercatat, pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena mereka terikat oleh aturan yang sudah ditetapkan. Konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman agar keputusan-keputusan yang diambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip yang adil dan sah.

---

<sup>67</sup> Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, 2020.

- c. Perwakilan Rakyat: Dalam demokrasi, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mengelola pemerintahan. Rakyat memberi mandat kepada perwakilan yang dipilih untuk membuat keputusan-keputusan penting atas nama rakyat. Melalui sistem perwakilan, rakyat tidak perlu terlibat langsung dalam setiap keputusan pemerintahan, tetapi mereka tetap memiliki kontrol melalui pemilu yang memungkinkan mereka memilih orang yang mereka percayai untuk mewakili kepentingan mereka.
- d. Pemilihan Umum: Pemilu adalah mekanisme yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin dan anggota lembaga legislatif yang akan bertugas mengelola negara. Pemilihan ini harus dilakukan secara adil, bebas, dan transparan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan politik mereka dan mengatur arah pemerintahan.
- e. Partai Politik: Dalam demokrasi, partai politik memainkan peran yang sangat penting. Partai politik menjadi sarana untuk menyampaikan visi, misi, dan platform politik mereka kepada publik. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat serta turut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara. Partai politik memungkinkan adanya berbagai pilihan

bagi rakyat dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana kebijakan negara akan dijalankan.

- f. **Pembagian Kekuasaan:** Salah satu karakteristik utama dalam demokrasi adalah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan antara berbagai lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang dapat mengontrol seluruh aspek pemerintahan. Biasanya, kekuasaan dibagi antara eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengadilan). Pembagian ini juga memungkinkan adanya sistem checks and balances, di mana masing-masing lembaga saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain.
- g. **Tanggung Jawab:** Pemerintah yang terpilih dalam sistem demokrasi harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan dan tindakannya. Jika pemerintah gagal memenuhi harapan rakyat atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, rakyat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme yang ada, seperti pemilihan umum berikutnya atau melalui proses hukum. Tanggung jawab ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas dalam demokrasi yang memastikan bahwa pemerintah tidak lepas dari kontrol rakyat.

Pada intinya ciri-ciri demokrasi ini menggambarkan sebuah sistem pemerintahan yang terbuka, adil, dan mengutamakan hak-hak rakyat. Pemerintah dalam sistem demokrasi bertindak atas dasar kehendak rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan memastikan adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik. Demokrasi juga mengutamakan adanya kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.<sup>68</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Pancasila**

### **1. Pengertian Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam bingkai norma dan etika yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara umum, Demokrasi Pancasila mencerminkan kedaulatan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, sedangkan dalam cakupan yang lebih sempit, sistem ini menekankan pelaksanaan

---

<sup>68</sup> Muazzinah, Riska. *KONSEP DEMOKRASI (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2019.

kedaulatan rakyat berdasarkan musyawarah dan perwakilan.<sup>69</sup>

Menurut Darji Darmodihardjo dalam Budiyo, Demokrasi Pancasila berakar pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang penerapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila tidak sekadar mengutamakan partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan, tetapi juga memperhatikan aspek budaya politik yang menekankan musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan.<sup>70</sup>

Demokrasi Pancasila secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat yang memuat rumusan Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila yang menjadi dasar utama sistem demokrasi Indonesia adalah sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan

---

<sup>69</sup> Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2 (2021): 407-423.

<sup>70</sup> Widiyanti, Diana Wahyu, and Dafit Riadi. *Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.



rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah serta perwakilan, bukan dengan cara otoriter maupun liberal individualistis.<sup>71</sup>

Letak demokrasi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan secara kolektif dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar prosedur formal pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan budaya politik yang mengedepankan mufakat, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama.<sup>72</sup>

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam sistem politik Indonesia. Fungsi utama Pancasila dalam demokrasi adalah:

- a. Sebagai cita-cita masyarakat yang menjadi acuan dalam pembuatan dan evaluasi keputusan politik.
- b. Sebagai alat pemersatu masyarakat, yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik secara adil dan berkeadilan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Hutabarat, Dany Try Utama, et al. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1.1 (2021): 59-64.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Irawan, Anang Dony, and Banu Prasetyo. "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia." *Jurnal pendidikan sosial keberagaman* 9.1 (2022): 1-7.

Dalam Demokrasi Pancasila, terdapat beberapa nilai utama yang menjadi ciri khas sistem ini, antara lain: <sup>74</sup>

- a. Kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.
- b. Menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dan gotong royong.
- c. Pengambilan keputusan harus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Adanya pengakuan dan penyelarasan antara hak dan kewajiban.
- e. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- f. Pemilu dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).
- g. Tidak menganut sistem monopartai.
- h. Tidak mengakui adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- i. Menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Ciri-ciri ini menegaskan karakter demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal atau sistem partai tunggal, dengan penekanan pada musyawarah mufakat, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang semuanya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

---

<sup>74</sup> Israil, I. (2005). *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Selain itu, Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Persamaan hak bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi dalam kehidupan politik dan sosial.
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Kebebasan yang bertanggung jawab, baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun masyarakat.
- d. Penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan semangat kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara.
- g. Menjunjung tinggi tujuan serta cita-cita nasional dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Dalam praktiknya, sistem politik Demokrasi Pancasila memiliki beberapa sendi

---

<sup>75</sup> Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2017): 1-27.

utama yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Kedaulatan Rakyat: Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
- b. Negara Berdasarkan Hukum: Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
- c. Bentuk Republik: Negara Indonesia berbentuk republik, yang menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- d. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi: Penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-

---

<sup>76</sup> Mufidah, Athiyyatul, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2024): 35-51.

Undang Dasar 1945. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi.

- e. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab: Pemerintah dalam Demokrasi Pancasila harus bertanggung jawab kepada rakyat dan secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus berpihak pada kepentingan nasional.
- f. Sistem Perwakilan: Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Artinya, rakyat tidak berpartisipasi langsung dalam pemerintahan, tetapi diwakili oleh anggota parlemen yang dipilih melalui pemilu.
- g. Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, presiden memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan, tetapi tetap dalam batasan yang diatur oleh konstitusi.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang tidak hanya menekankan aspek

politik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial, Demokrasi Pancasila bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, inklusif, dan berlandaskan hukum.<sup>77</sup>

## **2. Dasar Hukum Demokrasi Pancasila**

Dasar hukum Demokrasi Pancasila merupakan fondasi yang mendasari sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Sistem ini tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi universal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi Pancasila mengedepankan kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh

---

<sup>77</sup> Malik, Ajeng Nafisyia Raihan, et al. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2.2 (2024): 278-291.

rakyat Indonesia.<sup>78</sup> Dasar hukumnya tertuang dalam beberapa sumber hukum berikut:<sup>79</sup>

- j. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan dijalankan melalui prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Pancasila sebagai dasar filosofis negara menjadi landasan moral dan etika dalam pelaksanaan demokrasi.
- k. Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan demokrasi Pancasila, di antaranya Pasal 1 Ayat (2) yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menunjukkan prinsip demokrasi konstitusional yang dijiwai Pancasila. Selain itu, Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sesuai dengan nilai Pancasila. Pasal 28E Ayat (3) mengatur hak berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan Pasal 22E mengatur pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi langsung. Pasal 18 juga menunjukkan prinsip musyawarah dan otonomi daerah dalam pemerintahan daerah.

---

<sup>78</sup> Judijanto, Loso, et al. *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

<sup>79</sup> Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 87-100.

- l. Ketetapan MPR juga menjadi dasar hukum Demokrasi Pancasila, seperti Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara, serta Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menegaskan Pancasila sebagai sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.
- m. Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan Demokrasi Pancasila termasuk UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa semua produk hukum harus selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur pelaksanaan demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil.
- n. Keputusan institusi negara, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam demokrasi. Selain itu, peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjamin partisipasi rakyat sesuai dengan nilai Pancasila.
- o. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 yang menyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menjadi inti dari demokrasi Pancasila. Prinsip musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan keseimbangan hak-kewajiban menjadi fondasi



yang kuat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis, adil, dan beradab sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan norma-norma konstitusional dan nilai budaya bangsa. Prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, kesetaraan hukum, persamaan hak, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, serta persatuan dalam keberagaman.<sup>80</sup>

Kedaulatan rakyat menjadi dasar utama dalam Demokrasi Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, setiap individu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan

---

<sup>80</sup> Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum ius quia iustum* 24.2 (2017): 279-300.

masyarakat.<sup>81</sup> Kesetaraan hukum adalah prinsip lain yang mendasari Demokrasi Pancasila. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata, di mana tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Dalam praktiknya, kesetaraan hukum menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan institusi negara.<sup>82</sup>

Persamaan hak juga dijamin dalam sistem ini, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Dengan adanya persamaan hak, semua individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan nasib bangsa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini menciptakan ruang yang adil bagi semua warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018): 119.

<sup>82</sup> Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.

<sup>83</sup> Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 110-127.

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mencerminkan semangat kolektivitas dan mengupayakan agar keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan minoritas. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Keadilan sosial merupakan bagian integral dari prinsip Demokrasi Pancasila. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, khususnya yang kurang beruntung.<sup>84</sup>

Keadilan sosial menuntut agar sumber daya dan peluang dalam masyarakat didistribusikan secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal. Pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.<sup>85</sup> Persatuan dalam

---

<sup>84</sup> Napitu, Ulung, et al. "Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei* 2.2 (2022): 62-83.

<sup>85</sup> Chairunisah, Nabilah, and Gunawan Santoso. "Karakter Kebijaksanaan dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Abad ke-

keberagaman adalah salah satu ciri khas Demokrasi Pancasila yang harus diperhatikan. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya, agama, dan etnis memerlukan nilai-nilai persatuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Nilai ini mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Dengan menghargai keberagaman, masyarakat dapat membangun relasi yang positif dan produktif, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial di antara mereka.<sup>86</sup>

Demokrasi Pancasila berdiri di atas beberapa unsur utama yang mendasarinya.

- a. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi berfungsi untuk mengatur pelaksanaan demokrasi dan memastikan bahwa setiap proses politik berjalan sesuai dengan aturan

---

21 di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.5 (2023): 452-475.

<sup>86</sup> Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.1 (2023): 210-223.

yang ditetapkan. Konstitusi juga menjadi jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan kepentingan rakyat.

- c. Keterlibatan partai politik dalam menyerap aspirasi rakyat dan mengartikulasikannya dalam kebijakan negara menjadi unsur penting yang tak terpisahkan dari Demokrasi Pancasila. Partai politik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga penting bagi mereka untuk mendengarkan dan mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Pendidikan politik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pendidikan politik yang baik akan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa.<sup>87</sup>

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila memiliki hubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Pemilu sebagai wujud partisipasi aktif

---

<sup>87</sup> Prayitno, Ujianto Singgih. "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 5.2 (2014): 107-117.

masyarakat dalam menyalurkan hak pilih dan menentukan pemimpin menjadi aspek yang sangat penting. Dalam pemilu, rakyat terlibat langsung dalam menentukan jalannya pemerintahan. Proses ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka percayai, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan harapan dan aspirasi politik mereka.<sup>88</sup>

Kebebasan berpendapat juga merupakan salah satu hak fundamental dalam Demokrasi Pancasila. Kebebasan berpendapat memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka secara bebas dalam ruang demokrasi. Dengan adanya kebebasan berpendapat, masyarakat dapat melakukan diskusi dan dialog yang konstruktif mengenai berbagai isu politik, sehingga menciptakan ruang yang sehat untuk bertukar ide dan informasi.<sup>89</sup>

Pengawasan terhadap pemerintah oleh masyarakat juga menjadi bagian penting dalam Demokrasi Pancasila. Masyarakat memiliki peran aktif dalam memastikan transparansi dan

---

<sup>88</sup> Hadi, Moh Syamsul, and Zamroni Zamroni. "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Maktabah Borneo* 2.2 (2023): 35-54.

<sup>89</sup> Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2.7 (2024): 174-186.

akuntabilitas dalam kebijakan publik. Melalui pengawasan yang baik, masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.<sup>90</sup> Dengan demikian, prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila tidak hanya menjadi dasar teoretis, tetapi juga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Melalui partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, dan pengawasan terhadap pemerintah, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik. Demokrasi Pancasila, dengan semua nilai dan prinsip yang mendasarinya, diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan masyarakat dapat membangun sebuah sistem demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.<sup>91</sup> Hal ini akan

---

<sup>90</sup> Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3612-3623.

<sup>91</sup> Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14.1 (2017): 17-35.

memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pada akhirnya, Demokrasi Pancasila akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua.

### **3. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak negara ini meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan kolonial, Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika politik yang berkembang di setiap era. Dari demokrasi parlementer hingga demokrasi Pancasila, perubahan ini mencerminkan upaya bangsa Indonesia dalam mencari sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan nilai-nilai nasional serta kondisi sosial-politik yang ada.<sup>92</sup>

#### **a. Demokrasi masa Revolusi (1945-1950)**

Pada periode tahun 1945 hingga 1950, Indonesia masih berada dalam situasi

---

<sup>92</sup> Almahdali, Humairah, et al. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.



perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah. Kondisi ini membuat pelaksanaan demokrasi belum dapat berjalan secara optimal karena negara masih berada dalam fase revolusi fisik. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan bersifat sangat terpusat. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, seluruh kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP.

Untuk menghindari kesan bahwa Indonesia merupakan negara yang otoriter, pemerintah mengambil langkah-langkah penting. Di antaranya adalah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP menjadi badan legislatif sementara. Kemudian, Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 mengatur pembentukan partai-partai politik sebagai bentuk awal demokrasi multi-partai. Selanjutnya, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika politik dan aspirasi rakyat.

b. Demokrasi Parlementer (1950–1959)

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, yang ditandai dengan adanya peran dominan parlemen dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini diadopsi dari model demokrasi negara-negara Eropa, khususnya Belanda, di mana pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Namun, sistem ini menghadapi banyak tantangan, terutama karena banyaknya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Partai-partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) memiliki perbedaan ideologi yang cukup tajam. Akibatnya, terjadi ketidakstabilan politik karena sering terjadinya pergantian kabinet dalam waktu singkat. Selain itu, munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta semakin memperburuk situasi politik saat itu. Kondisi ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk

mengubah sistem pemerintahan ke arah demokrasi terpimpin pada tahun 1959.<sup>93</sup>

c. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan demokrasi parlementer dan mengembalikan sistem pemerintahan ke UUD 1945. Era ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan negara lebih terkonsentrasi pada presiden, dengan peran parlemen yang semakin terbatas.

Dalam sistem ini, Soekarno menerapkan konsep "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Namun, demokrasi terpimpin juga diwarnai oleh ketegangan politik yang meningkat, terutama dengan semakin besarnya pengaruh PKI di pemerintahan. Konflik politik ini mencapai puncaknya pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965, yang menyebabkan kejatuhan Soekarno dan berakhirnya era demokrasi terpimpin.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>94</sup> Fadli, Muhammad Rijal. "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4.1 (2020): 34-49.

d. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966–1998)

Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila sebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila di era Orde Baru menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.

Sistem ini memungkinkan adanya pemilu, tetapi dalam praktiknya, kebebasan politik sangat dibatasi. Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dominan yang selalu memenangkan pemilu, sementara oposisi dipinggirkan. Pemerintah juga menerapkan kontrol ketat terhadap media dan kebebasan berpendapat, dengan alasan menjaga stabilitas nasional.

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada era ini, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto lebih bersifat otoriter. Korupsi merajalela, kebebasan politik ditekan, dan muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Akhirnya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memicu gerakan reformasi yang menuntut pengunduran diri Soeharto. Pada tahun 1998,

Soeharto akhirnya lengser, menandai dimulainya era reformasi.<sup>95</sup>

e. Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi (1998–sekarang)

Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan fundamental dalam sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila tetap dijadikan sebagai sistem politik utama, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada keterbukaan, partisipasi rakyat, dan supremasi hukum.

Beberapa perubahan besar yang terjadi pada era reformasi meliputi:

- 1) Pemilu yang lebih demokratis, dengan sistem multipartai yang memungkinkan persaingan politik yang lebih adil.
- 2) Penguatan lembaga legislatif, sehingga DPR dan DPD memiliki peran lebih besar dalam pengawasan pemerintahan.
- 3) Desentralisasi pemerintahan, yang memberi otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengelola kebijakan dan anggaran.
- 4) Kebebasan pers, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas dalam

---

<sup>95</sup> Samosir, Osbin. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*. UKI Press, 2022.

menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah.<sup>96</sup>

Meskipun demokrasi Indonesia mengalami kemajuan pesat sejak era reformasi, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Korupsi, ketimpangan ekonomi, radikalisme, serta polarisasi politik menjadi hambatan utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Selain itu, munculnya fenomena disinformasi dan politik identitas dalam era digital juga menjadi tantangan baru dalam menjaga stabilitas demokrasi.

#### **4. Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi**

Setelah reformasi 1998, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan besar dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Reformasi diharapkan dapat membawa perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Namun, hingga saat ini, implementasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Ketimpangan sosial, kemiskinan, keterbatasan

---

<sup>96</sup> Shofa, Abdul Miud Aris. "Sejarah panjang pendidikan karakter di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2020): 73-90.

akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesejahteraan. Selain itu, banyak akademisi menilai bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, lebih berfokus pada pemilihan pemimpin dan proses elektoral, ketimbang demokrasi substansial yang menitikberatkan pada penegakan hukum, partisipasi publik, kebebasan pers, dan pelaksanaan Trias Politica secara ideal.<sup>97</sup>

Beberapa pakar menyebut bahwa Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi, di mana kebebasan yang berlebihan justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial-politik. Franky Hardiman, seorang filsuf dari STF Driyarkara Jakarta, menyatakan bahwa era transisi demokrasi ditandai dengan kebebasan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya memunculkan fenomena Darwinisme Sosial, di mana pihak yang kuat mendominasi dan mengendalikan sistem politik dan ekonomi.<sup>98</sup>

Demokrasi semacam ini sering kali dimanfaatkan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Namun, di

---

<sup>97</sup> Hanisa, Intan, and Sunny Ummul Firdaus. "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Sovereignty* 2.4 (2023): 340-353.

<sup>98</sup> Anugerah, Boy, and Jacob Junian Endiartia. "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat." *Jurnal Lemhannas RI* 6.2 (2018): 23-41.

sisi lain, kebebasan yang berlebihan ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya kebebasan sipil (*civil liberties*) yang lebih matang, di mana warga negara lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan membangun budaya demokrasi yang lebih kuat.

Meski demikian, ada pandangan yang lebih skeptis terhadap arah perkembangan demokrasi pasca reformasi. Hilmar Farid, seorang sejarawan, mempertanyakan sejauh mana demokrasi Indonesia telah mengalami perbaikan yang substansial. Ia berpendapat bahwa sistem demokrasi saat ini masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi rakyat secara nyata. Demokrasi masih banyak dikendalikan oleh kepentingan segelintir kelompok elit politik dan ekonomi, sementara aspirasi masyarakat akar rumput sering kali diabaikan. Munculnya berbagai bentuk perlawanan sosial di berbagai daerah menunjukkan adanya kekecewaan publik terhadap sistem demokrasi yang belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat.<sup>99</sup>

Dalam menghadapi dinamika demokrasi pasca reformasi, penting untuk mengembalikan fokus demokrasi pada kepentingan rakyat sebagai subjek utama dalam sistem pemerintahan. Demokrasi yang ideal bukan hanya soal pemilu

---

<sup>99</sup> Isdiyanto, Ilham Yuli. *Prinsip umum demokrasi dan pemilu*. Ilham Yuli Isdiyanto, 2015.



dan pergantian kepemimpinan, tetapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang telah disepakati dalam konsensus nasional Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan demokrasi.<sup>100</sup>

Dalam praktiknya, ada beberapa tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi demokrasi Indonesia pasca reformasi:<sup>101</sup>

- a. Otonomi Daerah dan Korupsi: Salah satu kebijakan reformasi yang paling berpengaruh adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Muncul fenomena "raja-raja kecil" di daerah, di mana kepala daerah justru lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga korupsi semakin meluas. Konflik sosial akibat kebijakan investasi yang tidak berpihak pada rakyat juga semakin sering terjadi.

---

<sup>100</sup> Budiatri, Aisah Putri, and Herlambang Wiratraman, eds. *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es, 2022.

<sup>101</sup> Muslimin, Husein. "Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.1 (2016): 30â-38.

- b. Kebebasan Berekspresi dan Sensor Budaya: Reformasi membuka ruang kebebasan berekspresi, termasuk dalam bidang seni dan budaya. Namun, masih ada pembatasan dan sensor terhadap karya-karya yang dianggap sensitif, terutama dalam perfilman dan seni yang mengkritik kebijakan pemerintah atau membahas isu-isu sejarah yang kontroversial.
- c. Peran Agama dalam Politik: Setelah reformasi, kelompok-kelompok keagamaan memiliki ruang lebih besar dalam politik. Munculnya berbagai partai berbasis Islam menunjukkan adanya harapan bahwa agama dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam demokrasi. Namun, perpecahan di antara kelompok-kelompok tersebut serta ketidakmampuan mereka untuk membangun koalisi yang kuat menyebabkan pengaruhnya dalam sistem politik menjadi terbatas.
- d. Media Sosial dan Demokrasi Digital: Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik melalui media sosial. Namun, muncul pertanyaan apakah aktivisme digital benar-benar berdampak pada perubahan nyata dalam kehidupan politik. Fenomena clicktivism atau aktivisme berbasis media sosial sering kali hanya sebatas wacana tanpa tindakan nyata. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana

penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang berpotensi memperburuk polarisasi sosial.

- e. Merosotnya Kualitas Demokrasi: Banyak narasi asli gerakan reformasi yang kini mulai dilupakan atau bahkan sengaja dihapus dari ingatan kolektif bangsa. Konflik kepentingan antar elite politik semakin memperburuk keadaan, di mana reformasi yang seharusnya bertujuan memperkuat demokrasi malah digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, demokrasi pasca reformasi di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan menghadapi banyak tantangan. Demokrasi yang ideal bukan hanya tentang pemilu dan kebebasan berbicara, tetapi juga harus memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin hak-hak sipil, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan kelompok elite semata.

### **C. Hak Politik Warga Negara**

Hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan penting, yang menjamin kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam pandangan Adrianus Bawamenewi, hak

politik adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap warga negara untuk meraih, mempertahankan, atau merebut kekuasaan serta kedudukan yang berguna bagi dirinya. Hak ini diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas, seperti pemilu, kebebasan berserikat, hingga partisipasi langsung dalam pemerintahan.<sup>102</sup>

Secara filosofis, hak politik berakar pada pandangan bahwa setiap individu memiliki akal budi dan nurani untuk membedakan yang baik dan buruk, sehingga layak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.<sup>103</sup> J.J. Rousseau, dalam karyanya *The Social Contract*, menyatakan bahwa manusia lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, dan hukum adalah ekspresi dari kehendak umum rakyat. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>104</sup>

Implementasi hak politik paling nyata terlihat dalam pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

---

<sup>102</sup> Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Madda. "Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16.1 (2022): 1-20.

<sup>103</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta*, Edisi 61, Juli 2019, hlm. 43.

<sup>104</sup> Ngudiharjo, Satrio. *Praktik Pelarangan Buku Di Era Demokrasi Pasca Reformasi 1998*. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017.

dan adil (LUBER JURDIL). Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu bukan hanya sekadar mekanisme administratif, melainkan bagian dari penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya.

Hak politik mencakup berbagai aspek, termasuk hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, berserikat, serta partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik.<sup>105</sup> Miriam Budiardjo menambahkan bahwa politik, dalam konteks terbaiknya, adalah usaha untuk menciptakan tatanan sosial yang baik dan adil. Oleh karena itu, hak politik tidak hanya menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi, tetapi juga mekanisme untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan individu.<sup>106</sup>

Namun, pelaksanaan hak politik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu isu yang sering muncul adalah praktik politik uang, yang merusak makna substantif dari partisipasi politik.<sup>107</sup> Adrianus Bawamenewi mencatat bahwa fenomena ini sering terjadi dalam pemilu, di mana banyak masyarakat

---

<sup>105</sup> Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28.1 (2017): 147-163.

<sup>106</sup> Sujatmiko, Andrian. *Peranan partai politik dalam Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa perspektif Fiqh siyasah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>107</sup> Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3.3 (2017): 2443-2539.

yang memilih berdasarkan insentif materi daripada visi dan misi calon.

Selain itu, kurangnya pendidikan politik juga menjadi kendala yang signifikan. Setiawan mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat berkontribusi pada tingginya angka golput. Dalam konteks golput, fenomena ini menjadi cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Data menunjukkan bahwa golput tidak hanya terjadi karena apatisme, tetapi juga sebagai bentuk protes terhadap kurangnya representasi politik yang efektif. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih inklusif dan akuntabel.<sup>108</sup>

Dari perspektif hukum, hak politik memiliki landasan yang kuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Landasan ini memberikan jaminan hukum bahwa hak politik merupakan bagian integral dari demokrasi yang tidak boleh diabaikan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta*, Edisi 61, Juli 2019, hlm. 46.

<sup>109</sup> Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7.2 (2023): 541-548.

Secara keseluruhan, hak politik adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Melalui hak ini, rakyat tidak hanya berperan sebagai subjek pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemenuhan hak politik memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem politik yang adil, inklusif, dan partisipatif. Implementasi hak politik yang efektif akan memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila.<sup>110</sup>

Dalam konteks lebih luas, penting untuk memahami bahwa hak politik tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga berkaitan dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi dapat diukur dari seberapa baik hak-hak politik dilindungi dan diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak politik harus menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan memberikan ruang yang memadai bagi suara rakyat untuk didengar. Selain itu, partai politik juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat, dengan

---

<sup>110</sup> Jufri, Muwaffiq. *"Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia."* Istinbath: Jurnal Hukum 14.1 (2017): 1-14.

mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak politik mereka. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan hak-hak politik mereka secara efektif. Oleh karena itu, langkah-langkah yang konkret perlu diambil untuk meningkatkan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka didengar.<sup>112</sup>

Secara keseluruhan, pemenuhan hak politik adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Hak politik yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak politik tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dihormati dan dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, demokrasi

---

<sup>111</sup> Pito, Toni Andrianus, et al. *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia, 2022. Hal 38.

<sup>112</sup> Gultom, Michael Manarov. "Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas." *Ensiklopedia education review* 5.1 (2023): 6-12.



Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

## **D. Golongan Putih (Golput)**

### **1. Pengertian Golongan Putih (Golput)**

Golongan putih, atau yang sering disingkat golput, merujuk pada fenomena di mana masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Secara harfiah, istilah "golput" berasal dari gabungan kata "golongan" dan "putih", yang secara simbolis menggambarkan ketidakterlibatan atau sikap netral dalam proses pemilu. Golput bukan sekadar ketidakhadiran fisik dalam pemungutan suara, tetapi juga mencerminkan sikap politik tertentu, seperti kekecewaan, ketidakpercayaan, atau apatisme terhadap sistem politik dan proses demokrasi. Fenomena ini sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, calon pemimpin, atau sistem pemilu yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Amelia, Kiki. *Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019*. Diss. IAIN Metro, 2023.

Dalam konteks yang lebih luas, golput dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang bersifat pasif. Meskipun tidak memberikan suara, golput tetap menjadi bagian dari dinamika politik karena mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap sistem yang ada. Menurut Priyatmoko, golput terjadi karena masyarakat merasa bahwa sistem politik dan hasil pemilu tidak mampu memenuhi harapan mereka. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan.<sup>114</sup>

Di negara berkembang seperti Indonesia, golput lebih banyak disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dihasilkan dari pemilu. Masyarakat merasa bahwa pemerintah hasil pemilu tidak amanah dan tidak mampu menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan baik, sehingga memunculkan perasaan bahwa demokrasi belum mampu mensejahterakan rakyat.<sup>115</sup>

Secara yuridis, meskipun istilah "golput" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu, konsep ketidakhadiran atau ketidakterlibatan dalam pemilu diatur secara implisit. Misalnya, dalam

---

<sup>114</sup> Triono, Triono. "Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5.2 (2017).

<sup>115</sup> IYAI, RONNY ONTOBUK. *Bentuk Prilaku Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilu Serentak 2019 di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. Diss. IISIP YAPIS Biak, 2021.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa hak memilih adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, seperti usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Namun, undang-undang ini juga menegaskan bahwa penggunaan hak pilih bersifat sukarela, bukan wajib. Artinya, warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakannya.

Dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diatur larangan bagi siapa pun untuk memaksa seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa golput, sebagai bentuk ketidakterlibatan dalam pemilu, diakui sebagai hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, golput dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi politik yang sah dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia.<sup>116</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "golput" didefinisikan sebagai "golongan putih; orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum".<sup>117</sup> Definisi ini menekankan pada aspek ketidakterlibatan fisik dalam proses pemilu. Namun,

---

<sup>116</sup> Nadia, Haiza. "Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3.1 (2023): 83-95.

<sup>117</sup> KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam konteks politik, makna golput lebih luas dan mencakup dimensi sikap, motivasi, dan alasan di balik ketidakhadiran tersebut. Golput tidak hanya dipahami sebagai ketidakhadiran fisik, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi sikap politik, seperti protes, kekecewaan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan calon pemimpin.

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang terlalu luas, dalam skripsi ini, golput didefinisikan sebagai fenomena ketidakterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu), baik secara fisik (tidak datang ke tempat pemungutan suara) maupun secara sikap (tidak memilih karena alasan tertentu). Golput dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekecewaan terhadap sistem politik, ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin, apatisme, atau alasan praktis seperti kesibukan atau ketidaktahuan tentang proses pemilu.<sup>118</sup> Dalam konteks hukum, golput diakui sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu, meskipun istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, golput adalah fenomena kompleks yang mencerminkan ketidakterlibatan masyarakat dalam pemilu, baik secara fisik maupun sikap. Dalam konteks hukum, golput diakui sebagai

---

<sup>118</sup> Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. "Komunikasi KPU dalam menekan golput di Jember." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18.2 (2020): 199-210.

hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu, meskipun istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan. Definisi operasional golput dalam skripsi ini mencakup aspek sikap, motivasi, dan alasan di balik ketidakhadiran dalam pemilu, dengan batasan yang jelas untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memahami golput secara komprehensif dan terarah dalam konteks skripsi ini.

## **2. Dasar Hukum Golput**

Golongan Putih, atau yang sering disebut golput, merupakan fenomena di mana sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sendiri sejatinya adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin dan anggota parlemen yang akan mewakili serta berbicara atas nama mereka. Namun, dalam realitanya, selalu ada sebagian rakyat yang memilih untuk tidak mengambil bagian dalam pemilu atau tidak memberikan suaranya.<sup>119</sup> Fenomena ini dikenal sebagai golput, yang merupakan manifestasi dari sikap politik tertentu. Secara yuridis, penyelenggaraan

---

<sup>119</sup> Firmansyah, Yoga. *Analisis Konfigurasi Politik Pasca Penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Tinjauan Terhadap Dinamika Kekuatan Partai Dan Representasi Politik*. Diss. IAIN Metro, 2024.

pemilu telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.” Hal ini menunjukkan bahwa hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat usia dan status perkawinan. Namun, hak ini tidak serta-merta dapat digunakan tanpa memenuhi syarat administratif tertentu. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 8 ayat 1, ditegaskan bahwa “untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Artinya, meskipun seseorang telah memenuhi syarat usia, ia tetap harus terdaftar dalam daftar pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya.<sup>120</sup>

Maksud dari frasa “mempunyai hak memilih” dalam Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam memberikan suara dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Meskipun demikian, hak ini tidak

---

<sup>120</sup> Habibah, Habibah, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasa Dusturiyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11.1 (2024): 118-128.

dapat digunakan secara otomatis. Undang-undang menetapkan syarat administratif, yaitu pemilih harus terdaftar secara resmi. Jika seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu, meskipun ia secara sukarela ingin melakukannya.<sup>121</sup>

Selain itu, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak memiliki gangguan jiwa dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa memilih dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, dalam perspektif Undang-Undang Pemilu, para pemilih (rakyat) diberi kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakannya.<sup>122</sup>

Selanjutnya, karena memilih adalah hak, maka tidak ada pihak yang boleh memaksa pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau melarangnya untuk

---

<sup>121</sup> Firdaus, Sunny Ummul. "Problematika hilangnya hak pilih warga negara yang ditimbulkan pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 3.3 (2019): 239-254.

<sup>122</sup> Waworuntu, Sherina. "Tinjauan yuridis mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah." *Lex Administratum* 10.5 (2022).

tidak menggunakan hak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan larangan untuk melakukan tindakan pemaksaan dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Bunyi pasal tersebut adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>123</sup>

Larangan ini tidak hanya berlaku untuk tindakan pemaksaan, tetapi juga untuk tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dalam Pasal 519 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, atau dengan memaksa, atau dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang sangat melarang praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu, termasuk politik uang dan pemaksaan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> DR Dahlan Sinaga SH, M. H. *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia, 2018.

<sup>124</sup> *Ibid*, 47



Dengan demikian, golongan putih (golput) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hak rakyat. Pemilih (rakyat) memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan hak suaranya atau tidak menggunakannya. Artinya, boleh menggunakan hak suaranya, dan boleh juga memilih untuk tidak menggunakannya. Oleh karena itu, golput menurut undang-undang diperbolehkan, karena memilih adalah hak, bukan kewajiban. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.<sup>125</sup>

Selain itu, penting untuk memahami bahwa golput tidak selalu diartikan sebagai bentuk apatisme atau ketidakpedulian terhadap politik. Bisa jadi, golput merupakan bentuk protes atau kekecewaan terhadap sistem politik yang ada, atau terhadap calon-calon yang dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, golput dapat dilihat sebagai bagian dari partisipasi politik yang bersifat kritis, di mana masyarakat menggunakan haknya untuk tidak memilih sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Manalu, Rizki Bastanta B. "Analisis faktor-faktor penyebab golput pilkada di Kota Medan." *Journal Recht (JR)* 1.1 (2022): 61-70.

<sup>126</sup> Abdatama, M. Rafda. *Hubungan Religiusitas Dan Tindakan Tidak Memilih (GOLPUT) Pada Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Agama Islam (UII)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak memilih dan kebebasan memilih. Golput, sebagai salah satu bentuk ekspresi politik, diakui sebagai hak yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, di sisi lain, undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak proses demokrasi, seperti politik uang dan pemaksaan. Dengan demikian, pemilu dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan menghormati hak-hak setiap warga negara.

### **3. Jenis-Jenis Golput**

Fenomena golongan putih (golput), atau ketidakhadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu), merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang bersifat pasif. Golput tidak dapat dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis yang didasarkan pada alasan atau motivasi di balik keputusan seseorang untuk tidak memilih. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis golput yang dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik dan latar belakangnya:<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Dewi, Lintang Yunisha, et al. "Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8.1 (2022).

- a. Golput Apatis: Golput apatis merujuk pada kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena ketidakpedulian atau ketidaktertarikan terhadap politik. Mereka cenderung menganggap bahwa politik tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Golput jenis ini sering ditemukan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa partisipasi politik tidak akan membawa perubahan apa pun. Apatisme politik muncul ketika masyarakat merasa teralienasi dari sistem politik yang ada, dan rendahnya kesadaran politik merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan apatisme.<sup>128</sup>
- b. Golput alienasi: Golput alienasi merujuk pada kelompok masyarakat yang merasa terasing dari sistem politik dan pemerintahan. Mereka merasa bahwa politik dijalankan oleh sekelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Golput jenis ini sering muncul di kalangan masyarakat yang merasa tidak diwakili oleh partai politik atau calon pemimpin. Alienasi politik terjadi ketika masyarakat merasa tidak memiliki keterikatan dengan sistem politik yang ada, dan hal ini sering terjadi ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak adil atau tidak peduli terhadap kebutuhan mereka.

---

<sup>128</sup> Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1.3 (2020): 421-431.

- c. Golput protes: Golput protes adalah kelompok yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau calon pemimpin yang dianggap tidak memenuhi harapan. Golput jenis ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi tetapi merasa bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan. Golput protes sering muncul dalam transisi demokrasi, di mana masyarakat merasa bahwa pemilu tidak adil atau tidak demokratis. Fenomena ini juga sering terjadi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah atau partai politik.<sup>129</sup>
- d. Golput ideologis: Golput ideologis adalah kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena memiliki keyakinan atau ideologi tertentu yang bertentangan dengan sistem pemilu yang ada. Misalnya, mereka yang menganggap bahwa pemilu adalah bagian dari sistem yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Golput ideologis sering muncul di kalangan kelompok yang memiliki pandangan politik radikal atau anti-sistem. Fenomena ini juga terjadi di kalangan kelompok yang menolak sistem demokrasi liberal.

Jenis-jenis golput di atas menunjukkan bahwa fenomena golput tidak dapat disederhanakan sebagai

---

<sup>129</sup> Firdaus, Syah. "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan perilaku pemilih di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1.2 (2023): 165-184.

bentuk ketidakpedulian semata. Golput dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari kekecewaan terhadap sistem politik hingga faktor-faktor praktis. Untuk memahami fenomena golput secara mendalam, penting untuk melihat konteks sosial, politik, dan budaya di mana golput terjadi. Penjelasan ini dapat menjadi landasan teoritis dalam menganalisis fenomena golput, khususnya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

#### **4. Dampak Negatif Golput**

Golput atau ketidakhadiran partisipasi dalam pemilihan umum memiliki dampak negatif yang sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Pertama, rendahnya partisipasi pemilih menyebabkan penurunan legitimasi pemerintahan. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak mayoritas. Akibatnya, pemerintahan yang terbentuk menjadi kurang kredibel dan menimbulkan keraguan mengenai keabsahan serta keadilan sistem politik yang ada.<sup>130</sup>

Di samping itu, tingginya angka golput mencerminkan bangsa yang tidak berdemokrasi, karena ketidakpedulian masyarakat terhadap proses

---

<sup>130</sup> Fauzan, Ahmad. *Pemilihan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

politik menunjukkan lemahnya kesadaran politik. Hal ini berimplikasi pada menurunnya partisipasi aktif, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, keadilan, dan keterwakilan semakin tergerus. Kondisi ini juga menggeser prioritas kebijakan, di mana pemerintah cenderung mengambil langkah yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, karena suara mayoritas yang seharusnya menjadi acuan tidak terwakili dengan optimal.<sup>131</sup>

Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih membuka peluang bagi manipulasi suara. Dengan jumlah pemilih yang sedikit, pihak-pihak tertentu dapat lebih mudah melakukan kecurangan atau manipulasi perhitungan suara, yang akhirnya merusak integritas dan transparansi proses demokrasi. Keadaan ini semakin diperparah dengan menurunnya akuntabilitas pemerintah. Pejabat yang terpilih dari pemilu dengan partisipasi rendah cenderung merasa kurang terikat untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada publik, sehingga meningkatkan potensi korupsi dan ketidaktransparanan dalam pemerintahan.<sup>132</sup>

Dampak negatif golput juga terasa pada aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang

---

<sup>131131</sup> Serentak, Potret Pengawasan Pemilu, et al. "Demi Tegaknya Demokrasi ELEKTORAL."

<sup>132</sup> Karso, A. Junaedi. *TENDENSI POLITIK REGIONAL 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy*. Samudra Biru, 2024.

dihasilkan dari pemilu dengan partisipasi rendah sering kali tidak efektif dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi karena tidak mencerminkan aspirasi mayoritas. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>133</sup>

Lebih jauh, tingginya angka golput memperparah apatisme politik di kalangan masyarakat. Siklus ketidakpedulian yang terjadi membuat partisipasi dalam proses demokrasi di masa depan semakin menurun, sehingga mengakibatkan turunnya kualitas pemilihan umum dan pemimpin yang terpilih. Dengan mekanisme seleksi yang tidak optimal, calon-calon yang terpilih mungkin tidak sepenuhnya mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas kepemimpinan pun turut menurun.

Secara keseluruhan, dampak negatif dari tingginya angka golput tidak hanya berdampak pada legitimasi dan kualitas pemerintahan, tetapi juga pada keberlangsungan demokrasi, pembangunan sosial-ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam pemilihan umum merupakan tanggung jawab penting yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara agar tercipta pemerintahan yang representatif, akuntabel,

---

<sup>133</sup> Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

dan mampu mewujudkan keadilan serta kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## E. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokrasi modern, termasuk yang diterapkan di Indonesia. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin, kebijakan, dan arah pemerintahan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum. Dalam perkembangannya, teori ini dipengaruhi oleh berbagai pemikir politik, seperti Jean-Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu, yang memberikan kontribusi terhadap konsep demokrasi perwakilan dan sistem *checks and balances*.<sup>134</sup>

Secara historis, gagasan tentang kedaulatan rakyat muncul sebagai respons terhadap sistem monarki absolut yang menganggap raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mulai mengembangkan teori bahwa

---

<sup>134</sup> Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.3 (2023): 333-345.



kekuasaan negara sejatinya berasal dari rakyat, bukan dari raja atau elite tertentu. Rousseau, dalam karyanya "*The Social Contract*," menyatakan bahwa negara hanya sah jika didasarkan pada kehendak umum (*volonté générale*) yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.<sup>135</sup>

John Locke juga memberikan pengaruh besar terhadap konsep kedaulatan rakyat melalui teori kontrak sosialnya. Menurut Locke, rakyat secara sukarela menyerahkan sebagian hak alaminya kepada pemerintah melalui sebuah kontrak sosial, dengan syarat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan dan hak atas kehidupan. Jika pemerintah gagal menjalankan tugasnya atau bertindak sewenang-wenang, rakyat berhak mengganti atau menggulingkan pemerintahan tersebut. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi sistem demokrasi modern, di mana rakyat memiliki hak untuk mengontrol dan mengevaluasi pemerintah melalui pemilu dan mekanisme demokratis lainnya.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II." (2006).

<sup>136</sup> Dekki, Umamur Rais, and Setyawan Dody. "KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik." (2022).

Dalam teori kedaulatan rakyat, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi ciri khasnya<sup>137</sup>:

- a. Kedaulatan berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah melalui mekanisme perwakilan, seperti pemilu.
- b. Pemerintahan yang sah harus mencerminkan kehendak rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- c. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.
- d. Terdapat mekanisme kontrol terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, seperti lembaga legislatif, yudikatif, serta media dan masyarakat sipil yang bebas.

Teori kedaulatan rakyat juga memiliki hubungan erat dengan konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam negara hukum, kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dapat bertindak di luar hukum, termasuk pemerintah. Demokrasi konstitusional, seperti yang diterapkan di Indonesia, menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, di mana hak-

---

<sup>137</sup> Ghufuranillah, Dzikri. "Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat." (2022).

hak rakyat dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dasar.<sup>138</sup>

Di Indonesia, kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui pemilu maupun mekanisme partisipasi lainnya. Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat juga tercermin dalam sistem pemilihan langsung untuk presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif, yang memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis.<sup>139</sup>

Selain itu, teori kedaulatan rakyat juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan. Rakyat tidak hanya berhak memilih pemimpin, tetapi juga memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, berorganisasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam praktiknya, negara-negara demokratis menjamin kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta akses terhadap informasi sebagai bagian dari implementasi kedaulatan rakyat.

---

<sup>138</sup> Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 128-145.

<sup>139</sup> Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6.1 (2020): 51-71.

<sup>140</sup>Dengan adanya kebebasan ini, rakyat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, dalam implementasinya, teori kedaulatan rakyat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Dalam beberapa kasus, pemerintah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru dapat bertindak otoriter dan membatasi hak-hak rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sistem checks and balances yang kuat, seperti independensi lembaga peradilan, kebebasan media, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>141</sup>

Selain itu, kedaulatan rakyat juga menghadapi tantangan dalam hal partisipasi politik. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, seperti pemilu dan pengambilan keputusan publik. Namun, dalam banyak kasus, tingkat partisipasi politik dapat menurun akibat berbagai faktor, seperti apatisisme politik, kurangnya pendidikan politik, atau ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu upaya penting dalam mempertahankan kedaulatan rakyat adalah

---

<sup>140</sup> Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legalitas* 13.01 (2020): 1-15.

<sup>141</sup> Pito, Toni Andrianus, et al. *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia, 2022.

meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.<sup>142</sup>

Pada intinya teori kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini berkembang dari pemikiran para filsuf politik seperti Rousseau dan Locke, yang menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.<sup>143</sup> Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, pemilu, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terlaksana, diperlukan sistem yang transparan, partisipasi aktif masyarakat, serta mekanisme kontrol terhadap pemerintah agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

---

<sup>142</sup> Hayati, Neni Nur. "Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.1 (2021): 23-34.

<sup>143</sup> Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, 2020.

## **BAB III**

### **PRAKTIK GOLPUT PADA PEMILU 2014, 2019, DAN 2024 DI INDONESIA**

#### **A. Profil Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar dengan total daratan sekitar 1.922.570 km<sup>2</sup> dan perairan seluas 3.257.483 km<sup>2</sup>. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.<sup>144</sup>

Secara administratif, Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi setelah adanya pemekaran wilayah terbaru. Provinsi-provinsi tersebut mencerminkan keberagaman geografis, sosial, dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Beberapa provinsi terbaru yang ditambahkan dalam struktur administratif adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Keberagaman ini tidak hanya

---

<sup>144</sup> Khaeruman, Badri, and Muchtar Ghazali. "4 pilar wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika." (2020).

terlihat dalam aspek administratif tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.<sup>145</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau, dengan jumlah mencapai sekitar 17.504 pulau, meskipun hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Beberapa pulau utama yang menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi adalah Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau Jawa, meskipun memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan pulau lainnya, merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat dan menjadi pusat pemerintahan serta ekonomi nasional.<sup>146</sup>

Dalam konteks pemerintahan, NKRI menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yang dijabat oleh seorang presiden. Presiden bertindak sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan dan kebijakan nasional. Pemerintahan Indonesia juga terdiri dari tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR, DPD, dan MPR), serta yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media, 2019.

<sup>146</sup> Gustina, Amelya. "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi." *Pembangunan Daerah* 5 (2023).

<sup>147</sup> Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.

NKRI juga memiliki konsep ketahanan nasional yang berfokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman disintegrasi sejak awal kemerdekaan, baik dalam bentuk pemberontakan, gerakan separatisme, maupun konflik sosial. Oleh karena itu, keutuhan NKRI menjadi salah satu aspek fundamental yang terus dijaga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung persatuan nasional.<sup>148</sup>

Selain aspek pemerintahan dan ketahanan nasional, NKRI juga memiliki peran penting dalam kancah internasional. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan menjalin kerja sama dengan berbagai negara di dunia.<sup>149</sup>

Dalam pembangunan ekonomi, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Sumber daya alam yang

---

<sup>148</sup> Taufiq, Otong Husni, Agus Budiman, and Egi Nurholis. "Kebijakan dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat." (2024).

<sup>149</sup> Isnaini, M. Arif, Hari Sulisty, and Rina Marlina. "Giat multilateral naval exercise Komodo dalam menjaga stabilitas perdamaian di kawasan regional sekaligus bukti Indonesia sebagai poros maritim dunia." *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.9 (2023): 6770-6775.



melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil pertanian, menjadi salah satu faktor utama yang mendukung perekonomian nasional. Selain itu, sektor industri, perdagangan, dan pariwisata juga berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan negara.<sup>150</sup>

Secara keseluruhan, NKRI adalah negara dengan karakteristik unik sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan suku bangsa. Dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi Pancasila dan konstitusi yang kuat, Indonesia terus berupaya menjaga persatuan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Keberadaan 38 provinsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan menunjukkan bahwa Indonesia terus beradaptasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Praktik golput, atau golongan putih, telah menjadi fenomena yang terus berkembang di Indonesia sejak era reformasi. Golput merujuk pada tindakan pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, meskipun juga dapat mencerminkan ketidakpedulian atau

---

<sup>150</sup> Sahban, Muhammad Amsal, and M. M. Se. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.

apatis terhadap proses demokrasi.<sup>151</sup> Golput memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih, karena suara mayoritas mungkin tidak tercermin dalam hasil pemilihan.

Pada Pemilu 2004, Indonesia mencatat angka golput yang cukup tinggi, mencapai sekitar 26%. Hal ini diduga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik pasca-rezim otoriter dan kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Pemilu 2004 merupakan pemilihan umum pertama setelah era Orde Baru, sehingga banyak warga yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, transisi politik yang belum stabil juga menjadi faktor penyebab tingginya angka golput pada saat itu. Masyarakat mungkin merasa bahwa proses politik masih belum sepenuhnya transparan atau adil, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi.<sup>152</sup>

Memasuki Pemilu 2009, angka golput mengalami penurunan signifikan, menjadi sekitar 20%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesadaran politik masyarakat setelah beberapa kali mengikuti pemilihan umum

---

<sup>151</sup> Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3.1 (2021): 85-100.

<sup>152</sup> Amrizal, Dedi, and Ahmad Hidayah Dalimunthe. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.

pasca-reformasi. Upaya sosialisasi dan edukasi politik yang lebih intensif juga turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, partai politik dan pemerintah mulai lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun, meskipun terjadi penurunan, angka golput pada Pemilu 2009 masih tergolong tinggi, menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada.<sup>153</sup>

Pada Pemilu 2014, angka golput kembali meningkat, mencapai sekitar 25%. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kepercayaan pada partai politik, dan kurangnya pilihan yang memadai di antara calon yang tersedia diduga menjadi penyebab utama peningkatan golput pada tahun tersebut. Banyak pemilih merasa bahwa tidak ada calon atau partai yang benar-benar mewakili kepentingan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, persepsi korupsi dan kegagalan pemerintah dalam menangani isu-isu penting juga turut berkontribusi terhadap peningkatan angka golput.<sup>154</sup>

Pada Pemilu 2019, angka golput kembali menurun, dengan hanya sekitar 20% pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Penurunan ini mungkin

---

<sup>153</sup> Arianto, Bismar. "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 51-60.

<sup>154</sup> Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014." *Humaniora* 6.1 (2015): 97-105.

dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda, serta kepentingan yang tinggi dalam proses politik. Pemilu 2019 juga diwarnai oleh persaingan yang ketat antara dua pasangan calon presiden, yang mungkin telah meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, meskipun terjadi penurunan, angka golput pada Pemilu 2019 masih menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih merasa tidak terwakili atau tidak puas dengan pilihan yang ada.<sup>155</sup>

Pada Pemilu 2024, Indonesia kembali menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah golput, dengan sekitar 20,18% pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, pandemi COVID-19, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik diduga menjadi penyebab utama peningkatan ini. Pandemi COVID-19, khususnya, telah membuat beberapa orang ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara karena kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, seperti pengangguran dan kemiskinan, juga membuat sebagian

---

<sup>155</sup> Faridah, Hana Faridah Hana, Masrifah Masrifah, and Din Eri Pratama Din Eri Pratama. "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu." *Krtha Bhayangkara* 18.2 (2024): 328-342.

masyarakat lebih memprioritaskan masalah ekonomi daripada partisipasi dalam pemilihan umum.<sup>156</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya edukasi politik juga menjadi penyebab utama golput di Indonesia. Banyak warga masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan masa depan negara. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan apatis atau ketidakpedulian terhadap proses politik. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka golput.<sup>157</sup> Banyak warga yang mungkin tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka atau tidak memahami konsekuensi dari tidak menggunakan hak pilih tersebut.

Secara keseluruhan, praktik golput di Indonesia dari Pemilu 2004 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kepercayaan pada partai politik,

---

<sup>156</sup> Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye gunakan hak suara dan jangan golput pada Pemilu 2024 untuk generasi muda." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.

<sup>157</sup> Shofa, Ghaita Zahira, Ristania Tri Widiarti, and Rochmawati Ing Lestari. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote: Ghaita Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti<sup>2\*</sup>, Rochmawati Ing Lestari, Nur Hasanah." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2.1 (2024): 112-120.

kondisi ekonomi yang sulit, dan pandemi COVID-19 telah berkontribusi terhadap peningkatan angka golput. Selain itu, kurangnya edukasi politik dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum juga turut menjadi penyebab utama golput.

Upaya untuk mengurangi angka golput harus dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling mendukung. Salah satunya adalah peningkatan edukasi politik. Pendidikan politik perlu diperluas dan diperdalam, tidak hanya sebatas menjelaskan teknis pemilihan umum, tetapi juga mengajarkan nilai partisipasi aktif sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Edukasi ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, organisasi masyarakat, maupun program-program pemerintah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, reformasi sistem politik juga menjadi hal penting. Sistem rekrutmen calon legislatif dan eksekutif harus diperbaiki agar lebih selektif, transparan, dan berbasis pada kapasitas serta integritas. Dengan menghadirkan calon-calon pemimpin yang kredibel dan representatif, masyarakat akan merasa memiliki pilihan yang bermakna, sehingga minat untuk menggunakan hak pilih meningkat.

Peningkatan transparansi dalam seluruh tahapan pemilu juga menjadi faktor kunci. Proses pencalonan, kampanye, distribusi logistik, hingga rekapitulasi suara harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik.

Transparansi ini akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya.

Partai politik perlu memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka harus lebih aktif mendengarkan aspirasi rakyat, tidak hanya mendekati pemilih saat menjelang pemilu. Partai juga perlu menghadirkan program-program nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji politik.

Penggunaan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi politik. Penyebaran informasi yang kreatif dan mudah dipahami, seperti infografis, video edukasi, serta diskusi daring, dapat meningkatkan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat ditingkatkan, sehingga demokrasi semakin kokoh dan angka golput bisa ditekan secara signifikan.

## **B. Pemilihan Umum Di Indonesia**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan rakyat kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Indonesia telah melakukan 13 kali pemilu sejak 1955-2024. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilu

sebagai proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>158</sup>

Pemilu merupakan lembaga demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam badan legislatif dan eksekutif. Keberadaan Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi berdasarkan pilihan mayoritas rakyat. Menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan rakyat dalam mengawasi dan menentukan jalannya pemerintahan.<sup>159</sup>

Dalam pelaksanaannya, Pemilu di Indonesia didasarkan pada enam asas utama yaitu:

1. Asas langsung berarti bahwa pemilih harus memberikan suaranya sendiri tanpa diwakili oleh

---

<sup>158</sup> Mufidah, Athiyyatul, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2024): 35-51.

<sup>159</sup> Wibowo, Eko. "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.2 (2024): 257-270.



pihak lain, sehingga memastikan bahwa setiap individu dapat menyalurkan pilihannya secara mandiri.

2. Asas umum menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
3. Asas bebas menjamin bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, baik individu maupun kelompok tertentu.
4. Asas rahasia memastikan bahwa pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh siapa pun, memberikan keamanan bagi individu dalam menyalurkan hak pilihnya.
5. Asas jujur mengharuskan seluruh tahapan Pemilu dilakukan secara transparan tanpa kecurangan, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun pemilih.
6. Terakhir, asas adil menegaskan bahwa semua peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan.<sup>160</sup>

Pemilu di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan merumuskan kebijakan publik yang mencerminkan

---

<sup>160</sup> Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, and Josina Londa. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* 10.4 (2022).

kehendak rakyat. Selain itu, Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme penyaluran konflik kepentingan dari masyarakat kepada lembaga perwakilan, sehingga potensi ketegangan sosial dapat diminimalisir. Lebih jauh lagi, Pemilu berperan dalam membangun kesadaran politik masyarakat serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,<sup>161</sup> Pemilu juga bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, menciptakan Pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin kepastian hukum dalam proses politik.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga utama yang memiliki peran masing-masing.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas untuk mengawasi jalannya Pemilu, mencegah serta menangani pelanggaran Pemilu guna memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

---

<sup>161</sup> Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas mengawasi etika penyelenggara Pemilu agar tetap profesional dan tidak berpihak.<sup>162</sup>

Di Indonesia, Pemilu terdiri dari beberapa jenis, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu Legislatif bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mewakili rakyat dalam penyusunan kebijakan negara. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih kepala pemerintahan nasional yang akan memimpin negara selama satu periode. Sementara itu, Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung yang dilakukan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di daerah masing-masing guna memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah.<sup>163</sup>

Seiring dengan perkembangan politik, sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu legislatif, yang memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif, bukan hanya partai politiknya. Sistem ini bertujuan untuk

---

<sup>162</sup> Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1.7 (2022): 288-301.

<sup>163</sup> Sirajuddin, Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4.2 (2021): 233-247.

meningkatkan keterwakilan rakyat dan transparansi dalam Pemilu. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem multi-partai, di mana berbagai partai politik dapat berkompetisi untuk memperoleh kursi di parlemen. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau memperoleh minimal 25% suara sah nasional dalam Pemilu sebelumnya.<sup>164</sup>

Partisipasi politik dalam Pemilu menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela warga negara dalam memilih pemimpin dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik. Partisipasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golongan putih (golput). Partisipasi aktif mencakup keterlibatan dalam kampanye, mengajukan kritik terhadap kebijakan, serta menggunakan hak pilih dalam Pemilu.<sup>165</sup> Partisipasi pasif merujuk pada individu yang hanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan tanpa memberikan masukan atau kritik. Sementara itu, golput adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang

---

<sup>164</sup> Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10.2 (2023): 120-137.

<sup>165</sup> Nurcahyo, Abraham. "Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6.01 (2016): 25-34.

menyebabkan seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Semakin tinggi angka partisipasi, semakin besar legitimasi pemerintahan yang terpilih. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan aktif dalam Pemilu guna memastikan pemerintahan yang demokratis dan mencerminkan aspirasi rakyat.<sup>166</sup>

Dengan demikian, Pemilu di Indonesia bukan hanya sekadar prosedur politik, tetapi juga mekanisme utama dalam menjaga stabilitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, serta menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan Pemilu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, profesionalisme penyelenggara, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus berperan serta dalam memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara adil dan demokratis agar dapat menghasilkan pemerintahan yang sah, kuat, dan mencerminkan kehendak rakyat.

---

<sup>166</sup> Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3.1 (2021): 85-100.

### **C. Praktik Golput Pada Pemilu 2014**

Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2014 merupakan pemilu keempat setelah reformasi. Pemilu ini berlangsung pada Rabu, 9 April 2014, diikuti oleh 12 partai politik nasional dan tiga partai politik lokal di Aceh. Proses pemilu untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah dianggap sebagai salah satu yang paling rumit dan kompleks di dunia. Terdapat 560 kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan, sementara di tingkat DPRD Provinsi ada 2.112 kursi di 259 daerah pemilihan. Di tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan. Selain itu, 132 kursi dari 33 provinsi diperebutkan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara keseluruhan, hampir 200 ribu calon legislatif (caleg) berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014. Jumlah pemilih terdaftar mencapai 185.822.507 jiwa yang tersebar di 546.278 tempat pemungutan suara (TPS), baik di dalam maupun luar negeri. Tak heran jika terdapat 145 pengamat asing dari 30 negara yang memantau jalannya pemilu legislatif 2014.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Husni Kamil Manik, S.P., Sigit Pamungkas, S.IP, MA, Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA, Ida Budhiati, SH, MH, Juri Ardiantoro, MSi., Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si, Hadar Navis Gumay, dan Arif Rahman Hakim MS. (2015). *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

Pemilu 2014 juga melibatkan jumlah petugas yang sangat besar, termasuk lebih dari 2,39 juta petugas KPPS di dalam negeri dan 3.486 di luar negeri; 243,4 ribu petugas PPS di dalam negeri dan 16,9 ribu di luar negeri; serta lebih dari 34,9 ribu anggota PPK. Jumlah tersebut masih ditambah dengan hampir satu juta Linmas. Pemilu 2014 juga memerlukan logistik yang sangat besar, dengan jumlah surat suara untuk DPR, DPRD, dan DPD mencapai ratusan juta lembar, serta jutaan bilik dan kotak suara.<sup>168</sup>

Meskipun kerumitannya, Pemilu 2014 berlangsung dengan baik. Dari segi keamanan, tidak ada bentrok atau konflik serius antar kelompok. Semua berjalan aman dan lancar. Kualitas penyelenggaraan pemilu juga meningkat, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 70 persen pada Pemilu 2009. Keberhasilan pelaksanaan pemilu legislatif ini tidak terlepas dari kontribusi partai politik, para caleg, dan elemen masyarakat yang saling bekerja sama.<sup>169</sup>

Pemilu 2014 dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Secara umum, UU ini menyebutkan beberapa perubahan dari UU pemilu sebelumnya (UU No. 10 Tahun 2008), yaitu:

---

<sup>168</sup> Ibid., 6

<sup>169</sup> Ibid.

- a. Perubahan pertama adalah besaran ambang batas parlementer yang ditetapkan sebesar 3,5%, sesuai dengan pasal 208, di mana kursi hanya diberikan kepada partai politik yang mencapai ambang batas tersebut secara nasional dari suara sah. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya yang sebesar 2,5%.
- b. Perubahan kedua mencakup pendaftaran partai politik baru atau partai yang gagal mencapai ambang batas pada pemilu 2009 yang harus memiliki kepengurusan dan kantor tetap di setiap provinsi (100%), 75% di kabupaten/kota, dan 50% di kecamatan.
- c. Ketiga, untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) akan dihitung dan disusun ulang berdasarkan jumlah penduduk terakhir yang diberikan oleh pemerintah kepada KPU. Keempat, pasal 154 UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemberian suara dalam Pemilu 2014 dilakukan dengan mekanisme mencoblos. Dan kelima, rekapitulasi penghitungan suara di PPS (tingkat desa/kelurahan) diaktifkan kembali.<sup>170</sup>

---

<sup>170170</sup> Husni Kamil Manik, S.P., Sigit Pamungkas, S.IP, MA, Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA, Ida Budhiati, SH, MH, Juri Ardiantoro, MSi., Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si, Hadar Navis Gumay, dan



## 1. Fenomena Golput Pada Pemilu 2014

Fenomena golput dalam Pemilu 2014 menjadi perhatian serius dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Golput, atau golongan putih, merujuk pada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik dengan tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun dengan memberikan suara tidak sah. Dalam setiap pemilu, tingkat partisipasi pemilih sering dijadikan indikator keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, meningkatnya angka golput menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu serta pemangku kepentingan politik lainnya.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mencapai 72 persen, sementara dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 turun menjadi 69,58 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target partisipasi yang ditetapkan KPU, yakni 75 persen. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2009, angka partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 mengalami penurunan sekitar 2 persen, karena pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,17 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak

---

Arif Rahman Hakim MS. (2015). *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>171</sup>

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 juga bervariasi di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam Pileg 2014 adalah Papua, yang mencapai 92 persen. Hal ini dipengaruhi oleh sistem noken yang masih digunakan di beberapa daerah di Papua. Di sisi lain, tingkat partisipasi terendah terjadi di DKI Jakarta, dengan hanya sekitar 60 persen pemilih yang datang ke TPS. Beberapa provinsi lain dengan angka partisipasi di bawah rata-rata nasional adalah Kepulauan Riau (61,9 persen), Sumatera Barat (68,5 persen), Kalimantan Timur (69 persen), dan Riau (69,2 persen).<sup>172</sup>

Dalam Pemilu Presiden 2014, angka partisipasi pemilih secara nasional sedikit lebih rendah dibandingkan Pileg 2014, yaitu sekitar 69,58 persen. Beberapa provinsi mengalami penurunan partisipasi yang signifikan dalam Pilpres dibandingkan Pileg, kecuali DKI Jakarta, yang justru mengalami peningkatan tingkat partisipasi pada Pilpres hingga mencapai 70 persen. Sebaliknya, Kepulauan Riau

---

<sup>171</sup> Sumber: Data Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum

<sup>172</sup> Nurhasim, Moch. (Editor). (2014). *Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum.

tercatat sebagai provinsi dengan tingkat partisipasi terendah dalam Pilpres 2014.<sup>173</sup>

Fenomena golput dalam Pemilu 2014 dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu golput teknis dan golput ideologis. Golput teknis terjadi akibat kendala administratif, seperti tidak terdaftarnya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau kesulitan mengakses TPS. Sementara itu, golput ideologis merupakan keputusan sadar pemilih untuk tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau pilihan kandidat yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka. Dalam Pemilu 2014, kedua jenis golput ini tampak dalam berbagai kelompok masyarakat, baik pemilih pemula maupun pemilih yang lebih senior.<sup>174</sup>

Menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 memiliki dampak terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam sistem demokrasi, tingginya partisipasi pemilih memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, meningkatnya angka golput dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan pemerintahan yang terbentuk.

Sebagai bagian dari dinamika politik elektoral di Indonesia, fenomena golput dalam Pemilu 2014 menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan

---

<sup>173</sup> Ibid, 7

<sup>174</sup> Ibid, 53

partisipasi pemilih. Meskipun pemilu telah berlangsung secara demokratis, angka partisipasi yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mendasar dalam sistem pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena golput menjadi penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan partisipasi pemilih yang lebih tinggi dalam pemilu mendatang.<sup>175</sup>

## **2. Faktor Penyebab Golput di Indonesia Pada Pemilu 2014**

Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya angka golput pada Pemilu 2014. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi dan informasi yang komprehensif mengenai tata cara pemilu serta profil calon dan partai politik. Banyak pemilih yang merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai sehingga kesulitan untuk menentukan pilihan secara rasional. Kondisi ini diperparah dengan praktik kampanye yang masih terfokus pada pendekatan ketokohan daripada penyajian program kerja yang jelas.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Ibid, 122

<sup>176</sup> Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and I. Ibrohim. *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting. Di banyak daerah, terutama di sektor informal, pemilih seringkali harus memilih antara mengikuti proses pemilu dan menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi mereka. Hambatan waktu dan biaya transportasi pada hari pemungutan suara menyebabkan sebagian pemilih enggan hadir di TPS. Hal ini menambah persentase golput, terutama di daerah-daerah dengan mobilitas ekonomi yang rendah.<sup>177</sup>

Dari sisi psikologis, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan politisi yang telah mengecewakan ekspektasi masyarakat turut memicu praktik golput. Rasa tidak percaya dan skeptisisme terhadap sistem politik membuat pemilih merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Di samping itu, adanya persepsi bahwa proses pemilu masih rentan terhadap praktik politik uang dan kecurangan semakin mengurangi motivasi pemilih untuk terlibat aktif.

Tidak hanya itu, masalah administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi faktor penyebab. Ketidaksempurnaan dalam pengelolaan daftar pemilih termasuk adanya DPT tambahan dan DPK menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai status kepemilikan hak pilihnya. Hal ini, ditambah dengan ketidakkonsistenan

---

<sup>177</sup> Ihsan, A. Bakir, and Cucu Nurhayati. "Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota." (2020).

dalam pelaksanaan prosedur di TPS, mengakibatkan sejumlah pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak efisien.<sup>178</sup>

Dengan demikian, penyebab golput pada Pemilu 2014 bersifat multidimensional, melibatkan aspek informasi, ekonomi, psikologis, dan teknis yang saling terkait. Pengidentifikasian faktor-faktor ini penting sebagai dasar untuk merancang strategi peningkatan partisipasi pada pemilu selanjutnya.

### **3. Upaya untuk Menekan Angka Golput di Indonesia pada pemilu 2014**

Fenomena golput dalam Pemilu 2014 menjadi perhatian serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pihak terkait. Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, termasuk ketidakpercayaan terhadap partai politik, minimnya figur potensial, serta citra partai yang menurun. Untuk mengatasi hal ini, KPU dan media memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu.

Salah satu strategi utama yang dilakukan KPU dalam menekan angka golput adalah melalui

---

<sup>178</sup> Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.1 (2019): 17-38.

sosialisasi secara masif dengan berbagai metode. KPU bekerja sama dengan media nasional dan daerah untuk menyebarkan informasi tentang pemilu ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, KPU juga merekrut agen sosialisasi yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak pilih serta tata cara pemungutan suara. Agen sosialisasi ini memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.<sup>179</sup>

Peningkatan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam Pemilu 2014. Salah satu alasan utama masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya adalah akses yang sulit ke TPS, terutama di daerah terpencil. Dengan menambah jumlah TPS, diharapkan lebih banyak pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa hambatan geografis.<sup>180</sup>

KPU juga memanfaatkan media massa sebagai alat utama dalam menyebarkan informasi pemilu. Program debat terbuka yang melibatkan seluruh partai politik diadakan di slot khusus yang disediakan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan komitmen pro-rakyat dari masing-masing calon dan

---

<sup>179</sup> Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014." *Humaniora* 6.1 (2015): 97-105.

<sup>180</sup> *Ibid*, 101

partai politik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan dalam desain program yang mampu secara sistematis membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar media menciptakan program-program yang lebih interaktif dan menarik, dengan mempertimbangkan budaya dan preferensi lokal.

Selain itu, KPU menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas masyarakat, seperti kampanye kreatif dan event berbasis budaya. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah konsep *electiontainment*, yaitu mengemas sosialisasi pemilu dalam bentuk hiburan yang menarik bagi masyarakat. Produk sosialisasi dan pendidikan pemilih dikemas dalam bentuk yang ringan, menghibur, dan dekat dengan kultur masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti pemilu dan memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.<sup>181</sup>

Dalam upaya lebih lanjut untuk menekan angka golput, KPU juga meluncurkan iklan pemilu melalui televisi dan media sosial. Iklan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih mengenai pentingnya menggunakan hak suara mereka. Selain itu, berbagai talkshow yang menghadirkan anggota KPU

---

<sup>181</sup> Ibid, 103



dan pakar politik diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemilu.<sup>182</sup>

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam menurunkan angka golput. Salah satu kendala utama adalah kesadaran politik masyarakat yang rendah dan sikap apatis terhadap pemilu. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara KPU, partai politik, media, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya demokrasi yang lebih kuat. Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu juga perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin percaya terhadap proses demokrasi.<sup>183</sup>

Secara keseluruhan, upaya menekan angka golput dalam Pemilu 2014 telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi melalui media massa, peningkatan aksesibilitas pemilih, kampanye kreatif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu adanya perbaikan dalam sistem sosialisasi yang lebih sistematis dan pendekatan yang lebih efektif dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

---

<sup>182</sup> *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

<sup>183</sup> Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014." *Humaniora* 6.1 (2015): 97-105.

## **D. Praktik Golput Pemilu 2019 di Indonesia**

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia, yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam satu hari. Keputusan untuk mengadakan pemilu serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Namun, meskipun partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, fenomena golput tetap menjadi isu yang menarik perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81,97%, meningkat dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 75,11%. Meski demikian, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang disebut sebagai golput masih cukup tinggi, yaitu 18,03% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau sekitar 34,7 juta orang. Selain itu, terdapat 3.754.905 suara tidak sah, yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari golput meskipun dalam konteks teknis mereka tetap berpartisipasi dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok pemilih yang datang ke TPS tetapi tidak memberikan suara secara sah, baik karena ketidaksengajaan, kesalahan teknis, maupun sebagai bentuk protes.<sup>184</sup>

### **1. Fenomena Golput di Indonesia Pada Pemilu 2019**

---

<sup>184</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. ISBN: 2303-2448.

Pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih mencapai 81,97%, meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 75,11%. Meskipun demikian, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang dikenal sebagai golongan putih (golput) tetap menjadi perhatian. Dengan total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192.770.611 orang, maka jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya berkisar 18,03%, atau sekitar 34,7 juta orang.<sup>185</sup> Selain itu, terdapat 3.754.905 suara tidak sah yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari golput, meskipun dalam konteks teknis bukan merupakan bagian dari mereka yang secara sadar memilih untuk tidak berpartisipasi. Fenomena golput ini terjadi secara merata di berbagai daerah, meskipun dengan variasi tingkat partisipasi yang berbeda.

Beberapa provinsi mencatat tingkat partisipasi yang tinggi, seperti Papua dengan 95,75%, sedangkan tingkat partisipasi terendah terjadi di luar negeri, yaitu 42,54%. Hal ini menunjukkan bahwa golput lebih tinggi di wilayah luar negeri dan daerah perkotaan dibandingkan dengan wilayah-wilayah dengan keterikatan sosial yang lebih kuat.<sup>186</sup>

Golput di Indonesia memiliki dua bentuk utama:

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, 15

<sup>186</sup> *Ibid.*, 23

- a. Golput administratif, yang terjadi akibat pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilih karena faktor administratif, seperti pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang baru dapat memilih setelah pukul 12.00 dan tergantung pada ketersediaan surat suara. Pada Pemilu 2019, 5.492.613 pemilih pilpres dan 5.785.584 pemilih pileg berasal dari DPK.<sup>187</sup>
- b. Golput ideologis, yang dilakukan secara sadar sebagai bentuk protes terhadap sistem politik, kandidat, atau kebijakan tertentu. Meskipun tidak ada angka pasti yang membedakan golput administratif dan ideologis, fenomena ini telah menjadi tren sejak reformasi.<sup>188</sup>

Pemilu 2019 mencatat partisipasi pemilih sebesar 81,97% untuk pilpres dan 81,69% untuk pemilihan legislatif. Meski meningkat dibanding 2014, sekitar 34 juta pemilih (18,03%) tidak menggunakan hak pilihnya. Golput tertinggi terjadi di DKI Jakarta (26,2% untuk pileg) dan pemilih luar negeri (57,46%), yang disebabkan keterbatasan akses dan administratif. Fenomena golput struktural terlihat dari 5,8 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena tidak tercatat dalam Daftar Pemilih

---

<sup>187</sup> Ringkasan Eksekutif Statistik Pemilu 2019, Badan Pusat Statistik. Jakarta hal 15

<sup>188</sup> Ibid.

Tetap (DPT).<sup>189</sup> Selain itu, 1,3 juta pemilih pindah (DPTb) hanya bisa memilih pilpres, tidak pileg, sehingga berpotensi mengurangi partisipasi. Pemilih disabilitas (349.411 jiwa) juga menghadapi kendala aksesibilitas, meski KPU menyediakan template Braille. Ketimpangan partisipasi terlihat dari tingginya angka golput di wilayah konflik seperti Papua Barat (30%) dan kesulitan pemilih migran (buruh, mahasiswa) yang tidak terdaftar di domisili sementara.<sup>190</sup>

## 2. Faktor Penyebab Golput di Indonesia Pada Pemilu 2019

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka golput pada Pemilu 2019 adalah:

- a. Kepercayaan yang Rendah terhadap Pemerintah dan Partai Politik: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat menyebabkan sebagian pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini sering dikaitkan dengan kasus korupsi dan janji politik yang tidak ditepati oleh para politisi. aktor sosial seperti minimnya edukasi politik: 40% pemilih muda tidak paham prosedur pemilu (data Perludem), sementara metode penghitungan suara *Sainte Lague* dinilai rumit. Representasi yang

---

<sup>189</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. ISBN: 2303-2448.

<sup>190</sup> Ibid, 25-30

tidak inklusif, seperti dominasi elite berusia 51-60 tahun di DPR (34,83%) dan rendahnya keterwakilan perempuan (20,87% di DPR), turut mengurangi motivasi pemilih.<sup>191</sup>

- b. Persoalan Administratif dan Logistik: Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan. Banyak pemilih yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. Selain itu, pemilih yang berpindah lokasi mengalami kendala administratif karena harus masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang pada Pemilu 2019 jumlahnya mencapai 1.388.967 pemilih untuk pilpres dan 1.387.478 pemilih untuk pileg. Selanjutnya seperti ketidakakuratan DPT: 5,4 juta pemilih pilpres dan 5,8 juta pemilih pileg berasal dari DPK, sementara DPTb pilpres (1,3 juta) dan pileg (1,4 juta) tidak sinkron. Penambahan TPS dari 546.278 (2014) menjadi 813.336 (2019) juga belum sepenuhnya mengatasi overload pemilih terpencil.<sup>192</sup>
- c. Apatism dan Ketidakpedulian Politik: Sebagian masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan. Sikap apatis ini umumnya lebih tinggi

---

<sup>191</sup> Taun, Taun, et al. "Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 11.2 (2023): 9-13.

<sup>192</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2-faktor-pemicu-golput> diakses pada tanggal 2 Maret 2025

di kalangan pemilih muda dan perkotaan, di mana keterlibatan dalam politik dianggap tidak menarik atau tidak relevan. Seperti polarisasi Jokowi vs Prabowo yang memicu kelelahan politik. Kampanye panjang selama 7 bulan (September 2018–April 2019) memperburuk kejenuhan. Ketidakpercayaan pada sistem juga muncul akibat 380 kasus pidana pemilu (terbanyak di Sulawesi Selatan) dan 934 pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang diadili DKPP.<sup>193</sup>

- d. Protes terhadap Kandidat yang Berkompetisi: Beberapa pemilih merasa tidak ada kandidat yang benar-benar mewakili aspirasi mereka, sehingga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes.<sup>194</sup>
- e. Penyelenggaran Pemilu yang rumit dan Melelahkan: Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden dalam satu hari. Kompleksitas ini membuat beberapa pemilih

---

<sup>193</sup> Husna, Asmaul. "Apatisme Politik Pemilih Pemula dan Paparan Drama Kasus Korupsi di Layar Kaca." *Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4.2 (2019).

<sup>194</sup> Alfarisi, Haris, Vinisa N. Aisyah, and M. I. Kom. *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

merasa kebingungan atau tidak termotivasi untuk datang ke TPS.<sup>195</sup>

### **3. Upaya untuk Menekan Angka Golput di Indonesia pada Pemilu 2019**

Upaya penekanan golput pada Pemilu 2019 dilakukan melalui pendekatan multidimensi yang mencakup perbaikan sistem administrasi, pengawasan ketat, dan peningkatan literasi politik, Upaya penekanan golput difokuskan pada tiga aspek:

- a. Perbaikan Sistem Administrasi: Upaya ini bertujuan mengatasi masalah teknis yang menghambat partisipasi pemilih. Digitalisasi DPT melalui Website resmi KPU yang menjadi langkah kritis untuk meminimalisir duplikasi dan kesalahan data. KPU.go.id memungkinkan verifikasi data pemilih secara real-time dengan mengintegrasikan basis data kependudukan dari Dukcapil (Kementerian Dalam Negeri). Pada 2019, sistem ini berhasil mengurangi kesalahan DPT hingga 60% dibanding Pemilu 2014. Selain itu, KPU memperkenalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengakomodasi 5,8 juta pemilih yang tidak tercatat di DPT, serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk 1,3 juta pemilih yang pindah domisili. Meski DPTb hanya bisa memilih pilpres,

---

<sup>195</sup> Dhanuarta, Charis Bagus, and Yana Syafriyana Hijri. "Komisi Pemilihan Umum dan fenomena abstain (golput) di Jawa Timur." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8.1 (2023).



kebijakan ini tetap mengurangi potensi golput akibat ketidaktersediaan data.<sup>196</sup>

Untuk meningkatkan aksesibilitas, KPU menyediakan template Braille di TPS bagi 349.411 pemilih disabilitas dan menambah jumlah TPS dari 546.278 (2014) menjadi 813.336 (2019). Penambahan TPS ini difokuskan di daerah terpencil seperti Papua dan Kalimantan, di mana jarak tempuh ke TPS sebelumnya mencapai puluhan kilometer. Di luar negeri, KPU membuka 130 TPS di 77 negara untuk memudahkan WNI, meski partisipasinya masih rendah (42,54%) karena hambatan biaya dan lokasi.

- b. Pengawasan Ketat oleh Bawaslu dan Kolaborasi Civil Society: Bawaslu berperan sentral dalam menindak pelanggaran yang merusak kepercayaan pemilih. Pada 2019, Bawaslu menangani 658 putusan administratif (seperti kesalahan DPT) dan 752 sengketa pemilu, dengan fokus pada daerah rawan konflik seperti Sulawesi Selatan (41 kasus pidana) dan Papua (18 putusan administratif). Sanksi tegas diberikan, termasuk pemberhentian 34 penyelenggara pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena pelanggaran etik.

---

<sup>196</sup> Amalia, Nopi, and Andi Mulyadi. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1.1 (2019): 1-9.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan Kawal Pemilu juga digalakkan untuk memerangi hoaks. MAFINDO meluncurkan platform #TurnBackHoax yang berhasil mendeteksi 1.200 konten hoaks terkait pemilu, termasuk narasi "pemilu tidak penting" dan "semua calon korup". Sementara itu, Kawal Pemilu mengembangkan sistem crowdsourcing untuk melaporkan pelanggaran di TPS, yang diakses oleh 500.000 pengguna. Upaya ini membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.<sup>197</sup>

- c. Edukasi Politik dan Transparansi Hasil: KPU dan Bawaslu menggunakan pendekatan kreatif untuk meningkatkan literasi pemilih, terutama kalangan muda. Kampanye "Ayo Nyoblos" dijalankan melalui media sosial dengan melibatkan selebritas seperti Raffi Ahmad dan Gita Savitri, yang menjangkau 10 juta pemilih milenial. Bawaslu juga mengadakan Sekolah Demokrasi di 34 provinsi, melatih 15.000 pemilih pemula tentang mekanisme pemilu dan pentingnya partisipasi.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Dila, Novita, and Ai Fitri. "Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019." *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya* 7.2 (2020): 56-84.

<sup>198</sup> Purbo, Onno W., et al. "KawalPilpres2019: a highly secured real count voting escort architecture." *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 17.6 (2019): 2834-2841.

Transparansi hasil pemilu ditingkatkan melalui aplikasi Info Pemilu, yang diunduh 2 juta pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pemilih melacak lokasi TPS, melihat profil caleg, dan memantau rekapitulasi suara secara real-time. Fitur "Cek DPT" dalam aplikasi digunakan oleh 5 juta pemilih untuk memastikan data mereka valid. Selain itu, KPU mempublikasikan hasil penghitungan suara hingga level TPS di situs resminya, mengurangi spekulasi dan hoaks terkait kecurangan.<sup>199</sup>

## E. Praktik Golput Pemilu 2024 di Indonesia

Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1955, Indonesia telah melaksanakan 13 pemilu. Selama rentang waktu tersebut, sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Pemilu 2024 dilaksanakan di 38 provinsi, termasuk penambahan empat provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, masing-masing dengan alokasi tiga kursi untuk DPR RI. Penambahan ini membuat jumlah anggota DPR bertambah dari 575 menjadi 580, serta anggota DPD dari 136 menjadi 152. Terdapat 18 partai nasional dan

---

<sup>199</sup> <https://www.kpu.go.id/berita/baca/5120/Seluruh-tahapan-penyelenggaraan-pemilu-dan-pilkada-yang-dilaksanakan-Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--selalu-transparan-dengan-memanfaatkan-sistem-informasi.-Contohnya-Sistem-Informasi-Data-Pemilih>  
diakses pada tanggal 5 Maret 2025

6 partai lokal Aceh yang berpartisipasi dalam pemilu.<sup>200</sup>

PDI-Perjuangan kembali meraih suara tertinggi pada Pemilu 2024 dengan 25.387.279 suara dan 110 kursi di DPR RI. Jumlah partai yang lolos ke Senayan berkurang satu dibandingkan Pemilu 2019, sehingga hanya ada 8 fraksi yang akan duduk di DPR RI. Hal ini disebabkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhasil masuk parlemen untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1977, dengan perolehan 5.878.777 suara atau 3,87 persen yang tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold sebesar 4 persen.<sup>201</sup>

Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menang dalam satu putaran dengan perolehan suara 96.214.691 (58,59%), yang merupakan perolehan suara tertinggi sejak pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dimulai pada tahun 2004. Urutan kedua diraih oleh Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dengan 40.971.906 suara

---

<sup>200</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>201</sup> Ibid.

(24,95%), dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD dengan 27.040.878 suara (16,47%).<sup>202</sup>

Pada pemilu 2024, kualitas daftar pemilih tetap (DPT) menunjukkan perbaikan dibandingkan Pemilu 2019, terlihat dari penurunan jumlah daftar pemilih khusus (DPK). DPK adalah daftar pemilih yang tinggal di suatu wilayah namun tidak terdaftar dalam DPT. Jumlah pemilih dari DPK berbeda antara pemilu legislatif dan pemilu presiden karena pemilih dari daftar ini hanya diizinkan untuk memilih pada rentang waktu 12.00 – 13.00, bergantung pada ketersediaan surat suara. Pada tahun 2019, terdapat 5.492.613 pemilih dari DPK untuk pemilu legislatif, sementara pada Pemilu 2024 jumlahnya berkurang menjadi 2.248.480 pemilih. Untuk pemilu presiden, pada 2019 terdapat 5.785.584 pemilih dari DPK, sedangkan pada 2024 menurun menjadi 2.253.754 pemilih.<sup>203</sup>

Selain itu, pemilih yang mengurus pindah memilih dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Untuk pemilu legislatif, jumlah pemilih dari daftar ini mencapai 1.014.627, sedangkan untuk pemilu presiden berjumlah 1.642.526. Sesuai

---

<sup>202</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>203</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

ketentuan DPTb, jika pindah memilih dilakukan ke luar provinsi, pemilih hanya diperbolehkan memilih dalam pemilu presiden. Jumlah pemilih disabilitas juga dicatat oleh KPU, mencapai 1.111.311, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya sebanyak 349.411 pemilih. Peningkatan ini menunjukkan bahwa KPU telah melakukan pencatatan yang lebih luas untuk pemilih disabilitas, termasuk identifikasi kebutuhan khusus di TPS. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh KPU adalah template braille untuk surat suara pemilu presiden dan pemilihan DPD.<sup>204</sup>

## **1. Fenomena Golput di Indonesia pada pemilu 2024**

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia merupakan salah satu pemilu terbesar yang pernah diselenggarakan dengan melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara serentak. Pemilu ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraannya.

Meskipun angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 masih cukup tinggi, fenomena golongan putih (golput) tetap menjadi isu yang signifikan. Golput, baik disengaja sebagai bentuk protes politik maupun terjadi karena faktor

---

<sup>204</sup>Ibid., 7-8

administratif dan teknis, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>205</sup>

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,48 persen dalam pemilihan presiden, sedikit menurun dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 81,97 persen. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 orang, ini berarti sekitar 18,52 persen pemilih atau sekitar 37,8 juta orang tidak memberikan suara mereka.<sup>206</sup>

Pada pemilihan legislatif, angka partisipasi pemilih mencapai 81,14 persen, meningkat dari Pemilu 2019 yang hanya mencapai 79,36 persen. Namun, masih ada puluhan juta warga yang tidak menggunakan hak pilih mereka, baik secara sengaja maupun karena kendala administratif dan logistik. Fenomena golput juga dapat dilihat dari jumlah suara tidak sah yang mencapai 4.194.536 suara atau sekitar 2,5 persen dari total suara. Suara tidak sah ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pencoblosan, kurangnya pemahaman teknis oleh

---

<sup>205</sup> Fauziah, Azkiyah Rahmita, et al. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): 51-75.

<sup>206</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Jakarta, 2024.

pemilih, atau sebagai bentuk protes politik dengan merusak atau tidak mengisi surat suara dengan benar.<sup>207</sup>

## 2. Faktor Penyebab Golput di Indonesia Pada Pemilu 2024

Fenomena golput dalam Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab golput dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan psikologis, yaitu:<sup>208</sup>

- a. Pertama, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama. Masyarakat merasa bahwa pemerintah dan partai politik tidak memenuhi harapan mereka, sehingga muncul perasaan bahwa pilihan yang ada tidak memadai. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, mengakibatkan pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Ibid, 55-100

<sup>208</sup> Fauzan, Ahmad. *Pemilihan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>209</sup> Tinambunan, Clara Pelita, Siera Syailendra, and Feny Selly Pratiwi. "Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik." *Sosio e-Kons* 16.3 (2024): 325-337.



- b. Kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi politik juga berkontribusi terhadap fenomena golput. Banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan arah masa depan negara. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan apatis dan ketidakpedulian terhadap proses pemilihan.
- c. Ketiga Kendala Teknis dalam Proses Pemilu, Beberapa pemilih menghadapi kendala administratif dalam menggunakan hak pilihnya, seperti permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), lokasi TPS yang jauh, serta kurangnya akses bagi kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Kesulitan teknis semacam ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama bagi mereka yang merasa bahwa prosesnya terlalu rumit atau tidak adil.
- d. Terakhir, Peran Media dan Penyebaran Misinformasi, Media massa dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terhadap pemilu. Sayangnya, penyebaran hoaks dan misinformasi mengenai pemilu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Kampanye negatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu juga dapat

memperburuk citra pemilu, sehingga membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi.<sup>210</sup>

Meningkatnya angka golput dalam Pemilu 2024 mencerminkan berbagai persoalan mendasar dalam sistem politik dan sosial Indonesia. Faktor utama seperti ketidakpuasan terhadap pemerintah, rendahnya literasi politik, keterbatasan pilihan kandidat, serta masalah ekonomi dan teknis menjadi penyebab utama golput. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, KPU, partai politik, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran politik, memperbaiki sistem pemilu, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan angka golput dapat ditekan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat di masa mendatang.<sup>211</sup>

### **3. Upaya untuk Menekan Angka Golput di Indonesia pada Pemilu 2024**

Fenomena golput dalam Pemilu 2024 merupakan tantangan serius bagi sistem demokrasi

---

<sup>210</sup> Maharani, Annisa. *Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik: Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Di Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>211</sup> Jayanti, Wilda Dwi, and Vianka Maulidya Putri. "Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.11 (2024): 812-823.

Indonesia. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan penelitian dalam Naskah Publikasi Anisaa, strategi utama yang diterapkan meliputi edukasi politik, peningkatan aksesibilitas pemilih, optimalisasi teknologi informasi, serta keterlibatan komunitas dan institusi terkait.<sup>212</sup>

Edukasi politik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran pemilih mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. KPU telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan menargetkan kelompok pemilih tertentu, terutama pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan dalam Pemilu 2024. Berbagai strategi digunakan, seperti sosialisasi tatap muka yang dilakukan melalui pertemuan langsung di sekolah-sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Selain itu, kampanye informasi juga dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menjangkau pemilih muda yang lebih aktif di dunia maya. Radio lokal turut dimanfaatkan untuk

---

<sup>212</sup> Amelia, Ardha, Muhammad Kamal, and Hasbuddin Khalid. "Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5.2 (2024): 479-494.

memberikan informasi kepada masyarakat luas. Mobilisasi massal juga menjadi strategi penting dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi pemuda dan tokoh masyarakat, dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu serta mengajak partisipasi aktif dalam proses demokrasi.<sup>213</sup>

Hambatan teknis dalam proses pemilu sering kali menjadi alasan utama golput, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pemilih dengan kebutuhan khusus. Upaya peningkatan aksesibilitas dilakukan dengan memperbanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah yang memiliki jumlah pemilih tinggi, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses TPS tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Pelayanan bagi penyandang disabilitas juga diperhatikan dengan menyediakan sarana khusus seperti TPS ramah disabilitas, surat suara dalam format braille, dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, perpanjangan waktu pemungutan suara di beberapa lokasi diterapkan untuk memastikan bahwa semua pemilih memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan suara mereka.<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> Aini, Anisa Nur, Nuria Siswi Enggraini, and M. SH. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

<sup>214</sup> Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye gunakan hak suara dan jangan golput pada Pemilu 2024 untuk generasi

Kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalkan angka golput. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang memungkinkan pemilih untuk mengecek status keikutsertaan mereka secara daring serta memperbarui data kependudukan sebelum hari pemilihan. Selain itu, penyebaran informasi pemilu secara digital melalui website resmi KPU dan aplikasi mobile memudahkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai kandidat, jadwal pemilu, dan prosedur pemungutan suara. Transparansi dalam perhitungan suara juga ditingkatkan melalui sistem digitalisasi yang memungkinkan publik untuk memantau hasil pemilu secara *real-time*.<sup>215</sup>

Salah satu faktor yang mendorong golput adalah ketidakpercayaan terhadap sistem politik akibat praktik politik uang dan kampanye hitam. Untuk mengatasi masalah ini, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan berbagai strategi, seperti meningkatkan pengawasan terhadap kampanye dengan melibatkan masyarakat dan media dalam memantau pelanggaran pemilu. Edukasi

---

muda." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.

<sup>215</sup> Huda, Dimiyati, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih. "Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia." *Journal of Development Research* 7.2 (2023): 272-282.

tentang bahaya politik uang juga digencarkan melalui sosialisasi di berbagai daerah agar masyarakat tidak tergiur dengan praktik transaksional dalam pemilu. Selain itu, sanksi tegas diberikan kepada kandidat dan partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu untuk memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.<sup>216</sup>

Upaya untuk menekan angka golput dalam Pemilu 2024 telah dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk edukasi politik, peningkatan aksesibilitas, pemanfaatan teknologi, keterlibatan komunitas, dan pencegahan politik uang. Keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, KPU, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga individu pemilih, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan tingkat partisipasi yang optimal dan demokrasi dapat terus berkembang di Indonesia.

## **F. Perbandingan Praktik Golput antara Pemilu Tahun 2014, 2019 dan Pemilu Tahun 2024**

Tingkat Partisipasi Pemilih di 3 periode terakhir bervariasi, Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih tercatat mencapai 75,11% untuk pemilu legislatif dan 69,58% untuk pemilu presiden. Angka golput, atau mereka

---

<sup>216</sup> Mulyadi, Dedi, et al. "Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1.1 (2024): 92-112.

yang tidak menggunakan hak pilih, sekitar 25%. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu berjalan dengan baik, masih ada sebagian besar masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Dalam konteks ini, golput menjadi indikator tantangan demokrasi di Indonesia.

Berbeda dengan Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan signifikan, mencapai 81,97% untuk pemilu presiden dan 81,69% untuk pemilu legislatif. Meskipun demikian, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tetap cukup tinggi, yaitu sekitar 18,03% atau sekitar 34,7 juta orang. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam menarik minat pemilih, tetapi golput tetap menjadi perhatian.

Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih sedikit menurun menjadi 81,48% untuk pemilu presiden dan 81,14% untuk pemilu legislatif. Meskipun angka ini masih tergolong tinggi, jumlah golput meningkat menjadi 18,52%, atau sekitar 37,8 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi, tantangan dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat masih ada.

Selanjutnya perbandingan golput dari aspek jenis Golput, Fenomena golput pada Pemilu 2014 dikelompokkan menjadi dua kategori: golput teknis dan golput ideologis. Golput teknis terjadi akibat kendala administratif, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau kesulitan dalam mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara

itu, golput ideologis merupakan keputusan sadar pemilih untuk tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau pilihan kandidat yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka.

Pada Pemilu 2019, golput juga terdiri dari dua bentuk, yakni golput administratif dan golput ideologis. Banyak pemilih yang datang ke TPS tetapi tidak memberikan suara sah, baik karena kesalahan teknis atau sebagai protes. Di sini, golput tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kandidat, tetapi juga frustrasi terhadap sistem pemilu yang dianggap rumit dan tidak adil.

Dalam Pemilu 2024, golput tetap muncul dalam bentuk yang serupa, dengan penekanan pada golput ideologis yang terus meningkat. Banyak pemilih merasa tidak ada kandidat yang sesuai dengan harapan mereka, sehingga memilih untuk tidak memberikan suara. Selain itu, masalah teknis dan administratif juga mempengaruhi keputusan pemilih, menciptakan tantangan yang berkelanjutan bagi sistem pemilu.

Faktor Penyebab Golput pada pemilu 2014, 2019 dan 2024 berbeda beda, berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka golput dalam setiap pemilu. Pada Pemilu 2014, kurangnya sosialisasi mengenai pemilu dan calon legislatif menjadi faktor utama. Banyak pemilih yang merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk membuat pilihan yang rasional. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, di mana banyak pemilih yang harus memilih antara berpartisipasi dalam pemilu atau melanjutkan aktivitas ekonomi mereka.



Pada Pemilu 2019, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan partai politik semakin mendalam. Banyak masyarakat merasa bahwa politisi tidak memenuhi janji mereka, yang mengakibatkan apatisme. Permasalahan administratif juga menjadi perhatian, seperti ketidakakuratan dalam daftar pemilih yang membuat banyak orang tidak dapat memberikan suara. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah semakin memperburuk situasi.

Di Pemilu 2024, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah masih menjadi penyebab utama golput. Masyarakat merasa bahwa partai politik tidak memenuhi harapan mereka, dan kurangnya sosialisasi serta edukasi politik menyebabkan banyak orang tidak memahami pentingnya hak suara mereka. Kendala teknis, seperti lokasi TPS yang jauh dan masalah akses bagi penyandang disabilitas, juga turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih.

Dalam upaya mengatasi golput, KPU melakukan berbagai strategi. Pada Pemilu 2014, KPU melaksanakan sosialisasi secara masif, meningkatkan jumlah TPS, dan bekerja sama dengan media untuk menyebarkan informasi penting. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai proses pemilu dan pentingnya menggunakan hak suara.

Di Pemilu 2019, KPU mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan fokus pada digitalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga meningkatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan proses pemilu berlangsung transparan. Edukasi politik

menjadi fokus utama, di mana KPU bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk menjangkau pemilih di seluruh Indonesia.

Pada Pemilu 2024, upaya yang dilakukan semakin terintegrasi. KPU melakukan edukasi politik yang lebih intensif, terutama kepada pemilih pemula. Peningkatan aksesibilitas juga menjadi prioritas, dengan menambah jumlah TPS di daerah terpencil dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi untuk memeriksa status pemilih, menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi.

Sama halnya dengan Hasil dan Dampak Pemilu yang berbeda beda, hasil dari Pemilu 2014 menunjukkan bahwa tingkat golput menjadi tantangan bagi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Meskipun pemilu berlangsung dengan baik, angka golput yang tinggi mencerminkan masalah mendasar dalam kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Di Pemilu 2019, meskipun ada peningkatan partisipasi, golput tetap menjadi isu yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan yang ada.

Pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa peningkatan, angka golput yang masih tinggi mencerminkan tantangan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih masih perlu ditingkatkan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

**TABEL 3.1**  
**PERBANDINGAN GOLPUT**  
**PADA PEMILU 2014, 2019, DAN 2024**

| <b>Aspek</b>           | <b>Pemilu 2014</b>   | <b>Pemilu 2019</b>  | <b>Pemilu 2024</b>  |
|------------------------|--|---|---|
| Tingkat Partisipasi    | 75,11% (Legislatif)<br>69,58% (Presiden)                                       | 81,69% (Legislatif)<br>81,97% (Presiden)  | 81,14% (Legislatif)<br>81,48% (Presiden)  |
| Tingkat Golput         | ±25%   | ±18,03% (34,7 juta orang)   | ±18,52% (37,8 juta orang)   |
| Jenis Golput           | Golput teknis & ideologis  | Golput administratif & ideologis  | Golput administratif & ideologis (meningkat)  |
| Faktor Penyebab Golput | Kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi, kendala administratif                   | Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, masalah daftar pemilih, kekecewaan politik          | Ketidakpuasan terhadap pemerintah, kurangnya edukasi politik, kendala aksesibilitas                     |
| Upaya KPU              | Sosialisasi masif, peningkatan jumlah TPS, kerja sama dengan media             | Digitalisasi DPT, peningkatan pengawasan Bawaslu, edukasi politik oleh berbagai organisas | Edukasi politik intensif (pemilih pemula), peningkatan aksesibilitas, pemanfaatan teknologi informasi   |
| Dampak Golput          | Tantangan bagi legitimasi pemerintahan, rendahnya kepercayaan terhadap politik | Indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan politik                                | Golput tetap tinggi, menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam membangun kepercayaan terhadap demokrasi |

Sumber: Statistik Pemilu 2014-2024, Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, perbandingan praktik golput antara Pemilu 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam tingkat partisipasi, fenomena golput tetap menjadi tantangan signifikan dalam

sistem demokrasi Indonesia. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap pemerintahan, kendala administratif, dan kurangnya sosialisasi terus mempengaruhi keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan efektif dari semua pihak untuk meningkatkan kepercayaan pemilih dan menekan angka golput di masa depan, agar partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat dan demokrasi di Indonesia semakin kuat.

## BAB IV

### KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA

#### A. Makna Dan Relevansi Golput

Golput, singkatan dari "golongan putih," merupakan fenomena sosial-politik yang merujuk pada individu atau kelompok yang memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan umum. Istilah ini tidak hanya mencakup tindakan untuk tidak memilih, tetapi juga mencerminkan sikap kritis terhadap sistem politik yang ada. Dalam konteks ini, golput dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi politik yang dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat, serta sebagai bentuk pernyataan politik yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia.<sup>217</sup>

Penggunaan istilah golput pertama kali muncul pada Pemilu tahun 1971, sebagai reaksi terhadap Undang-Undang Pemilu yang dianggap mempersempit ruang demokrasi. Aktivis pro-demokrasi, seperti Imam Waluyo dan Arief Budiman, memainkan peran penting dalam mempopulerkan istilah ini sebagai simbol penolakan terhadap sistem politik yang otoriter pada masa Orde Baru. Golput bukan hanya sekadar ketidakaktifan dalam berpolitik, tetapi merupakan

---

<sup>217</sup> Shofa, Ghaitza Zahira, Ristania Tri Widiarti, and Rochmawati Ing Lestari. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote: Ghaitza Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti2, Rochmawati Ing Lestari, Nur Hasanah." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2.1 (2024): 112-120.

tindakan sadar yang mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses politik yang ada.<sup>218</sup>

Golput dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan motivasinya. Pertama, golput karena tidak sengaja, di mana individu dalam kelompok ini tidak memberikan suara karena kelalaian, seperti lupa atau tidak memenuhi syarat administratif yang diperlukan. Kedua, golput karena sikap apatis, di mana individu merasa bahwa pemilu tidak berhubungan langsung dengan kepentingan pribadi mereka. Apatisme ini sering kali muncul dari rasa putus asa terhadap sistem politik yang dianggap tidak memberikan alternatif yang memadai. Ketiga, golput secara sadar, yaitu bentuk protes yang lebih aktif, di mana individu secara sadar memilih untuk tidak memberikan suara sebagai bentuk perlawanan terhadap calon pemimpin atau sistem politik yang ada.<sup>219</sup> Tindakan ini mencerminkan kesadaran politik dan kritik terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat.

## **B. Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 Menurut Konstitusi**

Golput dalam tiga pemilu terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi

---

<sup>218</sup> Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).

<sup>219</sup> Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. "Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput di Jember." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18.2 (2020): 199-210.

tingkat partisipasi pemilih. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih masih relatif rendah, yaitu 75,11% untuk pemilu legislatif dan 69,58% untuk pemilu presiden, dengan angka golput sekitar 25%. Pada Pemilu 2019, terjadi peningkatan dalam partisipasi hingga 81,97% untuk pemilu presiden dan 81,69% untuk pemilu legislatif, menurunkan angka golput menjadi 18,03%. Namun, Pemilu 2024 menunjukkan sedikit penurunan partisipasi menjadi 81,48% dalam pemilu presiden dan 81,14% dalam pemilu legislatif, dengan angka golput kembali meningkat menjadi 18,52%.<sup>220</sup>

Dari segi jenis golput, Pemilu 2014 didominasi oleh golput teknis akibat kendala administratif, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta golput ideologis yang muncul sebagai bentuk protes terhadap sistem politik. Pada Pemilu 2019, golput administratif masih terjadi, tetapi golput ideologis semakin meningkat akibat ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu dan pilihan kandidat yang ada. Sementara itu, pada Pemilu 2024, golput ideologis semakin dominan, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat yang merasa tidak memiliki pilihan politik yang sesuai dengan harapan mereka.<sup>221</sup>

Faktor penyebab golput dalam tiga pemilu tersebut bervariasi. Pada Pemilu 2014, kurangnya sosialisasi dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih. Pemilu 2019 diwarnai dengan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan partai politik, serta masih adanya permasalahan administratif terkait daftar

---

<sup>220</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2014-2024. Jakarta

<sup>221</sup> Ibid.

pemilih. Pada Pemilu 2024, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor dominan, sementara kendala teknis seperti aksesibilitas ke TPS masih menjadi tantangan bagi sebagian pemilih.<sup>222</sup>

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan partisipasi dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019, fenomena golput tetap menjadi tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia. Faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, kendala administratif, dan kurangnya sosialisasi terus mempengaruhi keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, hak untuk tidak memilih merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Konstitusi Indonesia mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun juga memberikan ruang bagi individu untuk tidak terlibat jika mereka merasa tidak ada pilihan yang layak. Dalam konteks ini, golput bisa dilihat sebagai ekspresi dari kebebasan individu untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap proses demokrasi yang ada.<sup>223</sup>

Fenomena golput memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemilu dan pemerintahan. Tingginya angka golput dapat menandakan adanya krisis kepercayaan dalam sistem politik, yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilihan. Sebuah pemerintahan yang terpilih dengan tingkat partisipasi

---

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3612-3623.



pemilih yang rendah mungkin menghadapi tantangan dalam mewakili kepentingan rakyat secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami golput tidak hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai indikator kesehatan demokrasi di Indonesia.<sup>224</sup>

Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi yang membawa perubahan positif dalam sistem politik, fenomena golput tetap ada. Data menunjukkan bahwa angka golput dalam pemilu pasca-reformasi masih signifikan, dengan alasan yang tidak jauh berbeda dari era sebelumnya, seperti ketidakpuasan terhadap sistem politik dan pilihan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Maka dari itu meskipun hukum golput tidak lagi bersifat wajib, tindakan tersebut tetap sah selama masyarakat merasa bahwa demokrasi yang ada tidak mencerminkan aspirasi mereka.<sup>225</sup> Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang golput sebagai fenomena sosial-politik di Indonesia menjadi penting untuk dianalisis, terutama dalam konteks upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Golput bukan sekadar fenomena negatif, tetapi mencerminkan dinamika dalam hubungan antara masyarakat

---

<sup>224</sup> Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1.1 (2018): 1-15.

<sup>225</sup> Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20.3 (2022): 367-381.

dan sistem politik. Memahami makna dan relevansi golput dalam konteks demokrasi Indonesia penting untuk merumuskan strategi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat sistem demokrasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu, memberikan pendidikan politik yang lebih baik, dan menciptakan sistem politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat membantu mengurangi angka golput di masa depan.

### **1. Hak Memilih dalam Konstitusi Indonesia**

Hak memilih dan dipilih diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, meskipun jumlah pemilih berperan penting dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia, hak masyarakat untuk tidak memilih juga harus diakui dan dihormati. Pendekatan penafsiran *argumentum a contrario* bisa digunakan untuk memahami hak ini. Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>226</sup> Dengan menggunakan penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa jika memilih dan dipilih merupakan hak, maka tidak memilih juga merupakan hak yang sah.

---

<sup>226</sup> Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.

Penafsiran argumentum *a contrario* adalah metode untuk memahami undang-undang dimana jika suatu pernyataan berlaku, maka pernyataan yang berlawanan juga harus dianggap berlaku. Dalam konteks ini, jika memilih diartikan sebagai hak asasi manusia, maka tidak memilih juga dapat dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai “bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.” Hak ini diberikan kepada pemilih untuk digunakan atau tidak, berbeda dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>227</sup>

Sebagai hak konstitusional, hak pilih dapat ditemukan dalam berbagai pasal dalam UUD 1945. Misalnya, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, sementara Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu. Selain itu, Pasal 22C menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih melalui pemilu. Pasal-pasal ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap hak untuk memilih, dan penjaminan

---

<sup>227</sup> Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).

hak pilih sangat penting agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik dan nyaman.<sup>228</sup>

UUD 1945 juga mengatur pelaksanaan pemilu, yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal ini menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan enam asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan saat pemungutan suara, sedangkan asas jujur dan adil diterapkan pada penghitungan suara. Asas-asas ini dirancang untuk menjamin bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan cita-cita demokrasi.

Pelaksanaan pemilu juga merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini ditegaskan dalam berbagai Tap MPR, seperti TAP MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/1978, ditegaskan bahwa pemilu merupakan

---

<sup>228</sup> Gimón, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila.<sup>229</sup>

Arti penting pemilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konteks demokrasi tidak terlepas dari gagasan awal demokrasi yang mengandaikan kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi juga disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.<sup>230</sup> Dalam arti ini, kekuasaan diakui berasal dari rakyat, sehingga rakyat memiliki peran utama dalam menentukan dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan didedikasikan untuk kepentingan seluruh rakyat, dan negara yang ideal diharapkan melibatkan masyarakat secara luas.<sup>231</sup> Keempat ciri ini mencerminkan kedaulatan rakyat, yaitu penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, dilakukan oleh rakyat itu sendiri, dan terus melibatkan partisipasi sebanyak mungkin dari rakyat dalam mengelola negara.

Dengan demikian, pengakuan terhadap hak politik dalam konstitusi Indonesia tidak hanya mencerminkan

---

<sup>229</sup> Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6.1 (2020): 51-71.

<sup>230</sup> Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).

<sup>231</sup> Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11.1 (2020): 13-48.

komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menggambarkan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam memilih atau tidak memilih. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hak untuk tidak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab dalam setiap pemilihan umum.

## **2. Golput dalam Konteks Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Salah satu perumus utama Demokrasi Pancasila, Prof. Notonagoro, menekankan bahwa demokrasi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, yakni demokrasi yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.<sup>232</sup>

Sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, yang kedaulatannya

---

<sup>232</sup> Amri, Sri Rahayu. "Pancasila sebagai sistem etika." *Voice of Midwifery* 8.01 (2018): 760-768.

dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan sistem perwakilan. Dalam praktik ketatanegaraan, pemilu merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan sila ini. Pemilu memungkinkan rakyat menyalurkan suara dan kehendaknya dalam memilih wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dan menyusun kebijakan atas nama mereka. Dengan demikian, hak memilih adalah bagian dari pelaksanaan sila keempat secara langsung.<sup>233</sup>

Namun, ketika sebagian warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput), maka hal ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, khususnya dalam beberapa dimensi berikut:

a. Golput dan Konsep Kerakyatan

Kerakyatan dalam Pancasila tidak hanya berarti bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga bahwa rakyat secara aktif terlibat dalam menentukan arah negara. Golput, terutama jika terjadi secara massal dan disengaja, menunjukkan adanya keterputusan antara rakyat dan mekanisme representasi politik. Ketika rakyat menolak untuk memilih, maka prinsip “kerakyatan” menjadi lemah, karena kehendak rakyat tidak tersalurkan secara formal.

Golput dalam konteks ini menunjukkan krisis legitimasi demokratis, karena pemerintah yang

---

<sup>233</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

terpilih tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak mayoritas. Ini tentu bertentangan dengan semangat sila keempat yang menghendaki keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas rakyat yang bijaksana dan aktif.

b. Golput dan Hikmat Kebijaksanaan

Sila keempat mengandung prinsip “hikmat kebijaksanaan”, yang mengandung makna bahwa dalam berdemokrasi, setiap warga dituntut untuk berpikir jernih, mempertimbangkan secara rasional dan etis sebelum mengambil keputusan. Memilih adalah salah satu bentuk keputusan publik yang harus dilandasi pertimbangan kebijaksanaan.

Sikap golput yang muncul karena apatisisme atau ketidakpedulian politik menunjukkan absennya proses berpikir kritis dan kebijaksanaan itu. Sebaliknya, jika golput dilakukan secara sadar sebagai kritik terhadap sistem atau kandidat yang dianggap tidak layak, maka walaupun diperbolehkan secara hukum, hal itu tetap perlu diarahkan menjadi partisipasi politik yang konstruktif. Dalam Demokrasi Pancasila, golput bukanlah solusi utama, melainkan peringatan bahwa perlu ada pembenahan sistem politik agar hikmat kebijaksanaan warga dapat tersalurkan.

c. Golput dan Permusyawaratan

Permusyawaratan adalah sarana untuk mencapai mufakat dan menyatukan perbedaan



secara damai. Dalam sistem demokrasi modern, permusyawaratan itu dimediasi melalui lembaga perwakilan yang dibentuk lewat pemilu. Jika rakyat tidak berpartisipasi dalam pemilu, maka proses permusyawaratan itu kehilangan legitimasi dan representasi.

Golput dalam konteks ini dapat melemahkan kualitas permusyawaratan di parlemen atau lembaga politik lainnya. Ketika wakil-wakil rakyat dipilih dengan tingkat partisipasi rendah, maka keputusan mereka akan kehilangan kekuatan moral sebagai hasil dari musyawarah yang mencerminkan kehendak rakyat secara luas.

#### d. Golput dan Perwakilan

Sistem perwakilan mengandaikan bahwa rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk berbicara dan bertindak atas nama mereka. Pemilu adalah mekanisme untuk memilih siapa yang layak memegang mandat itu. Dalam Demokrasi Pancasila, partisipasi dalam pemilu menjadi bentuk keterlibatan dalam memilih perwakilan yang menjalankan musyawarah dan kebijakan negara.

Golput berarti menolak memberikan mandat. Jika ini terjadi dalam jumlah besar, maka sistem perwakilan tidak lagi efektif. Wakil rakyat yang terpilih tidak lagi mewakili mayoritas kehendak rakyat, melainkan hanya segelintir pemilih aktif. Ini menciptakan jurang antara rakyat dan

wakilnya, yang secara langsung bertentangan dengan sila keempat.

e. Golput dan Etika Tanggung Jawab Warga Negara

Sila keempat tidak hanya menuntut hak partisipasi, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara. Memilih dalam pemilu adalah salah satu bentuk tanggung jawab itu. Demokrasi Pancasila tidak menghendaki demokrasi pasif, melainkan demokrasi partisipatoris yang aktif dan bertanggung jawab. Golput apatis, dengan demikian, merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab itu.

Golput seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menarik diri dari tanggung jawab sosial-politik. Justru, dalam semangat Pancasila, ketidakpuasan harus disalurkan melalui saluran yang etis, seperti pemilihan calon alternatif, pengawasan pemilu, atau keterlibatan dalam organisasi sipil. Demokrasi Pancasila menghormati kebebasan, tetapi mengutamakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa.

Fenomena golput dalam konteks sila keempat Demokrasi Pancasila menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara idealitas demokrasi partisipatif dan realitas politik elektoral. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang golput, tindakan ini bertentangan dengan semangat sila keempat yang menuntut kerakyatan aktif, musyawarah yang representatif, dan

tanggung jawab warga negara yang bijaksana. Oleh karena itu, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, agar sila keempat tidak sekadar menjadi rumusan ideal, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan bernegara.

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, teori kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama. Rakyat diposisikan sebagai pemilik sah kekuasaan negara yang menyalurkan kedaulatannya melalui lembaga-lembaga perwakilan dan pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi dalam pemilu bukan sekadar hak, melainkan juga perwujudan tanggung jawab konstitusional dan moral warga negara. Golput (golongan putih), sebagai sikap untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan etis tidaknya tindakan tersebut dalam konteks Demokrasi Pancasila..

Berikut adalah klasifikasi golput berdasarkan pendekatan hukum dan moral menurut nilai-nilai Demokrasi Pancasila:

Pertama Golput Administratif, Golput administratif menurut Demokrasi Pancasila diperbolehkan, karena terjadi bukan atas kehendak pribadi melainkan akibat kendala teknis seperti tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak memperoleh surat undangan, atau terkendala jarak geografis. Dalam kasus ini, tanggung jawab justru berada pada negara sebagai penyelenggara pemilu untuk menjamin aksesibilitas dan keadilan elektoral bagi seluruh warga negara. Karena tidak mencerminkan penolakan

terhadap sistem, golput administratif tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Yang Kedua Golput karena Intimidasi atau Tekanan, Golput yang terjadi akibat tekanan, intimidasi, atau ancaman terhadap keselamatan pribadi juga diperbolehkan dalam sistem Demokrasi Pancasila. Sebab, prinsip utama demokrasi adalah kebebasan memilih. Dalam situasi di mana kebebasan itu terampas, maka tindakan untuk tidak memilih merupakan bentuk perlindungan diri yang sah. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin iklim politik yang aman dan bebas dari paksaan. Golput dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap semangat demokrasi.

Selanjutnya yang Ketiga Golput apatis menurut Demokrasi Pancasila tidak diperbolehkan secara moral, meskipun tidak dilarang secara hukum. Ketika seseorang memilih untuk tidak berpartisipasi karena sikap acuh tak acuh terhadap politik, maka hal ini bertentangan dengan nilai partisipasi aktif yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila. Pemilu adalah sarana untuk menyalurkan kehendak rakyat secara kolektif, dan tindakan golput apatis justru melemahkan legitimasi pemerintahan serta mengabaikan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, secara normatif, golput apatis dinilai negatif.

Keempat Golput ideologis memiliki kedudukan yang diperbolehkan secara hukum, namun kurang sejalan secara normatif dengan Demokrasi Pancasila. Tindakan ini umumnya dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sistem

politik yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi rakyat. Meskipun kebebasan menyatakan pendapat dijamin, Demokrasi Pancasila mendorong rakyat untuk memperbaiki sistem dari dalam melalui mekanisme yang sah, bukan menarik diri dari proses politik. Oleh karena itu, golput ideologis merupakan ekspresi sah dalam konteks hak sipil, tetapi secara nilai tidak mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong yang menjadi landasan demokrasi Indonesia.

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila yang berlandaskan teori kedaulatan rakyat, fenomena golput harus ditelaah tidak secara hitam putih, melainkan berdasarkan motif dan kondisi yang melatarbelakanginya. Golput administratif dan karena intimidasi dapat dibenarkan, sementara golput apatis dan ideologis mengandung problematika etis yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan politik dan kualitas pemilu menjadi kunci agar partisipasi rakyat dalam pemilu tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga bermakna secara substantif.

### **C. Implikasi Hukum dan Politik terhadap Fenomena Golput**

Pengakuan golput sebagai hak konstitusional memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Secara hukum, pengakuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk tidak memilih, yang sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini dapat memperkuat posisi individu dalam sistem demokrasi, di mana

pilihan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu bukanlah tindakan yang dapat dipandang negatif, melainkan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.<sup>234</sup>

Dalam perspektif politik, pengakuan ini dapat mendorong pemerintah dan partai politik untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, mengingat bahwa tingginya angka golput sering kali mencerminkan ketidakpuasan terhadap calon atau sistem yang ada. Dengan demikian, pengakuan golput sebagai hak konstitusional dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong perbaikan dalam proses demokrasi.<sup>235</sup>

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih tanpa mengesampingkan hak untuk tidak memilih, strategi yang dapat diterapkan meliputi pendidikan politik yang lebih intensif dan inklusif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta dampak dari keputusan untuk memilih atau tidak memilih. Selain itu, penyelenggara pemilu harus menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pemilih, seperti menyediakan akses yang lebih baik ke tempat pemungutan suara dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan transparan dan adil.

Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepercayaan terhadap sistem pemilu,

---

<sup>234</sup> Alwi, Dzulkifli. *Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.

<sup>235</sup> Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.1 (2019): 17-38.

yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi tanpa mengabaikan hak individu untuk tidak memilih. Pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat membutuhkan sinergitas untuk saling berkolaborasi dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan responsif. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih baik, yang tidak hanya mendorong partisipasi tetapi juga menghormati hak untuk tidak memilih.

Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa semua proses pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai calon dan isu-isu yang dihadapi. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk aktif terlibat dalam diskusi politik dan menyuarakan pendapat mereka, baik melalui pemilihan maupun melalui bentuk-bentuk partisipasi lainnya. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan dapat tercipta sistem demokrasi yang lebih kuat dan lebih menghargai hak-hak individu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, kandidat yang tersedia, serta kondisi sosial-ekonomi yang melingkupi setiap periode pemilu. Pada Pemilu 2014, angka golput mencapai sekitar 25%, sebagian besar disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap partai politik dan kandidat yang bertarung. Pemilu 2019 mengalami sedikit peningkatan partisipasi dengan angka golput yang lebih rendah, sekitar 20%, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran politik dan kampanye yang lebih masif. Namun, pada Pemilu 2024, angka golput kembali meningkat menjadi sekitar 20,18%, dipicu oleh berbagai faktor seperti kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, keterbatasan edukasi politik, serta pengaruh media sosial yang membentuk opini publik secara lebih cepat tetapi kurang mendalam.

Fenomena golput dalam tiga pemilu ini mengindikasikan adanya pola partisipasi politik masyarakat yang dinamis, di mana golput bukan sekadar bentuk apatisisme politik, tetapi juga menjadi alat protes terhadap sistem yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Meskipun golput



adalah hak politik yang dijamin dalam konstitusi, peningkatan angka golput dapat menjadi sinyal bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih perlu diperbaiki agar lebih representatif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, baik melalui reformasi sistem pemilu, peningkatan transparansi politik, maupun pendidikan politik yang lebih luas.

2. Golput dalam konteks Demokrasi Pancasila merupakan bentuk pelemahan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri. Dalam Demokrasi Pancasila, tindakan tidak memilih atau golput merupakan bagian dari ekspresi hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E dan Pasal 28I UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, bersikap, dan menentukan pilihan politiknya, termasuk memilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Namun, dalam perspektif Demokrasi Pancasila yang menekankan kedaulatan rakyat, partisipasi aktif, permusyawaratan, dan tanggung jawab moral warga negara, fenomena golput tidak dapat dinilai secara seragam. Perbedaan jenis golput menghasilkan perbedaan konsekuensi hukum dan etika politik. \*Golput administratif\* dan \*golput karena intimidasi\* dapat dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan nilai Demokrasi

Pancasila, karena disebabkan oleh kendala teknis atau situasi yang mengancam kebebasan pribadi. Sebaliknya, golput apatis dan golput ideologis, meskipun sah secara hukum, mengandung problematika normatif karena bertentangan dengan semangat partisipasi aktif dan musyawarah yang menjadi inti sila keempat Pancasila.

Dengan demikian, golput tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional selama dilakukan dalam batas hukum yang berlaku. Namun, secara nilai dalam Demokrasi Pancasila, golput apatis dan ideologis dinilai melemahkan kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan pendidikan politik, memperbaiki kualitas pemilu, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan agar warga negara tidak hanya menggunakan haknya, tetapi juga menjalankan kewajiban konstitusionalnya secara bertanggung jawab.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses pemilu untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem politik. Salah satu caranya adalah dengan memperketat regulasi terhadap praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Sosialisasi pemilu harus diperluas dan lebih aktif menjangkau daerah-daerah terpencil serta kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam politik, seperti kelompok disabilitas, pekerja informal, dan masyarakat adat.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

KPU harus meningkatkan efektivitas sosialisasi pemilu dengan pendekatan yang lebih interaktif, terutama melalui media sosial dan platform digital yang lebih banyak digunakan oleh generasi muda. Bawaslu harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran pemilu, terutama yang berkaitan dengan intimidasi politik, politik uang, serta penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam pemilu. KPU perlu mengevaluasi kembali sistem debat kandidat agar lebih substantif dan edukatif bagi pemilih, sehingga masyarakat dapat menilai calon berdasarkan program dan visi-misi mereka secara lebih objektif.

3. Partai Politik dan Kandidat

Partai politik harus lebih berupaya mendekati diri dengan masyarakat dan tidak hanya aktif saat musim kampanye. Konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menekan angka golput. Kandidat yang maju

dalam pemilu harus lebih transparan dalam menyampaikan program dan rekam jeaknya. Kampanye yang berbasis program nyata dan bukan sekadar janji politik akan membuat pemilih lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya.

Partai politik juga harus lebih selektif dalam mengusung calon, memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang baik agar pemilih tidak merasa bahwa semua pilihan yang tersedia tidak layak untuk dipilih.

#### 4. Masyarakat dan Pemilih

Pemilih harus lebih aktif dalam mencari informasi terkait pemilu, kandidat, dan kebijakan yang akan diambil oleh calon terpilih. Mengandalkan informasi dari satu sumber atau hanya mengikuti tren media sosial dapat menyebabkan keputusan yang kurang objektif. Kesadaran politik perlu ditingkatkan, terutama dengan menyadari bahwa keputusan untuk tidak memilih (golput) juga memiliki konsekuensi terhadap kualitas pemerintahan yang akan terbentuk. Oleh karena itu, pemilih harus mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk golput.

Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan turut serta dalam diskusi

politik yang sehat serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu.

5. Akademisi dan Peneliti

Kajian akademik tentang fenomena golput perlu terus dikembangkan, terutama dengan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologi politik. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada cara-cara efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik melalui pendekatan teknologi, pendidikan politik, maupun reformasi kebijakan pemilu. Akademisi juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, baik melalui seminar, diskusi publik, maupun media sosial, agar partisipasi pemilih dalam pemilu semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. "*Politik Hukum Pemilu.*" (2023): 1-28
- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. Sistem Pemerintahan Indonesia. Deepublish, 2018.
- Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 167-168
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II." (2006).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. ISBN: 2303-2448.
- Budiatri, Aisah Putri, and Herlambang Wiratraman, eds. Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Lp3es, 2022.
- Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Djoko Sumanto & Amelia Haryanti. (2021). Pendidikan Politik. Banten: Unpampress, hal 85.
- DR Dahlan Sinaga SH, M. H. Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusamedia, 2018.

- Dugis, Visensio, ed. *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press, 2018.
- Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Prinsip umum demokrasi dan pemilu*. Ilham Yuli Isdiyanto, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010
- Judijanto, Loso, et al. *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Jufri, Muwaffiq. "Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14.1 (2017): 1-14.
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.
- Khaeruman, Badri, and Muchtar Ghazali. "4 pilar wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika." (2020).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jakarta, 2024.
- Mahmudah, Husnatul, et al. *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Muhadam labolo & Teguh Ilham. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: RajaGrafindo, hal 45.
- Nurhasim, Moch. (Editor). (2014). Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and I. Ibrohim. Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia, 2020.
- Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenada Media, 2021.
- Samosir, Osbin. Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia. UKI Press, 2022.
- Sihombing, E. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 12.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 22
- Strong, C. F. Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk. Nusamedia, 2019.
- Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati. Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Penerbit Widina, 2022.



- Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Suparto, D. (2021). *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, hal 65
- Suryana, Cecep, et al. "Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki." (2022).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Tengku Irmayani, *Partisipasi Milenial dalam Dinamika Politik* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal 95.
- Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Tuhuteru, Laros. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. CV. Azka Pustaka, 2022
- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Yulianto, Otto Adi, Subono, Nur Iman, & Asgart, Sofian M. (2022). *Demokrasi tanpa representasi*. Jakarta: Demos, hal 76

## **Jurnal**

- Abdatama, M. Rafda. *Hubungan Religiusitas Dan Tindakan Tidak Memilih (GOLPUT) Pada Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Agama Islam (UII)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta*, Edisi 61, Juli 2019, hlm. 43.
- Aini, Anisa Nur, Nuria Siswi Enggraini, and M. SH. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi*

- Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Madda. "Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16.1 (2022): 1-20.
- Alfarisi, H., Aisyah, V. N., & Kom, M. I. (2022). *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)* hal 45.
- Alfarisi, Haris, Vinisa N. Aisyah, and M. I. Kom. *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.*
- Almahdali, Humairah, et al. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.*
- Alwi, Dzulkifli. *HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.*
- Amalia, Nopi, and Andi Mulyadi. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1.1 (2019): 1-9.
- Amelia, Ardha, Muhammad Kamal, and Hasbuddin Khalid. "Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5.2 (2024): 479-494.
- Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legalitas* 13.01 (2020): 1-15.
- Amrizal, Dedi, and Ahmad Hidayah Dalimunthe. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.*

- Anugerah, Boy, and Jacob Junian Endiartia. "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat." *Jurnal Lemhannas RI* 6.2 (2018): 23-41.
- Arianto, Bismar. "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 51-60.
- Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 16-24
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 128-145.
- Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20.2 (2020): 81-94.
- Bistara, Raha. "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim." *Politea* 4.1 (2021): 95.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1.7 (2022): 288-301.
- Chairunisah, Nabilah, and Gunawan Santoso. "Karakter Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang

Abad ke-21 di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.5 (2023): 452-475.

Chika Irmala Deria, Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* Vol. 1, No. 4 (Desember 2021): 1-13.

Dekki, Umamur Rais, and Setyawan Dody. "KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik." (2022).

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 25.

Dewi, Lintang Yunisha, et al. "Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8.1 (2022).

Dhanuarta, Charis Bagus, and Yana Syafriyana Hijri. "Komisi Pemilihan Umum dan fenomena abstain (golput) di Jawa Timur." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8.1 (2023).

Dila, Novita, and Ai Fitri. "Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019." *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya* 7.2 (2020): 56-84.

Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.1 (2019): 17-38.

Evelina, L. W., & Angeline, M. (2019). Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014. *Humaniora*, 6(1), 97-105.

Erlina, Fatni. "Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi." *Kosmik Hukum* 23.2 (2023): 200-220.

- Fadli, Muhammad Rijal. "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4.1 (2020): 34-49.
- Faridah, Hana Faridah Hana, Masrifah Masrifah, and Din Eri Pratama Din Eri Pratama. "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu." *Krtha Bhayangkara* 18.2 (2024): 328-342.
- Farinuddin, H., Hum, S., Ilwafa, A. R., Hum, S., Al Ghiffari, A. A., Putri, A. L. L., ... & Sos, S. (2024). *Meninjau Kembali Demokrasi Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 76-78.
- Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28.1 (2017): 147-163.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, et al. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): 51-75.
- Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 1.2 (2022): 238-246.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2017): 1-27.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Problematika hilangnya hak pilih warga negara yang ditimbulkan pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 3.3 (2019): 239-254.

- Firdaus, Syah. "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan perilaku pemilih di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1.2 (2023): 165-184.
- Ghufranillah, Dzikri. "Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat." (2022).
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6.4 (2019).
- Gultom, Michael Manarov. "Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas." *Ensiklopedia education review* 5.1 (2023): 6-12.
- Gustina, Amelya. "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi." *Pembangunan Daerah* 5 (2023).
- Habibah, Habibah, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasah Dusturiyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11.1 (2024): 118-128.
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1.2 (2017): 90-100.
- Hadi, Moh Syamsul, and Zamroni Zamroni. "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Maktabah Borneo* 2.2 (2023): 35-54.
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hanisa, Intan, and Sunny Ummul Firdaus. "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Sovereignty* 2.4 (2023): 340-353.

- Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10.2 (2023): 120-137.
- Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7.2 (2023): 541-548.
- Hayati, Neni Nur. "Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.1 (2021): 23-34.
- Hidayah, Y., Ulfa, N., Aprillio, & Belladonna, P. (2022). Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat". *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 1(2), 110-123.
- Hidayat, A. (2023). Hak Pilih dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 501-520.
- Hidayat, R. (2020). Politik Identitas dan Golput di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 45-58.
- Huda, Dimiyati, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih. "Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia." *Journal of Development Research* 7.2 (2023): 272-282.
- Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3.1 (2021): 85-100.
- Husni Kamil Manik, S.P., Sigit Pamungkas, S.IP, MA, Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA, Ida Budhiati, SH, MH, Juri Ardiantoro, MSi., Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si, Hadar Navis Gumay, dan Arif Rahman Hakim MS. (2015). *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

- Ihsan, A. Bakir, and Cucu Nurhayati. "Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota." (2020).
- Irawan, Anang Dony, and Banu Prasetyo. "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia." *Jurnal pendidikan sosial keberagaman* 9.1 (2022): 1-7.
- Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14.1 (2017): 17-35.
- Isnaini, M. Arif, Hari Sulisty, and Rina Marlina. "Giat multilateral naval exercise Komodo dalam menjaga stabilitas perdamaian di kawasan regional sekaligus bukti Indonesia sebagai poros maritim dunia." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.9 (2023): 6770-6775.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye gunakan hak suara dan jangan golput pada Pemilu 2024 untuk generasi muda." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.
- IYAI, RONNY ONTOBUK. *Bentuk Prilaku Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilu Serentak 2019 di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. Diss. IISIP YAPIS Biak, 2021.
- Jayanti, Wilda Dwi, and Vianka Maulidya Putri. "Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.11 (2024): 812-823
- Karso, A. Junaedi. *TENDENSI POLITIK REGIONAL 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy*. Samudra Biru, 2024.
- Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, and Josina Londa. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



- Tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* 10.4 (2022).
- Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3612-3623.
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan Ham. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37-45.
- Malik, Ajeng Nafisyah Raihan, et al. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2.2 (2024): 278-291.
- Mamantung, Yery Yosua, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow. "Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).
- Manalu, Rizki Bastanta B. "Analisis faktor-faktor penyebab golput pilkada di Kota Medan." *Journal Recht (JR)* 1.1 (2022): 61-70.
- Mardani, A. (2021). Dampak Ketidakpercayaan Publik Terhadap Pemilih di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 1-15.
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah* 1.3 (2020): 421-431.
- Moko, Catur Widiat. "Pluralisme agama menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) dalam konteks keindonesiaan." *Medina-Te* 13.1 (2017): 61-78.
- Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, and Enis Khaerunnisa. "Demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan

- paradigma filosofische grondslag." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 232-245.
- Mufidah, Athiyyatul, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2024): 35-51.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 87-100.
- Mulyadi, Dedi, et al. "Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1.1 (2024): 92-112.
- Muslimin, Husein. "Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.1 (2016): 30â-38.
- Nadia, Haiza. "Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3.1 (2023): 83-95.
- Napitu, Ulung, et al. "Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei* 2.2 (2022): 62-83.
- Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8.2 (2016).
- Nugrahaajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Memilih Pemula." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20.3 (2022): 367-381.

- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1.1 (2018): 1-15.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 110-127.
- Nurchahyo, Abraham. "Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6.01 (2016): 25-34.
- Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2.7 (2024): 174-186.
- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., & Gulo, R. S. (2022). Golput dan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2).
- Pito, Toni Andrianus, et al. *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia, 2022.
- Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17-29.
- Pramudito, I. (2022). Golput dan Dinamika Pemilih di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 10(3), 15-30.
- Prayitno, Ujianto Singgih. "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 5.2 (2014): 107-117.
- Purbo, Onno W., et al. "KawalPilpres2019: a highly secured real count voting escort architecture." *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 17.6 (2019): 2834-2841.

- Putra, A. (2024). Golput dan Krisis Legitimasi: Analisis Pasca Pemilu 2024. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 45-60.
- Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. "Komunikasi KPU dalam menekan golput di Jember." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18.2 (2020): 199-210.
- Rahmawati, S. (2020). Peran Golput dalam Mendorong Akuntabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(1), 50-67.
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6.1 (2020): 51-71.
- Ristania, T. W., Shofa, G. Z., Lestari, R. I., & Hasanah, N. (2024). Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(1), 112-120.
- Sahban, Muhammad Amsal, and M. M. Se. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.1 (2023): 210-223.
- Sarbaini, Sarbaini. (2020) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum* 12.1 107-136.

- Shofa, Abdul Miud Aris. "Sejarah panjang pendidikan karakter di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2020): 73-90.
- Shofa, Ghaitza Zahira, Ristania Tri Widiarti, and Rochmawati Ing Lestari. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote: Ghaitza Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti<sup>2</sup>, Rochmawati Ing Lestari, Nur Hasanah." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2.1 (2024): 112-120.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3.3 (2017): 2443-2539.
- Sirajuddin, Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4.2 (2021): 233-247.
- Subanda, N. (2020). Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60-72.
- Sudarmanto, Kuku. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2 (2021): 407-423.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.3 (2023): 333-345.
- Tamrin, Abu. *Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah Dan Hukum Un Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Taufiq, Otong Husni, Agus Budiman, and Egi Nurholis. "Kebijakan dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama

- terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat." (2024).
- Taun, N. A. K., Sari, N. N., dkk (2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, 11(2), 9-13.
- Tinambunan, Clara Pelita, Siera Syailendra, and Feny Selly Pratiwi. "Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik." *Sosio e-Kons* 16.3 (2024): 325-337.
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 46.
- Triono, Triono. "Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5.2 (2017).
- Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum ius quia iustum* 24.2 (2017): 279-300.
- Waworuntu, Sherina. "Tinjauan yuridis mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah." *Lex Administratum* 10.5 (2022).
- Wibowo, Eko. "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.2 (2024): 257-270.
- Widiyanti, Diana Wahyu, and Dafit Riadi. *Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." Al Qisthas  
Jurnal Hukum Dan Politik 11.1 (2020): 13-48.

Zamri, Ahmad Rizaldin. Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi  
Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah. Diss.  
UIN Raden Intan Lampung, 2020.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum

Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia

## **Artikel**

HMIP FISIP UI. (n.d.). Populisme: Potensi untuk Mengalahkan  
Dominasi Oligarki di Indonesia? Retrieved from  
[https://hmip.fisip.ui.ac.id/populisme-potensi-untuk-  
mengalahkan-dominasi-oligarki-di-indonesia/](https://hmip.fisip.ui.ac.id/populisme-potensi-untuk-mengalahkan-dominasi-oligarki-di-indonesia/) diakses pada  
tanggal 25 Februari 2025

[https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2-  
faktor-pemicu-golput](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2-faktor-pemicu-golput) diakses pada tanggal 2 Maret 2025

[https://www.kpu.go.id/berita/baca/5120/Seluruh-tahapan-  
penyelenggaraan-pemilu-dan-pilkada-yang-dilaksanakan-  
Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--selalu-transparan-  
dengan-memanfaatkan-sistem-informasi.-Contohnya-  
Sistem-Informasi-Data-Pemilih](https://www.kpu.go.id/berita/baca/5120/Seluruh-tahapan-penyelenggaraan-pemilu-dan-pilkada-yang-dilaksanakan-Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--selalu-transparan-dengan-memanfaatkan-sistem-informasi.-Contohnya-Sistem-Informasi-Data-Pemilih) diakses pada tanggal 5  
Maret 2025

## Skripsi/Tesis

- Amelia, Kiki. Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Diss. IAIN Metro, 2023
- Andika Maulana, Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).
- Fauzan, Ahmad. Pemilihan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firmansyah, Yoga. Analisis Konfigurasi Politik Pasca Penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Tinjauan Terhadap Dinamika Kekuatan Partai Dan Representasi Politik. Diss. IAIN Metro, 2024.
- Maharani, Annisa. Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik: Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Di Indonesia. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Merkorius Tele, Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020 (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022).
- Muazzinah, Riska. KONSEP DEMOKRASI (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia). Diss. UIN AR-RANIRY, 2019.
- Muhammad Nur Rizqi, Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar



Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Ngudiharjo, Satrio. Praktik Pelarangan Buku Di Era Demokrasi Pasca Reformasi 1998. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Septi Novita, Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

Sujatmiko, Andrian. Peranan partai politik dalam Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa perspektif Fiqh siyasah. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran Data Pemilu 2014, Sumber Komisi Pemilihan Umum

Bagian IV  
Infografik Hasil Pemilu 2014

Buku Data & Infografik



## **BAGIAN IV**

### **INFOGRAFIK HASIL PEMILU 2014**



Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Foto: Dok.KPU)



**Jumlah Pemilih, Suara Sah, dan Tingkat Partisipasi per Provinsi**

| No                  | Nama Provinsi       | Dakil DPR  | Jumlah TPS     | Jumlah Penduduk    | Pemilih Laki-Laki | Pemilih Perempuan | L + P              | Jumlah Suara Sah   | Tingkat Partisipasi |
|---------------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1                   | ACEH                | 2          | 9.508          | 5.015.234          | 1.635.388         | 1.679.806         | 3.315.094          | 2.316.226          | 78,89 %             |
| 2                   | SUMATERA UTARA      | 3          | 27.378         | 15.227.719         | 4.821.388         | 4.914.344         | 9.736.732          | 6.124.359          | 70,50 %             |
| 3                   | SUMATERA BARAT      | 2          | 11.001         | 5.621.977          | 1.797.752         | 1.824.713         | 3.622.465          | 2.405.339          | 70,99 %             |
| 4                   | RIAU                | 2          | 12.166         | 6.456.322          | 2.098.334         | 1.981.179         | 4.079.513          | 2.669.684          | 72,85 %             |
| 5                   | JAMBI               | 1          | 7.523          | 3.531.126          | 1.245.798         | 1.200.947         | 2.446.745          | 1.691.958          | 80,21 %             |
| 6                   | SUMATERA SELATAN    | 2          | 16.361         | 8.528.719          | 2.913.528         | 2.850.250         | 5.763.778          | 3.943.842          | 78,47 %             |
| 7                   | BENGKULU            | 1          | 4.220          | 1.996.438          | 692.877           | 665.654           | 1.358.531          | 933.755            | 81,44 %             |
| 8                   | LAMPUNG             | 2          | 1.501          | 9.586.492          | 3.016.021         | 2.861.193         | 5.877.214          | 4.059.500          | 76,13 %             |
| 9                   | BANGKA BELITUNG     | 1          | 2.741          | 1.348.199          | 471.640           | 447.173           | 918.813            | 583.447            | 74,44 %             |
| 10                  | KEPULAUAN BIAU      | 1          | 3.129          | 1.893.590          | 654.997           | 623.672           | 1.278.669          | 822.336            | 71,65 %             |
| 11                  | DKI JAKARTA         | 3          | 12.408         | 9.605.417          | 3.547.032         | 3.454.488         | 7.001.520          | 4.891.024          | 68,67 %             |
| 12                  | JAWA BARAT          | 11         | 75.151         | 39.910.274         | 16.378.177        | 16.183.594        | 32.561.771         | 21.190.627         | 72,82 %             |
| 13                  | JAWA TENGAH         | 10         | 67.850         | 32.578.537         | 13.485.333        | 13.640.727        | 27.126.060         | 17.603.459         | 73,89 %             |
| 14                  | D.I.Y               | 7          | 8.354          | 3.458.029          | 1.320.883         | 1.403.058         | 2.723.941          | 2.059.453          | 81,46 %             |
| 15                  | JAWA TIMUR          | 11         | 75.979         | 37.269.885         | 14.957.275        | 15.441.494        | 30.398.769         | 19.992.320         | 75,55 %             |
| 16                  | BANTEN              | 3          | 17.693         | 9.938.820          | 3.992.403         | 3.868.661         | 7.861.064          | 4.841.859          | 72,73 %             |
| 17                  | BALI                | 1          | 5.939          | 4.227.705          | 1.455.831         | 1.480.404         | 2.936.235          | 2.024.250          | 78,66 %             |
| 18                  | NUSA TENGGARA BARAT | 1          | 8.532          | 5.398.573          | 1.679.977         | 1.788.374         | 3.468.351          | 2.412.489          | 79,58 %             |
| 19                  | NUSA TENGGARA TIMUR | 2          | 9.605          | 5.343.902          | 1.502.842         | 1.592.346         | 3.094.988          | 2.355.161          | 79,57 %             |
| 20                  | KALIMANTAN BARAT    | 1          | 11.703         | 5.193.272          | 1.779.866         | 1.699.702         | 3.479.388          | 2.478.262          | 78,14 %             |
| 21                  | KALIMANTAN TENGAH   | 1          | 8.556          | 2.640.070          | 954.095           | 844.279           | 1.798.374          | 1.139.544          | 72,54 %             |
| 22                  | KALIMANTAN SELATAN  | 2          | 8.228          | 4.145.845          | 1.399.326         | 1.386.004         | 2.785.330          | 1.837.951          | 75,77 %             |
| 23                  | KALIMANTAN UTARA    | 1          | 8.349          | 3.134.934          | 1.134.712         | 1.133.135         | 2.267.847          | 1.784.439          | 82,97 %             |
| 24                  | DIY                 | 1          | 1.848          | 1.111.111          | 411.111           | 411.111           | 822.222            | 611.111            | 80,94 %             |
| 25                  | SULAWESI TENGAH     | 1          | 5.187          | 2.935.341          | 968.868           | 933.144           | 1.902.012          | 1.024.748          | 79,84 %             |
| 26                  | SULAWESI SELATAN    | 3          | 16.357         | 9.748.103          | 3.033.339         | 3.235.913         | 6.269.252          | 4.404.148          | 75,59 %             |
| 27                  | SULAWESI TENGGARA   | 1          | 4.849          | 2.691.671          | 886.925           | 880.075           | 1.767.000          | 1.180.733          | 72,77 %             |
| 28                  | GORONTALO           | 1          | 1.932          | 1.143.578          | 397.362           | 400.260           | 797.622            | 636.654            | 83,20 %             |
| 29                  | SULAWESI BARAT      | 1          | 2.767          | 1.589.162          | 437.020           | 434.664           | 871.684            | 659.966            | 81,29 %             |
| 30                  | MALUKU              | 1          | 3.250          | 1.866.248          | 583.706           | 597.359           | 1.181.065          | 972.338            | 82,20 %             |
| 31                  | MALUKU UTARA        | 1          | 2.133          | 1.258.534          | 405.992           | 403.028           | 809.020            | 627.645            | 83,85 %             |
| 32                  | PAPUA               | 1          | 8.966          | 4.224.332          | 1.710.580         | 1.479.697         | 3.200.277          | 2.965.280          | 95,20 %             |
| 33                  | PAPUA BARAT         | 1          | 2.614          | 1.091.171          | 376.873           | 332.279           | 709.101            | 573.275            | 85,26 %             |
| <b>DALAM NEGERI</b> |                     |            | <b>478.685</b> | <b>251.824.296</b> | <b>95.060.494</b> | <b>92.767.493</b> | <b>187.827.987</b> | <b>124.973.474</b> | <b>75,11 %</b>      |
| <b>SUB TOTAL</b>    |                     | <b>83</b>  | <b>465.176</b> | <b>251.824.296</b> | <b>95.060.494</b> | <b>92.767.493</b> | <b>187.827.987</b> | <b>124.973.474</b> | <b>75,11 %</b>      |
| <b>PPN</b>          |                     | <b>498</b> |                |                    | <b>919.687</b>    | <b>1.119.024</b>  | <b>2.038.711</b>   |                    |                     |
| <b>TOTAL</b>        |                     |            | <b>465.674</b> | <b>251.824.296</b> | <b>95.980.181</b> | <b>93.886.517</b> | <b>187.866.698</b> | <b>124.973.474</b> | <b>75,11 %</b>      |

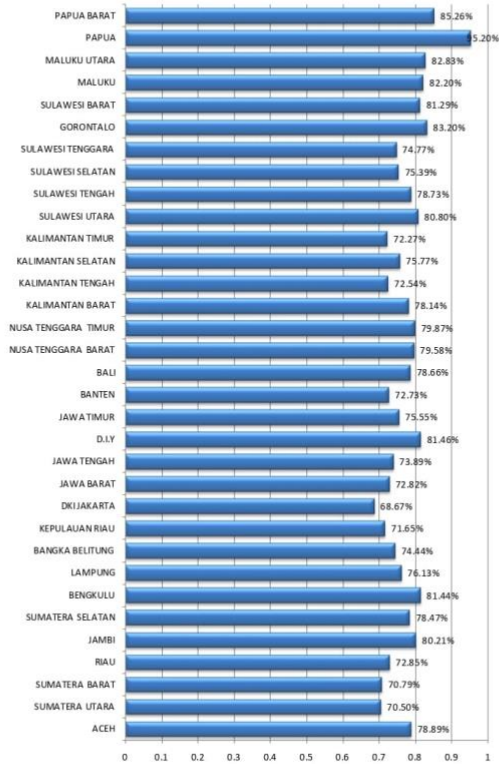
**Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu Anggota**

| No.    | Provinsi             | DPT        |            |             | Tingkat Pengguna Hak |            |
|--------|----------------------|------------|------------|-------------|----------------------|------------|
|        |                      | L          | P          | Jumlah      | L                    | P          |
| 1      | Aceh                 | 1.635.286  | 1.679.808  | 3.315.094   | 1.267.238            | 1.348.026  |
| 2      | Sumatera Utara       | 4.822.388  | 4.914.344  | 9.736.732   | 3.304.906            | 3.559.540  |
| 3      | Sumatera Barat       | 1.797.752  | 1.824.713  | 3.622.465   | 1.197.686            | 1.366.584  |
| 4      | Riau                 | 2.098.334  | 1.981.179  | 4.079.513   | 1.498.698            | 1.473.275  |
| 5      | Jambi                | 1.245.798  | 1.200.947  | 2.446.745   | 987.642              | 974.962    |
| 6      | Sumatera Selatan     | 2.913.504  | 2.850.742  | 5.764.246   | 2.259.832            | 2.263.193  |
| 7      | Bengkulu             | 692.877    | 665.634    | 1.358.511   | 555.924              | 550.445    |
| 8      | Lampung              | 3.016.021  | 2.861.193  | 5.877.214   | 2.263.606            | 2.210.742  |
| 9      | Kep. Bangka Belitung | 471.52     | 447.293    | 918.813     | 345.13               | 338.832    |
| 10     | Kepulauan Riau       | 654.875    | 623.794    | 1.278.669   | 463.319              | 452.822    |
| 11     | DKI Jakarta          | 3.547.032  | 3.454.488  | 7.001.520   | 2.333.994            | 2.474.204  |
| 12     | Jawa Barat           | 16.378.177 | 16.183.594 | 32.561.771  | 11.448.160           | 12.264.758 |
| 13     | Jawa Tengah          | 13.485.330 | 13.640.730 | 27.126.060  | 9.445.717            | 10.598.818 |
| 14     | DIY                  | 1.320.583  | 1.403.038  | 2.723.621   | 1.063.420            | 1.155.193  |
| 15     | Jawa Timur           | 14.957.275 | 15.441.494 | 30.398.769  | 10.954.817           | 12.010.940 |
| 16     | Banten               | 3.992.403  | 3.868.661  | 7.861.064   | 2.813.095            | 2.903.952  |
| 17     | Bali                 | 1.455.831  | 1.480.404  | 2.936.235   | 1.167.509            | 1.142.065  |
| 18     | NTB                  | 1.679.810  | 1.788.441  | 3.468.251   | 1.291.604            | 1.468.478  |
| 19     | NTT                  | 1.502.642  | 1.592.346  | 3.094.988   | 1.188.251            | 1.283.725  |
| 20     | Kalimantan Barat     | 1.779.666  | 1.699.702  | 3.479.368   | 1.375.379            | 1.343.417  |
| 21     | Kalimantan Tengah    | 934.168    | 844.804    | 1.778.972   | 670.271              | 620.248    |
| 22     | Kalimantan Selatan   | 1.399.526  | 1.386.004  | 2.785.530   | 1.042.010            | 1.068.584  |
| 23     | Kalimantan Timur     | 1.514.712  | 1.333.153  | 2.847.865   | 1.068.109            | 990.041    |
| 24     | Sulawesi Utara       | 943.869    | 915.446    | 1.859.315   | 753.945              | 748.336    |
| 25     | Sulawesi Tengah      | 968.518    | 933.272    | 1.901.790   | 756.722              | 740.64     |
| 26     | Sulawesi Selatan     | 3.033.129  | 3.225.912  | 6.259.041   | 2.226.373            | 2.492.257  |
| 27     | Sulawesi Tenggara    | 886.925    | 880.079    | 1.767.004   | 646.017              | 675.23     |
| 28     | Gorontalo            | 397.362    | 400.26     | 797.622     | 326.345              | 337.28     |
| 29     | Sulawesi Barat       | 437.02     | 434.664    | 871.684     | 350.131              | 358.491    |
| 30     | Maluku               | 583.706    | 597.359    | 1.181.065   | 476.06               | 494.804    |
| 31     | Maluku Utara         | 415.992    | 403.028    | 819.02      | 344.246              | 334.177    |
| 32     | Papua                | 1.719.380  | 1.478.992  | 3.198.372   | 1.639.182            | 1.405.555  |
| 33     | Papua Barat          | 376.872    | 332.229    | 709.101     | 320.092              | 284.462    |
| JUMLAH |                      | 93.058.283 | 92.767.747 | 185.826.030 | 67.845.430           | 71.734.076 |

## DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 per Provinsi

| Partisipasi |       | Penggunaan surat suara |         |                 |             |             |            |
|-------------|-------|------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Pilih       | %     | diterima               | rusak   | tidak digunakan | digunakan   | Sah         | Tidak Sah  |
| Jumlah      |       |                        |         |                 |             |             |            |
| 2.615.264   | 78,89 | 3.379.118              | 4.330   | 759.524         | 2.615.264   | 2.316.226   | 299.038    |
| 6.864.446   | 70,50 | 9.918.450              | 9.151   | 3.044.868       | 6.864.431   | 6.124.359   | 740.087    |
| 2.564.270   | 70,79 | 3.695.093              | 5.525   | 1.125.298       | 2.564.270   | 2.405.339   | 158.931    |
| 2.971.973   | 72,85 | 4.182.974              | 5.611   | 1.206.126       | 2.971.237   | 2.669.400   | 301.837    |
| 1.962.604   | 80,21 | 2.496.355              | 4.131   | 529.62          | 1.962.604   | 1.691.958   | 270.646    |
| 4.523.025   | 78,47 | 5.880.950              | 9.583   | 1.348.342       | 4.523.025   | 3.942.859   | 580.166    |
| 1.106.369   | 81,44 | 1.385.587              | 1.529   | 277.69          | 1.106.368   | 923.748     | 182.62     |
| 4.474.348   | 76,13 | 5.992.193              | 5.444   | 1.512.401       | 4.474.348   | 4.059.500   | 414.848    |
| 683.962     | 74,44 | 937.167                | 449     | 252.944         | 683.774     | 583.447     | 100.515    |
| 916.141     | 71,65 | 1.269.263              | 1.591   | 351.531         | 916.141     | 822.336     | 93.805     |
| 4.808.198   | 68,67 | 7.138.069              | 10.829  | 2.319.042       | 4.808.198   | 4.469.841   | 338.681    |
| 23.712.918  | 72,82 | 31.142.587             | 72.181  | 9.464.678       | 21.605.728  | 21.190.627  | 2.522.291  |
| 20.044.535  | 73,89 | 27.655.005             | 23.378  | 7.587.092       | 20.044.535  | 17.603.459  | 2.441.076  |
| 2.218.613   | 81,46 | 2.773.712              | 2.261   | 552.838         | 2.218.613   | 2.059.453   | 159.16     |
| 22.965.757  | 75,55 | 30.981.938             | 22.216  | 7.994.052       | 22.965.757  | 19.992.320  | 2.973.438  |
| 5.717.047   | 72,73 | 5.896.787              | 3.77    | 1.677.552       | 4.215.465   | 4.841.859   | 875.188    |
| 2.309.574   | 78,66 | 2.992.469              | 3.502   | 679.393         | 2.309.574   | 2.024.250   | 285.324    |
| 2.760.082   | 79,58 | 3.540.902              | 4.124   | 776.696         | 2.760.082   | 2.412.489   | 347.593    |
| 2.471.976   | 79,87 | 3.158.874              | 1.248   | 685.65          | 2.471.976   | 2.355.161   | 116.815    |
| 2.718.796   | 78,14 | 3.553.277              | 4.337   | 830.144         | 2.718.796   | 2.478.262   | 240.534    |
| 1.290.519   | 72,54 | 1.819.994              | 3       | 526.475         | 1.290.519   | 1.139.544   | 150.975    |
| 2.110.594   | 75,77 | 2.841.600              | 5.874   | 725.132         | 2.110.594   | 1.831.620   | 272.663    |
| 2.058.150   | 72,27 | 2.905.307              | 11.314  | 835.843         | 2.058.150   | 1.798.439   | 259.711    |
| 1.502.281   | 80,80 | 1.858.135              | 4.614   | 351.24          | 1.502.281   | 1.409.946   | 92.335     |
| 1.497.362   | 78,73 | 1.938.946              | 1.777   | 439.807         | 1.497.362   | 1.424.748   | 72.614     |
| 4.718.630   | 75,39 | 14.574.563             | 8.919   | 3.730.099       | 10.835.545  | 10.133.984  | 314.465    |
| 1.321.247   | 74,77 | 1.803.736              | 2.093   | 480.396         | 1.321.247   | 1.180.733   | 140.514    |
| 663.625     | 83,20 | 814.581                | 938     | 150.018         | 663.625     | 636.654     | 26.971     |
| 708.622     | 81,29 | 888.341                | 883     | 178.836         | 708.622     | 659.966     | 48.656     |
| 970.864     | 82,20 | 1.204.066              | 2.6     | 230.602         | 970.864     | 927.338     | 43.526     |
| 678.423     | 82,83 | 835.4                  | 864     | 156.113         | 678.423     | 627.645     | 53.741     |
| 3.044.737   | 95,20 | 3.263.837              | 2.372   | 216.653         | 3.044.812   | 2.949.189   | 83.748     |
| 604.554     | 85,26 | 723.283                | 604.454 | 200             | 118.629     | 573.725     | 30.829     |
| 139.579.506 | 75,11 | 193.442.559            | 844.892 | 50.996.895      | 141.600.859 | 130.260.424 | 15.033.341 |

### Tingkat Partisipasi per Provinsi

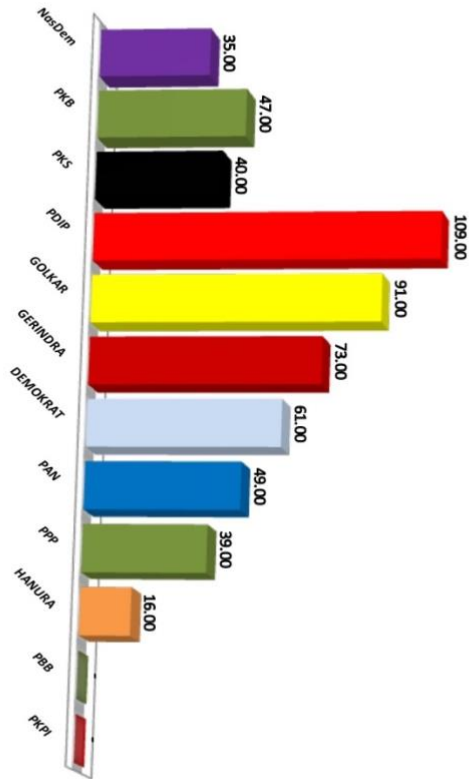


## Perolehan Suara Partai Secara Nasional





### Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu 2014





Perolehan Suara Parpol di tiap Provinsi

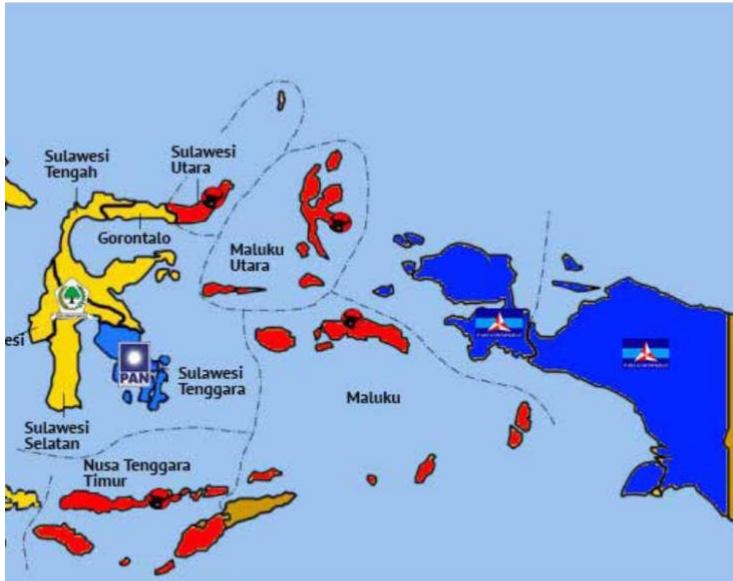
| No | PROVINSI      | Nasdem    | PKB        | PKS       | PDI-P      | GOLKAR     | GERINDRA   | DEMOKRAT   | PAN       | PPP       | HANUSA    | PBB       | PKPI      |
|----|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | ACEH          | 271.574   | 137.656    | 179.808   | 145.700    | 232.500    | 366.385    | 552.009    | 241.196   | 200.731   | 88.182    | 67.506    | 52.979    |
| 2  | SUMUT         | 412.448   | 255.058    | 441.965   | 958.428    | 1.004.998  | 816.642    | 728.699    | 500.672   | 314.944   | 465.139   | 129.700   | 98.566    |
| 3  | SUMBAR        | 214.495   | 88.370     | 205.760   | 184.065    | 405.249    | 548.280    | 302.231    | 226.648   | 202.996   | 156.148   | 65.693    | 24.106    |
| 4  | RIAU          | 165.854   | 216.842    | 190.033   | 374.467    | 544.986    | 260.074    | 261.204    | 266.730   | 187.201   | 122.706   | 62.669    | 27.238    |
| 5  | CELEB         | 98.156    | 103.511    | 70.305    | 274.143    | 288.724    | 193.970    | 234.471    | 179.358   | 104.628   | 154.659   | 59.203    | 16.752    |
| 6  | MBANI         | 277.468   | 278.748    | 242.470   | 692.509    | 660.896    | 303.105    | 394.402    | 333.244   | 188.896   | 210.839   | 124.443   | 43.064    |
| 7  | SHANGILU      | 304.232   | 331.762    | 315.722   | 758.826    | 618.241    | 198.241    | 470.795    | 374.664   | 448.306   | 232.086   | 44.483    | 15.964    |
| 8  | BANGUNG       | 47.661    | 221.662    | 41.897    | 137.085    | 211.863    | 372.550    | 679.718    | 445.106   | 53.370    | 311.748   | 245.519   | 87.066    |
| 10 | KEP BANG      | 95.848    | 38.976     | 66.095    | 132.412    | 95.554     | 91.942     | 81.150     | 119.944   | 37.760    | 50.736    | 11.913    | 11.106    |
| 11 | DKI JAKARTA   | 231.530   | 339.181    | 537.905   | 1.410.173  | 434.428    | 610.780    | 551.995    | 211.540   | 497.852   | 286.752   | 51.558    | 27.742    |
| 12 | JABAR         | 1.035.728 | 1.572.734  | 1.903.548 | 4.159.441  | 3.540.639  | 2.378.762  | 1.851.014  | 1.391.480 | 1.651.804 | 1.157.866 | 368.483   | 119.742   |
| 13 | JATENG        | 1.035.726 | 2.305.442  | 1.076.508 | 4.295.605  | 2.497.382  | 2.023.080  | 1.120.719  | 1.208.202 | 1.151.773 | 730.752   | 99.132    | 59.838    |
| 14 | DI YOGYAKARTA | 1.074.531 | 1.295.943  | 1.477.915 | 3.580.945  | 2.142.221  | 2.356.570  | 2.148.053  | 1.238.905 | 1.305.335 | 1.035.235 | 166.684   | 81.900    |
| 15 | JATIM         | 1.495.271 | 3.533.902  | 887.411   | 3.580.945  | 2.142.221  | 2.356.570  | 2.148.053  | 1.238.905 | 1.305.335 | 1.035.235 | 166.684   | 81.900    |
| 16 | BANTEN        | 316.865   | 350.146    | 391.847   | 815.517    | 650.492    | 641.570    | 502.954    | 348.628   | 410.960   | 274.392   | 89.210    | 49.438    |
| 17 | BALI          | 60.969    | 39.281     | 37.090    | 872.885    | 529.620    | 219.521    | 311.246    | 236.28    | 15.047    | 77.747    | 3.731     | 33.985    |
| 18 | NTB           | 154.981   | 182.320    | 235.870   | 189.569    | 335.382    | 263.621    | 318.713    | 196.074   | 172.421   | 222.410   | 83.768    | 41.460    |
| 19 | NTT           | 270.984   | 130.925    | 61.999    | 403.821    | 452.196    | 233.929    | 316.010    | 205.905   | 30.275    | 148.255   | 40.909    | 59.973    |
| 20 | KALBAR        | 168.741   | 117.937    | 102.146   | 81.770     | 348.986    | 236.281    | 196.890    | 196.212   | 136.564   | 86.741    | 30.813    | 39.181    |
| 21 | KALTENG       | 85.960    | 67.753     | 49.222    | 350.701    | 141.095    | 120.019    | 75.467     | 84.259    | 79.756    | 50.941    | 13.431    | 18.640    |
| 22 | KALSEL        | 102.431   | 202.893    | 152.088   | 192.364    | 486.314    | 172.398    | 101.071    | 73.668    | 215.082   | 95.110    | 30.734    | 14.358    |
| 23 | KALTIM        | 117.117   | 84.147     | 144.705   | 312.574    | 362.328    | 222.472    | 158.977    | 96.998    | 131.381   | 98.877    | 40.586    | 27.857    |
| 24 | SULLT         | 694.238   | 23.930     | 41.434    | 449.675    | 217.265    | 146.007    | 163.775    | 150.889   | 31.601    | 91.875    | 8.652     | 15.115    |
| 25 | SULTEG        | 171.289   | 71.783     | 83.590    | 143.106    | 274.610    | 182.217    | 174.006    | 97.049    | 52.099    | 123.646   | 26.087    | 24.866    |
| 26 | SULSEL        | 316.421   | 148.830    | 338.966   | 313.515    | 884.841    | 660.262    | 489.905    | 406.880   | 387.784   | 286.724   | 57.660    | 92.377    |
| 27 | SULTRA        | 90.363    | 58.772     | 60.177    | 97.056     | 178.294    | 123.972    | 126.764    | 271.321   | 99.140    | 40.315    | 26.699    | 7.965     |
| 28 | GORONTALO     | 20.930    | 15.285     | 26.499    | 40.606     | 310.790    | 49.342     | 47.662     | 41.222    | 31.114    | 36.640    | 16.172    | 2.392     |
| 29 | SULBAR        | 33.587    | 50.166     | 21.161    | 41.678     | 123.048    | 98.461     | 118.801    | 95.977    | 35.619    | 22.253    | 6.292     | 13.823    |
| 30 | MALIKU        | 107.443   | 113.294    | 49.528    | 192.731    | 162.549    | 130.794    | 66.517     | 26.673    | 27.702    | 271.200   | 8.646     | 14.541    |
| 31 | MALIKU UTARA  | 65.357    | 22.655     | 71.257    | 122.504    | 85.413     | 45.594     | 50.587     | 77.999    | 20.000    | 23.245    | 30.180    | 13.154    |
| 32 | RIPIA         | 298.176   | 251.772    | 159.653   | 491.591    | 257.767    | 303.396    | 700.150    | 191.145   | 105.766   | 135.257   | 16.265    | 50.542    |
| 33 | PAPUA BARAT   | 27.401    | 18.174     | 13.961    | 89.334     | 160.242    | 30.175     | 143.869    | 46.342    | 11.325    | 17.450    | 5.812     | 10.760    |
|    | TOTAL         | 8.402.894 | 11.299.017 | 8.480.158 | 25.881.233 | 18.432.216 | 14.760.090 | 12.728.950 | 9.481.952 | 8.157.572 | 6.590.804 | 1.876.057 | 1.143.138 |

Persebaran Suara Partai Politik Pemilu 2014



**PDI-P Menang di 17 Provinsi**

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sumatera Selatan 692.847 suara | 11. Bali 872.885 suara              |
| 2. Lampung 711.346 suara          | 12. NTT 452.196 suara               |
| 3. Bangka Belitung 137.085 suara  | 13. Kalimantan Barat 817.770 suara  |
| 4. Kepulauan Riau 132.412 suara   | 14. Kalimantan Tengah 350.701 suara |
| 5. DKI Jakarta 1.410.173 suara    | 15. Sulawesi Utara 449.675 suara    |
| 6. Jawa Barat 4.159.411 suara     | 16. Maluku 192.731 suara            |
| 7. Jawa Tengah 4.295.605 suara    | 17. Maluku Utara 122.504 suara      |
| 8. DI Yogyakarta 570.531 suara    |                                     |
| 9. Jawa Timur 3.580.945 suara     |                                     |
| 10. Banten 989.329 suara          |                                     |



**Golkar Menang di 11 Provinsi**

1. Sumatera Utara 1.004.498 suara
2. Sumatera Barat 403.249 suara
3. Riau 544.986 suara
4. Jambi 288.724 suara
5. NTB 333.282 suara
6. Kalimantan Selatan 486.314 suara
7. Kalimantan Timur 362.238 suara
8. Sulawesi Tengah 274.610 suara
9. Sulawesi Selatan 884.841 suara
10. Gorontalo 310.790 suara

11. Sulawesi Barat 123.048 suara

- Partai Gerindra unggul di Provinsi Aceh dengan 366.385 suara
- Nasdem unggul di Bengkulu dengan 130.759 suara,
- PAN unggul di Sulawesi Tenggara dengan 271.231 suara
- Demokrat unggul di Papua dengan 700.150 suara dan Papua Barat 143.869 suara

## 2. Lampiran Data Pemilu 2019, Sumber Badan Pusat Statistik

### Lampiran

**Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi<br>(1)      | Laki-laki         |                   | Perempuan         |                   | Jumlah<br>(6)      |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                      | Jumlah<br>(2)     | Persentase<br>(3) | Jumlah<br>(4)     | Persentase<br>(5) |                    |
| Aceh                 | 1 734 675         | 49,23             | 1 789 099         | 50,77             | 3 523 774          |
| Sumatera Utara       | 4 839 043         | 49,45             | 4 946 962         | 50,55             | 9 786 005          |
| Sumatera Barat       | 1 836 987         | 49,40             | 1 881 250         | 50,60             | 3 718 237          |
| Riau                 | 1 963 287         | 50,82             | 1 900 018         | 49,18             | 3 863 305          |
| Jambi                | 1 249 403         | 50,47             | 1 226 252         | 49,53             | 2 475 655          |
| Sumatera Selatan     | 2 965 679         | 50,46             | 2 911 896         | 49,54             | 5 877 575          |
| Bengkulu             | 708 242           | 50,62             | 690 866           | 49,38             | 1 399 108          |
| Lampung              | 3 101 750         | 51,06             | 2 972 387         | 48,94             | 6 074 137          |
| Kep. Bangka Belitung | 475 784           | 51,02             | 456 785           | 48,98             | 932 569            |
| Kepulauan Riau       | 619 882           | 50,42             | 609 542           | 49,58             | 1 229 424          |
| DKI Jakarta          | 3 874 021         | 49,91             | 3 887 577         | 50,09             | 7 761 598          |
| Jawa Barat           | 16 727 451        | 50,27             | 16 549 454        | 49,73             | 33 276 905         |
| Jawa Tengah          | 13 901 368        | 49,83             | 13 995 534        | 50,17             | 27 896 902         |
| DI Yogyakarta        | 1 330 112         | 48,69             | 1 401 762         | 51,31             | 2 731 874          |
| Jawa Timur           | 15 226 058        | 49,25             | 15 686 936        | 50,75             | 30 912 994         |
| Banten               | 4 100 146         | 50,54             | 4 012 331         | 49,46             | 8 112 477          |
| Bali                 | 1 556 427         | 49,72             | 1 573 861         | 50,28             | 3 130 288          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1 800 915         | 49,11             | 1 866 338         | 50,89             | 3 667 253          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1 660 843         | 48,97             | 1 730 773         | 51,03             | 3 391 616          |
| Kalimantan Barat     | 1 879 884         | 50,98             | 1 807 275         | 49,02             | 3 687 159          |
| Kalimantan Tengah    | 903 010           | 51,51             | 850 214           | 48,49             | 1 753 224          |
| Kalimantan Selatan   | 1 436 959         | 50,08             | 1 432 207         | 49,92             | 2 869 166          |
| Kalimantan Timur     | 1 285 439         | 51,80             | 1 195 947         | 48,20             | 2 481 386          |
| Kalimantan Utara     | 236 229           | 52,48             | 213 879           | 47,52             | 450 108            |
| Sulawesi Utara       | 965 444           | 50,60             | 942 671           | 49,40             | 1 908 115          |
| Sulawesi Tengah      | 994 173           | 50,91             | 958 637           | 49,09             | 1 952 810          |
| Sulawesi Selatan     | 2 987 564         | 48,50             | 3 171 811         | 51,50             | 6 159 375          |
| Sulawesi Tenggara    | 860 459           | 49,92             | 863 080           | 50,08             | 1 723 539          |
| Gorontalo            | 405 117           | 49,84             | 407 684           | 50,16             | 812 801            |
| Sulawesi Barat       | 433 985           | 50,16             | 431 259           | 49,84             | 865 244            |
| Maluku               | 622 398           | 49,16             | 643 627           | 50,84             | 1 266 025          |
| Maluku Utara         | 405 031           | 50,38             | 398 952           | 49,62             | 803 983            |
| Papua                | 1 892 236         | 53,41             | 1 650 308         | 46,59             | 3 542 544          |
| Papua Barat          | 385 945           | 51,99             | 356 346           | 48,01             | 742 291            |
| Luar Negeri          | 865 700           | 43,48             | 1 125 445         | 56,52             | 1 991 145          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>96 231 646</b> | <b>49,92</b>      | <b>96 538 965</b> | <b>50,08</b>      | <b>192 770 611</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki         |              | Perempuan         |              | Jumlah             |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                      | Jumlah            | Persentase   | Jumlah            | Persentase   |                    |
| (1)                  | (2)               | (3)          | (4)               | (5)          | (6)                |
| Aceh                 | 1 734 675         | 49,23        | 1 789 099         | 50,77        | 3 523 774          |
| Sumatera Utara       | 4 839 043         | 49,45        | 4 946 962         | 50,55        | 9 786 005          |
| Sumatera Barat       | 1 836 987         | 49,40        | 1 881 250         | 50,60        | 3 718 237          |
| Riau                 | 1 963 287         | 50,82        | 1 900 018         | 49,18        | 3 863 305          |
| Jambi                | 1 249 403         | 50,47        | 1 226 252         | 49,53        | 2 475 655          |
| Sumatera Selatan     | 2 965 679         | 50,46        | 2 911 896         | 49,54        | 5 877 575          |
| Bengkulu             | 708 242           | 50,62        | 690 866           | 49,38        | 1 399 108          |
| Lampung              | 3 101 750         | 51,06        | 2 972 387         | 48,94        | 6 074 137          |
| Kep. Bangka Belitung | 475 784           | 51,02        | 456 785           | 48,98        | 932 569            |
| Kepulauan Riau       | 619 882           | 50,42        | 609 542           | 49,58        | 1 229 424          |
| DKI Jakarta          | 3 874 021         | 49,91        | 3 887 577         | 50,09        | 7 761 598          |
| Jawa Barat           | 16 727 451        | 50,27        | 16 549 454        | 49,73        | 33 276 905         |
| Jawa Tengah          | 13 901 368        | 49,83        | 13 995 534        | 50,17        | 27 896 902         |
| DI Yogyakarta        | 1 330 112         | 48,69        | 1 401 762         | 51,31        | 2 731 874          |
| Jawa Timur           | 15 226 058        | 49,25        | 15 686 936        | 50,75        | 30 912 994         |
| Banten               | 4 100 146         | 50,54        | 4 012 331         | 49,46        | 8 112 477          |
| Bali                 | 1 556 427         | 49,72        | 1 573 861         | 50,28        | 3 130 288          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1 800 915         | 49,11        | 1 866 338         | 50,89        | 3 667 253          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1 660 843         | 48,97        | 1 730 773         | 51,03        | 3 391 616          |
| Kalimantan Barat     | 1 879 884         | 50,98        | 1 807 275         | 49,02        | 3 687 159          |
| Kalimantan Tengah    | 903 010           | 51,51        | 850 214           | 48,49        | 1 753 224          |
| Kalimantan Selatan   | 1 436 959         | 50,08        | 1 432 207         | 49,92        | 2 869 166          |
| Kalimantan Timur     | 1 285 439         | 51,80        | 1 195 947         | 48,20        | 2 481 386          |
| Kalimantan Utara     | 236 229           | 52,48        | 213 879           | 47,52        | 450 108            |
| Sulawesi Utara       | 965 444           | 50,60        | 942 671           | 49,40        | 1 908 115          |
| Sulawesi Tengah      | 994 173           | 50,91        | 958 637           | 49,09        | 1 952 810          |
| Sulawesi Selatan     | 2 987 564         | 48,50        | 3 171 811         | 51,50        | 6 159 375          |
| Sulawesi Tenggara    | 860 459           | 49,92        | 863 080           | 50,08        | 1 723 539          |
| Gorontalo            | 405 117           | 49,84        | 407 684           | 50,16        | 812 801            |
| Sulawesi Barat       | 433 985           | 50,16        | 431 259           | 49,84        | 865 244            |
| Maluku               | 622 398           | 49,16        | 643 627           | 50,84        | 1 266 025          |
| Maluku Utara         | 405 031           | 50,38        | 398 952           | 49,62        | 803 983            |
| Papua                | 1 892 236         | 53,41        | 1 650 308         | 46,59        | 3 542 544          |
| Papua Barat          | 385 945           | 51,99        | 356 346           | 48,01        | 742 291            |
| Luar Negeri          | 865 700           | 43,48        | 1 125 445         | 56,52        | 1 991 145          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>96 231 646</b> | <b>49,92</b> | <b>96 538 965</b> | <b>50,08</b> | <b>192 770 611</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki         |              | Perempuan         |              | Jumlah             |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                      | Jumlah            | Persentase   | Jumlah            | Persentase   |                    |
| (1)                  | (2)               | (3)          | (4)               | (5)          | (6)                |
| Aceh                 | 1 734 675         | 49,23        | 1 789 099         | 50,77        | 3 523 774          |
| Sumatera Utara       | 4 839 043         | 49,45        | 4 946 962         | 50,55        | 9 786 005          |
| Sumatera Barat       | 1 836 987         | 49,40        | 1 881 250         | 50,60        | 3 718 237          |
| Riau                 | 1 963 287         | 50,82        | 1 900 018         | 49,18        | 3 863 305          |
| Jambi                | 1 249 403         | 50,47        | 1 226 252         | 49,53        | 2 475 655          |
| Sumatera Selatan     | 2 965 679         | 50,46        | 2 911 896         | 49,54        | 5 877 575          |
| Bengkulu             | 708 242           | 50,62        | 690 866           | 49,38        | 1 399 108          |
| Lampung              | 3 101 750         | 51,06        | 2 972 387         | 48,94        | 6 074 137          |
| Kep. Bangka Belitung | 475 784           | 51,02        | 456 785           | 48,98        | 932 569            |
| Kepulauan Riau       | 619 882           | 50,42        | 609 542           | 49,58        | 1 229 424          |
| DKI Jakarta          | 3 874 021         | 49,91        | 3 887 577         | 50,09        | 7 761 598          |
| Jawa Barat           | 16 727 451        | 50,27        | 16 549 454        | 49,73        | 33 276 905         |
| Jawa Tengah          | 13 901 368        | 49,83        | 13 995 534        | 50,17        | 27 896 902         |
| DI Yogyakarta        | 1 330 112         | 48,69        | 1 401 762         | 51,31        | 2 731 874          |
| Jawa Timur           | 15 226 058        | 49,25        | 15 686 936        | 50,75        | 30 912 994         |
| Banten               | 4 100 146         | 50,54        | 4 012 331         | 49,46        | 8 112 477          |
| Bali                 | 1 556 427         | 49,72        | 1 573 861         | 50,28        | 3 130 288          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1 800 915         | 49,11        | 1 866 338         | 50,89        | 3 667 253          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1 660 843         | 48,97        | 1 730 773         | 51,03        | 3 391 616          |
| Kalimantan Barat     | 1 879 884         | 50,98        | 1 807 275         | 49,02        | 3 687 159          |
| Kalimantan Tengah    | 903 010           | 51,51        | 850 214           | 48,49        | 1 753 224          |
| Kalimantan Selatan   | 1 436 959         | 50,08        | 1 432 207         | 49,92        | 2 869 166          |
| Kalimantan Timur     | 1 285 439         | 51,80        | 1 195 947         | 48,20        | 2 481 386          |
| Kalimantan Utara     | 236 229           | 52,48        | 213 879           | 47,52        | 450 108            |
| Sulawesi Utara       | 965 444           | 50,60        | 942 671           | 49,40        | 1 908 115          |
| Sulawesi Tengah      | 994 173           | 50,91        | 958 637           | 49,09        | 1 952 810          |
| Sulawesi Selatan     | 2 987 564         | 48,50        | 3 171 811         | 51,50        | 6 159 375          |
| Sulawesi Tenggara    | 860 459           | 49,92        | 863 080           | 50,08        | 1 723 539          |
| Gorontalo            | 405 117           | 49,84        | 407 684           | 50,16        | 812 801            |
| Sulawesi Barat       | 433 985           | 50,16        | 431 259           | 49,84        | 865 244            |
| Maluku               | 622 398           | 49,16        | 643 627           | 50,84        | 1 266 025          |
| Maluku Utara         | 405 031           | 50,38        | 398 952           | 49,62        | 803 983            |
| Papua                | 1 892 236         | 53,41        | 1 650 308         | 46,59        | 3 542 544          |
| Papua Barat          | 385 945           | 51,99        | 356 346           | 48,01        | 742 291            |
| Luar Negeri          | 865 700           | 43,48        | 1 125 445         | 56,52        | 1 991 145          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>96 231 646</b> | <b>49,92</b> | <b>96 538 965</b> | <b>50,08</b> | <b>192 770 611</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.11 Jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPD Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki      |              | Perempuan      |              | Jumlah         |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                      | Jumlah         | Persentase   | Jumlah         | Persentase   |                |
| (1)                  | (2)            | (3)          | (4)            | (5)          | (6)            |
| Aceh                 | 3 943          | 48,19        | 4 239          | 51,81        | 8 182          |
| Sumatera Utara       | 5 577          | 47,41        | 6 186          | 52,59        | 11 763         |
| Sumatera Barat       | 4 741          | 45,62        | 5 651          | 54,38        | 10 392         |
| Riau                 | 2 269          | 49,08        | 2 354          | 50,92        | 4 623          |
| Jambi                | 1 890          | 48,82        | 1 981          | 51,18        | 3 871          |
| Sumatera Selatan     | 3 324          | 50,14        | 3 305          | 49,86        | 6 629          |
| Bengkulu             | 1 634          | 44,91        | 2 004          | 55,09        | 3 638          |
| Lampung              | 3 180          | 53,43        | 2 772          | 46,57        | 5 952          |
| Kep. Bangka Belitung | 1 472          | 51,69        | 1 376          | 48,31        | 2 848          |
| Kepulauan Riau       | 940            | 43,12        | 1 240          | 56,88        | 2 180          |
| DKI Jakarta          | 5 145          | 50,97        | 4 950          | 49,03        | 10 095         |
| Jawa Barat           | 25 746         | 50,38        | 25 361         | 49,62        | 51 107         |
| Jawa Tengah          | 29 490         | 51,79        | 27 453         | 48,21        | 56 943         |
| DI Yogyakarta        | 5 987          | 52,31        | 5 458          | 47,69        | 11 445         |
| Jawa Timur           | 25 229         | 50,51        | 24 719         | 49,49        | 49 948         |
| Banten               | 3 930          | 52,53        | 3 551          | 47,47        | 7 481          |
| Bali                 | 2 179          | 54,41        | 1 826          | 45,59        | 4 005          |
| Nusa Tenggara Barat  | 3 176          | 45,20        | 3 851          | 54,80        | 7 027          |
| Nusa Tenggara Timur  | 6 811          | 44,10        | 8 632          | 55,90        | 15 443         |
| Kalimantan Barat     | 4 549          | 52,88        | 4 054          | 47,12        | 8 603          |
| Kalimantan Tengah    | 1 836          | 54,82        | 1 513          | 45,18        | 3 349          |
| Kalimantan Selatan   | 4 164          | 50,59        | 4 067          | 49,41        | 8 231          |
| Kalimantan Timur     | 2 066          | 52,41        | 1 876          | 47,59        | 3 942          |
| Sulawesi Utara       | 2 999          | 47,36        | 3 334          | 52,64        | 6 333          |
| Sulawesi Tengah      | 1 878          | 46,28        | 2 180          | 53,72        | 4 058          |
| Sulawesi Selatan     | 9 446          | 45,55        | 11 293         | 54,45        | 20 739         |
| Sulawesi Tenggara    | 3 144          | 41,38        | 4 453          | 58,62        | 7 597          |
| Gorontalo            | 1 434          | 50,69        | 1 395          | 49,31        | 2 829          |
| Sulawesi Barat       | 1 389          | 43,11        | 1 833          | 56,89        | 3 222          |
| Maluku               | 1 606          | 39,56        | 2 454          | 60,44        | 4 060          |
| Maluku Utara         | 700            | 42,27        | 956            | 57,73        | 1 656          |
| Papua                | 836            | 54,32        | 703            | 45,68        | 1 539          |
| Papua Barat          | 394            | 50,26        | 390            | 49,74        | 784            |
| Kalimantan Utara     | 558            | 49,73        | 564            | 50,27        | 1 122          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>173 662</b> | <b>49,39</b> | <b>177 974</b> | <b>50,61</b> | <b>351 636</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 3.13** Jumlah Kursi yang Diperebutkan pada Pemilu DPR dan DPD Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi             | DPR RI     | DPD        |
|----------------------|------------|------------|
| (1)                  | (2)        | (3)        |
| Aceh                 | 13         | 4          |
| Sumatera Utara       | 30         | 4          |
| Sumatera Barat       | 14         | 4          |
| Riau                 | 13         | 4          |
| Jambi                | 8          | 4          |
| Sumatera Selatan     | 17         | 4          |
| Bengkulu             | 4          | 4          |
| Lampung              | 20         | 4          |
| Kep. Bangka Belitung | 3          | 4          |
| Kepulauan Riau       | 4          | 4          |
| DKI Jakarta          | 21         | 4          |
| Jawa Barat           | 91         | 4          |
| Jawa Tengah          | 77         | 4          |
| DI Yogyakarta        | 8          | 4          |
| Jawa Timur           | 87         | 4          |
| Banten               | 22         | 4          |
| Bali                 | 9          | 4          |
| Nusa Tenggara Barat  | 11         | 4          |
| Nusa Tenggara Timur  | 13         | 4          |
| Kalimantan Barat     | 12         | 4          |
| Kalimantan Tengah    | 6          | 4          |
| Kalimantan Selatan   | 11         | 4          |
| Kalimantan Timur     | 8          | 4          |
| Kalimantan Utara     | 3          | 4          |
| Sulawesi Utara       | 6          | 4          |
| Sulawesi Tengah      | 7          | 4          |
| Sulawesi Selatan     | 24         | 4          |
| Sulawesi Tenggara    | 6          | 4          |
| Gorontalo            | 3          | 4          |
| Sulawesi Barat       | 4          | 4          |
| Maluku               | 4          | 4          |
| Maluku Utara         | 3          | 4          |
| Papua                | 10         | 4          |
| Papua Barat          | 3          | 4          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>575</b> | <b>136</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.17 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi                   | Pengguna Hak Pilih Disabilitas |               |                | Partisipasi Pemilih Disabilitas (%) |              |              |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            | L                              | P             | Jumlah         | L                                   | P            | Jumlah       |
| (1)                        | (2)                            | (3)           | (4)            | (5)                                 | (6)          | (7)          |
| Aceh                       | 2 268                          | 2 801         | 5 069          | 49,39                               | 57,53        | 53,58        |
| Sumatera Utara             | 2 940                          | 3 839         | 6 779          | 52,73                               | 62,08        | 57,64        |
| Sumatera Barat             | 2 727                          | 3 958         | 6 685          | 57,52                               | 70,04        | 64,33        |
| Riau                       | 1 220                          | 1 356         | 2 576          | 44,69                               | 50,48        | 47,56        |
| Jambi                      | 1 075                          | 1 344         | 2 419          | 56,88                               | 67,84        | 62,49        |
| Sumatera Selatan           | 1 618                          | 1 893         | 3 511          | 48,68                               | 57,28        | 52,96        |
| Bengkulu                   | 1 147                          | 1 621         | 2 768          | 70,20                               | 80,89        | 76,09        |
| Lampung                    | 932                            | 906           | 1 838          | 29,31                               | 32,68        | 30,88        |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 482                            | 478           | 960            | 32,74                               | 34,74        | 33,71        |
| Kepulauan Riau             | 590                            | 967           | 1 557          | 71,86                               | 88,80        | 81,52        |
| DKI Jakarta                | 4 101                          | 4 164         | 8 265          | 79,71                               | 84,12        | 81,87        |
| Jawa Barat                 | 9 845                          | 9 106         | 18 951         | 38,24                               | 35,91        | 37,08        |
| Jawa Tengah                | 11 153                         | 8 901         | 20 054         | 38,27                               | 33,04        | 35,76        |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 436                          | 2 114         | 4 550          | 40,69                               | 38,73        | 39,76        |
| Jawa Timur                 | 9 509                          | 9 050         | 18 559         | 39,60                               | 38,65        | 39,13        |
| Banten                     | 1 412                          | 1 376         | 2 788          | 36,08                               | 38,80        | 37,38        |
| Bali                       | 793                            | 627           | 1 420          | 36,39                               | 34,34        | 35,46        |
| Nusa Tenggara Barat        | 2 006                          | 2 616         | 4 622          | 63,16                               | 67,93        | 65,77        |
| Nusa Tenggara Timur        | 5 139                          | 6 980         | 12 119         | 75,45                               | 80,86        | 78,48        |
| Kalimantan Barat           | 2 103                          | 2 186         | 4 289          | 45,97                               | 53,59        | 49,56        |
| Kalimantan Tengah          | 799                            | 914           | 1 713          | 43,49                               | 60,33        | 51,10        |
| Kalimantan Selatan         | 1 700                          | 1 893         | 3 593          | 39,96                               | 45,86        | 42,87        |
| Kalimantan Timur           | 1 116                          | 1 127         | 2 243          | 60,69                               | 67,65        | 63,99        |
| Sulawesi Utara             | 2 315                          | 2 693         | 5 008          | 80,58                               | 84,24        | 82,50        |
| Sulawesi Tengah            | 1 563                          | 1 984         | 3 547          | 83,23                               | 91,01        | 87,41        |
| Sulawesi Selatan           | 4 650                          | 5 812         | 10 462         | 49,23                               | 51,47        | 50,45        |
| Sulawesi Tenggara          | 2 196                          | 3 467         | 5 663          | 69,85                               | 77,86        | 74,54        |
| Gorontalo                  | 835                            | 924           | 1 759          | 58,23                               | 66,24        | 62,18        |
| Sulawesi Barat             | 973                            | 1 386         | 2 359          | 70,25                               | 75,70        | 73,35        |
| Maluku                     | 1 366                          | 2 281         | 3 647          | 94,21                               | 98,74        | 96,99        |
| Maluku Utara               | 655                            | 882           | 1 537          | 93,57                               | 92,26        | 92,81        |
| Papua                      | 539                            | 461           | 1 000          | 64,24                               | 65,30        | 64,72        |
| Papua Barat                | 133                            | 154           | 287            | 27,65                               | 32,02        | 29,83        |
| Kalimantan Utara           | 339                            | 437           | 776            | 60,75                               | 77,48        | 69,16        |
| Luar Negeri                | 100                            | 44            | 144            | 28,01                               | 95,65        | 35,73        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>82 775</b>                  | <b>90 742</b> | <b>173 517</b> | <b>48,05</b>                        | <b>51,35</b> | <b>49,60</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.20 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi                   | Sah                | Tidak Sah        | Jumlah             | Suara Tidak Sah (%) |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| (1)                        | (2)                | (3)              | (4)                | (5)                 |
| Aceh                       | 2 804 934          | 83 326           | 2 888 260          | 2,88                |
| Sumatera Utara             | 7 524 301          | 111 925          | 7 636 226          | 1,47                |
| Sumatera Barat             | 2 896 494          | 40 225           | 2 936 719          | 1,37                |
| Riau                       | 3 224 000          | 47 530           | 3 271 530          | 1,45                |
| Jambi                      | 2 062 858          | 48 470           | 2 111 328          | 2,30                |
| Sumatera Selatan           | 4 820 768          | 117 817          | 4 938 585          | 2,39                |
| Bengkulu                   | 1 169 487          | 26 862           | 1 196 349          | 2,25                |
| Lampung                    | 4 809 274          | 86 311           | 4 895 585          | 1,76                |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 783 964            | 22 927           | 806 891            | 2,84                |
| Kepulauan Riau             | 1 016 203          | 14 665           | 1 030 868          | 1,42                |
| DKI Jakarta                | 6 345 684          | 79 890           | 6 425 574          | 1,24                |
| Jawa Barat                 | 26 828 014         | 648 065          | 27 476 079         | 2,36                |
| Jawa Tengah                | 21 769 958         | 606 514          | 22 376 472         | 2,71                |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 397 655          | 52 024           | 2 449 679          | 2,12                |
| Jawa Timur                 | 24 672 915         | 838 326          | 25 511 241         | 3,29                |
| Banten                     | 6 597 038          | 194 128          | 6 791 166          | 2,86                |
| Bali                       | 2 564 472          | 52 338           | 2 616 810          | 2,00                |
| Nusa Tenggara Barat        | 2 962 561          | 78 125           | 3 040 686          | 2,57                |
| Nusa Tenggara Timur        | 2 674 569          | 43 895           | 2 718 464          | 1,61                |
| Kalimantan Barat           | 2 973 653          | 56 256           | 3 029 909          | 1,86                |
| Kalimantan Tengah          | 1 368 086          | 33 612           | 1 401 698          | 2,40                |
| Kalimantan Selatan         | 2 294 102          | 88 001           | 2 382 103          | 3,69                |
| Kalimantan Timur           | 1 965 288          | 37 993           | 2 003 281          | 1,90                |
| Sulawesi Utara             | 1 580 209          | 14 096           | 1 594 305          | 0,88                |
| Sulawesi Tengah            | 1 621 242          | 18 821           | 1 640 063          | 1,15                |
| Sulawesi Selatan           | 4 926 984          | 98 205           | 5 025 189          | 1,95                |
| Sulawesi Tenggara          | 1 397 781          | 27 625           | 1 425 406          | 1,94                |
| Gorontalo                  | 714 932            | 8 148            | 723 080            | 1,13                |
| Sulawesi Barat             | 738 932            | 12 147           | 751 079            | 1,62                |
| Maluku                     | 992 397            | 11 514           | 1 003 911          | 1,15                |
| Maluku Utara               | 655 371            | 10 243           | 665 614            | 1,54                |
| Papua                      | 3 333 065          | 58 822           | 3 391 887          | 1,73                |
| Papua Barat                | 637 729            | 12 462           | 650 191            | 1,92                |
| Kalimantan Utara           | 354 401            | 4 840            | 359 241            | 1,35                |
| Luar Negeri                | 778 280            | 68 757           | 847 037            | 8,12                |
| <b>Jumlah</b>              | <b>154 257 601</b> | <b>3 754 905</b> | <b>158 012 506</b> | <b>2,38</b>         |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.21 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi                   | Sah                | Tidak Sah         | Jumlah             | Suara Tidak Sah (%) |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| (1)                        | (2)                | (3)               | (4)                | (5)                 |
| Aceh                       | 2 562 479          | 321 597           | 2 884 076          | 11,15               |
| Sumatera Utara             | 6 704 439          | 914 328           | 7 618 767          | 12,00               |
| Sumatera Barat             | 2 727 387          | 201 921           | 2 929 308          | 6,89                |
| Riau                       | 2 921 229          | 339 471           | 3 260 700          | 10,41               |
| Jambi                      | 1 786 074          | 321 604           | 2 107 678          | 15,26               |
| Sumatera Selatan           | 4 335 825          | 598 478           | 4 934 303          | 12,13               |
| Bengkulu                   | 986 984            | 207 382           | 1 194 366          | 17,36               |
| Lampung                    | 4 345 719          | 544 007           | 4 889 726          | 11,13               |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 682 168            | 121 188           | 803 356            | 15,09               |
| Kepulauan Riau             | 919 399            | 100 587           | 1 019 986          | 9,86                |
| DKI Jakarta                | 6 650 289          | 546 941           | 7 197 230          | 7,60                |
| Jawa Barat                 | 24 416 196         | 2 970 984         | 27 387 180         | 10,85               |
| Jawa Tengah                | 19 418 014         | 2 911 656         | 22 329 670         | 13,04               |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 184 355          | 230 006           | 2 414 361          | 9,53                |
| Jawa Timur                 | 22 069 539         | 3 361 187         | 25 430 726         | 13,22               |
| Banten                     | 5 833 764          | 918 132           | 6 751 896          | 13,60               |
| Bali                       | 2 313 366          | 292 835           | 2 606 201          | 11,24               |
| Nusa Tenggara Barat        | 2 670 901          | 364 468           | 3 035 369          | 12,01               |
| Nusa Tenggara Timur        | 2 571 216          | 142 976           | 2 714 192          | 5,27                |
| Kalimantan Barat           | 2 729 877          | 293 543           | 3 023 420          | 9,71                |
| Kalimantan Tengah          | 1 202 839          | 182 090           | 1 384 929          | 13,15               |
| Kalimantan Selatan         | 2 016 007          | 354 232           | 2 370 239          | 14,94               |
| Kalimantan Timur           | 1 742 547          | 246 127           | 1 988 674          | 12,38               |
| Sulawesi Utara             | 1 479 369          | 110 269           | 1 589 638          | 6,94                |
| Sulawesi Tengah            | 1 550 324          | 87 088            | 1 637 412          | 5,32                |
| Sulawesi Selatan           | 4 659 502          | 359 080           | 5 018 582          | 7,16                |
| Sulawesi Tenggara          | 1 287 972          | 134 873           | 1 422 845          | 9,48                |
| Gorontalo                  | 688 445            | 32 587            | 721 032            | 4,52                |
| Sulawesi Barat             | 698 697            | 51 143            | 749 840            | 6,82                |
| Maluku                     | 949 492            | 52 925            | 1 002 417          | 5,28                |
| Maluku Utara               | 622 755            | 39 682            | 662 437            | 5,99                |
| Papua                      | 3 314 858          | 75 479            | 3 390 337          | 2,23                |
| Papua Barat                | 601 107            | 46 288            | 647 395            | 7,15                |
| Kalimantan Utara           | 328 126            | 28 799            | 356 925            | 8,07                |
| Luar Negeri                | -                  | -                 | -                  | -                   |
| <b>Jumlah</b>              | <b>139 971 260</b> | <b>17 503 953</b> | <b>157 475 213</b> | <b>11,12</b>        |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.23 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Perolehan Suara   |              |                   |              | Suara Tidak Sah  |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
|                      | Jokowi-Amin       |              | Prabowo-Sandi     |              |                  |
|                      | Jumlah            | Persentase   | Jumlah            | Persentase   |                  |
| (1)                  | (2)               | (3)          | (4)               | (5)          | (6)              |
| Aceh                 | 404 188           | 14,41        | 2 400 746         | 85,59        | 83 326           |
| Sumatera Utara       | 3 936 515         | 52,32        | 3 587 786         | 47,68        | 111 925          |
| Sumatera Barat       | 407 761           | 14,08        | 2 488 733         | 85,92        | 40 225           |
| Riau                 | 1 248 713         | 38,73        | 1 975 287         | 61,27        | 47 530           |
| Jambi                | 859 833           | 41,68        | 1 203 025         | 58,32        | 48 470           |
| Sumatera Selatan     | 1 942 987         | 40,30        | 2 877 781         | 59,70        | 117 817          |
| Bengkulu             | 583 488           | 49,89        | 585 999           | 50,11        | 26 862           |
| Lampung              | 2 853 585         | 59,34        | 1 955 689         | 40,66        | 86 311           |
| Kep. Bangka Belitung | 495 729           | 63,23        | 288 235           | 36,77        | 22 927           |
| Kepulauan Riau       | 550 692           | 54,19        | 465 511           | 45,81        | 14 665           |
| DKI Jakarta          | 3 279 547         | 51,68        | 3 066 137         | 48,32        | 79 890           |
| Jawa Barat           | 10 750 568        | 40,07        | 16 077 446        | 59,93        | 648 065          |
| Jawa Tengah          | 16 825 511        | 77,29        | 4 944 447         | 22,71        | 606 514          |
| DI Yogyakarta        | 1 655 174         | 69,03        | 742 481           | 30,97        | 52 024           |
| Jawa Timur           | 16 231 668        | 65,79        | 8 441 247         | 34,21        | 838 326          |
| Banten               | 2 537 524         | 38,46        | 4 059 514         | 61,54        | 194 128          |
| Bali                 | 2 351 057         | 91,68        | 213 415           | 8,32         | 52 338           |
| Nusa Tenggara Barat  | 951 242           | 32,11        | 2 011 319         | 67,89        | 78 125           |
| Nusa Tenggara Timur  | 2 368 982         | 88,57        | 305 587           | 11,43        | 43 895           |
| Kalimantan Barat     | 1 709 896         | 57,50        | 1 263 757         | 42,50        | 56 256           |
| Kalimantan Tengah    | 830 948           | 60,74        | 537 138           | 39,26        | 33 612           |
| Kalimantan Selatan   | 823 939           | 35,92        | 1 470 163         | 64,08        | 88 001           |
| Kalimantan Timur     | 1 094 845         | 55,71        | 870 443           | 44,29        | 37 993           |
| Kalimantan Utara     | 248 239           | 70,04        | 106 162           | 29,96        | 4 840            |
| Sulawesi Utara       | 1 220 524         | 77,24        | 359 685           | 22,76        | 14 096           |
| Sulawesi Tengah      | 914 588           | 56,41        | 706 654           | 43,59        | 18 821           |
| Sulawesi Selatan     | 2 117 591         | 42,98        | 2 809 393         | 57,02        | 98 205           |
| Sulawesi Tenggara    | 555 664           | 39,75        | 842 117           | 60,25        | 27 625           |
| Gorontalo            | 369 803           | 51,73        | 345 129           | 48,27        | 8 148            |
| Sulawesi Barat       | 475 312           | 64,32        | 263 620           | 35,68        | 12 147           |
| Maluku               | 599 457           | 60,40        | 392 940           | 39,60        | 11 514           |
| Maluku Utara         | 310 548           | 47,39        | 344 823           | 52,61        | 10 243           |
| Papua                | 3 021 713         | 90,66        | 311 352           | 9,34         | 58 822           |
| Papua Barat          | 508 997           | 79,81        | 128 732           | 20,19        | 12 462           |
| Luar Negeri          | 570 534           | 73,31        | 207 746           | 26,69        | 68 757           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>85 607 362</b> | <b>55,50</b> | <b>68 650 239</b> | <b>44,50</b> | <b>3 754 905</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.24 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019**  
(lanjutan)

| Provinsi             | Partai Politik   |                   |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | Berkarya         | PKS               | Perindo          | PPP              | PSJ              | PAN              |
| (1)                  | (8)              | (9)               | (10)             | (11)             | (12)             | (13)             |
| Aceh                 | 66 024           | 209 011           | 18 266           | 215 520          | 28 922           | 318 202          |
| Sumatera Utara       | 90 102           | 634 787           | 286 791          | 205 905          | 99 682           | 520 824          |
| Sumatera Barat       | 55 667           | 356 294           | 43 510           | 141 865          | 38 373           | 412 483          |
| Riau                 | 71 459           | 371 455           | 76 762           | 169 663          | 37 681           | 282 902          |
| Jambi                | 50 770           | 103 280           | 55 752           | 81 049           | 37 461           | 196 085          |
| Sumatera Selatan     | 111 499          | 266 130           | 121 328          | 117 147          | 50 496           | 268 712          |
| Bengkulu             | 23 633           | 98 952            | 37 657           | 30 394           | 17 759           | 121 990          |
| Lampung              | 95 299           | 340 867           | 133 263          | 112 108          | 58 891           | 336 788          |
| Kep. Bangka Belitung | 13 193           | 34 280            | 16 029           | 36 554           | 4 639            | 14 830           |
| Kepulauan Riau       | 16 073           | 80 344            | 18 256           | 19 259           | 20 580           | 101 265          |
| DKI Jakarta          | 84 770           | 1 116 705         | 197 751          | 178 631          | 583 071          | 412 843          |
| Jawa Barat           | 564 942          | 3 286 606         | 695 083          | 1 111 362        | 402 835          | 1 690 821        |
| Jawa Tengah          | 321 298          | 1 116 942         | 418 942          | 971 139          | 249 806          | 832 010          |
| DI Yogyakarta        | 60 611           | 229 815           | 27 364           | 62 357           | 45 347           | 237 731          |
| Jawa Timur           | 327 817          | 862 840           | 479 577          | 1 192 976        | 329 621          | 1 209 375        |
| Banten               | 196 190          | 678 040           | 164 920          | 313 012          | 151 477          | 350 025          |
| Bali                 | 42 158           | 39 024            | 36 467           | 12 195           | 55 399           | 8 136            |
| Nusa Tenggara Barat  | 118 515          | 293 473           | 63 701           | 217 804          | 24 162           | 200 435          |
| Nusa Tenggara Timur  | 73 991           | 52 239            | 126 106          | 30 420           | 69 857           | 158 618          |
| Kalimantan Barat     | 58 200           | 167 591           | 82 728           | 111 178          | 30 145           | 202 689          |
| Kalimantan Tengah    | 26 073           | 37 110            | 46 078           | 63 865           | 11 941           | 80 193           |
| Kalimantan Selatan   | 54 557           | 203 223           | 41 336           | 157 246          | 16 907           | 172 943          |
| Kalimantan Timur     | 41 907           | 159 557           | 67 635           | 98 401           | 24 247           | 95 401           |
| Kalimantan Utara     | 4 851            | 21 718            | 7 725            | 11 790           | 4 437            | 21 391           |
| Sulawesi Utara       | 20 221           | 17 453            | 51 437           | 27 990           | 26 953           | 80 732           |
| Sulawesi Tengah      | 41 019           | 96 004            | 58 938           | 37 877           | 31 837           | 97 608           |
| Sulawesi Selatan     | 132 611          | 247 798           | 142 521          | 338 093          | 65 536           | 418 440          |
| Sulawesi Tenggara    | 28 189           | 85 423            | 20 479           | 65 284           | 17 680           | 158 621          |
| Gorontalo            | 13 786           | 24 945            | 6 116            | 69 784           | 3 491            | 21 840           |
| Sulawesi Barat       | 10 092           | 10 219            | 10 601           | 11 849           | 4 055            | 28 872           |
| Maluku               | 28 942           | 97 765            | 38 375           | 41 045           | 17 380           | 33 796           |
| Maluku Utara         | 21 877           | 57 293            | 37 781           | 15 861           | 8 425            | 16 200           |
| Papua                | 52 143           | 80 318            | 89 035           | 45 435           | 75 349           | 443 393          |
| Papua Barat          | 11 016           | 16 162            | 20 010           | 8 089            | 6 919            | 26 429           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>2 929 495</b> | <b>11 493 663</b> | <b>3 738 320</b> | <b>6 323 147</b> | <b>2 651 361</b> | <b>9 572 623</b> |



**Tabel 3.9** Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Gender dan Provinsi, 2019

| Provinsi             | Laki-laki      |              | Perempuan      |              | Jumlah         |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                      | Jumlah         | Persentase   | Jumlah         | Persentase   |                |
| (1)                  | (2)            | (3)          | (4)            | (5)          | (6)            |
| Aceh                 | 4 592          | 48,54        | 4 869          | 51,46        | 9 461          |
| Sumatera Utara       | 5 576          | 47,41        | 6 184          | 52,59        | 11 760         |
| Sumatera Barat       | 4 741          | 45,62        | 5 651          | 54,38        | 10 392         |
| Riau                 | 2 730          | 50,41        | 2 686          | 49,59        | 5 416          |
| Jambi                | 1 890          | 48,82        | 1 981          | 51,18        | 3 871          |
| Sumatera Selatan     | 3 324          | 50,14        | 3 305          | 49,86        | 6 629          |
| Bengkulu             | 1 634          | 44,91        | 2 004          | 55,09        | 3 638          |
| Lampung              | 3 180          | 53,43        | 2 772          | 46,57        | 5 952          |
| Kep. Bangka Belitung | 1 472          | 51,69        | 1 376          | 48,31        | 2 848          |
| Kepulauan Riau       | 821            | 42,98        | 1 089          | 57,02        | 1 910          |
| DKI Jakarta          | 5 145          | 50,97        | 4 950          | 49,03        | 10 095         |
| Jawa Barat           | 25 746         | 50,38        | 25 361         | 49,62        | 51 107         |
| Jawa Tengah          | 29 140         | 51,96        | 26 940         | 48,04        | 56 080         |
| DI Yogyakarta        | 5 987          | 52,31        | 5 458          | 47,69        | 11 445         |
| Jawa Timur           | 24 011         | 50,63        | 23 415         | 49,37        | 47 426         |
| Banten               | 3 913          | 52,46        | 3 546          | 47,54        | 7 459          |
| Bali                 | 2 179          | 54,41        | 1 826          | 45,59        | 4 005          |
| Nusa Tenggara Barat  | 3 176          | 45,20        | 3 851          | 54,80        | 7 027          |
| Nusa Tenggara Timur  | 6 811          | 44,10        | 8 632          | 55,90        | 15 443         |
| Kalimantan Barat     | 4 575          | 52,87        | 4 079          | 47,13        | 8 654          |
| Kalimantan Tengah    | 1 837          | 54,80        | 1 515          | 45,20        | 3 352          |
| Kalimantan Selatan   | 4 254          | 50,75        | 4 128          | 49,25        | 8 382          |
| Kalimantan Timur     | 1 839          | 52,47        | 1 666          | 47,53        | 3 505          |
| Kalimantan Utara     | 558            | 49,73        | 564            | 50,27        | 1 122          |
| Sulawesi Utara       | 2 873          | 47,33        | 3 197          | 52,67        | 6 070          |
| Sulawesi Tengah      | 1 878          | 46,28        | 2 180          | 53,72        | 4 058          |
| Sulawesi Selatan     | 9 446          | 45,55        | 11 293         | 54,45        | 20 739         |
| Sulawesi Tenggara    | 3 144          | 41,38        | 4 453          | 58,62        | 7 597          |
| Gorontalo            | 1 434          | 50,69        | 1 395          | 49,31        | 2 829          |
| Sulawesi Barat       | 1 385          | 43,07        | 1 831          | 56,93        | 3 216          |
| Maluku               | 1 450          | 38,56        | 2 310          | 61,44        | 3 760          |
| Maluku Utara         | 700            | 42,27        | 956            | 57,73        | 1 656          |
| Papua                | 839            | 54,30        | 706            | 45,70        | 1 545          |
| Papua Barat          | 481            | 50,00        | 481            | 50,00        | 962            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>172 761</b> | <b>49,44</b> | <b>176 650</b> | <b>50,56</b> | <b>349 411</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.28 Komposisi Anggota DPR Terpilih pada Pemilu DPR Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan Provinsi, 2019

| Provinsi             | Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan |          |            |            |           |                   |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------|
|                      | SMA                                 | D3       | S1         | S2         | S3        | Tidak Menyebutkan |
| (1)                  | (2)                                 | (3)      | (4)        | (5)        | (6)       | (7)               |
| Aceh                 | 4                                   | 0        | 3          | 6          | 0         | 0                 |
| Sumatera Utara       | 4                                   | 1        | 9          | 10         | 6         | 0                 |
| Sumatera Barat       | 2                                   | 0        | 6          | 5          | 1         | 0                 |
| Riau                 | 2                                   | 0        | 5          | 5          | 1         | 0                 |
| Jambi                | 1                                   | 0        | 2          | 5          | 0         | 0                 |
| Sumatera Selatan     | 1                                   | 0        | 8          | 8          | 0         | 0                 |
| Bengkulu             | 0                                   | 0        | 1          | 3          | 0         | 0                 |
| Lampung              | 1                                   | 0        | 8          | 9          | 2         | 0                 |
| Kep. Bangka Belitung | 0                                   | 0        | 1          | 2          | 0         | 0                 |
| Kepulauan Riau       | 0                                   | 0        | 2          | 1          | 1         | 0                 |
| DKI Jakarta          | 1                                   | 0        | 7          | 4          | 4         | 5                 |
| Jawa Barat           | 9                                   | 1        | 24         | 37         | 11        | 9                 |
| Jawa Tengah          | 10                                  | 1        | 23         | 32         | 6         | 5                 |
| DI Yogyakarta        | 0                                   | 0        | 2          | 3          | 1         | 2                 |
| Jawa Timur           | 4                                   | 0        | 31         | 30         | 4         | 18                |
| Banten               | 2                                   | 0        | 7          | 4          | 5         | 4                 |
| Bali                 | 2                                   | 0        | 3          | 4          | 0         | 0                 |
| Nusa Tenggara Barat  | 0                                   | 0        | 7          | 3          | 0         | 1                 |
| Nusa Tenggara Timur  | 1                                   | 0        | 5          | 3          | 1         | 3                 |
| Kalimantan Barat     | 2                                   | 0        | 4          | 5          | 1         | 0                 |
| Kalimantan Tengah    | 0                                   | 0        | 3          | 1          | 1         | 1                 |
| Kalimantan Selatan   | 1                                   | 0        | 4          | 5          | 0         | 1                 |
| Kalimantan Timur     | 1                                   | 1        | 2          | 2          | 2         | 0                 |
| Kalimantan Utara     | 0                                   | 0        | 0          | 2          | 0         | 1                 |
| Sulawesi Utara       | 1                                   | 0        | 4          | 1          | 0         | 0                 |
| Sulawesi Tengah      | 0                                   | 0        | 3          | 3          | 1         | 0                 |
| Sulawesi Selatan     | 4                                   | 0        | 7          | 9          | 3         | 1                 |
| Sulawesi Tenggara    | 1                                   | 0        | 3          | 2          | 0         | 0                 |
| Gorontalo            | 1                                   | 0        | 0          | 2          | 0         | 0                 |
| Sulawesi Barat       | 0                                   | 0        | 2          | 1          | 1         | 0                 |
| Maluku               | 0                                   | 0        | 3          | 1          | 0         | 0                 |
| Maluku Utara         | 0                                   | 0        | 1          | 1          | 1         | 0                 |
| Papua                | 3                                   | 1        | 3          | 2          | 0         | 1                 |
| Papua Barat          | 0                                   | 0        | 3          | 0          | 0         | 0                 |
| <b>Jumlah</b>        | <b>58</b>                           | <b>5</b> | <b>196</b> | <b>211</b> | <b>53</b> | <b>52</b>         |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 2.39 Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu DPR**  
(lanjutan) **Menurut Provinsi, 2014**

| No            | Provinsi                 | Perolehan Kursi Partai Politik |             |                |             |              | Jumlah     |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|
|               |                          | PAN<br>(10)                    | PPP<br>(11) | HANURA<br>(12) | PBB<br>(13) | PKPI<br>(14) |            |
| 1             | Nanggroe Aceh Darussalam | 1                              | 1           | 0              | 0           | 0            | 13         |
| 2             | Sumatera Utara           | 3                              | 2           | 3              | 0           | 0            | 30         |
| 3             | Sumatera Barat           | 1                              | 2           | 0              | 0           | 0            | 14         |
| 4             | Riau                     | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 11         |
| 5             | Jambi                    | 1                              | 1           | 0              | 0           | 0            | 7          |
| 6             | Sumatera Selatan         | 2                              | 0           | 1              | 0           | 0            | 17         |
| 7             | Bengkulu                 | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 4          |
| 8             | Lampung                  | 2                              | 0           | 1              | 0           | 0            | 18         |
| 9             | Bangka Belitung          | 0                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 3          |
| 10            | Kepulauan Riau           | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 3          |
| 11            | DKI Jakarta              | 0                              | 3           | 0              | 0           | 0            | 21         |
| 12            | Jawa Barat               | 7                              | 7           | 4              | 0           | 0            | 91         |
| 13            | Jawa Tengah              | 8                              | 7           | 0              | 0           | 0            | 77         |
| 14            | D I Yogyakarta           | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 8          |
| 15            | Jawa Timur               | 7                              | 4           | 2              | 0           | 0            | 87         |
| 16            | Banten                   | 2                              | 3           | 1              | 0           | 0            | 22         |
| 17            | Bali                     | 0                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 9          |
| 18            | Nusa Tenggara Barat      | 1                              | 1           | 1              | 0           | 0            | 10         |
| 19            | Nusa Tenggara Timur      | 1                              | 0           | 1              | 0           | 0            | 13         |
| 20            | Kalimantan Barat         | 1                              | 1           | 0              | 0           | 0            | 10         |
| 21            | Kalimantan Tengah        | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 6          |
| 22            | Kalimantan Selatan       | 0                              | 2           | 0              | 0           | 0            | 11         |
| 23            | Kalimantan Timur         | 0                              | 1           | 0              | 0           | 0            | 8          |
| 24            | Sulawesi Utara           | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 6          |
| 25            | Sulawesi Tengah          | 0                              | 0           | 1              | 0           | 0            | 6          |
| 26            | Sulawesi Selatan         | 3                              | 3           | 1              | 0           | 0            | 24         |
| 27            | Sulawesi Tenggara        | 1                              | 1           | 0              | 0           | 0            | 5          |
| 28            | Gorontalo                | 0                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 3          |
| 29            | Sulawesi Barat           | 0                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 3          |
| 30            | Maluku                   | 0                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 4          |
| 31            | Maluku Utara             | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 3          |
| 32            | Papua                    | 1                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 10         |
| 33            | Papua Barat              | 0                              | 0           | 0              | 0           | 0            | 3          |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>49</b>                      | <b>39</b>   | <b>16</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>560</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 2.38 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2014**  
(lanjutan)

| No            | Provinsi                 | Perolehan Suara Partai Politik |                  | Jumlah             |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|               |                          | PBB                            | PKPI             |                    |
| (1)           | (2)                      | (13)                           | (14)             | (15)               |
| 1             | Nanggroe Aceh Darussalam | 67 506                         | 32 979           | 2 316 226          |
| 2             | Sumatera Utara           | 129 700                        | 98 566           | 6 124 359          |
| 3             | Sumatera Barat           | 65 693                         | 24 106           | 2 405 339          |
| 4             | Riau                     | 62 269                         | 27 328           | 2 669 684          |
| 5             | Jambi                    | 39 203                         | 16 752           | 1 691 958          |
| 6             | Sumatera Selatan         | 124 136                        | 45 220           | 3 943 842          |
| 7             | Bengkulu                 | 17 663                         | 18 923           | 923 755            |
| 8             | Lampung                  | 45 482                         | 35 994           | 4 059 500          |
| 9             | Bangka Belitung          | 24 519                         | 8 066            | 583 447            |
| 10            | Kepulauan Riau           | 11 913                         | 11 106           | 822 336            |
| 11            | DKI Jakarta              | 51 558                         | 27 342           | 4 891 034          |
| 12            | Jawa Barat               | 368 483                        | 119 748          | 21 190 627         |
| 13            | Jawa Tengah              | 99 132                         | 59 838           | 17 603 459         |
| 14            | D I Yogyakarta           | 14 162                         | 5 199            | 2 059 453          |
| 15            | Jawa Timur               | 166 684                        | 81 900           | 19 992 320         |
| 16            | Banten                   | 89 210                         | 49 438           | 4 841 859          |
| 17            | Bali                     | 3 731                          | 33 985           | 2 024 250          |
| 18            | Nusa Tenggara Barat      | 83 768                         | 41 460           | 2 412 489          |
| 19            | Nusa Tenggara Timur      | 40 909                         | 59 973           | 2 355 161          |
| 20            | Kalimantan Barat         | 30 813                         | 39 181           | 2 478 262          |
| 21            | Kalimantan Tengah        | 15 431                         | 18 640           | 1 139 544          |
| 22            | Kalimantan Selatan       | 30 734                         | 14 358           | 1 837 931          |
| 23            | Kalimantan Timur         | 40 586                         | 27 657           | 1 798 439          |
| 24            | Sulawesi Utara           | 8 652                          | 15 115           | 1 409 946          |
| 25            | Sulawesi Tengah          | 26 087                         | 24 866           | 1 424 748          |
| 26            | Sulawesi Selatan         | 57 660                         | 92 377           | 4 404 165          |
| 27            | Sulawesi Tenggara        | 26 699                         | 7 965            | 1 180 733          |
| 28            | Gorontalo                | 16 172                         | 2 392            | 636 654            |
| 29            | Sulawesi Barat           | 6 292                          | 13 823           | 659 966            |
| 30            | Maluku                   | 8 646                          | 14 541           | 927 338            |
| 31            | Maluku Utara             | 27 338                         | 12 127           | 540 891            |
| 32            | Papua Barat              | 16 265                         | 50 342           | 573 725            |
| 33            | Papua                    | 5 812                          | 10 760           | 2 963 280          |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>1 822 908</b>               | <b>1 142 067</b> | <b>124 885 737</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki         |              | Perempuan         |              | Jumlah             |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                      | Jumlah            | Persentase   | Jumlah            | Persentase   |                    |
| (1)                  | (2)               | (3)          | (4)               | (5)          | (6)                |
| Aceh                 | 1 734 675         | 49,23        | 1 789 099         | 50,77        | 3 523 774          |
| Sumatera Utara       | 4 839 043         | 49,45        | 4 946 962         | 50,55        | 9 786 005          |
| Sumatera Barat       | 1 836 987         | 49,40        | 1 881 250         | 50,60        | 3 718 237          |
| Riau                 | 1 963 287         | 50,82        | 1 900 018         | 49,18        | 3 863 305          |
| Jambi                | 1 249 403         | 50,47        | 1 226 252         | 49,53        | 2 475 655          |
| Sumatera Selatan     | 2 965 679         | 50,46        | 2 911 896         | 49,54        | 5 877 575          |
| Bengkulu             | 708 242           | 50,62        | 690 866           | 49,38        | 1 399 108          |
| Lampung              | 3 101 750         | 51,06        | 2 972 387         | 48,94        | 6 074 137          |
| Kep. Bangka Belitung | 475 784           | 51,02        | 456 785           | 48,98        | 932 569            |
| Kepulauan Riau       | 619 882           | 50,42        | 609 542           | 49,58        | 1 229 424          |
| DKI Jakarta          | 3 874 021         | 49,91        | 3 887 577         | 50,09        | 7 761 598          |
| Jawa Barat           | 16 727 451        | 50,27        | 16 549 454        | 49,73        | 33 276 905         |
| Jawa Tengah          | 13 901 368        | 49,83        | 13 995 534        | 50,17        | 27 896 902         |
| DI Yogyakarta        | 1 330 112         | 48,69        | 1 401 762         | 51,31        | 2 731 874          |
| Jawa Timur           | 15 226 058        | 49,25        | 15 686 936        | 50,75        | 30 912 994         |
| Banten               | 4 100 146         | 50,54        | 4 012 331         | 49,46        | 8 112 477          |
| Bali                 | 1 556 427         | 49,72        | 1 573 861         | 50,28        | 3 130 288          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1 800 915         | 49,11        | 1 866 338         | 50,89        | 3 667 253          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1 660 843         | 48,97        | 1 730 773         | 51,03        | 3 391 616          |
| Kalimantan Barat     | 1 879 884         | 50,98        | 1 807 275         | 49,02        | 3 687 159          |
| Kalimantan Tengah    | 903 010           | 51,51        | 850 214           | 48,49        | 1 753 224          |
| Kalimantan Selatan   | 1 436 959         | 50,08        | 1 432 207         | 49,92        | 2 869 166          |
| Kalimantan Timur     | 1 285 439         | 51,80        | 1 195 947         | 48,20        | 2 481 386          |
| Kalimantan Utara     | 236 229           | 52,48        | 213 879           | 47,52        | 450 108            |
| Sulawesi Utara       | 965 444           | 50,60        | 942 671           | 49,40        | 1 908 115          |
| Sulawesi Tengah      | 994 173           | 50,91        | 958 637           | 49,09        | 1 952 810          |
| Sulawesi Selatan     | 2 987 564         | 48,50        | 3 171 811         | 51,50        | 6 159 375          |
| Sulawesi Tenggara    | 860 459           | 49,92        | 863 080           | 50,08        | 1 723 539          |
| Gorontalo            | 405 117           | 49,84        | 407 684           | 50,16        | 812 801            |
| Sulawesi Barat       | 433 985           | 50,16        | 431 259           | 49,84        | 865 244            |
| Maluku               | 622 398           | 49,16        | 643 627           | 50,84        | 1 266 025          |
| Maluku Utara         | 405 031           | 50,38        | 398 952           | 49,62        | 803 983            |
| Papua                | 1 892 236         | 53,41        | 1 650 308         | 46,59        | 3 542 544          |
| Papua Barat          | 385 945           | 51,99        | 356 346           | 48,01        | 742 291            |
| Luar Negeri          | 865 700           | 43,48        | 1 125 445         | 56,52        | 1 991 145          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>96 231 646</b> | <b>49,92</b> | <b>96 538 965</b> | <b>50,08</b> | <b>192 770 611</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 2.41** Jumlah Penduduk, Pemilih Terdaftar, Kursi DPR, dan Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2014

| No  | Provinsi                 | Jumlah Penduduk    | Jumlah Pemilih Terdaftar | Jumlah Kursi DPR untuk tiap provinsi | Jumlah Suara yang diperoleh Parpol |
|-----|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2)                      | (3)                | (4)                      | (5)                                  | (6)                                |
| 1   | Nanggroe Aceh Darussalam | 5 015 234          | 3 315 094                | 13                                   | 2 316 226                          |
| 2   | Sumatera Utara           | 15 227 719         | 9 736 732                | 30                                   | 6 124 359                          |
| 3   | Sumatera Barat           | 5 617 977          | 3 622 465                | 14                                   | 2 405 339                          |
| 4   | Riau                     | 6 456 322          | 4 079 513                | 11                                   | 2 669 684                          |
| 5   | Jambi                    | 3 532 126          | 2 446 745                | 7                                    | 1 691 958                          |
| 6   | Sumatera Selatan         | 8 528 719          | 5 764 278                | 17                                   | 3 943 842                          |
| 7   | Bengkulu                 | 1 996 538          | 1 358 511                | 4                                    | 923 755                            |
| 8   | Lampung                  | 9 586 492          | 5 877 214                | 18                                   | 4 059 500                          |
| 9   | Bangka Belitung          | 1 349 199          | 918 813                  | 3                                    | 583 447                            |
| 10  | Kepulauan Riau           | 1 895 590          | 1 278 669                | 3                                    | 822 336                            |
| 11  | DKI Jakarta              | 9 603 417          | 7 001 520                | 21                                   | 4 891 034                          |
| 12  | Jawa Barat               | 39 910 274         | 32 561 771               | 91                                   | 21 190 627                         |
| 13  | Jawa Tengah              | 32 578 357         | 27 126 060               | 77                                   | 17 603 459                         |
| 14  | DI Yogyakarta            | 3 458 029          | 2 723 621                | 8                                    | 2 059 453                          |
| 15  | Jawa Timur               | 37 269 885         | 30 398 769               | 87                                   | 19 992 320                         |
| 16  | Banten                   | 9 938 820          | 7 861 064                | 22                                   | 4 841 859                          |
| 17  | Bali                     | 4 227 705          | 2 936 235                | 9                                    | 2 024 250                          |
| 18  | Nusa Tenggara Barat      | 5 398 573          | 3 468 251                | 10                                   | 2 412 489                          |
| 19  | Nusa Tenggara Timur      | 5 343 902          | 3 094 988                | 13                                   | 2 355 161                          |
| 20  | Kalimantan Barat         | 5 193 272          | 3 479 368                | 10                                   | 2 478 262                          |
| 21  | Kalimantan Tengah        | 2 640 070          | 1 778 972                | 6                                    | 1 139 544                          |
| 22  | Kalimantan Selatan       | 4 145 843          | 2 785 530                | 11                                   | 1 837 931                          |
| 23  | Kalimantan Timur         | 4 154 954          | 2 847 865                | 8                                    | 1 798 439                          |
| 24  | Sulawesi Utara           | 2 583 511          | 1 859 315                | 6                                    | 1 409 946                          |
| 25  | Sulawesi Tengah          | 2 935 343          | 1 901 810                | 6                                    | 1 424 748                          |
| 26  | Sulawesi Selatan         | 9 368 107          | 6 259 041                | 24                                   | 4 404 165                          |
| 27  | Sulawesi Tenggara        | 2 691 623          | 1 767 004                | 5                                    | 1 180 733                          |
| 28  | Gorontalo                | 1 147 528          | 797 622                  | 3                                    | 636 654                            |
| 29  | Sulawesi Barat           | 1 589 162          | 871 684                  | 3                                    | 659 966                            |
| 30  | Maluku                   | 1 866 248          | 1 181 065                | 4                                    | 927 338                            |
| 31  | Maluku Utara             | 1 258 354          | 819 020                  | 3                                    | 540 891                            |
| 32  | Papua                    | 4 224 232          | 3 200 277                | 10                                   | 2 963 280                          |
| 33  | Papua Barat              | 1 091 171          | 709 101                  | 3                                    | 573 725                            |
|     | <b>Jumlah</b>            | <b>251 824 296</b> | <b>185 827 987</b>       | <b>560</b>                           | <b>124 885 737</b>                 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.4 Jumlah Pemilih yang Teraftar dalam DPTB pada Pilpres Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki      |              | Perempuan      |              | Jumlah           |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
|                      | Jumlah         | Persentase   | Jumlah         | Persentase   |                  |
| (1)                  | (2)            | (3)          | (4)            | (5)          | (6)              |
| Aceh                 | 10 335         | 61,66        | 6 426          | 38,34        | 16 761           |
| Sumatera Utara       | 32 071         | 57,57        | 23 635         | 42,43        | 55 706           |
| Sumatera Barat       | 17 093         | 51,45        | 16 129         | 48,55        | 33 222           |
| Riau                 | 27 937         | 51,87        | 25 926         | 48,13        | 53 863           |
| Jambi                | 9 122          | 59,30        | 6 261          | 40,70        | 15 383           |
| Sumatera Selatan     | 13 140         | 58,03        | 9 504          | 41,97        | 22 644           |
| Bengkulu             | 4 906          | 57,55        | 3 619          | 42,45        | 8 525            |
| Lampung              | 13 155         | 55,01        | 10 757         | 44,99        | 23 912           |
| Kep. Bangka Belitung | 6 098          | 63,91        | 3 444          | 36,09        | 9 542            |
| Kepulauan Riau       | 14 767         | 50,69        | 14 366         | 49,31        | 29 133           |
| DKI Jakarta          | 61 059         | 49,80        | 61 559         | 50,20        | 122 618          |
| Jawa Barat           | 107 889        | 50,97        | 103 767        | 49,03        | 211 656          |
| Jawa Tengah          | 52 657         | 48,24        | 56 496         | 51,76        | 109 153          |
| DI Yogyakarta        | 25 818         | 45,04        | 31 501         | 54,96        | 57 319           |
| Jawa Timur           | 91 579         | 52,51        | 82 834         | 47,49        | 174 413          |
| Banten               | 38 810         | 50,89        | 37 460         | 49,11        | 76 270           |
| Bali                 | 11 525         | 49,77        | 11 631         | 50,23        | 23 156           |
| Nusa Tenggara Barat  | 7 947          | 59,06        | 5 509          | 40,94        | 13 456           |
| Nusa Tenggara Timur  | 9 185          | 57,84        | 6 694          | 42,16        | 15 879           |
| Kalimantan Barat     | 21 089         | 59,49        | 14 362         | 40,51        | 35 451           |
| Kalimantan Tengah    | 31 112         | 65,43        | 16 437         | 34,57        | 47 549           |
| Kalimantan Selatan   | 23 301         | 63,34        | 13 485         | 36,66        | 36 786           |
| Kalimantan Timur     | 36 413         | 65,40        | 19 262         | 34,60        | 55 675           |
| Kalimantan Utara     | 6 964          | 65,97        | 3 592          | 34,03        | 10 556           |
| Sulawesi Utara       | 9 996          | 54,39        | 8 383          | 45,61        | 18 379           |
| Sulawesi Tengah      | 9 966          | 60,20        | 6 588          | 39,80        | 16 554           |
| Sulawesi Selatan     | 19 989         | 56,21        | 15 574         | 43,79        | 35 563           |
| Sulawesi Tenggara    | 6 442          | 60,40        | 4 224          | 39,60        | 10 666           |
| Gorontalo            | 5 988          | 52,36        | 5 449          | 47,64        | 11 437           |
| Sulawesi Barat       | 4 352          | 56,76        | 3 315          | 43,24        | 7 667            |
| Maluku               | 3 761          | 57,20        | 2 814          | 42,80        | 6 575            |
| Maluku Utara         | 7 822          | 71,56        | 3 109          | 28,44        | 10 931           |
| Papua                | 3 682          | 76,85        | 1 109          | 23,15        | 4 791            |
| Papua Barat          | 5 031          | 64,70        | 2 745          | 35,30        | 7 776            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>751 001</b> | <b>54,07</b> | <b>637 966</b> | <b>45,93</b> | <b>1 388 967</b> |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.6 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi             | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK |                  |
|----------------------|---|------------------|
|                      | Pemilihan Presiden                      | Pemilihan DPR RI |
| (1)                  | (2)                                     | (3)              |
| Aceh                 | 84 934                                  | 84 934           |
| Sumatera Utara       | 513 800                                 | 513 833          |
| Sumatera Barat       | 130 928                                 | 130 928          |
| Riau                 | 268 885                                 | 268 885          |
| Jambi                | 87 110                                  | 87 110           |
| Sumatera Selatan     | 161 288                                 | 161 288          |
| Bengkulu             | 44 870                                  | 44 870           |
| Lampung              | 195 437                                 | 195 437          |
| Kep. Bangka Belitung | 32 931                                  | 32 931           |
| Kepulauan Riau       | 101 932                                 | 101 996          |
| DKI Jakarta          | 225 556                                 | 551 508          |
| Jawa Barat           | 1 121 736                               | 1 121 736        |
| Jawa Tengah          | 301 383                                 | 301 386          |
| DI Yogyakarta        | 49 823                                  | 49 823           |
| Jawa Timur           | 444 707                                 | 444 923          |
| Banten               | 328 589                                 | 328 591          |
| Bali                 | 67 035                                  | 67 035           |
| Nusa Tenggara Barat  | 111 347                                 | 111 347          |
| Nusa Tenggara Timur  | 92 994                                  | 92 994           |
| Kalimantan Barat     | 83 519                                  | 83 519           |
| Kalimantan Tengah    | 103 223                                 | 103 229          |
| Kalimantan Selatan   | 89 254                                  | 89 254           |
| Kalimantan Timur     | 125 415                                 | 125 415          |
| Kalimantan Utara     | 30 210                                  | 30 210           |
| Sulawesi Utara       | 59 561                                  | 59 561           |
| Sulawesi Tengah      | 101 094                                 | 101 094          |
| Sulawesi Selatan     | 230 607                                 | 230 932          |
| Sulawesi Tenggara    | 62 622                                  | 62 622           |
| Gorontalo            | 11 498                                  | 11 498           |
| Sulawesi Barat       | 38 007                                  | 38 007           |
| Maluku               | 55 500                                  | 55 595           |
| Maluku Utara         | 39 449                                  | 39 449           |
| Papua                | 52 019                                  | 50 592           |
| Papua Barat          | 45 350                                  | 45 350           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>5 492 613</b>                        | <b>5 817 882</b> |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.16 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi                   | Jumlah DPT         | Jumlah Suara       |                             | Partisipasi Pemilih (%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                            |                    | Pengguna Hak Pilih | Tidak Menggunakan Hak Pilih |                         |
| (1)                        | (2)                | (3)                | (4)                         | (5)                     |
| Aceh                       | 3 523 774          | 2 885 136          | 638 638                     | 81,88                   |
| Sumatera Utara             | 9 786 005          | 7 626 315          | 2 159 690                   | 77,93                   |
| Sumatera Barat             | 3 718 237          | 2 930 696          | 787 541                     | 78,82                   |
| Riau                       | 3 863 305          | 3 260 022          | 603 283                     | 84,38                   |
| Jambi                      | 2 475 655          | 2 107 678          | 367 977                     | 85,14                   |
| Sumatera Selatan           | 5 877 575          | 4 935 121          | 942 454                     | 83,97                   |
| Bengkulu                   | 1 399 108          | 1 194 267          | 204 841                     | 85,36                   |
| Lampung                    | 6 074 137          | 4 890 007          | 1 184 130                   | 80,51                   |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 932 569            | 803 341            | 129 228                     | 86,14                   |
| Kepulauan Riau             | 1 229 424          | 1 019 219          | 210 205                     | 82,90                   |
| DKI Jakarta                | 7 761 598          | 6 365 415          | 1 396 183                   | 82,01                   |
| Jawa Barat                 | 33 276 905         | 27 405 664         | 5 871 241                   | 82,36                   |
| Jawa Tengah                | 27 896 902         | 22 344 135         | 5 552 767                   | 80,10                   |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 731 874          | 2 414 393          | 317 481                     | 88,38                   |
| Jawa Timur                 | 30 912 994         | 25 456 343         | 5 456 651                   | 82,35                   |
| Banten                     | 8 112 477          | 6 752 646          | 1 359 831                   | 83,24                   |
| Bali                       | 3 130 288          | 2 606 201          | 524 087                     | 83,26                   |
| Nusa Tenggara Barat        | 3 667 253          | 3 036 391          | 630 862                     | 82,80                   |
| Nusa Tenggara Timur        | 3 391 616          | 2 715 096          | 676 520                     | 80,05                   |
| Kalimantan Barat           | 3 687 159          | 3 023 397          | 663 762                     | 82,00                   |
| Kalimantan Tengah          | 1 753 224          | 1 385 477          | 367 747                     | 79,02                   |
| Kalimantan Selatan         | 2 869 166          | 2 370 469          | 498 697                     | 82,62                   |
| Kalimantan Timur           | 2 481 386          | 1 987 961          | 493 425                     | 80,11                   |
| Sulawesi Utara             | 1 908 115          | 1 589 731          | 318 384                     | 83,31                   |
| Sulawesi Tengah            | 1 952 810          | 1 637 512          | 315 298                     | 83,85                   |
| Sulawesi Selatan           | 6 159 375          | 5 020 111          | 1 139 264                   | 81,50                   |
| Sulawesi Tenggara          | 1 723 539          | 1 422 883          | 300 656                     | 82,56                   |
| Gorontalo                  | 812 801            | 720 996            | 91 805                      | 88,71                   |
| Sulawesi Barat             | 865 249            | 749 888            | 115 361                     | 86,67                   |
| Maluku                     | 1 266 025          | 1 002 283          | 263 742                     | 79,17                   |
| Maluku Utara               | 803 983            | 662 394            | 141 589                     | 82,39                   |
| Papua                      | 3 542 544          | 3 390 337          | 152 207                     | 95,70                   |
| Papua Barat                | 742 291            | 647 542            | 94 749                      | 87,24                   |
| Kalimantan Utara           | 450 108            | 356 825            | 93 283                      | 79,28                   |
| <b>Jumlah</b>              | <b>190 779 466</b> | <b>156 715 892</b> | <b>34 063 579</b>           | <b>82,15</b>            |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



Tabel 3.18 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPR RI Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi                   | Pengguna Hak Pilih Disabilitas |               |                | Partisipasi Pemilih Disabilitas (%) |              |              |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            | L                              | P             | Jumlah         | L                                   | P            | Jumlah       |
| (1)                        | (2)                            | (3)           | (4)            | (5)                                 | (6)          | (7)          |
| Aceh                       | 3 610                          | 2 360         | 5 970          | 91,67                               | 56,76        | 73,74        |
| Sumatera Utara             | 2 929                          | 3 827         | 6 756          | 32,00                               | 39,23        | 35,73        |
| Sumatera Barat             | 2 726                          | 3 954         | 6 680          | 57,50                               | 69,97        | 64,28        |
| Riau                       | 1 294                          | 1 442         | 2 736          | 54,81                               | 58,10        | 56,49        |
| Jambi                      | 1 074                          | 1 338         | 2 412          | 56,83                               | 67,54        | 62,31        |
| Sumatera Selatan           | 1 618                          | 1 893         | 3 511          | 48,68                               | 57,28        | 52,96        |
| Bengkulu                   | 1 147                          | 1 621         | 2 768          | 70,20                               | 80,89        | 76,09        |
| Lampung                    | 1 035                          | 1 023         | 2 058          | 32,55                               | 36,90        | 34,58        |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 475                            | 483           | 958            | 32,27                               | 35,10        | 33,64        |
| Kepulauan Riau             | 596                            | 918           | 1 514          | 73,85                               | 83,00        | 79,14        |
| DKI Jakarta                | 3 933                          | 3 996         | 7 929          | 71,46                               | 71,47        | 71,46        |
| Jawa Barat                 | 9 784                          | 9 075         | 18 859         | 38,00                               | 35,78        | 36,90        |
| Jawa Tengah                | 10 837                         | 8 740         | 19 577         | 36,75                               | 31,84        | 34,38        |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 410                          | 2 092         | 4 502          | 40,25                               | 38,33        | 39,34        |
| Jawa Timur                 | 9 499                          | 8 705         | 18 204         | 37,30                               | 34,97        | 36,15        |
| Banten                     | 1 398                          | 1 375         | 2 773          | 35,57                               | 38,72        | 37,07        |
| Bali                       | 793                            | 627           | 1 420          | 36,39                               | 34,34        | 35,46        |
| Nusa Tenggara Barat        | 2 001                          | 2 602         | 4 603          | 62,98                               | 67,58        | 65,50        |
| Nusa Tenggara Timur        | 5 123                          | 7 008         | 12 131         | 75,22                               | 81,19        | 78,55        |
| Kalimantan Barat           | 2 279                          | 2 329         | 4 608          | 46,52                               | 52,41        | 49,32        |
| Kalimantan Tengah          | 799                            | 914           | 1 713          | 43,49                               | 60,33        | 51,10        |
| Kalimantan Selatan         | 1 685                          | 1 895         | 3 580          | 40,28                               | 46,20        | 43,21        |
| Kalimantan Timur           | 1 184                          | 1 211         | 2 395          | 57,31                               | 64,55        | 60,76        |
| Sulawesi Utara             | 2 297                          | 2 698         | 4 995          | 82,01                               | 85,65        | 83,94        |
| Sulawesi Tengah            | 1 552                          | 2 003         | 3 555          | 82,64                               | 91,88        | 87,60        |
| Sulawesi Selatan           | 4 660                          | 5 825         | 10 485         | 49,33                               | 51,58        | 50,56        |
| Sulawesi Tenggara          | 2 197                          | 3 467         | 5 664          | 69,88                               | 77,86        | 74,56        |
| Gorontalo                  | 840                            | 927           | 1 767          | 58,58                               | 66,45        | 62,46        |
| Sulawesi Barat             | 975                            | 1 387         | 2 362          | 70,14                               | 75,79        | 73,35        |
| Maluku                     | 1 355                          | 2 231         | 3 586          | 87,19                               | 92,38        | 90,35        |
| Maluku Utara               | 655                            | 882           | 1 537          | 93,57                               | 92,26        | 92,81        |
| Papua                      | 522                            | 450           | 972            | 63,74                               | 64,84        | 64,24        |
| Papua Barat                | 143                            | 185           | 328            | 88,27                               | 96,35        | 92,66        |
| Kalimantan Utara           | 340                            | 432           | 772            | 60,93                               | 76,60        | 68,81        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>83 765</b>                  | <b>89 915</b> | <b>173 680</b> | <b>47,15</b>                        | <b>49,33</b> | <b>48,25</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 3.19 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi                   | Penggawa Hak Pilih Disabilitas |               |                | Partisipasi Pemilih Disabilitas (%) |              |              |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            | L                              | P             | Jumlah         | L                                   | P            | Jumlah       |
| (1)                        | (2)                            | (3)           | (4)            | (5)                                 | (6)          | (7)          |
| Aceh                       | 2 126                          | 2 558         | 4 684          | 53,92                               | 60,34        | 57,25        |
| Sumatera Utara             | 2 946                          | 3 857         | 6 803          | 52,82                               | 62,35        | 57,83        |
| Sumatera Barat             | 2 740                          | 3 966         | 6 706          | 57,79                               | 70,18        | 64,53        |
| Riau                       | 1 284                          | 1 370         | 2 654          | 56,59                               | 58,20        | 57,41        |
| Jambi                      | 1 074                          | 1 338         | 2 412          | 56,83                               | 67,54        | 62,31        |
| Sumatera Selatan           | 1 618                          | 1 893         | 3 511          | 48,68                               | 57,28        | 52,96        |
| Bengkulu                   | 1 147                          | 1 621         | 2 768          | 70,20                               | 80,89        | 76,09        |
| Lampung                    | 972                            | 927           | 1 899          | 30,57                               | 33,44        | 31,91        |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 473                            | 483           | 956            | 32,13                               | 35,10        | 33,57        |
| Kepulauan Riau             | 618                            | 950           | 1 568          | 65,74                               | 76,61        | 71,93        |
| DKI Jakarta                | 3 880                          | 4 035         | 7 915          | 75,41                               | 81,52        | 78,41        |
| Jawa Barat                 | 9 820                          | 9 119         | 18 939         | 38,14                               | 35,96        | 37,06        |
| Jawa Tengah                | 11 131                         | 8 877         | 20 008         | 37,74                               | 32,34        | 35,14        |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 416                          | 2 113         | 4 529          | 40,35                               | 38,71        | 39,57        |
| Jawa Timur                 | 9 241                          | 8 830         | 18 071         | 36,63                               | 35,72        | 36,18        |
| Banten                     | 1 410                          | 1 371         | 2 781          | 35,88                               | 38,61        | 37,17        |
| Bali                       | 793                            | 627           | 1 420          | 36,39                               | 34,34        | 35,46        |
| Nusa Tenggara Barat        | 2 000                          | 2 599         | 4 599          | 62,97                               | 67,49        | 65,45        |
| Nusa Tenggara Timur        | 5 056                          | 6 875         | 11 931         | 74,23                               | 79,65        | 77,26        |
| Kalimantan Barat           | 2 079                          | 2 169         | 4 248          | 45,70                               | 53,50        | 49,38        |
| Kalimantan Tengah          | 791                            | 904           | 1 695          | 43,08                               | 59,75        | 50,61        |
| Kalimantan Selatan         | 1 674                          | 1 871         | 3 545          | 40,20                               | 46,00        | 43,07        |
| Kalimantan Timur           | 1 189                          | 1 215         | 2 404          | 57,55                               | 64,77        | 60,98        |
| Sulawesi Utara             | 2 299                          | 2 684         | 4 983          | 76,66                               | 80,50        | 78,68        |
| Sulawesi Tengah            | 1 544                          | 2 003         | 3 547          | 82,22                               | 91,88        | 87,41        |
| Sulawesi Selatan           | 4 652                          | 5 828         | 10 480         | 49,25                               | 51,61        | 50,53        |
| Sulawesi Tenggara          | 2 197                          | 3 465         | 5 662          | 69,88                               | 77,81        | 74,53        |
| Gorontalo                  | 836                            | 927           | 1 763          | 58,30                               | 66,45        | 62,32        |
| Sulawesi Barat             | 975                            | 1 390         | 2 365          | 70,19                               | 75,83        | 73,40        |
| Maluku                     | 1 359                          | 2 247         | 3 606          | 84,62                               | 91,56        | 88,82        |
| Maluku Utara               | 655                            | 882           | 1 537          | 93,57                               | 92,26        | 92,81        |
| Papua                      | 540                            | 465           | 1 005          | 64,59                               | 66,15        | 65,30        |
| Papua Barat                | 144                            | 181           | 325            | 36,55                               | 46,41        | 41,45        |
| Kalimantan Utara           | 340                            | 439           | 779            | 60,93                               | 77,84        | 69,43        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>82 019</b>                  | <b>90 079</b> | <b>172 098</b> | <b>47,23</b>                        | <b>50,61</b> | <b>48,94</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.24 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019**  
(lanjutan)

| Provinsi             | Partai Politik   |                   |                  |                | Suara Tidak Sah   |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                      | Hanura           | Demokrat          | PBB              | PKPI           |                   |
| (1)                  | (14)             | (15)              | (16)             | (17)           | (18)              |
| Aceh                 | 25 686           | 413 438           | 66 447           | 8 471          | 321 597           |
| Sumatera Utara       | 125 842          | 391 489           | 57 919           | 17 960         | 914 328           |
| Sumatera Barat       | 47 790           | 371 058           | 45 873           | 4 322          | 201 921           |
| Riau                 | 67 161           | 326 694           | 29 515           | 5 710          | 339 471           |
| Jambi                | 13 944           | 156 812           | 18 212           | 2 601          | 321 604           |
| Sumatera Selatan     | 86 437           | 396 609           | 56 173           | 10 128         | 598 478           |
| Bengkulu             | 16 392           | 38 426            | 8 210            | 10 633         | 207 382           |
| Lampung              | 40 637           | 491 786           | 15 522           | 8 699          | 544 007           |
| Kep. Bangka Belitung | 12 084           | 58 426            | 37 524           | 1 735          | 121 188           |
| Kepulauan Riau       | 16 054           | 76 884            | 7 534            | 994            | 100 587           |
| DKI Jakarta          | 63 245           | 360 303           | 47 834           | 12 844         | 546 941           |
| Jawa Barat           | 271 204          | 1 830 565         | 236 304          | 45 372         | 2 970 984         |
| Jawa Tengah          | 166 774          | 1 132 420         | 45 278           | 21 538         | 2 911 656         |
| DI Yogyakarta        | 6 987            | 62 708            | 9 378            | 3 667          | 230 006           |
| Jawa Timur           | 244 329          | 1 841 145         | 93 717           | 34 924         | 3 361 187         |
| Banten               | 108 965          | 553 391           | 51 416           | 10 485         | 918 132           |
| Bali                 | 84 012           | 118 830           | 2 445            | 3 417          | 292 835           |
| Nusa Tenggara Barat  | 102 095          | 207 732           | 73 290           | 12 094         | 364 468           |
| Nusa Tenggara Timur  | 135 946          | 202 100           | 9 152            | 16 115         | 142 976           |
| Kalimantan Barat     | 80 680           | 173 880           | 11 161           | 12 590         | 293 543           |
| Kalimantan Tengah    | 12 914           | 87 504            | 4 759            | 2 940          | 182 090           |
| Kalimantan Selatan   | 16 328           | 68 725            | 23 681           | 4 312          | 354 232           |
| Kalimantan Timur     | 28 034           | 112 987           | 12 558           | 2 883          | 246 127           |
| Kalimantan Utara     | 9 317            | 37 616            | 2 239            | 1 008          | 28 799            |
| Sulawesi Utara       | 37 630           | 69 943            | 3 736            | 3 862          | 110 269           |
| Sulawesi Tengah      | 73 881           | 127 562           | 20 377           | 3 657          | 87 088            |
| Sulawesi Selatan     | 43 249           | 398 047           | 36 289           | 7 683          | 359 080           |
| Sulawesi Tenggara    | 12 039           | 163 684           | 33 562           | 1 498          | 134 873           |
| Gorontalo            | 7 041            | 35 212            | 1 937            | 590            | 32 587            |
| Sulawesi Barat       | 26 208           | 83 499            | 4 510            | 1 541          | 51 143            |
| Maluku               | 45 426           | 62 220            | 5 060            | 9 758          | 52 925            |
| Maluku Utara         | 28 025           | 43 180            | 8 505            | 3 527          | 39 682            |
| Papua                | 89 401           | 313 485           | 15 840           | 21 600         | 75 479            |
| Papua Barat          | 15 750           | 68 147            | 3 891            | 3 617          | 46 288            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>2 161 507</b> | <b>10 876 507</b> | <b>1 099 848</b> | <b>312 775</b> | <b>17 503 953</b> |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.22 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi<br>(1)            | Sah<br>(2)         | Tidak Sah<br>(3)  | Jumlah<br>(4)      | Suara Tidak Sah (%)<br>(5) |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Aceh                       | 2 495 832          | 389 304           | 2 885 136          | 13,49                      |
| Sumatera Utara             | 6 303 283          | 1 323 032         | 7 626 315          | 17,35                      |
| Sumatera Barat             | 2 522 971          | 407 725           | 2 930 696          | 13,91                      |
| Riau                       | 2 762 127          | 497 874           | 3 260 001          | 15,27                      |
| Jambi                      | 1 680 321          | 427 357           | 2 107 678          | 20,28                      |
| Sumatera Selatan           | 4 057 443          | 877 678           | 4 935 121          | 17,78                      |
| Bengkulu                   | 974 339            | 219 928           | 1 194 267          | 18,42                      |
| Lampung                    | 4 025 876          | 864 131           | 4 890 007          | 17,67                      |
| Kepulauan Bangka Belitung  | 659 134            | 144 207           | 803 341            | 17,95                      |
| Kepulauan Riau             | 902 110            | 117 109           | 1 019 219          | 11,49                      |
| DKI Jakarta                | 5 531 630          | 833 785           | 6 365 415          | 13,10                      |
| Jawa Barat                 | 21 556 998         | 5 848 666         | 27 405 664         | 21,34                      |
| Jawa Tengah                | 16 419 199         | 5 924 935         | 22 344 134         | 26,52                      |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 189 337          | 225 056           | 2 414 393          | 9,32                       |
| Jawa Timur                 | 19 030 033         | 6 426 310         | 25 456 343         | 25,24                      |
| Banten                     | 5 204 216          | 1 548 430         | 6 752 646          | 22,93                      |
| Bali                       | 2 320 137          | 286 064           | 2 606 201          | 10,98                      |
| Nusa Tenggara Barat        | 2 537 688          | 498 703           | 3 036 391          | 16,42                      |
| Nusa Tenggara Timur        | 2 541 067          | 174 029           | 2 715 096          | 6,41                       |
| Kalimantan Barat           | 2 648 738          | 374 659           | 3 023 397          | 12,39                      |
| Kalimantan Tengah          | 1 174 827          | 210 650           | 1 385 477          | 15,20                      |
| Kalimantan Selatan         | 1 923 164          | 447 305           | 2 370 469          | 18,87                      |
| Kalimantan Timur           | 1 624 684          | 363 277           | 1 987 961          | 18,27                      |
| Sulawesi Utara             | 1 462 868          | 126 863           | 1 589 731          | 7,98                       |
| Sulawesi Tengah            | 1 535 667          | 101 845           | 1 637 512          | 6,22                       |
| Sulawesi Selatan           | 4 513 402          | 506 709           | 5 020 111          | 10,09                      |
| Sulawesi Tenggara          | 1 239 622          | 183 261           | 1 422 883          | 12,88                      |
| Gorontalo                  | 686 155            | 34 841            | 720 996            | 4,83                       |
| Sulawesi Barat             | 692 802            | 57 086            | 749 888            | 7,61                       |
| Maluku                     | 952 685            | 49 598            | 1 002 283          | 4,95                       |
| Maluku Utara               | 620 962            | 41 432            | 662 394            | 6,25                       |
| Papua                      | 3 234 398          | 155 939           | 3 390 337          | 4,60                       |
| Papua Barat                | 593 807            | 53 735            | 647 542            | 8,30                       |
| Kalimantan Utara           | 320 527            | 36 298            | 356 825            | 10,17                      |
| Luar Negeri                | -                  | -                 | -                  | -                          |
| <b>Jumlah</b>              | <b>126 938 049</b> | <b>29 777 821</b> | <b>156 715 870</b> | <b>19,00</b>               |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.24 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi             | Partai Politik |            |            |            |            |         |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                      | PKB            | Gerindra   | PDI-P      | Golkar     | NasDem     | Garuda  |
| (1)                  | (2)            | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)     |
| Aceh                 | 186 314        | 376 784    | 111 381    | 325 421    | 177 009    | 15 583  |
| Sumatera Utara       | 247 298        | 904 054    | 1 404 548  | 878 693    | 819 485    | 19 060  |
| Sumatera Barat       | 88 961         | 560 835    | 134 232    | 202 182    | 206 432    | 17 510  |
| Riau                 | 187 154        | 386 835    | 378 913    | 351 931    | 163 076    | 14 318  |
| Jambi                | 120 092        | 224 103    | 233 633    | 360 297    | 124 126    | 7 857   |
| Sumatera Selatan     | 317 657        | 648 303    | 543 675    | 671 290    | 641 144    | 29 097  |
| Bengkulu             | 76 751         | 130 846    | 137 006    | 136 581    | 94 172     | 7 582   |
| Lampung              | 433 087        | 488 838    | 887 416    | 509 014    | 365 723    | 27781   |
| Kep. Bangka Belitung | 19 227         | 75 153     | 169 644    | 101 681    | 83 447     | 3 722   |
| Kepulauan Riau       | 34 342         | 77 798     | 148 887    | 173 998    | 123 341    | 3 790   |
| DKI Jakarta          | 304 163        | 988 859    | 1 625 042  | 322 764    | 334 660    | 16 804  |
| Jawa Barat           | 1 896 257      | 4 320 050  | 3 510 525  | 3 226 962  | 1 213 414  | 114 894 |
| Jawa Tengah          | 2 726 730      | 1 701 310  | 5 769 664  | 2 381 565  | 1 496 325  | 66 273  |
| DI Yogyakarta        | 264 698        | 191 346    | 654 088    | 152 903    | 166 680    | 8 675   |
| Jawa Timur           | 4 198 551      | 2 408 607  | 4 319 666  | 2 256 056  | 2 190 169  | 80 169  |
| Banten               | 447 805        | 876 588    | 914 719    | 683 558    | 307 248    | 25 925  |
| Bali                 | 49 695         | 109 600    | 1 257 590  | 382 607    | 102 966    | 8 825   |
| Nusa Tenggara Barat  | 190 262        | 443 321    | 195 394    | 334 570    | 161 405    | 32 648  |
| Nusa Tenggara Timur  | 199 250        | 141 282    | 450 635    | 365 266    | 510 574    | 29 665  |
| Kalimantan Barat     | 191 462        | 264 506    | 786 796    | 273 400    | 271 941    | 10 930  |
| Kalimantan Tengah    | 69 565         | 101 452    | 354 331    | 128 436    | 166 602    | 9 076   |
| Kalimantan Selatan   | 182 458        | 288 899    | 334 396    | 343 144    | 99 837     | 8 015   |
| Kalimantan Timur     | 78 000         | 194 259    | 333 404    | 350 829    | 137 593    | 4 852   |
| Kalimantan Utara     | 25 700         | 17 480     | 73 880     | 24 794     | 62 971     | 1 209   |
| Sulawesi Utara       | 17 530         | 61 811     | 564 703    | 236 697    | 248 666    | 10 005  |
| Sulawesi Tengah      | 95 900         | 207 117    | 165 504    | 194 712    | 271 513    | 26 818  |
| Sulawesi Selatan     | 259 970        | 645 464    | 380 029    | 833 382    | 684 533    | 25 857  |
| Sulawesi Tenggara    | 60 902         | 151 872    | 183 197    | 203 794    | 95 522     | 6 226   |
| Gorontalo            | 11 973         | 87 748     | 37 423     | 194 660    | 169 509    | 2 390   |
| Sulawesi Barat       | 43 449         | 96 845     | 214 365    | 52 186     | 93 943     | 6 463   |
| Maluku               | 58 701         | 94 298     | 197 648    | 93 158     | 118 307    | 7 613   |
| Maluku Utara         | 57 339         | 33 333     | 111 296    | 93 484     | 62 549     | 24 080  |
| Papua                | 399 011        | 221 282    | 368 618    | 286 762    | 787 753    | 25 433  |
| Papua Barat          | 29 843         | 73 961     | 101 713    | 103 012    | 109 157    | 3 391   |
| Jumlah               | 13 570 097     | 17 594 839 | 27 053 961 | 17 229 789 | 12 661 792 | 702 536 |

Tabel 3.15 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi             | Jumlah DPT         | Jumlah Suara       |                             | Partisipasi Pemilih (%) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                      |                    | Pengguna Hak Pilih | Tidak Menggunakan Hak Pilih |                         |
| (1)                  | (2)                | (3)                | (4)                         | (5)                     |
| Aceh                 | 3 523 774          | 2 884 076          | 639 698                     | 81,85                   |
| Sumatera Utara       | 9 786 005          | 7 618 767          | 2 167 238                   | 77,85                   |
| Sumatera Barat       | 3 718 237          | 2 929 308          | 788 929                     | 78,78                   |
| Riau                 | 3 863 305          | 3 260 719          | 602 586                     | 84,40                   |
| Jambi                | 2 475 655          | 2 107 678          | 367 977                     | 85,14                   |
| Sumatera Selatan     | 5 877 575          | 4 934 303          | 943 272                     | 83,95                   |
| Bengkulu             | 1 399 108          | 1 194 366          | 204 742                     | 85,37                   |
| Lampung              | 6 074 137          | 4 889 726          | 1 184 411                   | 80,50                   |
| Kep. Bangka Belitung | 932 569            | 803 356            | 129 213                     | 86,14                   |
| Kepulauan Riau       | 1 229 424          | 1 019 986          | 209 438                     | 82,96                   |
| DKI Jakarta          | 9 752 743          | 7 197 230          | 2 555 513                   | 73,80                   |
| Jawa Barat           | 33 276 905         | 27 387 180         | 5 889 725                   | 82,30                   |
| Jawa Tengah          | 27 896 902         | 22 329 668         | 5 567 234                   | 80,04                   |
| DI Yogyakarta        | 2 731 874          | 2 414 361          | 317 513                     | 88,38                   |
| Jawa Timur           | 30 912 994         | 25 430 726         | 5 482 268                   | 82,27                   |
| Banten               | 8 112 477          | 6 751 896          | 1 360 581                   | 83,23                   |
| Bali                 | 3 130 288          | 2 606 201          | 524 087                     | 83,26                   |
| Nusa Tenggara Barat  | 3 667 253          | 3 035 369          | 631 884                     | 82,77                   |
| Nusa Tenggara Timur  | 3 391 616          | 2 714 192          | 677 424                     | 80,03                   |
| Kalimantan Barat     | 3 687 159          | 3 023 420          | 663 739                     | 82,00                   |
| Kalimantan Tengah    | 1 753 224          | 1 384 929          | 368 295                     | 78,99                   |
| Kalimantan Selatan   | 2 869 166          | 2 370 239          | 498 927                     | 82,61                   |
| Kalimantan Timur     | 2 481 386          | 1 988 674          | 492 712                     | 80,14                   |
| Kalimantan Utara     | 450 108            | 356 925            | 93 183                      | 79,30                   |
| Sulawesi Utara       | 1 908 115          | 1 589 638          | 318 477                     | 83,31                   |
| Sulawesi Tengah      | 1 952 810          | 1 637 412          | 315 398                     | 83,85                   |
| Sulawesi Selatan     | 6 159 375          | 5 018 582          | 1 140 793                   | 81,48                   |
| Sulawesi Tenggara    | 1 723 539          | 1 422 845          | 300 694                     | 82,55                   |
| Gorontalo            | 812 801            | 721 032            | 91 769                      | 88,71                   |
| Sulawesi Barat       | 865 244            | 749 840            | 115 404                     | 86,66                   |
| Maluku               | 1 266 025          | 1 002 417          | 263 608                     | 79,18                   |
| Maluku Utara         | 803 983            | 662 437            | 141 546                     | 82,39                   |
| Papua                | 3 542 544          | 3 390 337          | 152 207                     | 95,70                   |
| Papua Barat          | 742 291            | 647 395            | 94 896                      | 87,22                   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>192 770 611</b> | <b>157 475 230</b> | <b>35 295 381</b>           | <b>81,69</b>            |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.27** Komposisi Anggota DPR Terpilih pada Pemilu DPR Menurut Kelompok Umur dan Provinsi, 2019

| Provinsi             | Kelompok Umur |           |            |            |           |          |
|----------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
|                      | < 30          | 30-40     | 41-50      | 51-60      | 61-70     | >70      |
| (1)                  | (2)           | (3)       | (4)        | (5)        | (6)       | (7)      |
| Aceh                 | 0             | 3         | 6          | 3          | 1         | 0        |
| Sumatera Utara       | 0             | 3         | 6          | 18         | 2         | 1        |
| Sumatera Barat       | 1             | 1         | 3          | 3          | 6         | 0        |
| Riau                 | 1             | 1         | 2          | 5          | 4         | 0        |
| Jambi                | 0             | 0         | 4          | 2          | 1         | 1        |
| Sumatera Selatan     | 0             | 2         | 7          | 3          | 4         | 1        |
| Bengkulu             | 0             | 0         | 0          | 4          | 0         | 0        |
| Lampung              | 0             | 2         | 4          | 10         | 4         | 0        |
| Kep. Bangka Belitung | 0             | 0         | 2          | 0          | 1         | 0        |
| Kepulauan Riau       | 0             | 0         | 0          | 3          | 1         | 0        |
| DKI Jakarta          | 0             | 2         | 10         | 7          | 2         | 0        |
| Jawa Barat           | 2             | 13        | 37         | 21         | 16        | 2        |
| Jawa Tengah          | 4             | 10        | 26         | 25         | 11        | 1        |
| DI Yogyakarta        | 0             | 2         | 0          | 2          | 3         | 1        |
| Jawa Timur           | 3             | 14        | 23         | 35         | 11        | 1        |
| Banten               | 1             | 5         | 5          | 10         | 1         | 0        |
| Bali                 | 0             | 0         | 4          | 4          | 1         | 0        |
| Nusa Tenggara Barat  | 0             | 0         | 7          | 1          | 3         | 0        |
| Nusa Tenggara Timur  | 0             | 1         | 6          | 5          | 1         | 0        |
| Kalimantan Barat     | 0             | 3         | 3          | 5          | 1         | 0        |
| Kalimantan Tengah    | 0             | 0         | 3          | 2          | 1         | 0        |
| Kalimantan Selatan   | 0             | 2         | 4          | 3          | 2         | 0        |
| Kalimantan Timur     | 0             | 3         | 0          | 3          | 1         | 1        |
| Kalimantan Utara     | 1             | 0         | 1          | 0          | 1         | 0        |
| Sulawesi Utara       | 2             | 0         | 2          | 1          | 1         | 0        |
| Sulawesi Tengah      | 0             | 0         | 3          | 3          | 1         | 0        |
| Sulawesi Selatan     | 1             | 2         | 8          | 9          | 4         | 0        |
| Sulawesi Tenggara    | 1             | 0         | 0          | 3          | 2         | 0        |
| Gorontalo            | 0             | 0         | 1          | 2          | 0         | 0        |
| Sulawesi Barat       | 0             | 2         | 0          | 1          | 1         | 0        |
| Maluku               | 0             | 0         | 2          | 2          | 0         | 0        |
| Maluku Utara         | 0             | 2         | 0          | 0          | 1         | 0        |
| Papua                | 2             | 2         | 3          | 2          | 1         | 0        |
| Papua Barat          | 0             | 0         | 1          | 2          | 0         | 0        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>19</b>     | <b>75</b> | <b>183</b> | <b>199</b> | <b>90</b> | <b>9</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 3.5 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu DPR Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki      |              | Perempuan      |              | Jumlah           |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
|                      | Jumlah         | Persentase   | Jumlah         | Persentase   |                  |
| (1)                  | (2)            | (3)          | (4)            | (5)          | (6)              |
| Aceh                 | 10 335         | 61,66        | 6 426          | 38,34        | 16 761           |
| Sumatera Utara       | 32 025         | 57,53        | 23 641         | 42,47        | 55 666           |
| Sumatera Barat       | 17 093         | 51,45        | 16 129         | 48,55        | 33 222           |
| Riau                 | 27 937         | 51,87        | 25 926         | 48,13        | 53 863           |
| Jambi                | 9 122          | 59,30        | 6 261          | 40,70        | 15 383           |
| Sumatera Selatan     | 13 140         | 58,03        | 9 504          | 41,97        | 22 644           |
| Bengkulu             | 4 906          | 57,55        | 3 619          | 42,45        | 8 525            |
| Lampung              | 13 155         | 55,01        | 10 757         | 44,99        | 23 912           |
| Kep. Bangka Belitung | 6 098          | 63,91        | 3 444          | 36,09        | 9 542            |
| Kepulauan Riau       | 12 369         | 53,12        | 10 917         | 46,88        | 23 286           |
| DKI Jakarta          | 65 428         | 49,44        | 66 917         | 50,56        | 132 345          |
| Jawa Barat           | 107 889        | 50,97        | 103 767        | 49,03        | 211 656          |
| Jawa Tengah          | 52 671         | 48,26        | 56 459         | 51,74        | 109 130          |
| DI Yogyakarta        | 25 818         | 45,04        | 31 501         | 54,96        | 57 319           |
| Jawa Timur           | 90 943         | 52,51        | 82 243         | 47,49        | 173 186          |
| Banten               | 38 810         | 50,89        | 37 460         | 49,11        | 76 270           |
| Bali                 | 11 525         | 49,77        | 11 631         | 50,23        | 23 156           |
| Nusa Tenggara Barat  | 7 947          | 59,06        | 5 509          | 40,94        | 13 456           |
| Nusa Tenggara Timur  | 9 185          | 57,84        | 6 694          | 42,16        | 15 879           |
| Kalimantan Barat     | 21 089         | 59,49        | 14 362         | 40,51        | 35 451           |
| Kalimantan Tengah    | 31 112         | 65,43        | 16 437         | 34,57        | 47 549           |
| Kalimantan Selatan   | 23 301         | 63,34        | 13 485         | 36,66        | 36 786           |
| Kalimantan Timur     | 36 413         | 65,40        | 19 262         | 34,60        | 55 675           |
| Kalimantan Utara     | 6 964          | 65,97        | 3 592          | 34,03        | 10 556           |
| Sulawesi Utara       | 9 996          | 54,39        | 8 383          | 45,61        | 18 379           |
| Sulawesi Tengah      | 9 966          | 60,20        | 6 588          | 39,80        | 16 554           |
| Sulawesi Selatan     | 19 960         | 56,21        | 15 548         | 43,79        | 35 508           |
| Sulawesi Tenggara    | 6 442          | 60,40        | 4 224          | 39,60        | 10 666           |
| Gorontalo            | 5 988          | 52,36        | 5 449          | 47,64        | 11 437           |
| Sulawesi Barat       | 4 352          | 56,76        | 3 315          | 43,24        | 7 667            |
| Maluku               | 3 476          | 57,70        | 2 548          | 42,30        | 6 024            |
| Maluku Utara         | 7 822          | 71,56        | 3 109          | 28,44        | 10 931           |
| Papua                | 3 610          | 77,35        | 1 057          | 22,65        | 4 667            |
| Papua Barat          | 5 031          | 64,70        | 2 745          | 35,30        | 7 776            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>751 918</b> | <b>54,06</b> | <b>638 909</b> | <b>45,94</b> | <b>1 390 827</b> |

Keterangan : \*) DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.3** Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi             | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb |                  |
|----------------------|--|------------------|
|                      | Pemilihan Presiden                       | Pemilihan DPR RI |
| (1)                  | (2)                                      | (3)              |
| Aceh                 | 16 761                                   | 16 761           |
| Sumatera Utara       | 55 706                                   | 55 666           |
| Sumatera Barat       | 33 222                                   | 33 222           |
| Riau                 | 53 863                                   | 53 863           |
| Jambi                | 15 383                                   | 15 383           |
| Sumatera Selatan     | 22 644                                   | 22 644           |
| Bengkulu             | 8 525                                    | 8 525            |
| Lampung              | 23 912                                   | 23 912           |
| Kep. Bangka Belitung | 9 542                                    | 9 542            |
| Kepulauan Riau       | 29 133                                   | 23 286           |
| DKI Jakarta          | 122 618                                  | 132 345          |
| Jawa Barat           | 211 656                                  | 211 656          |
| Jawa Tengah          | 109 153                                  | 109 130          |
| DI Yogyakarta        | 57 319                                   | 57 319           |
| Jawa Timur           | 174 413                                  | 173 186          |
| Banten               | 76 270                                   | 76 270           |
| Bali                 | 23 156                                   | 23 156           |
| Nusa Tenggara Barat  | 13 456                                   | 13 456           |
| Nusa Tenggara Timur  | 15 879                                   | 15 879           |
| Kalimantan Barat     | 35 451                                   | 35 451           |
| Kalimantan Tengah    | 47 549                                   | 47 549           |
| Kalimantan Selatan   | 36 786                                   | 36 786           |
| Kalimantan Timur     | 55 675                                   | 55 675           |
| Kalimantan Utara     | 10 556                                   | 10 556           |
| Sulawesi Utara       | 18 379                                   | 18 379           |
| Sulawesi Tengah      | 16 554                                   | 16 554           |
| Sulawesi Selatan     | 35 563                                   | 35 508           |
| Sulawesi Tenggara    | 10 666                                   | 10 666           |
| Gorontalo            | 11 437                                   | 11 437           |
| Sulawesi Barat       | 7 667                                    | 7 667            |
| Maluku               | 6 575                                    | 6 024            |
| Maluku Utara         | 10 931                                   | 10 931           |
| Papua                | 4 791                                    | 4 667            |
| Papua Barat          | 7 776                                    | 7 776            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>1 388 967</b>                         | <b>1 390 827</b> |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk luar negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 3.8** Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilu DPR Menurut Gender dan Provinsi, 2019

| Provinsi<br>(1)      | Laki-laki        |                   | Perempuan        |                   | Jumlah<br>(6)    |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      | Jumlah<br>(2)    | Persentase<br>(3) | Jumlah<br>(4)    | Persentase<br>(5) |                  |
| Aceh                 | 39 635           | 46,67             | 45 299           | 53,33             | 84 934           |
| Sumatera Utara       | 227 731          | 44,32             | 286 102          | 55,68             | 513 833          |
| Sumatera Barat       | 65 094           | 49,72             | 65 834           | 50,28             | 130 928          |
| Riau                 | 131 089          | 48,75             | 137 796          | 51,25             | 268 885          |
| Jambi                | 42 663           | 48,98             | 44 447           | 51,02             | 87 110           |
| Sumatera Selatan     | 75 711           | 46,94             | 85 577           | 53,06             | 161 288          |
| Bengkulu             | 21 100           | 47,02             | 23 770           | 52,98             | 44 870           |
| Lampung              | 88 347           | 45,20             | 107 090          | 54,80             | 195 437          |
| Kep. Bangka Belitung | 16 025           | 48,66             | 16 906           | 51,34             | 32 931           |
| Kepulauan Riau       | 49 250           | 48,29             | 52 746           | 51,71             | 101 996          |
| DKI Jakarta          | 306 359          | 55,55             | 245 149          | 44,45             | 551 508          |
| Jawa Barat           | 526 689          | 46,95             | 595 047          | 53,05             | 1 121 736        |
| Jawa Tengah          | 138 506          | 45,96             | 162 880          | 54,04             | 301 386          |
| DI Yogyakarta        | 22 149           | 44,46             | 27 674           | 55,54             | 49 823           |
| Jawa Timur           | 206 273          | 46,36             | 238 650          | 53,64             | 444 923          |
| Banten               | 157 887          | 48,05             | 170 704          | 51,95             | 328 591          |
| Bali                 | 28 788           | 42,94             | 38 247           | 57,06             | 67 035           |
| Nusa Tenggara Barat  | 45 322           | 40,70             | 66 025           | 59,30             | 111 347          |
| Nusa Tenggara Timur  | 42 899           | 46,13             | 50 095           | 53,87             | 92 994           |
| Kalimantan Barat     | 40 411           | 48,39             | 43 108           | 51,61             | 83 519           |
| Kalimantan Tengah    | 51 768           | 50,15             | 51 461           | 49,85             | 103 229          |
| Kalimantan Selatan   | 42 593           | 47,72             | 46 661           | 52,28             | 89 254           |
| Kalimantan Timur     | 64 601           | 51,51             | 60 814           | 48,49             | 125 415          |
| Kalimantan Utara     | 15 343           | 50,79             | 14 867           | 49,21             | 30 210           |
| Sulawesi Utara       | 28 726           | 48,23             | 30 835           | 51,77             | 59 561           |
| Sulawesi Tengah      | 49 449           | 48,91             | 51 645           | 51,09             | 101 094          |
| Sulawesi Selatan     | 108 886          | 47,15             | 122 046          | 52,85             | 230 932          |
| Sulawesi Tenggara    | 29 932           | 47,80             | 32 690           | 52,20             | 62 622           |
| Gorontalo            | 5 600            | 48,70             | 5 898            | 51,30             | 11 498           |
| Sulawesi Barat       | 18 776           | 49,40             | 19 231           | 50,60             | 38 007           |
| Maluku               | 25 673           | 46,18             | 29 922           | 53,82             | 55 595           |
| Maluku Utara         | 18 413           | 46,68             | 21 036           | 53,32             | 39 449           |
| Papua                | 25 131           | 49,67             | 25 461           | 50,33             | 50 592           |
| Papua Barat          | 23 560           | 51,95             | 21 790           | 48,05             | 45 350           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>2 780 379</b> | <b>47,79</b>      | <b>3 037 503</b> | <b>52,21</b>      | <b>5 817 882</b> |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.7 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pilpres Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki        |              | Perempuan        |              | Jumlah           |
|----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                      | Jumlah           | Persentase   | Jumlah           | Persentase   |                  |
| (1)                  | (2)              | (3)          | (4)              | (5)          | (6)              |
| Aceh                 | 39 635           | 46,67        | 45 299           | 53,33        | 84 934           |
| Sumatera Utara       | 227 728          | 44,32        | 286 072          | 55,68        | 513 800          |
| Sumatera Barat       | 65 094           | 49,72        | 65 834           | 50,28        | 130 928          |
| Riau                 | 131 089          | 48,75        | 137 796          | 51,25        | 268 885          |
| Jambi                | 42 663           | 48,98        | 44 447           | 51,02        | 87 110           |
| Sumatera Selatan     | 75 711           | 46,94        | 85 577           | 53,06        | 161 288          |
| Bengkulu             | 21 100           | 47,02        | 23 770           | 52,98        | 44 870           |
| Lampung              | 88 347           | 45,20        | 107 090          | 54,80        | 195 437          |
| Kep. Bangka Belitung | 16 025           | 48,66        | 16 906           | 51,34        | 32 931           |
| Kepulauan Riau       | 49 020           | 48,09        | 52 912           | 51,91        | 101 932          |
| DKI Jakarta          | 104 977          | 46,54        | 120 579          | 53,46        | 225 556          |
| Jawa Barat           | 526 689          | 46,95        | 595 047          | 53,05        | 1 121 736        |
| Jawa Tengah          | 138 507          | 45,96        | 162 876          | 54,04        | 301 383          |
| DI Yogyakarta        | 22 149           | 44,46        | 27 674           | 55,54        | 49 823           |
| Jawa Timur           | 206 162          | 46,36        | 238 545          | 53,64        | 444 707          |
| Banten               | 157 887          | 48,05        | 170 702          | 51,95        | 328 589          |
| Bali                 | 28 788           | 42,94        | 38 247           | 57,06        | 67 035           |
| Nusa Tenggara Barat  | 45 322           | 40,70        | 66 025           | 59,30        | 111 347          |
| Nusa Tenggara Timur  | 42 899           | 46,13        | 50 095           | 53,87        | 92 994           |
| Kalimantan Barat     | 40 411           | 48,39        | 43 108           | 51,61        | 83 519           |
| Kalimantan Tengah    | 51 760           | 50,14        | 51 463           | 49,86        | 103 223          |
| Kalimantan Selatan   | 42 593           | 47,72        | 46 661           | 52,28        | 89 254           |
| Kalimantan Timur     | 64 601           | 51,51        | 60 814           | 48,49        | 125 415          |
| Kalimantan Utara     | 15 343           | 50,79        | 14 867           | 49,21        | 30 210           |
| Sulawesi Utara       | 28 726           | 48,23        | 30 835           | 51,77        | 59 561           |
| Sulawesi Tengah      | 49 449           | 48,91        | 51 645           | 51,09        | 101 094          |
| Sulawesi Selatan     | 108 752          | 47,16        | 121 855          | 52,84        | 230 607          |
| Sulawesi Tenggara    | 29 932           | 47,80        | 32 690           | 52,20        | 62 622           |
| Gorontalo            | 5 600            | 48,70        | 5 898            | 51,30        | 11 498           |
| Sulawesi Barat       | 18 776           | 49,40        | 19 231           | 50,60        | 38 007           |
| Maluku               | 25 641           | 46,20        | 29 859           | 53,80        | 55 500           |
| Maluku Utara         | 18 413           | 46,68        | 21 036           | 53,32        | 39 449           |
| Papua                | 25 953           | 49,89        | 26 066           | 50,11        | 52 019           |
| Papua Barat          | 23 560           | 51,95        | 21 790           | 48,05        | 45 350           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>2 579 302</b> | <b>46,96</b> | <b>2 913 311</b> | <b>53,04</b> | <b>5 492 613</b> |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.10 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPR RI Menurut Gender dan Provinsi, 2019

| Provinsi             | Laki-laki      |              | Perempuan      |              | Jumlah         |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                      | Jumlah         | Persentase   | Jumlah         | Persentase   |                |
| (1)                  | (2)            | (3)          | (4)            | (5)          | (6)            |
| Aceh                 | 3 938          | 48,64        | 4 158          | 51,36        | 8 096          |
| Sumatera Utara       | 9 152          | 48,40        | 9 756          | 51,60        | 18 908         |
| Sumatera Barat       | 4 741          | 45,62        | 5 651          | 54,38        | 10 392         |
| Riau                 | 2 361          | 48,75        | 2 482          | 51,25        | 4 843          |
| Jambi                | 1 890          | 48,82        | 1 981          | 51,18        | 3 871          |
| Sumatera Selatan     | 3 324          | 50,14        | 3 305          | 49,86        | 6 629          |
| Bengkulu             | 1 634          | 44,91        | 2 004          | 55,09        | 3 638          |
| Lampung              | 3 180          | 53,43        | 2 772          | 46,57        | 5 952          |
| Kep. Bangka Belitung | 1 472          | 51,69        | 1 376          | 48,31        | 2 848          |
| Kepulauan Riau       | 807            | 42,19        | 1 106          | 57,81        | 1 913          |
| DKI Jakarta          | 5 504          | 49,61        | 5 591          | 50,39        | 11 095         |
| Jawa Barat           | 25 746         | 50,38        | 25 361         | 49,62        | 51 107         |
| Jawa Tengah          | 29 490         | 51,79        | 27 453         | 48,21        | 56 943         |
| DI Yogyakarta        | 5 987          | 52,31        | 5 458          | 47,69        | 11 445         |
| Jawa Timur           | 25 467         | 50,57        | 24 893         | 49,43        | 50 360         |
| Banten               | 3 930          | 52,53        | 3 551          | 47,47        | 7 481          |
| Bali                 | 2 179          | 54,41        | 1 826          | 45,59        | 4 005          |
| Nusa Tenggara Barat  | 3 177          | 45,21        | 3 850          | 54,79        | 7 027          |
| Nusa Tenggara Timur  | 6 811          | 44,10        | 8 632          | 55,90        | 15 443         |
| Kalimantan Barat     | 4 899          | 52,43        | 4 444          | 47,57        | 9 343          |
| Kalimantan Tengah    | 1 837          | 54,80        | 1 515          | 45,20        | 3 352          |
| Kalimantan Selatan   | 4 183          | 50,49        | 4 102          | 49,51        | 8 285          |
| Kalimantan Timur     | 2 066          | 52,41        | 1 876          | 47,59        | 3 942          |
| Sulawesi Utara       | 2 801          | 47,07        | 3 150          | 52,93        | 5 951          |
| Sulawesi Tengah      | 1 878          | 46,28        | 2 180          | 53,72        | 4 058          |
| Sulawesi Selatan     | 9 446          | 45,55        | 11 293         | 54,45        | 20 739         |
| Sulawesi Tenggara    | 3 144          | 41,38        | 4 453          | 58,62        | 7 597          |
| Gorontalo            | 1 434          | 50,69        | 1 395          | 49,31        | 2 829          |
| Sulawesi Barat       | 1 390          | 43,17        | 1 830          | 56,83        | 3 220          |
| Maluku               | 1 554          | 39,15        | 2 415          | 60,85        | 3 969          |
| Maluku Utara         | 700            | 42,27        | 956            | 57,73        | 1 656          |
| Papua                | 819            | 54,13        | 694            | 45,87        | 1 513          |
| Papua Barat          | 162            | 45,76        | 192            | 54,24        | 354            |
| Kalimantan Utara     | 558            | 49,73        | 564            | 50,27        | 1 122          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>177 661</b> | <b>49,36</b> | <b>182 265</b> | <b>50,64</b> | <b>359 926</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.12 Jumlah Dapil dan TPS pada Pemilu Menurut Provinsi, 2019

| Provinsi             | Dapil                     |                        | Jumlah TPS**   |
|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
|                      | Pemilihan Anggota DPR RI* | Pemilihan Anggota DPD* |                |
| (1)                  | (2)                       | (3)                    | (4)            |
| Aceh                 | 2                         | 1                      | 15 616         |
| Sumatera Utara       | 3                         | 1                      | 42 673         |
| Sumatera Barat       | 2                         | 1                      | 16 718         |
| Riau                 | 2                         | 1                      | 17 643         |
| Jambi                | 1                         | 1                      | 11 342         |
| Sumatera Selatan     | 2                         | 1                      | 25 326         |
| Bengkulu             | 1                         | 1                      | 6 165          |
| Lampung              | 2                         | 1                      | 26 265         |
| Kep. Bangka Belitung | 1                         | 1                      | 3 803          |
| Kepulauan Riau       | 1                         | 1                      | 5 477          |
| DKI Jakarta          | 3                         | 1                      | 29 063         |
| Jawa Barat           | 11                        | 1                      | 138 123        |
| Jawa Tengah          | 10                        | 1                      | 115 401        |
| DI Yogyakarta        | 1                         | 1                      | 11 781         |
| Jawa Timur           | 11                        | 1                      | 130 171        |
| Banten               | 3                         | 1                      | 33 471         |
| Bali                 | 1                         | 1                      | 12 386         |
| Nusa Tenggara Barat  | 2                         | 1                      | 15 989         |
| Nusa Tenggara Timur  | 2                         | 1                      | 14 979         |
| Kalimantan Barat     | 2                         | 1                      | 16 499         |
| Kalimantan Tengah    | 1                         | 1                      | 8 133          |
| Kalimantan Selatan   | 2                         | 1                      | 13 153         |
| Kalimantan Timur     | 1                         | 1                      | 10 909         |
| Kalimantan Utara     | 1                         | 1                      | 2 186          |
| Sulawesi Utara       | 1                         | 1                      | 7 826          |
| Sulawesi Tengah      | 1                         | 1                      | 9 181          |
| Sulawesi Selatan     | 3                         | 1                      | 26 356         |
| Sulawesi Tenggara    | 1                         | 1                      | 7 817          |
| Gorontalo            | 1                         | 1                      | 3 364          |
| Sulawesi Barat       | 1                         | 1                      | 3 865          |
| Maluku               | 1                         | 1                      | 5 524          |
| Maluku Utara         | 1                         | 1                      | 3 805          |
| Papua                | 1                         | 1                      | 15 231         |
| Papua Barat          | 1                         | 1                      | 3 918          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>80</b>                 | <b>34</b>              | <b>813 336</b> |

Sumber: \* Komisi Pemilihan Umum  
 \*\* Pemilu2019.kpu.go.id

**Tabel 3.2 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPT pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Laki-laki         |              | Perempuan         |              | Jumlah             |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                      | Jumlah            | Persentase   | Jumlah            | Persentase   |                    |
| (1)                  | (2)               | (3)          | (4)               | (5)          | (6)                |
| Aceh                 | 1 734 675         | 49,23        | 1 789 099         | 50,77        | 3 523 774          |
| Sumatera Utara       | 4 839 043         | 49,45        | 4 946 962         | 50,55        | 9 786 005          |
| Sumatera Barat       | 1 836 987         | 49,40        | 1 881 250         | 50,60        | 3 718 237          |
| Riau                 | 1 963 287         | 50,82        | 1 900 018         | 49,18        | 3 863 305          |
| Jambi                | 1 249 403         | 50,47        | 1 226 252         | 49,53        | 2 475 655          |
| Sumatera Selatan     | 2 965 679         | 50,46        | 2 911 896         | 49,54        | 5 877 575          |
| Bengkulu             | 708 242           | 50,62        | 690 866           | 49,38        | 1 399 108          |
| Lampung              | 3 101 750         | 51,06        | 2 972 387         | 48,94        | 6 074 137          |
| Kep. Bangka Belitung | 475 784           | 51,02        | 456 785           | 48,98        | 932 569            |
| Kepulauan Riau       | 619 882           | 50,42        | 609 542           | 49,58        | 1 229 424          |
| DKI Jakarta          | 3 874 022         | 49,91        | 3 887 576         | 50,09        | 7 761 598          |
| Jawa Barat           | 16 727 451        | 50,27        | 16 549 454        | 49,73        | 33 276 905         |
| Jawa Tengah          | 13 901 368        | 49,83        | 13 995 534        | 50,17        | 27 896 902         |
| DI Yogyakarta        | 1 330 112         | 48,69        | 1 401 762         | 51,31        | 2 731 874          |
| Jawa Timur           | 15 226 058        | 49,25        | 15 686 936        | 50,75        | 30 912 994         |
| Banten               | 4 100 146         | 50,54        | 4 012 331         | 49,46        | 8 112 477          |
| Bali                 | 1 556 427         | 49,72        | 1 573 861         | 50,28        | 3 130 288          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1 800 915         | 49,11        | 1 866 338         | 50,89        | 3 667 253          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1 660 843         | 48,97        | 1 730 773         | 51,03        | 3 391 616          |
| Kalimantan Barat     | 1 879 884         | 50,98        | 1 807 275         | 49,02        | 3 687 159          |
| Kalimantan Tengah    | 903 010           | 51,51        | 850 214           | 48,49        | 1 753 224          |
| Kalimantan Selatan   | 1 436 959         | 50,08        | 1 432 207         | 49,92        | 2 869 166          |
| Kalimantan Timur     | 1 285 439         | 51,80        | 1 195 947         | 48,20        | 2 481 386          |
| Sulawesi Utara       | 965 444           | 50,60        | 942 671           | 49,40        | 1 908 115          |
| Sulawesi Tengah      | 994 173           | 50,91        | 958 637           | 49,09        | 1 952 810          |
| Sulawesi Selatan     | 2 987 564         | 48,50        | 3 171 811         | 51,50        | 6 159 375          |
| Sulawesi Tenggara    | 860 459           | 49,92        | 863 080           | 50,08        | 1 723 539          |
| Gorontalo            | 405 117           | 49,84        | 407 684           | 50,16        | 812 801            |
| Sulawesi Barat       | 433 985           | 50,16        | 431 259           | 49,84        | 865 244            |
| Maluku               | 622 398           | 49,16        | 643 627           | 50,84        | 1 266 025          |
| Maluku Utara         | 405 031           | 50,38        | 398 952           | 49,62        | 803 983            |
| Papua                | 1 892 236         | 53,41        | 1 650 308         | 46,59        | 3 542 544          |
| Papua Barat          | 385 945           | 51,99        | 356 346           | 48,01        | 742 291            |
| Kalimantan Utara     | 236 229           | 52,48        | 213 879           | 47,52        | 450 108            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>95 365 947</b> | <b>49,99</b> | <b>95 413 519</b> | <b>50,01</b> | <b>190 779 466</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.14 Partisipasi Memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2019**

| Provinsi             | Jumlah DPT         | Jumlah Suara       |                             | Partisipasi Memilih (%) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                      |                    | Pengguna Hak Pilih | Tidak Menggunakan Hak Pilih |                         |
| (1)                  | (2)                | (3)                | (4)                         | (5)                     |
| Aceh                 | 3 523 774          | 2 888 260          | 635 514                     | 81,96                   |
| Sumatera Utara       | 9 786 005          | 7 636 226          | 2 149 779                   | 78,03                   |
| Sumatera Barat       | 3 718 237          | 2 936 719          | 781 518                     | 78,98                   |
| Riau                 | 3 863 305          | 3 271 530          | 591 775                     | 84,68                   |
| Jambi                | 2 475 655          | 2 111 328          | 364 327                     | 85,28                   |
| Sumatera Selatan     | 5 877 575          | 4 938 585          | 938 990                     | 84,02                   |
| Bengkulu             | 1 399 108          | 1 196 349          | 202 759                     | 85,51                   |
| Lampung              | 6 074 137          | 4 895 585          | 1 178 552                   | 80,60                   |
| Kep. Bangka Belitung | 932 569            | 806 891            | 125 678                     | 86,52                   |
| Kepulauan Riau       | 1 229 424          | 1 030 868          | 198 556                     | 83,85                   |
| DKI Jakarta          | 7 761 598          | 6 425 574          | 1 336 024                   | 82,79                   |
| Jawa Barat           | 33 276 905         | 27 476 079         | 5 800 826                   | 82,57                   |
| Jawa Tengah          | 27 896 902         | 22 376 465         | 5 520 437                   | 80,21                   |
| DI Yogyakarta        | 2 731 874          | 2 449 679          | 282 195                     | 89,67                   |
| Jawa Timur           | 30 912 994         | 25 511 241         | 5 401 753                   | 82,53                   |
| Banten               | 8 112 477          | 6 791 166          | 1 321 311                   | 83,71                   |
| Bali                 | 3 130 288          | 2 616 810          | 513 478                     | 83,60                   |
| Nusa Tenggara Barat  | 3 667 253          | 3 040 686          | 626 567                     | 82,91                   |
| Nusa Tenggara Timur  | 3 391 616          | 2 718 464          | 673 152                     | 80,15                   |
| Kalimantan Barat     | 3 687 159          | 3 029 909          | 657 250                     | 82,17                   |
| Kalimantan Tengah    | 1 753 224          | 1 401 698          | 351 526                     | 79,95                   |
| Kalimantan Selatan   | 2 869 166          | 2 382 103          | 487 063                     | 83,02                   |
| Kalimantan Timur     | 2 481 386          | 2 003 281          | 478 105                     | 80,73                   |
| Kalimantan Utara     | 450 108            | 359 241            | 90 867                      | 79,81                   |
| Sulawesi Utara       | 1 908 115          | 1 594 305          | 313 810                     | 83,55                   |
| Sulawesi Tengah      | 1 952 810          | 1 640 063          | 312 747                     | 83,98                   |
| Sulawesi Selatan     | 6 159 375          | 5 025 189          | 1 134 186                   | 81,59                   |
| Sulawesi Tenggara    | 1 723 539          | 1 425 406          | 298 133                     | 82,70                   |
| Gorontalo            | 812 801            | 723 080            | 89 721                      | 88,96                   |
| Sulawesi Barat       | 865 244            | 751 079            | 114 165                     | 86,61                   |
| Maluku               | 1 266 025          | 1 003 911          | 262 114                     | 79,30                   |
| Maluku Utara         | 803 983            | 665 614            | 138 369                     | 82,79                   |
| Papua                | 3 542 544          | 3 391 887          | 150 657                     | 95,75                   |
| Papua Barat          | 742 291            | 650 191            | 92 100                      | 87,59                   |
| Luar Negeri          | 1 991 145          | 847 037            | 1 144 108                   | 42,54                   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>192 770 611</b> | <b>158 012 499</b> | <b>34 758 112</b>           | <b>81,97</b>            |

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

3. Lampiran Data Pemilu 2024, Sumber Badan Pusat Statistik





# PEMILU 2024

**KOMISI**  
**SIK**  
**UNTARAN**

**SURAT SUARA**

**PEMILU**  
**SORANGI**  
**INTEGRASI**  
**BONGSA**

**PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2024**

**1**



**CALON PRESIDEN**  
A. ANAS SUDISARTA  
BANDUNG, PKB

**CALON WAKIL PRESIDEN**  
A. A. MUCHLISIN  
BANDUNG, DI (PKU)

**KELOMPOK PARTAI POLITIK PENDUKU**



**2**



**CALON PRESIDEN**  
G. PRADIYO SOEBANTO

**CALON WAKIL PRESIDEN**  
G. B. SALSABILLAH  
KAKA

**KELOMPOK PARTAI POLITIK PENDUKU**



**3**



**CALON PRESIDEN**  
G. SARIM PRASOJO  
L.A., BAK

**CALON WAKIL PRESIDEN**  
Prof. Dr. H. H. HARSONO  
L.A., BAK

**KELOMPOK PARTAI POLITIK PENDUKU**





**Lampiran 49 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPT pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki          |                | Perempuan          |                | Jumlah             |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                      | Jumlah             | Persentase (%) | Jumlah             | Persentase (%) |                    |
| (1)                  | (2)                | (3)            | (4)                | (5)            | (6)                |
| Aceh                 | 1.839.412          | 49,16          | 1.902.625          | 50,84          | 3.742.037          |
| Sumatera Utara       | 5.360.844          | 49,39          | 5.493.096          | 50,61          | 10.853.940         |
| Sumatera Barat       | 2.027.360          | 49,59          | 2.061.246          | 50,41          | 4.088.606          |
| Riau                 | 2.399.163          | 50,70          | 2.333.011          | 49,30          | 4.732.174          |
| Jambi                | 1.350.151          | 50,45          | 1.325.956          | 49,55          | 2.676.107          |
| Sumatera Selatan     | 3.192.292          | 50,46          | 3.134.056          | 49,54          | 6.326.348          |
| Bengkulu             | 754.855            | 50,50          | 739.973            | 49,50          | 1.494.828          |
| Lampung              | 3.326.334          | 50,87          | 3.212.794          | 49,13          | 6.539.128          |
| Kep. Bangka Belitung | 543.663            | 50,93          | 523.771            | 49,07          | 1.067.434          |
| Kepulauan Riau       | 753.535            | 50,20          | 747.439            | 49,80          | 1.500.974          |
| DKI Jakarta          | 4.080.601          | 49,44          | 4.172.296          | 50,56          | 8.252.897          |
| Jawa Barat           | 17.958.814         | 50,28          | 17.756.087         | 49,72          | 35.714.901         |
| Jawa Tengah          | 14.113.893         | 49,89          | 14.175.520         | 50,11          | 28.289.413         |
| DI Yogyakarta        | 1.397.099          | 48,66          | 1.473.875          | 51,34          | 2.870.974          |
| Jawa Timur           | 15.495.556         | 49,34          | 15.907.282         | 50,66          | 31.402.838         |
| Banten               | 4.460.176          | 50,44          | 4.382.470          | 49,56          | 8.842.646          |
| Bali                 | 1.617.276          | 49,47          | 1.652.240          | 50,53          | 3.269.516          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1.916.798          | 48,92          | 2.001.493          | 51,08          | 3.918.291          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1.971.831          | 49,19          | 2.036.644          | 50,81          | 4.008.475          |
| Kalimantan Barat     | 2.017.565          | 50,97          | 1.940.996          | 49,03          | 3.958.561          |
| Kalimantan Tengah    | 995.097            | 51,42          | 940.019            | 48,58          | 1.935.116          |
| Kalimantan Selatan   | 1.512.186          | 49,99          | 1.513.034          | 50,01          | 3.025.220          |
| Kalimantan Timur     | 1.435.916          | 51,68          | 1.342.728          | 48,32          | 2.778.644          |
| Kalimantan Utara     | 263.000            | 52,16          | 241.252            | 47,84          | 504.252            |
| Sulawesi Utara       | 993.863            | 50,46          | 975.740            | 49,54          | 1.969.603          |
| Sulawesi Tengah      | 1.140.466          | 50,99          | 1.096.237          | 49,01          | 2.236.703          |
| Sulawesi Selatan     | 3.244.626          | 48,64          | 3.425.956          | 51,36          | 6.670.582          |
| Sulawesi Tenggara    | 931.298            | 49,86          | 936.633            | 50,14          | 1.867.931          |
| Gorontalo            | 438.682            | 49,78          | 442.524            | 50,22          | 881.206            |
| Sulawesi Barat       | 494.660            | 50,18          | 491.100            | 49,82          | 985.760            |
| Maluku               | 658.058            | 49,07          | 682.954            | 50,93          | 1.341.012          |
| Maluku Utara         | 490.478            | 51,41          | 463.500            | 48,59          | 953.978            |
| Papua                | 370.861            | 50,95          | 356.974            | 49,05          | 727.835            |
| Papua Barat          | 196.570            | 51,00          | 188.895            | 49,00          | 385.465            |
| Papua Selatan        | 190.310            | 51,82          | 176.959            | 48,18          | 367.269            |
| Papua Tengah         | 604.549            | 53,55          | 524.295            | 46,45          | 1.128.844          |
| Papua Pegunungan     | 701.582            | 53,70          | 604.832            | 46,30          | 1.306.414          |
| Papua Barat Daya     | 227.823            | 51,68          | 213.003            | 48,32          | 440.826            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>101.467.243</b> | <b>49,97</b>   | <b>101.589.505</b> | <b>50,03</b>   | <b>203.056.748</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 48 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPT pada Pemilu DPR Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki          |                | Perempuan          |                | Jumlah             |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                      | Jumlah             | Persentase (%) | Jumlah             | Persentase (%) |                    |
| (1)                  | (2)                | (3)            | (4)                | (5)            | (6)                |
| Aceh                 | 1.839.412          | 49,16          | 1.902.625          | 50,84          | 3.742.037          |
| Sumatera Utara       | 5.360.844          | 49,39          | 5.493.096          | 50,61          | 10.853.940         |
| Sumatera Barat       | 2.027.360          | 49,59          | 2.061.246          | 50,41          | 4.088.606          |
| Riau                 | 2.399.163          | 50,70          | 2.333.011          | 49,30          | 4.732.174          |
| Jambi                | 1.350.151          | 50,45          | 1.325.956          | 49,55          | 2.676.107          |
| Sumatera Selatan     | 3.192.292          | 50,46          | 3.134.056          | 49,54          | 6.326.348          |
| Bengkulu             | 754.855            | 50,50          | 739.973            | 49,50          | 1.494.828          |
| Lampung              | 3.326.334          | 50,87          | 3.212.794          | 49,13          | 6.539.128          |
| Kep. Bangka Belitung | 543.663            | 50,93          | 523.771            | 49,07          | 1.067.434          |
| Kepulauan Riau       | 753.535            | 50,20          | 747.439            | 49,80          | 1.500.974          |
| DKI Jakarta          | 4.617.626          | 48,01          | 5.000.704          | 51,99          | 9.618.330          |
| Jawa Barat           | 17.958.814         | 50,28          | 17.756.087         | 49,72          | 35.714.901         |
| Jawa Tengah          | 14.113.896         | 49,89          | 14.175.517         | 50,11          | 28.289.413         |
| DI Yogyakarta        | 1.397.099          | 48,66          | 1.473.875          | 51,34          | 2.870.974          |
| Jawa Timur           | 15.495.556         | 49,34          | 15.907.282         | 50,66          | 31.402.838         |
| Banten               | 4.460.176          | 50,44          | 4.382.470          | 49,56          | 8.842.646          |
| Bali                 | 1.617.276          | 49,47          | 1.652.240          | 50,53          | 3.269.516          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1.916.798          | 48,92          | 2.001.493          | 51,08          | 3.918.291          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1.971.831          | 49,19          | 2.036.644          | 50,81          | 4.008.475          |
| Kalimantan Barat     | 2.017.565          | 50,97          | 1.940.996          | 49,03          | 3.958.561          |
| Kalimantan Tengah    | 995.097            | 51,42          | 940.019            | 48,58          | 1.935.116          |
| Kalimantan Selatan   | 1.512.186          | 49,99          | 1.513.034          | 50,01          | 3.025.220          |
| Kalimantan Timur     | 1.435.916          | 51,68          | 1.342.728          | 48,32          | 2.778.644          |
| Kalimantan Utara     | 263.000            | 52,16          | 241.252            | 47,84          | 504.252            |
| Sulawesi Utara       | 993.863            | 50,46          | 975.740            | 49,54          | 1.969.603          |
| Sulawesi Tengah      | 1.140.466          | 50,99          | 1.096.237          | 49,01          | 2.236.703          |
| Sulawesi Selatan     | 3.244.626          | 48,64          | 3.425.956          | 51,36          | 6.670.582          |
| Sulawesi Tenggara    | 931.298            | 49,86          | 936.633            | 50,14          | 1.867.931          |
| Gorontalo            | 438.682            | 49,78          | 442.524            | 50,22          | 881.206            |
| Sulawesi Barat       | 494.660            | 50,18          | 491.100            | 49,82          | 985.760            |
| Maluku               | 658.058            | 49,07          | 682.954            | 50,93          | 1.341.012          |
| Maluku Utara         | 490.476            | 51,41          | 463.502            | 48,59          | 953.978            |
| Papua                | 370.861            | 50,95          | 356.974            | 49,05          | 727.835            |
| Papua Barat          | 196.570            | 51,00          | 188.895            | 49,00          | 385.465            |
| Papua Selatan        | 190.310            | 51,82          | 176.959            | 48,18          | 367.269            |
| Papua Tengah         | 604.549            | 53,55          | 524.295            | 46,45          | 1.128.844          |
| Papua Pegunungan     | 701.582            | 53,70          | 604.832            | 46,30          | 1.306.414          |
| Papua Barat Daya     | 227.823            | 51,68          | 213.003            | 48,32          | 440.826            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>102.004.269</b> | <b>49,90</b>   | <b>102.417.912</b> | <b>50,10</b>   | <b>204.422.181</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 50 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Jumlah DPTb               |                         |                         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | Pemilihan Presiden<br>(1) | Pemilihan DPR RI<br>(2) | Pemilihan DPD RI<br>(3) |
| Aceh                 | 28.040                    | 22.672                  | 24.045                  |
| Sumatera Utara       | 69.341                    | 51.463                  | 60.010                  |
| Sumatera Barat       | 37.864                    | 29.634                  | 31.645                  |
| Riau                 | 45.642                    | 36.401                  | 37.776                  |
| Jambi                | 20.499                    | 16.337                  | 16.337                  |
| Sumatera Selatan     | 32.282                    | 24.755                  | 26.348                  |
| Bengkulu             | 13.993                    | 11.708                  | 11.708                  |
| Lampung              | 26.403                    | 17.608                  | 20.358                  |
| Kep. Bangka Belitung | 12.913                    | 8.525                   | 8.524                   |
| Kepulauan Riau       | 28.161                    | 19.908                  | 19.908                  |
| DKI Jakarta          | 130.254                   | 146.803                 | 38.387                  |
| Jawa Barat           | 230.154                   | 106.485                 | 147.004                 |
| Jawa Tengah          | 186.364                   | 108.027                 | 136.293                 |
| DI Yogyakarta        | 52.293                    | 18.413                  | 18.413                  |
| Jawa Timur           | 150.968                   | 77.720                  | 106.088                 |
| Banten               | 65.097                    | 29.498                  | 31.114                  |
| Bali                 | 17.496                    | 6.445                   | 6.445                   |
| Nusa Tenggara Barat  | 14.673                    | 9.144                   | 9.988                   |
| Nusa Tenggara Timur  | 28.269                    | 22.168                  | 23.633                  |
| Kalimantan Barat     | 31.217                    | 22.754                  | 24.428                  |
| Kalimantan Tengah    | 20.399                    | 15.551                  | 15.551                  |
| Kalimantan Selatan   | 33.863                    | 20.051                  | 22.074                  |
| Kalimantan Timur     | 39.488                    | 24.630                  | 24.630                  |
| Kalimantan Utara     | 10.004                    | 6.928                   | 6.930                   |
| Sulawesi Utara       | 19.365                    | 14.340                  | 14.280                  |
| Sulawesi Tengah      | 27.567                    | 21.445                  | 21.450                  |
| Sulawesi Selatan     | 75.691                    | 61.476                  | 65.329                  |
| Sulawesi Tenggara    | 19.515                    | 16.794                  | 16.796                  |
| Gorontalo            | 11.970                    | 9.544                   | 9.547                   |
| Sulawesi Barat       | 11.715                    | 9.599                   | 9.599                   |
| Maluku               | 10.849                    | 8.446                   | 8.419                   |
| Maluku Utara         | 9.522                     | 6.825                   | 6.638                   |
| Papua                | 2.554                     | 1.698                   | 1.698                   |
| Papua Barat          | 4.071                     | 2.648                   | 2.648                   |
| Papua Selatan        | 2.471                     | 2.463                   | 2.463                   |
| Papua Tengah         | 1.098                     | 1.028                   | 1.028                   |
| Papua Pegunungan     | 348                       | 348                     | 348                     |
| Papua Barat Daya     | 6.633                     | 4.345                   | 3.866                   |
| Luar Negeri          | 113.480                   | --                      | --                      |
| <b>Jumlah</b>        | <b>1.642.526</b>          | <b>1.014.627</b>        | <b>1.031.746</b>        |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 47 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki          |                | Perempuan          |                | Jumlah             |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                      | Jumlah             | Persentase (%) | Jumlah             | Persentase (%) |                    |
| (1)                  | (2)                | (3)            | (4)                | (5)            | (6)                |
| Aceh                 | 1.839.412          | 49,16          | 1.902.625          | 50,84          | 3.742.037          |
| Sumatera Utara       | 5.360.844          | 49,39          | 5.493.096          | 50,61          | 10.853.940         |
| Sumatera Barat       | 2.027.360          | 49,59          | 2.061.246          | 50,41          | 4.088.606          |
| Riau                 | 2.399.163          | 50,70          | 2.333.011          | 49,30          | 4.732.174          |
| Jambi                | 1.350.151          | 50,45          | 1.325.956          | 49,55          | 2.676.107          |
| Sumatera Selatan     | 3.192.292          | 50,46          | 3.134.056          | 49,54          | 6.326.348          |
| Bengkulu             | 754.855            | 50,50          | 739.973            | 49,50          | 1.494.828          |
| Lampung              | 3.326.334          | 50,87          | 3.212.794          | 49,13          | 6.539.128          |
| Kep. Bangka Belitung | 543.663            | 50,93          | 523.771            | 49,07          | 1.067.434          |
| Kepulauan Riau       | 753.535            | 50,20          | 747.439            | 49,80          | 1.500.974          |
| DKI Jakarta          | 4.080.601          | 49,44          | 4.172.296          | 50,56          | 8.252.897          |
| Jawa Barat           | 17.958.814         | 50,28          | 17.756.087         | 49,72          | 35.714.901         |
| Jawa Tengah          | 14.113.893         | 49,89          | 14.175.520         | 50,11          | 28.289.413         |
| DI Yogyakarta        | 1.397.099          | 48,66          | 1.473.875          | 51,34          | 2.870.974          |
| Jawa Timur           | 15.495.556         | 49,34          | 15.907.282         | 50,66          | 31.402.838         |
| Banten               | 4.460.176          | 50,44          | 4.382.470          | 49,56          | 8.842.646          |
| Bali                 | 1.617.276          | 49,47          | 1.652.240          | 50,53          | 3.269.516          |
| Nusa Tenggara Barat  | 1.916.798          | 48,92          | 2.001.493          | 51,08          | 3.918.291          |
| Nusa Tenggara Timur  | 1.971.831          | 49,19          | 2.036.644          | 50,81          | 4.008.475          |
| Kalimantan Barat     | 2.017.565          | 50,97          | 1.940.996          | 49,03          | 3.958.561          |
| Kalimantan Tengah    | 995.097            | 51,42          | 940.019            | 48,58          | 1.935.116          |
| Kalimantan Selatan   | 1.512.186          | 49,99          | 1.513.034          | 50,01          | 3.025.220          |
| Kalimantan Timur     | 1.435.916          | 51,68          | 1.342.728          | 48,32          | 2.778.644          |
| Kalimantan Utara     | 263.000            | 52,16          | 241.252            | 47,84          | 504.252            |
| Sulawesi Utara       | 993.863            | 50,46          | 975.740            | 49,54          | 1.969.603          |
| Sulawesi Tengah      | 1.140.466          | 50,99          | 1.096.237          | 49,01          | 2.236.703          |
| Sulawesi Selatan     | 3.244.626          | 48,64          | 3.425.956          | 51,36          | 6.670.582          |
| Sulawesi Tenggara    | 931.298            | 49,86          | 936.633            | 50,14          | 1.867.931          |
| Gorontalo            | 438.682            | 49,78          | 442.524            | 50,22          | 881.206            |
| Sulawesi Barat       | 494.660            | 50,18          | 491.100            | 49,82          | 985.760            |
| Maluku               | 658.058            | 49,07          | 682.954            | 50,93          | 1.341.012          |
| Maluku Utara         | 490.478            | 51,41          | 463.500            | 48,59          | 953.978            |
| Papua                | 370.861            | 50,95          | 356.974            | 49,05          | 727.835            |
| Papua Barat          | 196.570            | 51,00          | 188.895            | 49,00          | 385.465            |
| Papua Selatan        | 190.310            | 51,82          | 176.959            | 48,18          | 367.269            |
| Papua Tengah         | 604.549            | 53,55          | 524.295            | 46,45          | 1.128.844          |
| Papua Pegunungan     | 701.582            | 53,70          | 604.832            | 46,30          | 1.306.414          |
| Papua Barat Daya     | 227.823            | 51,68          | 213.003            | 48,32          | 440.826            |
| Luar Negeri          | 537.025            | 39,33          | 828.408            | 60,67          | 1.365.433          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>102.004.268</b> | <b>49,90</b>   | <b>102.417.913</b> | <b>50,10</b>   | <b>204.422.181</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 53 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi<br>(1)      | Laki-Laki      |                       | Perempuan      |                       | Jumlah<br>(6)    |
|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|                      | Jumlah<br>(2)  | Persentase (%)<br>(3) | Jumlah<br>(4)  | Persentase (%)<br>(5) |                  |
| Aceh                 | 13.011         | 54,11                 | 11.034         | 45,89                 | 24.045           |
| Sumatera Utara       | 32.496         | 54,15                 | 27.514         | 45,85                 | 60.010           |
| Sumatera Barat       | 16.762         | 52,97                 | 14.883         | 47,03                 | 31.645           |
| Riau                 | 21.123         | 55,92                 | 16.653         | 44,08                 | 37.776           |
| Jambi                | 9.340          | 57,17                 | 6.997          | 42,83                 | 16.337           |
| Sumatera Selatan     | 14.604         | 55,43                 | 11.744         | 44,57                 | 26.348           |
| Bengkulu             | 6.437          | 54,98                 | 5.271          | 45,02                 | 11.708           |
| Lampung              | 11.667         | 57,31                 | 8.691          | 42,69                 | 20.358           |
| Kep. Bangka Belitung | 4.679          | 54,89                 | 3.845          | 45,11                 | 8.524            |
| Kepulauan Riau       | 10.637         | 53,43                 | 9.271          | 46,57                 | 19.908           |
| DKI Jakarta          | 20.439         | 53,24                 | 17.948         | 46,76                 | 38.387           |
| Jawa Barat           | 75.686         | 51,49                 | 71.318         | 48,51                 | 147.004          |
| Jawa Tengah          | 65.415         | 48,00                 | 70.878         | 52,00                 | 136.293          |
| DI Yogyakarta        | 9.649          | 52,40                 | 8.764          | 47,60                 | 18.413           |
| Jawa Timur           | 55.878         | 52,67                 | 50.210         | 47,33                 | 106.088          |
| Banten               | 16.843         | 54,13                 | 14.271         | 45,87                 | 31.114           |
| Bali                 | 2.875          | 44,61                 | 3.570          | 55,39                 | 6.445            |
| Nusa Tenggara Barat  | 5.435          | 54,42                 | 4.553          | 45,58                 | 9.988            |
| Nusa Tenggara Timur  | 12.310         | 52,09                 | 11.323         | 47,91                 | 23.633           |
| Kalimantan Barat     | 13.840         | 56,66                 | 10.588         | 43,34                 | 24.428           |
| Kalimantan Tengah    | 8.541          | 54,92                 | 7.010          | 45,08                 | 15.551           |
| Kalimantan Selatan   | 12.621         | 57,18                 | 9.453          | 42,82                 | 22.074           |
| Kalimantan Timur     | 13.965         | 56,70                 | 10.665         | 43,30                 | 24.630           |
| Kalimantan Utara     | 3.631          | 52,40                 | 3.299          | 47,60                 | 6.930            |
| Sulawesi Utara       | 7.204          | 50,45                 | 7.076          | 49,55                 | 14.280           |
| Sulawesi Tengah      | 11.921         | 55,58                 | 9.529          | 44,42                 | 21.450           |
| Sulawesi Selatan     | 33.216         | 50,84                 | 32.113         | 49,16                 | 65.329           |
| Sulawesi Tenggara    | 8.595          | 51,17                 | 8.201          | 48,83                 | 16.796           |
| Gorontalo            | 4.799          | 50,27                 | 4.748          | 49,73                 | 9.547            |
| Sulawesi Barat       | 5.089          | 53,02                 | 4.510          | 46,98                 | 9.599            |
| Maluku               | 4.504          | 53,50                 | 3.915          | 46,50                 | 8.419            |
| Maluku Utara         | 3.744          | 56,40                 | 2.894          | 43,60                 | 6.638            |
| Papua                | 936            | 55,12                 | 762            | 44,88                 | 1.698            |
| Papua Barat          | 1.542          | 58,23                 | 1.106          | 41,77                 | 2.648            |
| Papua Selatan        | 1.322          | 53,67                 | 1.141          | 46,33                 | 2.463            |
| Papua Tengah         | 656            | 63,81                 | 372            | 36,19                 | 1.028            |
| Papua Pegunungan     | 199            | 57,18                 | 149            | 42,82                 | 348              |
| Papua Barat Daya     | 1.965          | 50,83                 | 1.901          | 49,17                 | 3.866            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>543.576</b> | <b>52,69</b>          | <b>488.170</b> | <b>47,31</b>          | <b>1.031.746</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 51 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki      |                | Perempuan      |                | Jumlah           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                      | Jumlah         | Persentase (%) | Jumlah         | Persentase (%) |                  |
| (1)                  | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            | (6)              |
| Aceh                 | 15.127         | 53,95          | 12.913         | 46,05          | 28.040           |
| Sumatera Utara       | 37.553         | 54,16          | 31.788         | 45,84          | 69.341           |
| Sumatera Barat       | 19.852         | 52,43          | 18.012         | 47,57          | 37.864           |
| Riau                 | 25.818         | 56,57          | 19.824         | 43,43          | 45.642           |
| Jambi                | 11.911         | 58,11          | 8.588          | 41,89          | 20.499           |
| Sumatera Selatan     | 18.616         | 57,67          | 13.666         | 42,33          | 32.282           |
| Bengkulu             | 7.738          | 55,30          | 6.255          | 44,70          | 13.993           |
| Lampung              | 15.058         | 57,03          | 11.345         | 42,97          | 26.403           |
| Kep. Bangka Belitung | 7.542          | 58,41          | 5.371          | 41,59          | 12.913           |
| Kepulauan Riau       | 15.232         | 54,09          | 12.929         | 45,91          | 28.161           |
| DKI Jakarta          | 59.990         | 46,06          | 70.264         | 53,94          | 130.254          |
| Jawa Barat           | 116.396        | 50,57          | 113.758        | 49,43          | 230.154          |
| Jawa Tengah          | 88.831         | 47,67          | 97.533         | 52,33          | 186.364          |
| DI Yogyakarta        | 22.878         | 43,75          | 29.415         | 56,25          | 52.293           |
| Jawa Timur           | 78.695         | 52,13          | 72.273         | 47,87          | 150.968          |
| Banten               | 33.384         | 51,28          | 31.713         | 48,72          | 65.097           |
| Bali                 | 8.528          | 48,74          | 8.968          | 51,26          | 17.496           |
| Nusa Tenggara Barat  | 8.163          | 55,63          | 6.510          | 44,37          | 14.673           |
| Nusa Tenggara Timur  | 15.171         | 53,67          | 13.098         | 46,33          | 28.269           |
| Kalimantan Barat     | 18.032         | 57,76          | 13.185         | 42,24          | 31.217           |
| Kalimantan Tengah    | 11.786         | 57,78          | 8.613          | 42,22          | 20.399           |
| Kalimantan Selatan   | 20.915         | 61,76          | 12.948         | 38,24          | 33.863           |
| Kalimantan Timur     | 24.371         | 61,72          | 15.117         | 38,28          | 39.488           |
| Kalimantan Utara     | 5.605          | 56,03          | 4.399          | 43,97          | 10.004           |
| Sulawesi Utara       | 10.009         | 51,69          | 9.356          | 48,31          | 19.365           |
| Sulawesi Tengah      | 16.117         | 58,46          | 11.450         | 41,54          | 27.567           |
| Sulawesi Selatan     | 38.691         | 51,12          | 37.000         | 48,88          | 75.691           |
| Sulawesi Tenggara    | 10.287         | 52,71          | 9.228          | 47,29          | 19.515           |
| Gorontalo            | 6.229          | 52,04          | 5.741          | 47,96          | 11.970           |
| Sulawesi Barat       | 6.255          | 53,39          | 5.460          | 46,61          | 11.715           |
| Maluku               | 6.077          | 56,01          | 4.772          | 43,99          | 10.849           |
| Maluku Utara         | 5.751          | 60,40          | 3.771          | 39,60          | 9.522            |
| Papua                | 1.673          | 65,51          | 881            | 34,49          | 2.554            |
| Papua Barat          | 2.353          | 57,80          | 1.718          | 42,20          | 4.071            |
| Papua Selatan        | 1.326          | 53,66          | 1.145          | 46,34          | 2.471            |
| Papua Tengah         | 696            | 63,39          | 402            | 36,61          | 1.098            |
| Papua Pegunungan     | 199            | 57,18          | 149            | 42,82          | 348              |
| Papua Barat Daya     | 3.380          | 50,96          | 3.253          | 49,04          | 6.633            |
| Luar Negeri          | 64.415         | 56,76          | 49.065         | 43,24          | 113.480          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>860.650</b> | <b>52,40</b>   | <b>781.876</b> | <b>47,60</b>   | <b>1.642.526</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 52 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu DPR Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki |                | Perempuan |                | Jumlah    |
|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                      | Jumlah    | Persentase (%) | Jumlah    | Persentase (%) |           |
| (1)                  | (2)       | (3)            | (4)       | (5)            | (6)       |
| Aceh                 | 12.194    | 53,78          | 10.478    | 46,22          | 22.672    |
| Sumatera Utara       | 27.575    | 53,58          | 23.888    | 46,42          | 51.463    |
| Sumatera Barat       | 15.791    | 53,29          | 13.843    | 46,71          | 29.634    |
| Riau                 | 20.411    | 56,07          | 15.990    | 43,93          | 36.401    |
| Jambi                | 9.347     | 57,21          | 6.990     | 42,79          | 16.337    |
| Sumatera Selatan     | 13.602    | 54,95          | 11.153    | 45,05          | 24.755    |
| Bengkulu             | 6.437     | 54,98          | 5.271     | 45,02          | 11.708    |
| Lampung              | 10.195    | 57,90          | 7.413     | 42,10          | 17.608    |
| Kep. Bangka Belitung | 4.682     | 54,92          | 3.843     | 45,08          | 8.525     |
| Kepulauan Riau       | 10.637    | 53,43          | 9.271     | 46,57          | 19.908    |
| DKI Jakarta          | 81.107    | 55,25          | 65.696    | 44,75          | 146.803   |
| Jawa Barat           | 55.348    | 51,98          | 51.137    | 48,02          | 106.485   |
| Jawa Tengah          | 53.133    | 49,18          | 54.894    | 50,82          | 108.027   |
| DI Yogyakarta        | 9.649     | 52,40          | 8.764     | 47,60          | 18.413    |
| Jawa Timur           | 42.965    | 55,28          | 34.755    | 44,72          | 77.720    |
| Banten               | 15.941    | 54,04          | 13.557    | 45,96          | 29.498    |
| Bali                 | 2.875     | 44,61          | 3.570     | 55,39          | 6.445     |
| Nusa Tenggara Barat  | 4.973     | 54,39          | 4.171     | 45,61          | 9.144     |
| Nusa Tenggara Timur  | 11.491    | 51,84          | 10.677    | 48,16          | 22.168    |
| Kalimantan Barat     | 12.996    | 57,12          | 9.758     | 42,88          | 22.754    |
| Kalimantan Tengah    | 8.541     | 54,92          | 7.010     | 45,08          | 15.551    |
| Kalimantan Selatan   | 11.586    | 57,78          | 8.465     | 42,22          | 20.051    |
| Kalimantan Timur     | 13.965    | 56,70          | 10.665    | 43,30          | 24.630    |
| Kalimantan Utara     | 3.612     | 52,14          | 3.316     | 47,86          | 6.928     |
| Sulawesi Utara       | 7.196     | 50,18          | 7.144     | 49,82          | 14.340    |
| Sulawesi Tengah      | 11.927    | 55,62          | 9.518     | 44,38          | 21.445    |
| Sulawesi Selatan     | 31.235    | 50,81          | 30.241    | 49,19          | 61.476    |
| Sulawesi Tenggara    | 8.594     | 51,17          | 8.200     | 48,83          | 16.794    |
| Gorontalo            | 4.797     | 50,26          | 4.747     | 49,74          | 9.544     |
| Sulawesi Barat       | 5.089     | 53,02          | 4.510     | 46,98          | 9.599     |
| Maluku               | 4.510     | 53,40          | 3.936     | 46,60          | 8.446     |
| Maluku Utara         | 3.894     | 57,05          | 2.931     | 42,95          | 6.825     |
| Papua                | 936       | 55,12          | 762       | 44,88          | 1.698     |
| Papua Barat          | 1.542     | 58,23          | 1.106     | 41,77          | 2.648     |
| Papua Selatan        | 1.322     | 53,67          | 1.141     | 46,33          | 2.463     |
| Papua Tengah         | 656       | 63,81          | 372       | 36,19          | 1.028     |
| Papua Pegunungan     | 199       | 57,18          | 149       | 42,82          | 348       |
| Papua Barat Daya     | 2.256     | 51,92          | 2.089     | 48,08          | 4.345     |
| Jumlah               | 543.206   | 53,54          | 471.421   | 46,46          | 1.014.627 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Lampiran 54 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden, DPR, dan DPD Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Jumlah DPK         |                  |                  |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                      | Pemilihan Presiden | Pemilihan DPR RI | Pemilihan DPD RI |
| (1)                  | (2)                | (3)              | (4)              |
| Aceh                 | 33.720             | 33.677           | 33.783           |
| Sumatera Utara       | 157.188            | 157.198          | 157.199          |
| Sumatera Barat       | 42.094             | 42.114           | 42.111           |
| Riau                 | 97.764             | 96.164           | 96.184           |
| Jambi                | 46.975             | 46.676           | 46.665           |
| Sumatera Selatan     | 82.217             | 82.217           | 82.217           |
| Bengkulu             | 13.480             | 13.482           | 13.482           |
| Lampung              | 68.706             | 68.709           | 68.709           |
| Kep. Bangka Belitung | 12.513             | 12.513           | 12.509           |
| Kepulauan Riau       | 35.477             | 35.477           | 35.477           |
| DKI Jakarta          | 71.973             | 274.237          | 69.677           |
| Jawa Barat           | 304.190            | 304.195          | 304.197          |
| Jawa Tengah          | 146.320            | 146.322          | 146.322          |
| DI Yogyakarta        | 17.719             | 17.728           | 17.728           |
| Jawa Timur           | 169.300            | 169.253          | 169.270          |
| Banten               | 89.659             | 89.659           | 89.659           |
| Bali                 | 18.746             | 18.748           | 18.748           |
| Nusa Tenggara Barat  | 59.512             | 59.561           | 59.563           |
| Nusa Tenggara Timur  | 54.922             | 54.910           | 54.898           |
| Kalimantan Barat     | 37.624             | 37.640           | 37.640           |
| Kalimantan Tengah    | 40.753             | 40.455           | 40.455           |
| Kalimantan Selatan   | 30.089             | 30.089           | 30.089           |
| Kalimantan Timur     | 75.163             | 75.150           | 75.150           |
| Kalimantan Utara     | 15.195             | 15.203           | 15.205           |
| Sulawesi Utara       | 21.263             | 21.262           | 21.262           |
| Sulawesi Tengah      | 38.114             | 38.128           | 38.129           |
| Sulawesi Selatan     | 94.098             | 93.675           | 93.864           |
| Sulawesi Tenggara    | 30.109             | 30.098           | 30.102           |
| Gorontalo            | 6.248              | 6.253            | 6.253            |
| Sulawesi Barat       | 19.834             | 19.846           | 19.846           |
| Maluku               | 32.246             | 31.916           | 32.003           |
| Maluku Utara         | 24.445             | 24.485           | 24.368           |
| Papua                | 22.268             | 22.268           | 22.268           |
| Papua Barat          | 13.037             | 13.037           | 13.037           |
| Papua Selatan        | 11.429             | 11.429           | 11.429           |
| Papua Tengah         | 5.175              | 5.175            | 5.175            |
| Papua Pegunungan     | 445                | 445              | 445              |
| Papua Barat Daya     | 9.086              | 9.086            | 9.086            |
| Luar Negeri          | 204.658            | -                | -                |
| <b>Jumlah</b>        | <b>2.253.754</b>   | <b>2.248.480</b> | <b>2.044.204</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



**Lampiran 55 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilihan Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki        |                | Perempuan        |                | Jumlah           |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | Jumlah           | Persentase (%) | Jumlah           | Persentase (%) |                  |
| (1)                  | (2)              | (3)            | (4)              | (5)            | (6)              |
| Aceh                 | 16.800           | 49,82          | 16.920           | 50,18          | 33.720           |
| Sumatera Utara       | 70.494           | 44,85          | 86.694           | 55,15          | 157.188          |
| Sumatera Barat       | 21.620           | 51,36          | 20.474           | 48,64          | 42.094           |
| Riau                 | 48.800           | 49,92          | 48.964           | 50,08          | 97.764           |
| Jambi                | 23.903           | 50,88          | 23.072           | 49,12          | 46.975           |
| Sumatera Selatan     | 39.913           | 48,55          | 42.304           | 51,45          | 82.217           |
| Bengkulu             | 6.691            | 49,64          | 6.789            | 50,36          | 13.480           |
| Lampung              | 32.348           | 47,08          | 36.358           | 52,92          | 68.706           |
| Kep. Bangka Belitung | 6.429            | 51,38          | 6.084            | 48,62          | 12.513           |
| Kepulauan Riau       | 17.468           | 49,24          | 18.009           | 50,76          | 35.477           |
| DKI Jakarta          | 33.858           | 47,04          | 38.115           | 52,96          | 71.973           |
| Jawa Barat           | 143.469          | 47,16          | 160.721          | 52,84          | 304.190          |
| Jawa Tengah          | 67.136           | 45,88          | 79.184           | 54,12          | 146.320          |
| DI Yogyakarta        | 8.285            | 46,76          | 9.434            | 53,24          | 17.719           |
| Jawa Timur           | 79.719           | 47,09          | 89.581           | 52,91          | 169.300          |
| Banten               | 42.767           | 47,70          | 46.892           | 52,30          | 89.659           |
| Bali                 | 7.925            | 42,28          | 10.821           | 57,72          | 18.746           |
| Nusa Tenggara Barat  | 27.055           | 45,46          | 32.457           | 54,54          | 59.512           |
| Nusa Tenggara Timur  | 24.785           | 45,13          | 30.137           | 54,87          | 54.922           |
| Kalimantan Barat     | 18.892           | 50,21          | 18.732           | 49,79          | 37.624           |
| Kalimantan Tengah    | 21.105           | 51,79          | 19.648           | 48,21          | 40.753           |
| Kalimantan Selatan   | 15.058           | 50,04          | 15.031           | 49,96          | 30.089           |
| Kalimantan Timur     | 40.134           | 53,40          | 35.029           | 46,60          | 75.163           |
| Kalimantan Utara     | 8.382            | 55,16          | 6.813            | 44,84          | 15.195           |
| Sulawesi Utara       | 10.611           | 49,90          | 10.652           | 50,10          | 21.263           |
| Sulawesi Tengah      | 20.041           | 52,58          | 18.073           | 47,42          | 38.114           |
| Sulawesi Selatan     | 47.329           | 50,30          | 46.769           | 49,70          | 94.098           |
| Sulawesi Tenggara    | 15.555           | 51,66          | 14.554           | 48,34          | 30.109           |
| Gorontalo            | 3.250            | 52,02          | 2.998            | 47,98          | 6.248            |
| Sulawesi Barat       | 10.000           | 50,42          | 9.834            | 49,58          | 19.834           |
| Maluku               | 15.405           | 47,77          | 16.841           | 52,23          | 32.246           |
| Maluku Utara         | 12.703           | 51,97          | 11.742           | 48,03          | 24.445           |
| Papua                | 11.763           | 52,82          | 10.505           | 47,18          | 22.268           |
| Papua Barat          | 6.979            | 53,53          | 6.058            | 46,47          | 13.037           |
| Papua Selatan        | 6.225            | 54,47          | 5.204            | 45,53          | 11.429           |
| Papua Tengah         | 2.608            | 50,40          | 2.567            | 49,60          | 5.175            |
| Papua Pegunungan     | 298              | 66,97          | 147              | 33,03          | 445              |
| Papua Barat Daya     | 4.679            | 51,50          | 4.407            | 48,50          | 9.086            |
| Luar Negeri          | 118.221          | 57,77          | 86.437           | 42,23          | 204.658          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>1.108.703</b> | <b>49,19</b>   | <b>1.145.051</b> | <b>50,81</b>   | <b>2.253.754</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 56 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilu DPR Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki        |                | Perempuan        |                | Jumlah           |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | Jumlah           | Persentase (%) | Jumlah           | Persentase (%) |                  |
| (1)                  | (2)              | (3)            | (4)              | (5)            | (6)              |
| Aceh                 | 16.766           | 49,78          | 16.911           | 50,22          | 33.677           |
| Sumatera Utara       | 70.498           | 44,85          | 86.700           | 55,15          | 157.198          |
| Sumatera Barat       | 21.630           | 51,36          | 20.484           | 48,64          | 42.114           |
| Riau                 | 48.000           | 49,91          | 48.164           | 50,09          | 96.164           |
| Jambi                | 23.747           | 50,88          | 22.929           | 49,12          | 46.676           |
| Sumatera Selatan     | 39.913           | 48,55          | 42.304           | 51,45          | 82.217           |
| Bengkulu             | 6.691            | 49,63          | 6.791            | 50,37          | 13.482           |
| Lampung              | 32.348           | 47,08          | 36.361           | 52,92          | 68.709           |
| Kep. Bangka Belitung | 6.429            | 51,38          | 6.084            | 48,62          | 12.513           |
| Kepulauan Riau       | 17.468           | 49,24          | 18.009           | 50,76          | 35.477           |
| DKI Jakarta          | 150.831          | 55,00          | 123.406          | 45,00          | 274.237          |
| Jawa Barat           | 143.471          | 47,16          | 160.724          | 52,84          | 304.195          |
| Jawa Tengah          | 67.136           | 45,88          | 79.186           | 54,12          | 146.322          |
| DI Yogyakarta        | 8.288            | 46,75          | 9.440            | 53,25          | 17.728           |
| Jawa Timur           | 79.675           | 47,07          | 89.578           | 52,93          | 169.253          |
| Banten               | 42.768           | 47,70          | 46.891           | 52,30          | 89.659           |
| Bali                 | 7.925            | 42,27          | 10.823           | 57,73          | 18.748           |
| Nusa Tenggara Barat  | 27.080           | 45,47          | 32.481           | 54,53          | 59.561           |
| Nusa Tenggara Timur  | 24.784           | 45,14          | 30.126           | 54,86          | 54.910           |
| Kalimantan Barat     | 18.899           | 50,21          | 18.741           | 49,79          | 37.640           |
| Kalimantan Tengah    | 20.946           | 51,78          | 19.509           | 48,22          | 40.455           |
| Kalimantan Selatan   | 15.063           | 50,06          | 15.026           | 49,94          | 30.089           |
| Kalimantan Timur     | 40.129           | 53,40          | 35.021           | 46,60          | 75.150           |
| Kalimantan Utara     | 8.386            | 55,16          | 6.817            | 44,84          | 15.203           |
| Sulawesi Utara       | 10.612           | 49,91          | 10.650           | 50,09          | 21.262           |
| Sulawesi Tengah      | 20.033           | 52,54          | 18.095           | 47,46          | 38.128           |
| Sulawesi Selatan     | 47.166           | 50,35          | 46.509           | 49,65          | 93.675           |
| Sulawesi Tenggara    | 15.563           | 51,71          | 14.535           | 48,29          | 30.098           |
| Gorontalo            | 3.253            | 52,02          | 3.000            | 47,98          | 6.253            |
| Sulawesi Barat       | 10.001           | 50,39          | 9.845            | 49,61          | 19.846           |
| Maluku               | 15.203           | 47,63          | 16.713           | 52,37          | 31.916           |
| Maluku Utara         | 12.764           | 52,13          | 11.721           | 47,87          | 24.485           |
| Papua                | 11.763           | 52,82          | 10.505           | 47,18          | 22.268           |
| Papua Barat          | 6.979            | 53,53          | 6.058            | 46,47          | 13.037           |
| Papua Selatan        | 6.225            | 54,47          | 5.204            | 45,53          | 11.429           |
| Papua Tengah         | 2.608            | 50,40          | 2.567            | 49,60          | 5.175            |
| Papua Pegunungan     | 298              | 66,97          | 147              | 33,03          | 445              |
| Papua Barat Daya     | 4.679            | 51,50          | 4.407            | 48,50          | 9.086            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>1.106.018</b> | <b>49,19</b>   | <b>1.142.462</b> | <b>50,81</b>   | <b>2.248.480</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 60 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Laki-Laki      |                | Perempuan      |                | Jumlah           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                      | Jumlah         | Persentase (%) | Jumlah         | Persentase (%) |                  |
| (1)                  | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            | (6)              |
| Aceh                 | 14.268         | 51,75          | 13.302         | 48,25          | 27.570           |
| Sumatera Utara       | 18.422         | 52,79          | 16.475         | 47,21          | 34.897           |
| Sumatera Barat       | 15.407         | 48,35          | 16.457         | 51,65          | 31.864           |
| Riau                 | 8.552          | 51,24          | 8.137          | 48,76          | 16.689           |
| Jambi                | 6.030          | 50,69          | 5.865          | 49,31          | 11.895           |
| Sumatera Selatan     | 13.789         | 52,45          | 12.499         | 47,55          | 26.288           |
| Bengkulu             | 4.694          | 51,04          | 4.503          | 48,96          | 9.197            |
| Lampung              | 18.434         | 52,17          | 16.901         | 47,83          | 35.335           |
| Kep. Bangka Belitung | 3.899          | 50,34          | 3.847          | 49,66          | 7.746            |
| Kepulauan Riau       | 3.245          | 50,11          | 3.231          | 49,89          | 6.476            |
| DKI Jakarta          | 34.087         | 55,21          | 27.659         | 44,79          | 61.746           |
| Jawa Barat           | 74.036         | 50,45          | 72.715         | 49,55          | 146.751          |
| Jawa Tengah          | 94.040         | 50,15          | 93.461         | 49,85          | 187.501          |
| DI Yogyakarta        | 15.007         | 49,20          | 15.496         | 50,80          | 30.503           |
| Jawa Timur           | 78.797         | 48,75          | 82.831         | 51,25          | 161.628          |
| Banten               | 15.143         | 51,50          | 14.261         | 48,50          | 29.404           |
| Bali                 | 10.808         | 52,91          | 9.620          | 47,09          | 20.428           |
| Nusa Tenggara Barat  | 10.962         | 47,09          | 12.317         | 52,91          | 23.279           |
| Nusa Tenggara Timur  | 22.081         | 47,74          | 24.170         | 52,26          | 46.251           |
| Kalimantan Barat     | 11.841         | 52,25          | 10.820         | 47,75          | 22.661           |
| Kalimantan Tengah    | 5.241          | 51,11          | 5.013          | 48,89          | 10.254           |
| Kalimantan Selatan   | 10.805         | 49,85          | 10.868         | 50,15          | 21.673           |
| Kalimantan Timur     | 6.181          | 52,24          | 5.650          | 47,76          | 11.831           |
| Kalimantan Utara     | 1.158          | 52,52          | 1.047          | 47,48          | 2.205            |
| Sulawesi Utara       | 6.917          | 51,68          | 6.466          | 48,32          | 13.383           |
| Sulawesi Tengah      | 6.849          | 50,61          | 6.685          | 49,39          | 13.534           |
| Sulawesi Selatan     | 24.657         | 45,87          | 29.094         | 54,13          | 53.751           |
| Sulawesi Tenggara    | 7.450          | 47,57          | 8.210          | 52,43          | 15.660           |
| Gorontalo            | 3.749          | 47,32          | 4.174          | 52,68          | 7.923            |
| Sulawesi Barat       | 4.212          | 46,31          | 4.883          | 53,69          | 9.095            |
| Maluku               | 2.861          | 50,43          | 2.812          | 49,57          | 5.673            |
| Maluku Utara         | 1.658          | 54,31          | 1.395          | 45,69          | 3.053            |
| Papua                | 780            | 57,74          | 571            | 42,26          | 1.351            |
| Papua Barat          | 469            | 60,91          | 301            | 39,09          | 770              |
| Papua Selatan        | 334            | 60,07          | 222            | 39,93          | 556              |
| Papua Tengah         | 692            | 57,67          | 508            | 42,33          | 1.200            |
| Papua Pegunungan     | 178            | 55,63          | 142            | 44,38          | 320              |
| Papua Barat Daya     | 349            | 50,22          | 346            | 49,78          | 695              |
| <b>Jumlah</b>        | <b>558.082</b> | <b>50,23</b>   | <b>552.954</b> | <b>49,77</b>   | <b>1.111.036</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 57 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024

| Provinsi             | Laki-Laki |                | Perempuan |                | Jumlah    |
|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                      | Jumlah    | Persentase (%) | Jumlah    | Persentase (%) |           |
| (1)                  | (2)       | (3)            | (4)       | (5)            | (6)       |
| Aceh                 | 16.833    | 49,83          | 16.950    | 50,17          | 33.783    |
| Sumatera Utara       | 70.498    | 44,85          | 86.701    | 55,15          | 157.199   |
| Sumatera Barat       | 21.625    | 51,35          | 20.486    | 48,65          | 42.111    |
| Riau                 | 48.013    | 49,92          | 48.171    | 50,08          | 96.184    |
| Jambi                | 23.737    | 50,87          | 22.928    | 49,13          | 46.665    |
| Sumatera Selatan     | 39.913    | 48,55          | 42.304    | 51,45          | 82.217    |
| Bengkulu             | 6.691     | 49,63          | 6.791     | 50,37          | 13.482    |
| Lampung              | 32.348    | 47,08          | 36.361    | 52,92          | 68.709    |
| Kep. Bangka Belitung | 6.425     | 51,36          | 6.084     | 48,64          | 12.509    |
| Kepulauan Riau       | 17.468    | 49,24          | 18.009    | 50,76          | 35.477    |
| DKI Jakarta          | 32.705    | 46,94          | 36.972    | 53,06          | 69.677    |
| Jawa Barat           | 143.471   | 47,16          | 160.726   | 52,84          | 304.197   |
| Jawa Tengah          | 67.136    | 45,88          | 79.186    | 54,12          | 146.322   |
| DI Yogyakarta        | 8.288     | 46,75          | 9.440     | 53,25          | 17.728    |
| Jawa Timur           | 79.676    | 47,07          | 89.594    | 52,93          | 169.270   |
| Banten               | 42.775    | 47,71          | 46.884    | 52,29          | 89.659    |
| Bali                 | 7.925     | 42,27          | 10.823    | 57,73          | 18.748    |
| Nusa Tenggara Barat  | 27.082    | 45,47          | 32.481    | 54,53          | 59.563    |
| Nusa Tenggara Timur  | 24.772    | 45,12          | 30.126    | 54,88          | 54.898    |
| Kalimantan Barat     | 18.899    | 50,21          | 18.741    | 49,79          | 37.640    |
| Kalimantan Tengah    | 20.946    | 51,78          | 19.509    | 48,22          | 40.455    |
| Kalimantan Selatan   | 15.063    | 50,06          | 15.026    | 49,94          | 30.089    |
| Kalimantan Timur     | 40.129    | 53,40          | 35.021    | 46,60          | 75.150    |
| Kalimantan Utara     | 8.388     | 55,17          | 6.817     | 44,83          | 15.205    |
| Sulawesi Utara       | 10.612    | 49,91          | 10.650    | 50,09          | 21.262    |
| Sulawesi Tengah      | 20.041    | 52,56          | 18.088    | 47,44          | 38.129    |
| Sulawesi Selatan     | 47.240    | 50,33          | 46.624    | 49,67          | 93.864    |
| Sulawesi Tenggara    | 15.559    | 51,69          | 14.543    | 48,31          | 30.102    |
| Gorontalo            | 3.253     | 52,02          | 3.000     | 47,98          | 6.253     |
| Sulawesi Barat       | 10.001    | 50,39          | 9.845     | 49,61          | 19.846    |
| Maluku               | 15.244    | 47,63          | 16.759    | 52,37          | 32.003    |
| Maluku Utara         | 12.669    | 51,99          | 11.699    | 48,01          | 24.368    |
| Papua                | 11.763    | 52,82          | 10.505    | 47,18          | 22.268    |
| Papua Barat          | 6.979     | 53,53          | 6.058     | 46,47          | 13.037    |
| Papua Selatan        | 6.225     | 54,47          | 5.204     | 45,53          | 11.429    |
| Papua Tengah         | 2.608     | 50,40          | 2.567     | 49,60          | 5.175     |
| Papua Pegunungan     | 298       | 66,97          | 147       | 33,03          | 445       |
| Papua Barat Daya     | 4.679     | 51,50          | 4.407     | 48,50          | 9.086     |
| Jumlah               | 987.977   | 48,33          | 1.056.227 | 51,67          | 2.044.204 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 59 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPR RI Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024

| Provinsi             | Laki-Laki |                | Perempuan |                | Jumlah    |
|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                      | Jumlah    | Persentase (%) | Jumlah    | Persentase (%) |           |
| (1)                  | (2)       | (3)            | (4)       | (5)            | (6)       |
| Aceh                 | 14.268    | 51,75          | 13.302    | 48,25          | 27.570    |
| Sumatera Utara       | 18.422    | 52,79          | 16.475    | 47,21          | 34.897    |
| Sumatera Barat       | 15.407    | 48,35          | 16.457    | 51,65          | 31.864    |
| Riau                 | 8.552     | 51,24          | 8.137     | 48,76          | 16.689    |
| Jambi                | 6.030     | 50,69          | 5.865     | 49,31          | 11.895    |
| Sumatera Selatan     | 13.789    | 52,45          | 12.499    | 47,55          | 26.288    |
| Bengkulu             | 4.694     | 51,04          | 4.503     | 48,96          | 9.197     |
| Lampung              | 18.434    | 52,17          | 16.901    | 47,83          | 35.335    |
| Kep. Bangka Belitung | 3.899     | 50,34          | 3.847     | 49,66          | 7.746     |
| Kepulauan Riau       | 3.245     | 50,11          | 3.231     | 49,89          | 6.476     |
| DKI Jakarta          | 34.222    | 55,18          | 27.799    | 44,82          | 62.021    |
| Jawa Barat           | 74.036    | 50,45          | 72.715    | 49,55          | 146.751   |
| Jawa Tengah          | 94.040    | 50,15          | 93.461    | 49,85          | 187.501   |
| DI Yogyakarta        | 15.007    | 49,20          | 15.496    | 50,80          | 30.503    |
| Jawa Timur           | 78.797    | 48,75          | 82.831    | 51,25          | 161.628   |
| Banten               | 15.143    | 51,50          | 14.261    | 48,50          | 29.404    |
| Bali                 | 10.808    | 52,91          | 9.620     | 47,09          | 20.428    |
| Nusa Tenggara Barat  | 10.962    | 47,09          | 12.317    | 52,91          | 23.279    |
| Nusa Tenggara Timur  | 22.081    | 47,74          | 24.170    | 52,26          | 46.251    |
| Kalimantan Barat     | 11.841    | 52,25          | 10.820    | 47,75          | 22.661    |
| Kalimantan Tengah    | 5.241     | 51,11          | 5.013     | 48,89          | 10.254    |
| Kalimantan Selatan   | 10.805    | 49,85          | 10.868    | 50,15          | 21.673    |
| Kalimantan Timur     | 6.181     | 52,24          | 5.650     | 47,76          | 11.831    |
| Kalimantan Utara     | 1.158     | 52,52          | 1.047     | 47,48          | 2.205     |
| Sulawesi Utara       | 6.917     | 51,68          | 6.466     | 48,32          | 13.383    |
| Sulawesi Tengah      | 6.849     | 50,61          | 6.685     | 49,39          | 13.534    |
| Sulawesi Selatan     | 24.657    | 45,87          | 29.094    | 54,13          | 53.751    |
| Sulawesi Tenggara    | 7.450     | 47,57          | 8.210     | 52,43          | 15.660    |
| Gorontalo            | 3.749     | 47,32          | 4.174     | 52,68          | 7.923     |
| Sulawesi Barat       | 4.212     | 46,31          | 4.883     | 53,69          | 9.095     |
| Maluku               | 2.861     | 50,43          | 2.812     | 49,57          | 5.673     |
| Maluku Utara         | 1.658     | 54,31          | 1.395     | 45,69          | 3.053     |
| Papua                | 780       | 57,74          | 571       | 42,26          | 1.351     |
| Papua Barat          | 469       | 60,91          | 301       | 39,09          | 770       |
| Papua Selatan        | 334       | 60,07          | 222       | 39,93          | 556       |
| Papua Tengah         | 692       | 57,67          | 508       | 42,33          | 1.200     |
| Papua Pegunungan     | 178       | 55,63          | 142       | 44,38          | 320       |
| Papua Barat Daya     | 349       | 50,22          | 346       | 49,78          | 695       |
| Jumlah               | 558.217   | 50,23          | 553.094   | 49,77          | 1.111.311 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 58 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024

| Provinsi             | Laki-Laki      |                | Perempuan      |                | Jumlah           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                      | Jumlah         | Persentase (%) | Jumlah         | Persentase (%) |                  |
| (1)                  | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            | (6)              |
| Aceh                 | 14.268         | 51,75          | 13.302         | 48,25          | 27.570           |
| Sumatera Utara       | 18.422         | 52,79          | 16.475         | 47,21          | 34.897           |
| Sumatera Barat       | 15.407         | 48,35          | 16.457         | 51,65          | 31.864           |
| Riau                 | 8.552          | 51,24          | 8.137          | 48,76          | 16.689           |
| Jambi                | 6.030          | 50,69          | 5.865          | 49,31          | 11.895           |
| Sumatera Selatan     | 13.789         | 52,45          | 12.499         | 47,55          | 26.288           |
| Bengkulu             | 4.694          | 51,04          | 4.503          | 48,96          | 9.197            |
| Lampung              | 18.434         | 52,17          | 16.901         | 47,83          | 35.335           |
| Kep. Bangka Belitung | 3.899          | 50,34          | 3.847          | 49,66          | 7.746            |
| Kepulauan Riau       | 3.245          | 50,11          | 3.231          | 49,89          | 6.476            |
| DKI Jakarta          | 34.087         | 55,21          | 27.659         | 44,79          | 61.746           |
| Jawa Barat           | 74.036         | 50,45          | 72.715         | 49,55          | 146.751          |
| Jawa Tengah          | 94.040         | 50,15          | 93.461         | 49,85          | 187.501          |
| DI Yogyakarta        | 15.007         | 49,20          | 15.496         | 50,80          | 30.503           |
| Jawa Timur           | 78.797         | 48,75          | 82.831         | 51,25          | 161.628          |
| Banten               | 15.143         | 51,50          | 14.261         | 48,50          | 29.404           |
| Bali                 | 10.808         | 52,91          | 9.620          | 47,09          | 20.428           |
| Nusa Tenggara Barat  | 10.962         | 47,09          | 12.317         | 52,91          | 23.279           |
| Nusa Tenggara Timur  | 22.081         | 47,74          | 24.170         | 52,26          | 46.251           |
| Kalimantan Barat     | 11.841         | 52,25          | 10.820         | 47,75          | 22.661           |
| Kalimantan Tengah    | 5.241          | 51,11          | 5.013          | 48,89          | 10.254           |
| Kalimantan Selatan   | 10.805         | 49,85          | 10.868         | 50,15          | 21.673           |
| Kalimantan Timur     | 6.181          | 52,24          | 5.650          | 47,76          | 11.831           |
| Kalimantan Utara     | 1.158          | 52,52          | 1.047          | 47,48          | 2.205            |
| Sulawesi Utara       | 6.917          | 51,68          | 6.466          | 48,32          | 13.383           |
| Sulawesi Tengah      | 6.849          | 50,61          | 6.685          | 49,39          | 13.534           |
| Sulawesi Selatan     | 24.657         | 45,87          | 29.094         | 54,13          | 53.751           |
| Sulawesi Tenggara    | 7.450          | 47,57          | 8.210          | 52,43          | 15.660           |
| Gorontalo            | 3.749          | 47,32          | 4.174          | 52,68          | 7.923            |
| Sulawesi Barat       | 4.212          | 46,31          | 4.883          | 53,69          | 9.095            |
| Maluku               | 2.861          | 50,43          | 2.812          | 49,57          | 5.673            |
| Maluku Utara         | 1.658          | 54,31          | 1.395          | 45,69          | 3.053            |
| Papua                | 780            | 57,74          | 571            | 42,26          | 1.351            |
| Papua Barat          | 469            | 60,91          | 301            | 39,09          | 770              |
| Papua Selatan        | 334            | 60,07          | 222            | 39,93          | 556              |
| Papua Tengah         | 692            | 57,67          | 508            | 42,33          | 1.200            |
| Papua Pegunungan     | 178            | 55,63          | 142            | 44,38          | 320              |
| Papua Barat Daya     | 349            | 50,22          | 346            | 49,78          | 695              |
| Luar Negeri          | 135            | 49,09          | 140            | 50,91          | 275              |
| <b>Jumlah</b>        | <b>558.217</b> | <b>50,23</b>   | <b>553.094</b> | <b>49,77</b>   | <b>1.111.311</b> |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 63 Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Jumlah DPT         | Jumlah Pengguna Hak Pilih |                  |                  | DPT Tidak Menggunakan Hak Pilih | Partisipasi Pemilih (Persen) |
|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                      |                    | DPT                       | DPTb             | DPK              |                                 |                              |
| (1)                  | (2)                | (3)                       | (4)              | (5)              | (6)                             | (7)                          |
| Aceh                 | 3.742.037          | 3.223.512                 | 28.040           | 33.720           | 518.525                         | 87,01                        |
| Sumatera Utara       | 10.853.940         | 7.923.259                 | 69.341           | 157.188          | 2.930.681                       | 74,01                        |
| Sumatera Barat       | 4.088.606          | 3.048.388                 | 37.864           | 42.094           | 1.040.218                       | 75,73                        |
| Riau                 | 4.732.174          | 3.605.524                 | 45.642           | 97.764           | 1.126.650                       | 77,62                        |
| Jambi                | 2.676.107          | 2.192.759                 | 20.499           | 46.975           | 483.348                         | 83,00                        |
| Sumatera Selatan     | 6.326.348          | 5.321.628                 | 32.282           | 82.217           | 1.004.720                       | 84,83                        |
| Bengkulu             | 1.494.828          | 1.268.840                 | 13.993           | 13.480           | 225.988                         | 85,94                        |
| Lampung              | 6.539.128          | 5.111.199                 | 26.403           | 68.706           | 1.427.929                       | 78,79                        |
| Kep. Bangka Belitung | 1.067.434          | 890.852                   | 12.913           | 12.513           | 176.582                         | 84,84                        |
| Kepulauan Riau       | 1.500.974          | 1.108.195                 | 28.161           | 35.477           | 392.779                         | 76,27                        |
| DKI Jakarta          | 8.252.897          | 6.356.507                 | 130.254          | 71.973           | 1.896.390                       | 78,78                        |
| Jawa Barat           | 35.714.901         | 28.903.697                | 230.154          | 304.190          | 6.811.204                       | 81,73                        |
| Jawa Tengah          | 28.289.413         | 23.143.127                | 186.364          | 146.320          | 5.146.286                       | 82,56                        |
| DI Yogyakarta        | 2.870.974          | 2.497.382                 | 52.293           | 17.719           | 373.592                         | 88,88                        |
| Jawa Timur           | 31.402.838         | 26.219.453                | 150.968          | 169.300          | 5.183.385                       | 84,06                        |
| Banten               | 8.842.646          | 7.267.751                 | 65.097           | 89.659           | 1.574.895                       | 83,10                        |
| Bali                 | 3.269.516          | 2.704.450                 | 17.496           | 18.746           | 565.066                         | 83,35                        |
| Nusa Tenggara Barat  | 3.918.291          | 3.250.427                 | 14.673           | 59.512           | 667.864                         | 83,58                        |
| Nusa Tenggara Timur  | 4.008.475          | 2.871.605                 | 28.269           | 54.922           | 1.136.870                       | 72,72                        |
| Kalimantan Barat     | 3.958.561          | 3.208.974                 | 31.217           | 37.624           | 749.587                         | 82,02                        |
| Kalimantan Tengah    | 1.935.116          | 1.492.040                 | 20.399           | 40.753           | 443.076                         | 78,61                        |
| Kalimantan Selatan   | 3.025.220          | 2.472.531                 | 33.863           | 30.089           | 552.689                         | 83,02                        |
| Kalimantan Timur     | 2.778.644          | 2.163.390                 | 39.488           | 75.163           | 615.254                         | 79,82                        |
| Kalimantan Utara     | 504.252            | 387.933                   | 10.004           | 15.195           | 116.319                         | 79,53                        |
| Sulawesi Utara       | 1.969.603          | 1.606.377                 | 19.365           | 21.263           | 363.226                         | 82,73                        |
| Sulawesi Tengah      | 2.236.703          | 1.756.761                 | 27.567           | 38.114           | 479.942                         | 80,11                        |
| Sulawesi Selatan     | 6.670.582          | 5.204.564                 | 75.691           | 94.098           | 1.466.018                       | 79,45                        |
| Sulawesi Tenggara    | 1.867.931          | 1.541.295                 | 19.515           | 30.109           | 326.636                         | 83,82                        |
| Gorontalo            | 881.206            | 765.833                   | 11.970           | 6.248            | 115.373                         | 88,35                        |
| Sulawesi Barat       | 985.760            | 780.108                   | 11.715           | 19.834           | 205.652                         | 80,71                        |
| Maluku               | 1.341.012          | 1.052.695                 | 10.849           | 32.246           | 288.317                         | 79,79                        |
| Maluku Utara         | 953.978            | 724.845                   | 9.522            | 24.445           | 229.133                         | 77,55                        |
| Papua                | 727.835            | 659.683                   | 2.554            | 22.268           | 68.152                          | 91,25                        |
| Papua Barat          | 385.465            | 319.595                   | 4.071            | 13.037           | 65.870                          | 84,49                        |
| Papua Selatan        | 367.269            | 306.486                   | 2.471            | 11.429           | 60.783                          | 84,60                        |
| Papua Tengah         | 1.128.844          | 1.127.277                 | 1.098            | 5.175            | 1.567                           | 99,96                        |
| Papua Pegunungan     | 1.306.414          | 1.305.947                 | 348              | 445              | 467                             | 99,99                        |
| Papua Barat Daya     | 440.826            | 350.590                   | 6.633            | 9.086            | 90.236                          | 81,42                        |
| Luar Negeri          | 1.365.433          | 369.840                   | 113.480          | 204.658          | 995.593                         | 43,82                        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>204.422.181</b> | <b>164.505.319</b>        | <b>1.642.526</b> | <b>2.253.754</b> | <b>39.916.862</b>               | <b>81,48</b>                 |

Keterangan: Tingkat Partisipasi Pemilih KPU diperoleh melalui rumus Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) dibagi dengan Jumlah Pemilih (DPT+DPK) lalu dikalikan 100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum



Lampiran 61 Jumlah Dapil dan TPS pada Pemilu Menurut Provinsi, 2024

| Provinsi             | Dapil            |                  | Jumlah TPS/ TPSLN/<br>KSK/ POS |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                      | Pemilihan DPR RI | Pemilihan DPD RI |                                |
| (1)                  | (2)              | (3)              | (4)                            |
| Aceh                 | 2                | 1                | 16.046                         |
| Sumatera Utara       | 3                | 1                | 45.875                         |
| Sumatera Barat       | 2                | 1                | 17.569                         |
| Riau                 | 2                | 1                | 19.366                         |
| Jambi                | 1                | 1                | 11.160                         |
| Sumatera Selatan     | 2                | 1                | 25.985                         |
| Bengkulu             | 1                | 1                | 6.210                          |
| Lampung              | 2                | 1                | 25.825                         |
| Kep. Bangka Belitung | 1                | 1                | 4.116                          |
| Kepulauan Riau       | 1                | 1                | 5.914                          |
| DKI Jakarta          | 3                | 1                | 30.766                         |
| Jawa Barat           | 11               | 1                | 140.457                        |
| Jawa Tengah          | 10               | 1                | 117.299                        |
| DI Yogyakarta        | 1                | 1                | 11.932                         |
| Jawa Timur           | 11               | 1                | 120.666                        |
| Banten               | 3                | 1                | 33.324                         |
| Bali                 | 1                | 1                | 12.809                         |
| Nusa Tenggara Barat  | 2                | 1                | 16.243                         |
| Nusa Tenggara Timur  | 2                | 1                | 16.746                         |
| Kalimantan Barat     | 2                | 1                | 17.626                         |
| Kalimantan Tengah    | 1                | 1                | 7.830                          |
| Kalimantan Selatan   | 2                | 1                | 13.584                         |
| Kalimantan Timur     | 1                | 1                | 11.441                         |
| Kalimantan Utara     | 1                | 1                | 2.295                          |
| Sulawesi Utara       | 1                | 1                | 8.240                          |
| Sulawesi Tengah      | 1                | 1                | 9.462                          |
| Sulawesi Selatan     | 3                | 1                | 26.357                         |
| Sulawesi Tenggara    | 1                | 1                | 8.154                          |
| Gorontalo            | 1                | 1                | 3.539                          |
| Sulawesi Barat       | 1                | 1                | 4.219                          |
| Maluku               | 1                | 1                | 5.622                          |
| Maluku Utara         | 1                | 1                | 4.192                          |
| Papua                | 1                | 1                | 3.109                          |
| Papua Barat          | 1                | 1                | 1.923                          |
| Papua Selatan        | 1                | 1                | 1.770                          |
| Papua Tengah         | 1                | 1                | 4.484                          |
| Papua Pegunungan     | 1                | 1                | 5.850                          |
| Papua Barat Daya     | 1                | 1                | 2.156                          |
| Luar Negeri          | ...              | ...              | 2.538                          |
| Jumlah               | 84               | 38               | 822.699                        |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum



Lampiran 62 Jumlah Kursi yang Diperebutkan pada Pemilu DPR dan DPD Menurut Provinsi, 2024

| Provinsi             | Alokasi Kursi |               |
|----------------------|---------------|---------------|
|                      | DPR RI<br>(2) | DPD RI<br>(3) |
| Aceh                 | 13            | 4             |
| Sumatera Utara       | 30            | 4             |
| Sumatera Barat       | 14            | 4             |
| Riau                 | 13            | 4             |
| Jambi                | 8             | 4             |
| Sumatera Selatan     | 17            | 4             |
| Bengkulu             | 4             | 4             |
| Lampung              | 20            | 4             |
| Kep. Bangka Belitung | 3             | 4             |
| Kepulauan Riau       | 4             | 4             |
| DKI Jakarta          | 21            | 4             |
| Jawa Barat           | 91            | 4             |
| Jawa Tengah          | 77            | 4             |
| DI Yogyakarta        | 8             | 4             |
| Jawa Timur           | 87            | 4             |
| Banten               | 22            | 4             |
| Bali                 | 9             | 4             |
| Nusa Tenggara Barat  | 11            | 4             |
| Nusa Tenggara Timur  | 13            | 4             |
| Kalimantan Barat     | 12            | 4             |
| Kalimantan Tengah    | 6             | 4             |
| Kalimantan Selatan   | 11            | 4             |
| Kalimantan Timur     | 8             | 4             |
| Kalimantan Utara     | 3             | 4             |
| Sulawesi Utara       | 6             | 4             |
| Sulawesi Tengah      | 7             | 4             |
| Sulawesi Selatan     | 24            | 4             |
| Sulawesi Tenggara    | 6             | 4             |
| Gorontalo            | 3             | 4             |
| Sulawesi Barat       | 4             | 4             |
| Maluku               | 4             | 4             |
| Maluku Utara         | 3             | 4             |
| Papua                | 3             | 4             |
| Papua Barat          | 3             | 4             |
| Papua Selatan        | 3             | 4             |
| Papua Tengah         | 3             | 4             |
| Papua Pegunungan     | 3             | 4             |
| Papua Barat Daya     | 3             | 4             |
| <b>Jumlah</b>        | <b>580</b>    | <b>152</b>    |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 64 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Jumlah DPT         | Jumlah Pengguna Hak Pilih |                  |                  | DPT Tidak Menggunakan Hak Pilih | Partisipasi Pemilih (Persen) |
|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                      |                    | DPT                       | DPTb             | DPK              |                                 |                              |
| (1)                  | (2)                | (3)                       | (4)              | (5)              | (6)                             | (7)                          |
| Aceh                 | 3.742.037          | 3.223.096                 | 22.672           | 33.677           | 518.941                         | 86,86                        |
| Sumatera Utara       | 10.853.940         | 7.918.216                 | 51.463           | 157.198          | 2.935.724                       | 73,81                        |
| Sumatera Barat       | 4.088.606          | 3.047.653                 | 29.634           | 42.114           | 1.040.953                       | 75,52                        |
| Riau                 | 4.732.174          | 3.604.498                 | 36.401           | 96.164           | 1.127.676                       | 77,40                        |
| Jambi                | 2.676.107          | 2.192.763                 | 16.337           | 46.676           | 483.344                         | 82,85                        |
| Sumatera Selatan     | 6.326.348          | 5.316.322                 | 24.755           | 82.217           | 1.010.026                       | 84,63                        |
| Bengkulu             | 1.494.828          | 1.268.760                 | 11.708           | 13.482           | 226.068                         | 85,79                        |
| Lampung              | 6.539.128          | 5.110.889                 | 17.608           | 68.709           | 1.428.239                       | 78,65                        |
| Kep. Bangka Belitung | 1.067.434          | 890.621                   | 8.525            | 12.513           | 176.813                         | 84,42                        |
| Kepulauan Riau       | 1.500.974          | 1.106.352                 | 19.908           | 35.477           | 394.622                         | 75,61                        |
| DKI Jakarta          | 9.618.330          | 6.719.541                 | 146.803          | 274.237          | 2.898.789                       | 72,18                        |
| Jawa Barat           | 35.714.901         | 28.896.543                | 106.485          | 304.195          | 6.818.358                       | 81,37                        |
| Jawa Tengah          | 28.289.413         | 23.137.937                | 108.027          | 146.322          | 5.151.476                       | 82,26                        |
| DI Yogyakarta        | 2.870.974          | 2.487.445                 | 18.413           | 17.728           | 383.529                         | 87,36                        |
| Jawa Timur           | 31.402.838         | 26.177.972                | 77.720           | 169.253          | 5.224.866                       | 83,70                        |
| Banten               | 8.842.646          | 7.262.669                 | 29.498           | 89.659           | 1.579.977                       | 82,64                        |
| Bali                 | 3.269.516          | 2.703.707                 | 6.445            | 18.748           | 565.809                         | 82,99                        |
| Nusa Tenggara Barat  | 3.918.291          | 3.250.740                 | 9.144            | 59.561           | 667.551                         | 83,45                        |
| Nusa Tenggara Timur  | 4.008.475          | 2.871.570                 | 22.168           | 54.910           | 1.136.905                       | 72,57                        |
| Kalimantan Barat     | 3.958.561          | 3.207.625                 | 22.754           | 37.640           | 750.936                         | 81,78                        |
| Kalimantan Tengah    | 1.935.116          | 1.489.548                 | 15.551           | 40.455           | 445.568                         | 78,23                        |
| Kalimantan Selatan   | 3.025.220          | 2.470.897                 | 20.051           | 30.089           | 554.323                         | 82,51                        |
| Kalimantan Timur     | 2.778.644          | 2.159.931                 | 24.630           | 75.150           | 618.713                         | 79,18                        |
| Kalimantan Utara     | 504.252            | 386.922                   | 6.928            | 15.203           | 117.330                         | 78,75                        |
| Sulawesi Utara       | 1.969.603          | 1.606.237                 | 14.340           | 21.262           | 363.366                         | 82,47                        |
| Sulawesi Tengah      | 2.236.703          | 1.757.187                 | 21.445           | 38.128           | 479.516                         | 79,86                        |
| Sulawesi Selatan     | 6.670.582          | 5.205.176                 | 61.476           | 93.675           | 1.465.406                       | 79,24                        |
| Sulawesi Tenggara    | 1.867.931          | 1.540.704                 | 16.794           | 30.098           | 327.227                         | 83,64                        |
| Gorontalo            | 881.206            | 766.077                   | 9.544            | 6.253            | 115.129                         | 88,10                        |
| Sulawesi Barat       | 985.760            | 800.671                   | 9.599            | 19.846           | 185.089                         | 82,55                        |
| Maluku               | 1.341.012          | 1.052.693                 | 8.446            | 31.916           | 288.319                         | 79,61                        |
| Maluku Utara         | 953.978            | 721.016                   | 6.825            | 24.485           | 232.962                         | 76,89                        |
| Papua                | 727.835            | 659.683                   | 1.698            | 22.268           | 68.152                          | 91,14                        |
| Papua Barat          | 385.465            | 319.595                   | 2.648            | 13.037           | 65.870                          | 84,14                        |
| Papua Selatan        | 367.269            | 306.486                   | 2.463            | 11.429           | 60.783                          | 84,60                        |
| Papua Tengah         | 1.128.844          | 1.127.277                 | 1.028            | 5.175            | 1.567                           | 99,95                        |
| Papua Pegunungan     | 1.306.414          | 1.305.947                 | 348              | 445              | 467                             | 99,99                        |
| Papua Barat Daya     | 440.826            | 350.460                   | 4.345            | 9.086            | 90.366                          | 80,88                        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>204.422.181</b> | <b>164.421.426</b>        | <b>1.014.627</b> | <b>2.248.480</b> | <b>40.000.755</b>               | <b>81,14</b>                 |

Keterangan: Tingkat Partisipasi Pemilih KPU diperoleh melalui rumus Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) dibagi dengan Jumlah Pemilih (DPT+DPK) lalu dikalikan 100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 68 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPD RI Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | DPT Disabilitas | Pengguna Hak Pilih Disabilitas | Partisipasi Pemilih Disabilitas (Persen) |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| (1)                  | (2)             | (3)                            | (4)                                      |
| Aceh                 | 27.570          | 11.723                         | 42,52                                    |
| Sumatera Utara       | 34.897          | 20.060                         | 57,48                                    |
| Sumatera Barat       | 31.864          | 15.612                         | 49,00                                    |
| Riau                 | 16.689          | 8.261                          | 49,50                                    |
| Jambi                | 11.895          | 6.064                          | 50,98                                    |
| Sumatera Selatan     | 26.288          | 15.486                         | 58,91                                    |
| Bengkulu             | 9.197           | 6.209                          | 67,51                                    |
| Lampung              | 35.335          | 11.762                         | 33,29                                    |
| Kep. Bangka Belitung | 7.746           | 2.950                          | 38,08                                    |
| Kepulauan Riau       | 6.476           | 3.696                          | 57,07                                    |
| DKI Jakarta          | 61.746          | 24.748                         | 40,08                                    |
| Jawa Barat           | 146.751         | 56.607                         | 38,57                                    |
| Jawa Tengah          | 187.501         | 58.973                         | 31,45                                    |
| DI Yogyakarta        | 30.503          | 9.646                          | 31,62                                    |
| Jawa Timur           | 161.628         | 44.590                         | 27,59                                    |
| Banten               | 29.404          | 12.609                         | 42,88                                    |
| Bali                 | 20.428          | 4.309                          | 21,09                                    |
| Nusa Tenggara Barat  | 23.279          | 14.779                         | 63,49                                    |
| Nusa Tenggara Timur  | 46.251          | 35.079                         | 75,84                                    |
| Kalimantan Barat     | 22.661          | 11.591                         | 51,15                                    |
| Kalimantan Tengah    | 10.254          | 5.029                          | 49,04                                    |
| Kalimantan Selatan   | 21.673          | 9.948                          | 45,90                                    |
| Kalimantan Timur     | 11.831          | 6.091                          | 51,48                                    |
| Kalimantan Utara     | 2.205           | 1.949                          | 88,39                                    |
| Sulawesi Utara       | 13.383          | 9.312                          | 69,58                                    |
| Sulawesi Tengah      | 13.534          | 9.574                          | 70,74                                    |
| Sulawesi Selatan     | 53.751          | 30.498                         | 56,74                                    |
| Sulawesi Tenggara    | 15.660          | 12.293                         | 78,50                                    |
| Gorontalo            | 7.923           | 3.963                          | 50,02                                    |
| Sulawesi Barat       | 9.095           | 5.507                          | 60,55                                    |
| Maluku               | 5.673           | 7.720                          | 136,08                                   |
| Maluku Utara         | 3.053           | 3.436                          | 112,55                                   |
| Papua                | 1.351           | 1.147                          | 84,90                                    |
| Papua Barat          | 770             | 1.192                          | 154,81                                   |
| Papua Selatan        | 556             | 235                            | 42,27                                    |
| Papua Tengah         | 1.200           | 212                            | 17,67                                    |
| Papua Pegunungan     | 320             | -                              | -  |
| Papua Barat Daya     | 695             | 1.144                          | 164,60                                   |
| Jumlah               | 1.111.036       | 484.004                        | 43,56                                    |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 6 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | DPT Disabilitas  | Pengguna Hak Pilih Disabilitas | Partisipasi Pemilih Disabilitas (Persen) |
|----------------------|------------------|--------------------------------|--|
| (1)                  | (2)              | (3)                            | (4)                                      |
| Aceh                 | 27.570           | 11.728                         | 42,54                                    |
| Sumatera Utara       | 34.897           | 19.840                         | 56,85                                    |
| Sumatera Barat       | 31.864           | 15.604                         | 48,97                                    |
| Riau                 | 16.689           | 8.094                          | 48,50                                    |
| Jambi                | 11.895           | 6.386                          | 53,69                                    |
| Sumatera Selatan     | 26.288           | 13.961                         | 53,11                                    |
| Bengkulu             | 9.197            | 6.205                          | 67,47                                    |
| Lampung              | 35.335           | 11.615                         | 32,87                                    |
| Kep. Bangka Belitung | 7.746            | 2.950                          | 38,08                                    |
| Kepulauan Riau       | 6.476            | 3.696                          | 57,07                                    |
| DKI Jakarta          | 61.746           | 24.981                         | 40,46                                    |
| Jawa Barat           | 146.751          | 57.081                         | 38,90                                    |
| Jawa Tengah          | 187.501          | 59.172                         | 31,56                                    |
| DI Yogyakarta        | 30.503           | 9.650                          | 31,64                                    |
| Jawa Timur           | 161.628          | 42.972                         | 26,59                                    |
| Banten               | 29.404           | 12.250                         | 41,66                                    |
| Bali                 | 20.428           | 4.149                          | 20,31                                    |
| Nusa Tenggara Barat  | 23.279           | 14.779                         | 63,49                                    |
| Nusa Tenggara Timur  | 46.251           | 35.255                         | 76,23                                    |
| Kalimantan Barat     | 22.661           | 11.662                         | 51,46                                    |
| Kalimantan Tengah    | 10.254           | 5.024                          | 49,00                                    |
| Kalimantan Selatan   | 21.673           | 11.003                         | 50,77                                    |
| Kalimantan Timur     | 11.831           | 6.077                          | 51,37                                    |
| Kalimantan Utara     | 2.205            | 1.947                          | 88,30                                    |
| Sulawesi Utara       | 13.383           | 9.334                          | 69,75                                    |
| Sulawesi Tengah      | 13.534           | 9.573                          | 70,73                                    |
| Sulawesi Selatan     | 53.751           | 30.367                         | 56,50                                    |
| Sulawesi Tenggara    | 15.660           | 12.294                         | 78,51                                    |
| Gorontalo            | 7.923            | 3.968                          | 50,08                                    |
| Sulawesi Barat       | 9.095            | 5.549                          | 61,01                                    |
| Maluku               | 5.673            | 7.734                          | 136,33                                   |
| Maluku Utara         | 3.053            | 3.419                          | 111,99                                   |
| Papua                | 1.351            | 1.147                          | 84,90                                    |
| Papua Barat          | 770              | 1.497                          | 194,42                                   |
| Papua Selatan        | 556              | 235                            | 42,27                                    |
| Papua Tengah         | 1.200            | 212                            | 17,67                                    |
| Papua Pegunungan     | 320              | -                              | -  |
| Papua Barat Daya     | 695              | 807                            | 116,12                                   |
| Luar Negeri          | 275              | 282,00                         | 102,55                                   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>1.111.311</b> | <b>482.499</b>                 | <b>43,42</b>                             |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 67 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPR RI Menurut Provinsi, 2024

| Provinsi             | DPT Disabilitas | Pengguna Hak Pilih Disabilitas | Partisipasi Pemilih Disabilitas (Persen) |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| (1)                  | (2)             | (3)                            | (4)                                      |
| Aceh                 | 27.570          | 11.714                         | 42,49                                    |
| Sumatera Utara       | 34.897          | 19.888                         | 56,99                                    |
| Sumatera Barat       | 31.864          | 15.612                         | 49,00                                    |
| Riau                 | 16.689          | 8.051                          | 48,24                                    |
| Jambi                | 11.895          | 6.094                          | 51,23                                    |
| Sumatera Selatan     | 26.288          | 16.446                         | 62,56                                    |
| Bengkulu             | 9.197           | 6.209                          | 67,51                                    |
| Lampung              | 35.335          | 11.594                         | 32,81                                    |
| Kep. Bangka Belitung | 7.746           | 2.950                          | 38,08                                    |
| Kepulauan Riau       | 6.476           | 3.696                          | 57,07                                    |
| DKI Jakarta          | 62.021          | 24.636                         | 39,72                                    |
| Jawa Barat           | 146.751         | 56.527                         | 38,52                                    |
| Jawa Tengah          | 187.501         | 58.608                         | 31,26                                    |
| DI Yogyakarta        | 30.503          | 9.646                          | 31,62                                    |
| Jawa Timur           | 161.628         | 43.464                         | 26,89                                    |
| Banten               | 29.404          | 12.212                         | 41,53                                    |
| Bali                 | 20.428          | 4.360                          | 21,34                                    |
| Nusa Tenggara Barat  | 23.279          | 14.779                         | 63,49                                    |
| Nusa Tenggara Timur  | 46.251          | 35.391                         | 76,52                                    |
| Kalimantan Barat     | 22.661          | 11.352                         | 50,09                                    |
| Kalimantan Tengah    | 10.254          | 5.029                          | 49,04                                    |
| Kalimantan Selatan   | 21.673          | 9.070                          | 41,85                                    |
| Kalimantan Timur     | 11.831          | 6.091                          | 51,48                                    |
| Kalimantan Utara     | 2.205           | 1.935                          | 87,76                                    |
| Sulawesi Utara       | 13.383          | 9.312                          | 69,58                                    |
| Sulawesi Tengah      | 13.534          | 9.576                          | 70,76                                    |
| Sulawesi Selatan     | 53.751          | 30.322                         | 56,41                                    |
| Sulawesi Tenggara    | 15.660          | 12.298                         | 78,53                                    |
| Gorontalo            | 7.923           | 3.963                          | 50,02                                    |
| Sulawesi Barat       | 9.095           | 5.507                          | 60,55                                    |
| Maluku               | 5.673           | 7.608                          | 134,11                                   |
| Maluku Utara         | 3.053           | 3.484                          | 114,12                                   |
| Papua                | 1.351           | 1.147                          | 84,90                                    |
| Papua Barat          | 770             | 1.056                          | 137,14                                   |
| Papua Selatan        | 556             | 235                            | 42,27                                    |
| Papua Tengah         | 1.200           | 212                            | 17,67                                    |
| Papua Pegunungan     | 320             | -                              | -  |
| Papua Barat Daya     | 695             | 1.215                          | 174,82                                   |
| Jumlah               | 1.111.311       | 481.289                        | 43,31                                    |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 65 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2024

| Provinsi             | Jumlah DPT         | Jumlah Pengguna Hak Pilih |                  |                  | DPT Tidak Menggunakan Hak Pilih | Partisipasi Pemilih (Persen) |
|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                      |                    | DPT                       | DPTb             | DPK              |                                 |                              |
| (1)                  | (2)                | (3)                       | (4)              | (5)              | (6)                             | (7)                          |
| Aceh                 | 3.742.037          | 3.223.397                 | 24.045           | 33.783           | 518.640                         | 86,90                        |
| Sumatera Utara       | 10.853.940         | 7.921.084                 | 60.010           | 157.199          | 2.932.856                       | 73,91                        |
| Sumatera Barat       | 4.088.606          | 3.048.132                 | 31.645           | 42.111           | 1.040.474                       | 75,58                        |
| Riau                 | 4.732.174          | 3.605.158                 | 37.776           | 96.184           | 1.127.016                       | 77,44                        |
| Jambi                | 2.676.107          | 2.192.736                 | 16.337           | 46.665           | 483.371                         | 82,85                        |
| Sumatera Selatan     | 6.326.348          | 5.317.118                 | 26.348           | 82.217           | 1.009.230                       | 84,66                        |
| Bengkulu             | 1.494.828          | 1.268.760                 | 11.708           | 13.482           | 226.068                         | 85,79                        |
| Lampung              | 6.539.128          | 5.111.006                 | 20.358           | 68.709           | 1.428.122                       | 78,70                        |
| Kep. Bangka Belitung | 1.067.434          | 890.612                   | 8.524            | 12.509           | 176.822                         | 84,42                        |
| Kepulauan Riau       | 1.500.974          | 1.106.352                 | 19.908           | 35.477           | 394.622                         | 75,61                        |
| DKI Jakarta          | 8.252.897          | 6.354.291                 | 38.387           | 69.677           | 1.898.606                       | 77,65                        |
| Jawa Barat           | 35.714.901         | 28.899.683                | 147.004          | 304.197          | 6.815.218                       | 81,49                        |
| Jawa Tengah          | 28.289.413         | 23.141.174                | 136.293          | 146.322          | 5.148.239                       | 82,37                        |
| DI Yogyakarta        | 2.870.974          | 2.487.399                 | 18.413           | 17.728           | 383.575                         | 87,36                        |
| Jawa Timur           | 31.402.838         | 26.192.731                | 106.088          | 169.270          | 5.210.107                       | 83,83                        |
| Banten               | 8.842.646          | 7.258.707                 | 31.114           | 89.659           | 1.583.939                       | 82,62                        |
| Bali                 | 3.269.516          | 2.703.707                 | 6.445            | 18.748           | 565.809                         | 82,99                        |
| Nusa Tenggara Barat  | 3.918.291          | 3.250.863                 | 9.988            | 59.563           | 667.428                         | 83,47                        |
| Nusa Tenggara Timur  | 4.008.475          | 2.871.391                 | 23.633           | 54.898           | 1.137.084                       | 72,60                        |
| Kalimantan Barat     | 3.958.561          | 3.208.446                 | 24.428           | 37.640           | 750.115                         | 81,84                        |
| Kalimantan Tengah    | 1.935.116          | 1.489.548                 | 15.551           | 40.455           | 445.568                         | 78,23                        |
| Kalimantan Selatan   | 3.025.220          | 2.471.999                 | 22.074           | 30.089           | 553.221                         | 82,62                        |
| Kalimantan Timur     | 2.778.644          | 2.159.931                 | 24.630           | 75.150           | 618.713                         | 79,18                        |
| Kalimantan Utara     | 504.252            | 386.935                   | 6.930            | 15.205           | 117.317                         | 78,75                        |
| Sulawesi Utara       | 1.969.603          | 1.606.214                 | 14.280           | 21.262           | 363.389                         | 82,46                        |
| Sulawesi Tengah      | 2.236.703          | 1.757.109                 | 21.450           | 38.129           | 479.594                         | 79,86                        |
| Sulawesi Selatan     | 6.670.582          | 5.205.925                 | 65.329           | 93.864           | 1.464.657                       | 79,31                        |
| Sulawesi Tenggara    | 1.867.931          | 1.540.703                 | 16.796           | 30.102           | 327.228                         | 83,64                        |
| Gorontalo            | 881.206            | 766.170                   | 9.547            | 6.253            | 115.036                         | 88,11                        |
| Sulawesi Barat       | 985.760            | 800.671                   | 9.599            | 19.846           | 185.089                         | 82,55                        |
| Maluku               | 1.341.012          | 1.052.607                 | 8.419            | 32.003           | 288.405                         | 79,61                        |
| Maluku Utara         | 953.978            | 721.472                   | 6.638            | 24.368           | 232.506                         | 76,91                        |
| Papua                | 727.835            | 659.683                   | 1.698            | 22.268           | 68.152                          | 91,14                        |
| Papua Barat          | 385.465            | 319.595                   | 2.648            | 13.037           | 65.870                          | 84,14                        |
| Papua Selatan        | 367.269            | 306.486                   | 2.463            | 11.429           | 60.783                          | 84,60                        |
| Papua Tengah         | 1.128.844          | 1.127.277                 | 1.028            | 5.175            | 1.567                           | 99,95                        |
| Papua Pegunungan     | 1.306.414          | 1.305.947                 | 348              | 445              | 467                             | 99,99                        |
| Papua Barat Daya     | 440.826            | 350.590                   | 3.866            | 9.086            | 90.236                          | 80,80                        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>203.056.748</b> | <b>164.081.609</b>        | <b>1.031.746</b> | <b>2.044.204</b> | <b>38.975.139</b>               | <b>81,50</b>                 |

Keterangan: Tingkat Partisipasi Pemilih KPU diperoleh melalui rumus Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) dibagi dengan Jumlah Pemilih (DPT+DPK) lalu dikalikan 100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 71 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Suara Sah          | Suara Tidak Sah   | Jumlah Suara       | Suara Tidak Sah (Persen) |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                  | (2)                | (3)               | (4)                | (5)                      |
| Aceh                 | 2.942.946          | 338.279           | 3.281.225          | 10,31                    |
| Sumatera Utara       | 6.736.533          | 1.401.760         | 8.138.293          | 17,22                    |
| Sumatera Barat       | 1.439.145          | 21.913            | 1.461.058          | 1,50                     |
| Riau                 | 3.193.066          | 546.052           | 3.739.118          | 14,60                    |
| Jambi                | 1.821.475          | 434.263           | 2.255.738          | 19,25                    |
| Sumatera Selatan     | 4.521.915          | 903.768           | 5.425.683          | 16,66                    |
| Bengkulu             | 1.141.196          | 152.754           | 1.293.950          | 11,81                    |
| Lampung              | 4.362.846          | 837.227           | 5.200.073          | 16,10                    |
| Kep. Bangka Belitung | 733.440            | 178.205           | 911.645            | 19,55                    |
| Kepulauan Riau       | 1.036.889          | 124.848           | 1.161.737          | 10,75                    |
| DKI Jakarta          | 5.613.949          | 848.406           | 6.462.355          | 13,13                    |
| Jawa Barat           | 23.733.601         | 5.617.283         | 29.350.884         | 19,14                    |
| Jawa Tengah          | 18.460.060         | 4.963.729         | 23.423.789         | 21,19                    |
| DI Yogyakarta        | 2.299.569          | 223.971           | 2.523.540          | 8,88                     |
| Jawa Timur           | 20.290.187         | 6.177.902         | 26.468.089         | 23,34                    |
| Banten               | 5.745.213          | 1.634.267         | 7.379.480          | 22,15                    |
| Bali                 | 2.483.353          | 245.547           | 2.728.900          | 9,00                     |
| Nusa Tenggara Barat  | 2.893.906          | 426.508           | 3.320.414          | 12,85                    |
| Nusa Tenggara Timur  | 2.772.248          | 177.674           | 2.949.922          | 6,02                     |
| Kalimantan Barat     | 2.884.393          | 386.121           | 3.270.514          | 11,81                    |
| Kalimantan Tengah    | 1.330.826          | 214.728           | 1.545.554          | 13,89                    |
| Kalimantan Selatan   | 2.107.817          | 416.345           | 2.524.162          | 16,49                    |
| Kalimantan Timur     | 1.900.969          | 358.742           | 2.259.711          | 15,88                    |
| Kalimantan Utara     | 372.937            | 36.133            | 409.070            | 8,83                     |
| Sulawesi Utara       | 1.497.328          | 144.428           | 1.641.756          | 8,80                     |
| Sulawesi Tengah      | 1.686.388          | 130.300           | 1.816.688          | 7,17                     |
| Sulawesi Selatan     | 4.865.100          | 500.018           | 5.365.118          | 9,32                     |
| Sulawesi Tenggara    | 1.407.207          | 180.394           | 1.587.601          | 11,36                    |
| Gorontalo            | 744.606            | 37.364            | 781.970            | 4,78                     |
| Sulawesi Barat       | 777.790            | 52.326            | 830.116            | 6,30                     |
| Maluku               | 1.035.107          | 57.922            | 1.093.029          | 5,30                     |
| Maluku Utara         | 705.273            | 47.205            | 752.478            | 6,27                     |
| Papua                | 595.031            | 88.618            | 683.649            | 12,96                    |
| Papua Barat          | 304.722            | 30.558            | 335.280            | 9,11                     |
| Papua Selatan        | 298.277            | 22.101            | 320.378            | 6,90                     |
| Papua Tengah         | 1.115.527          | 17.953            | 1.133.480          | 1,58                     |
| Papua Pegunungan     | 1.305.090          | 1.650             | 1.306.740          | 0,13                     |
| Papua Barat Daya     | 330.600            | 32.942            | 363.542            | 9,06                     |
| <b>Jumlah</b>        | <b>137.486.525</b> | <b>28.010.204</b> | <b>165.496.729</b> | <b>16,92</b>             |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 69 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024

| Provinsi             | Suara Sah   | Suara Tidak Sah | Jumlah Suara | Suara Tidak Sah (Persen) |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| (1)                  | (2)         | (3)             | (4)          | (5)                      |
| Aceh                 | 3.221.235   | 64.037          | 3.285.272    | 1,95                     |
| Sumatera Utara       | 7.999.556   | 150.232         | 8.149.788    | 1,84                     |
| Sumatera Barat       | 3.085.400   | 42.946          | 3.128.346    | 1,37                     |
| Riau                 | 3.688.504   | 60.426          | 3.748.930    | 1,61                     |
| Jambi                | 2.205.808   | 54.425          | 2.260.233    | 2,41                     |
| Sumatera Selatan     | 5.253.631   | 182.496         | 5.436.127    | 3,36                     |
| Bengkulu             | 1.268.750   | 27.563          | 1.296.313    | 2,13                     |
| Lampung              | 5.110.688   | 95.620          | 5.206.308    | 1,84                     |
| Kep. Bangka Belitung | 885.340     | 30.938          | 916.278      | 3,38                     |
| Kepulauan Riau       | 1.152.792   | 19.041          | 1.171.833    | 1,62                     |
| DKI Jakarta          | 6.460.911   | 97.823          | 6.558.734    | 1,49                     |
| Jawa Barat           | 28.726.523  | 711.518         | 29.438.041   | 2,42                     |
| Jawa Tengah          | 22.790.162  | 685.649         | 23.475.811   | 2,92                     |
| DI Yogyakarta        | 2.506.765   | 60.629          | 2.567.394    | 2,36                     |
| Jawa Timur           | 25.644.060  | 895.661         | 26.539.721   | 3,37                     |
| Banten               | 7.206.710   | 215.797         | 7.422.507    | 2,91                     |
| Bali                 | 2.681.007   | 59.685          | 2.740.692    | 2,18                     |
| Nusa Tenggara Barat  | 3.246.488   | 78.124          | 3.324.612    | 2,35                     |
| Nusa Tenggara Timur  | 2.910.704   | 44.092          | 2.954.796    | 1,49                     |
| Kalimantan Barat     | 3.217.274   | 60.541          | 3.277.815    | 1,85                     |
| Kalimantan Tengah    | 1.512.669   | 40.523          | 1.553.192    | 2,61                     |
| Kalimantan Selatan   | 2.417.582   | 118.901         | 2.536.483    | 4,69                     |
| Kalimantan Timur     | 2.230.535   | 47.506          | 2.278.041    | 2,09                     |
| Kalimantan Utara     | 407.725     | 5.407           | 413.132      | 1,31                     |
| Sulawesi Utara       | 1.631.968   | 15.037          | 1.647.005    | 0,91                     |
| Sulawesi Tengah      | 1.798.650   | 23.792          | 1.822.442    | 1,31                     |
| Sulawesi Selatan     | 5.279.755   | 94.598          | 5.374.353    | 1,76                     |
| Sulawesi Tenggara    | 1.565.656   | 25.263          | 1.590.919    | 1,59                     |
| Gorontalo            | 773.524     | 10.527          | 784.051      | 1,34                     |
| Sulawesi Barat       | 819.424     | 12.645          | 832.069      | 1,52                     |
| Maluku               | 1.080.323   | 15.467          | 1.095.790    | 1,41                     |
| Maluku Utara         | 746.695     | 12.117          | 758.812      | 1,60                     |
| Papua                | 625.034     | 59.471          | 684.505      | 8,69                     |
| Papua Barat          | 330.989     | 5.714           | 336.703      | 1,70                     |
| Papua Selatan        | 314.761     | 5.625           | 320.386      | 1,76                     |
| Papua Tengah         | 1.102.282   | 31.268          | 1.133.550    | 2,76                     |
| Papua Pegunungan     | 1.298.522   | 8.218           | 1.306.740    | 0,63                     |
| Papua Barat Daya     | 357.707     | 8.602           | 366.309      | 2,35                     |
| Luar Negeri          | 671.366     | 16.612          | 687.978      | 2,41                     |
| Jumlah               | 164.227.475 | 4.194.536       | 168.422.011  | 2,49                     |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum



**Lanjutan Lampiran 73**

| Provinsi             | Perolehan Suara Partai Politik |            |         |           |         |            |
|----------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------|---------|------------|
|                      | Gelora                         | PKS        | PKN     | Hanura    | Garuda  | PAN        |
| (1)                  | (8)                            | (9)        | (10)    | (11)      | (12)    | (13)       |
| Aceh                 | 19.625                         | 223.721    | 4.028   | 54.024    | 8.051   | 268.710    |
| Sumatera Utara       | 44.403                         | 602.832    | 7.981   | 71.905    | 16.823  | 359.489    |
| Sumatera Barat       | 22.251                         | 381.879    | 3.828   | 22.606    | 9.379   | 382.856    |
| Riau                 | 22.559                         | 384.023    | 5.976   | 21.162    | 8.976   | 266.112    |
| Jambi                | 15.627                         | 107.298    | 5.656   | 12.783    | 6.729   | 166.290    |
| Sumatera Selatan     | 33.234                         | 294.282    | 20.773  | 52.535    | 21.469  | 329.836    |
| Bengkulu             | 10.400                         | 70.344     | 3.043   | 11.688    | 4.300   | 188.346    |
| Lampung              | 27.631                         | 303.074    | 6.701   | 20.815    | 14.021  | 364.060    |
| Kep. Bangka Belitung | 6.870                          | 33.169     | 998     | 7.149     | 2.503   | 12.288     |
| Kepulauan Riau       | 9.870                          | 108.797    | 1.920   | 10.629    | 3.206   | 57.472     |
| DKI Jakarta          | 47.569                         | 1.195.699  | 11.578  | 23.277    | 13.284  | 496.407    |
| Jawa Barat           | 220.788                        | 3.505.195  | 40.482  | 107.768   | 60.915  | 1.885.165  |
| Jawa Tengah          | 148.895                        | 1.492.537  | 23.371  | 146.358   | 41.317  | 1.137.194  |
| D. I. Yogyakarta     | 12.732                         | 272.061    | 3.638   | 4.047     | 4.792   | 198.662    |
| Jawa Timur           | 141.857                        | 1.129.997  | 28.856  | 88.528    | 47.061  | 1.484.944  |
| Banten               | 60.013                         | 686.645    | 9.609   | 21.994    | 18.938  | 581.145    |
| Bali                 | 23.731                         | 19.145     | 23.681  | 9.851     | 4.600   | 6.683      |
| Nusa Tenggara Barat  | 116.859                        | 319.321    | 11.008  | 33.991    | 19.289  | 262.809    |
| Nusa Tenggara Timur  | 24.872                         | 55.982     | 16.808  | 75.551    | 19.101  | 212.854    |
| Kalimantan Barat     | 16.224                         | 137.253    | 3.981   | 78.850    | 6.956   | 189.531    |
| Kalimantan Tengah    | 8.095                          | 29.778     | 3.143   | 13.786    | 4.853   | 148.111    |
| Kalimantan Selatan   | 23.419                         | 169.987    | 2.572   | 9.424     | 6.727   | 372.607    |
| Kalimantan Timur     | 56.308                         | 145.538    | 3.662   | 13.254    | 5.158   | 111.141    |
| Kalimantan Utara     | 3.622                          | 12.354     | 815     | 8.197     | 1.273   | 7.795      |
| Sulawesi Utara       | 5.802                          | 28.665     | 1.628   | 10.248    | 1.684   | 80.753     |
| Sulawesi Tengah      | 20.981                         | 100.727    | 10.713  | 30.995    | 6.094   | 117.811    |
| Sulawesi Selatan     | 55.875                         | 384.394    | 8.902   | 25.209    | 11.938  | 411.431    |
| Sulawesi Tenggara    | 20.942                         | 63.092     | 7.380   | 17.140    | 4.850   | 110.211    |
| Gorontalo            | 5.348                          | 17.590     | 970     | 5.984     | 1.663   | 15.149     |
| Sulawesi Barat       | 9.260                          | 22.460     | 1.377   | 5.966     | 2.168   | 101.646    |
| Maluku               | 13.391                         | 146.716    | 11.111  | 14.325    | 4.514   | 178.770    |
| Maluku Utara         | 8.859                          | 70.736     | 3.894   | 10.914    | 5.594   | 62.457     |
| Papua                | 9.292                          | 27.887     | 5.237   | 25.718    | 4.289   | 41.911     |
| Papua Barat          | 2.764                          | 19.729     | 1.545   | 3.369     | 1.456   | 8.747      |
| Papua Selatan        | 4.830                          | 27.285     | 1.019   | 5.340     | 1.826   | 31.576     |
| Papua Tengah         | 3.796                          | 30.158     | 6.465   | 5.152     | 2.256   | 119.726    |
| Papua Pegunungan     | 1.256                          | 145.353    | 21.505  | 1.640     | 7.118   | 189.105    |
| Papua Barat Daya     | 2.141                          | 15.650     | 946     | 12.416    | 1.712   | 24.203     |
| Jumlah               | 1.281.991                      | 12.781.353 | 326.800 | 1.094.588 | 406.883 | 10.984.003 |

**Lampiran 70 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Suara Sah          | Suara Tidak Sah   | Jumlah Suara       | Suara Tidak Sah (Persen) |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                  | (2)                | (3)               | (4)                | (5)                      |
| Aceh                 | 3.047.729          | 231.716           | 3.279.445          | 7,07                     |
| Sumatera Utara       | 7.408.581          | 718.296           | 8.126.877          | 8,84                     |
| Sumatera Barat       | 2.920.240          | 199.161           | 3.119.401          | 6,38                     |
| Riau                 | 3.392.259          | 344.804           | 3.737.063          | 9,23                     |
| Jambi                | 1.951.724          | 304.052           | 2.255.776          | 13,48                    |
| Sumatera Selatan     | 4.874.788          | 548.506           | 5.423.294          | 10,11                    |
| Bengkulu             | 1.151.620          | 142.330           | 1.293.950          | 11,00                    |
| Lampung              | 4.651.843          | 545.363           | 5.197.206          | 10,49                    |
| Kep. Bangka Belitung | 771.812            | 139.847           | 911.659            | 15,34                    |
| Kepulauan Riau       | 1.053.995          | 107.742           | 1.161.737          | 9,27                     |
| DKI Jakarta          | 6.643.110          | 497.471           | 7.140.581          | 6,97                     |
| Jawa Barat           | 26.291.451         | 3.015.772         | 29.307.223         | 10,29                    |
| Jawa Tengah          | 20.944.956         | 2.447.330         | 23.392.286         | 10,46                    |
| DI Yogyakarta        | 2.294.779          | 228.807           | 2.523.586          | 9,07                     |
| Jawa Timur           | 23.543.816         | 2.873.735         | 26.417.551         | 10,88                    |
| Banten               | 6.483.737          | 898.088           | 7.381.825          | 12,17                    |
| Bali                 | 2.460.686          | 268.214           | 2.728.900          | 9,83                     |
| Nusa Tenggara Barat  | 3.006.171          | 313.274           | 3.319.445          | 9,44                     |
| Nusa Tenggara Timur  | 2.801.119          | 147.529           | 2.948.648          | 5,00                     |
| Kalimantan Barat     | 3.006.307          | 261.712           | 3.268.019          | 8,01                     |
| Kalimantan Tengah    | 1.354.625          | 190.929           | 1.545.554          | 12,35                    |
| Kalimantan Selatan   | 2.229.816          | 291.221           | 2.521.037          | 11,55                    |
| Kalimantan Timur     | 2.014.025          | 245.686           | 2.259.711          | 10,87                    |
| Kalimantan Utara     | 379.458            | 29.595            | 409.053            | 7,24                     |
| Sulawesi Utara       | 1.533.523          | 108.316           | 1.641.839          | 6,60                     |
| Sulawesi Tengah      | 1.718.343          | 98.417            | 1.816.760          | 5,42                     |
| Sulawesi Selatan     | 5.081.429          | 278.898           | 5.360.327          | 5,20                     |
| Sulawesi Tenggara    | 1.458.333          | 129.263           | 1.587.596          | 8,14                     |
| Gorontalo            | 741.783            | 40.091            | 781.874            | 5,13                     |
| Sulawesi Barat       | 785.247            | 44.869            | 830.116            | 5,41                     |
| Maluku               | 1.040.166          | 52.889            | 1.093.055          | 4,84                     |
| Maluku Utara         | 699.302            | 53.024            | 752.326            | 7,05                     |
| Papua                | 658.922            | 24.727            | 683.649            | 3,62                     |
| Papua Barat          | 321.066            | 14.214            | 335.280            | 4,24                     |
| Papua Selatan        | 303.385            | 16.993            | 320.378            | 5,30                     |
| Papua Tengah         | 1.126.683          | 6.797             | 1.133.480          | 0,60                     |
| Papua Pegunungan     | 1.306.436          | 304               | 1.306.740          | 0,02                     |
| Papua Barat Daya     | 340.028            | 23.863            | 363.891            | 6,56                     |
| <b>Jumlah</b>        | <b>151.793.293</b> | <b>15.883.845</b> | <b>167.677.138</b> | <b>9,47</b>              |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 73 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2024**

| Provinsi             | Perolehan Suara Partai Politik |            |            |            |            |              |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                      | PKB                            | Gerindra   | PDI-P      | Golkar     | Nasdem     | Partai Buruh |
| (1)                  | (2)                            | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)          |
| Aceh                 | 30.979                         | 88.087     | 180.917    | 324.563    | 141.236    | 6.399        |
| Sumatera Utara       | 579.246                        | 806.836    | 724.522    | 670.414    | 443.412    | 277.338      |
| Sumatera Barat       | 36.444                         | 172.949    | 168.406    | 115.549    | 80.472     | 5.072        |
| Riau                 | 88.253                         | 164.310    | 149.222    | 166.147    | 151.776    | 10.084       |
| Jambi                | 440.873                        | 753.569    | 1.044.203  | 684.464    | 475.924    | 72.292       |
| Sumatera Selatan     | 2.876.990                      | 4.197.376  | 2.983.432  | 4.292.082  | 1.689.044  | 273.661      |
| Bengkulu             | 2.672.345                      | 2.279.011  | 5.846.493  | 2.648.583  | 1.321.849  | 86.023       |
| Lampung              | 245.627                        | 272.165    | 593.969    | 302.845    | 130.830    | 15.343       |
| Kep. Bangka Belitung | 4.156.291                      | 3.257.479  | 4.062.371  | 3.232.218  | 1.723.493  | 109.217      |
| Kepulauan Riau       | 691.678                        | 706.915    | 820.438    | 931.294    | 570.546    | 63.614       |
| DKI Jakarta          | 41.628                         | 295.313    | 1.290.884  | 333.521    | 147.678    | 9.045        |
| Jawa Barat           | 355.767                        | 434.155    | 188.688    | 285.263    | 247.854    | 22.900       |
| Jawa Tengah          | 255.277                        | 325.202    | 447.442    | 378.996    | 338.882    | 25.520       |
| D. I. Yogyakarta     | 174.943                        | 344.780    | 735.610    | 409.076    | 514.489    | 11.350       |
| Jawa Timur           | 111.434                        | 177.420    | 295.749    | 193.871    | 134.107    | 6.427        |
| Banten               | 146.780                        | 247.043    | 145.204    | 501.255    | 296.156    | 13.250       |
| Bali                 | 143.852                        | 307.259    | 252.714    | 538.147    | 227.803    | 8.643        |
| Nusa Tenggara Barat  | 7.607                          | 126.507    | 75.556     | 24.992     | 31.201     | 1.688        |
| Nusa Tenggara Timur  | 16.639                         | 116.781    | 511.270    | 203.548    | 174.555    | 3.766        |
| Kalimantan Barat     | 101.659                        | 242.635    | 136.625    | 330.971    | 256.799    | 9.865        |
| Kalimantan Tengah    | 268.777                        | 960.959    | 309.000    | 814.225    | 876.055    | 18.576       |
| Kalimantan Selatan   | 147175                         | 233.478    | 175.830    | 149.788    | 207.276    | 7.402        |
| Kalimantan Timur     | 14.897                         | 145.152    | 46.225     | 163.074    | 227.533    | 2.447        |
| Kalimantan Utara     | 50.561                         | 76.133     | 132.714    | 99.793     | 142.496    | 2.730        |
| Sulawesi Utara       | 53.963                         | 136.989    | 145.777    | 87.508     | 91.835     | 8.616        |
| Sulawesi Tengah      | 58.175                         | 64.089     | 146.937    | 128.475    | 56.105     | 6.574        |
| Sulawesi Selatan     | 11.149                         | 110.961    | 154.548    | 71.845     | 99.418     | 5.468        |
| Sulawesi Tenggara    | 32.041                         | 27.411     | 43.951     | 95.883     | 52.964     | 2.046        |
| Gorontalo            | 42.490                         | 27.454     | 54.416     | 30.449     | 50.241     | 1.932        |
| Sulawesi Barat       | 24.173                         | 50.644     | 289.738    | 256.718    | 157.978    | 11.538       |
| Maluku               | 47.981                         | 1.064      | 202.726    | 9.866      | 482.364    | 97           |
| Maluku Utara         | 10.607                         | 34.439     | 28.702     | 102.786    | 40.959     | 2.099        |
| Papua                | 67.592                         | 10,81      | 378.908    | 60,62      | 178.534    | 28,56        |
| Papua Barat          | 37.459                         | 11,32      | 172.965    | 52,26      | 120.565    | 36,43        |
| Papua Selatan        | 41.906                         | 13,31      | 162.852    | 51,74      | 110.003    | 34,95        |
| Papua Tengah         | 128.577                        | 11,66      | 638.616    | 57,94      | 335.089    | 30,40        |
| Papua Pegunungan     | 284.184                        | 21,89      | 838.382    | 64,56      | 175.956    | 13,55        |
| Papua Barat Daya     | 48.405                         | 13,53      | 209.403    | 58,54      | 99.899     | 27,93        |
| Jumlah               | 16.115.655                     | 20.071.708 | 25.387.279 | 23.208.654 | 14.660.516 | 972.910      |

Lampiran 201

Lampiran 72 Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024

| Provinsi             | Anies Rasyid Baswedan-<br>Muhammad Iskandar |            | Prabowo Subianto-<br>Gibran Rakabuming Raka |            | Ganjar Pranowo-<br>M. Mahfud MD |            |
|----------------------|---|------------|---|------------|---------------------------------|------------|
|                      | Jumlah                                      | Persentase | Jumlah                                      | Persentase | Jumlah                          | Persentase |
| (1)                  | (2)   | (3)        | (4)   | (5)        | (6)                             | (7)        |
| Aceh                 | 2.369.534                                   | 73,56      | 787.024                                     | 24,43      | 64.677                          | 2,01       |
| Sumatera Utara       | 2.339.620                                   | 29,25      | 4.660.408                                   | 58,26      | 999.528                         | 12,49      |
| Sumatera Barat       | 1.744.042                                   | 56,53      | 1.217.314                                   | 39,45      | 124.044                         | 4,02       |
| Riau                 | 1.400.093                                   | 37,96      | 1.931.113                                   | 52,35      | 357.298                         | 9,69       |
| Jambi                | 532.605                                     | 24,15      | 1.438.952                                   | 65,23      | 234.251                         | 10,62      |
| Sumatera Selatan     | 997.299                                     | 18,98      | 3.649.651                                   | 69,47      | 606.681                         | 11,55      |
| Bengkulu             | 229.681                                     | 18,10      | 893.499                                     | 70,42      | 145.570                         | 11,47      |
| Lampung              | 791.892                                     | 15,49      | 3.554.310                                   | 69,55      | 764.486                         | 14,96      |
| Kep. Bangka Belitung | 204.348                                     | 23,08      | 529.883                                     | 59,85      | 151.109                         | 17,07      |
| Kepulauan Riau       | 370.671                                     | 32,15      | 641.388                                     | 55,64      | 140.733                         | 12,21      |
| DKI Jakarta          | 2.653.762                                   | 41,07      | 2.692.011                                   | 41,67      | 1.115.138                       | 17,26      |
| Jawa Barat           | 9.099.674                                   | 31,68      | 16.805.854                                  | 58,50      | 2.820.995                       | 9,82       |
| Jawa Tengah          | 2.866.373                                   | 12,58      | 12.096.454                                  | 53,08      | 7.827.335                       | 34,35      |
| DI Yogyakarta        | 496.280                                     | 19,80      | 1.269.265                                   | 50,63      | 741.220                         | 29,57      |
| Jawa Timur           | 4.492.652                                   | 17,52      | 16.716.603                                  | 65,19      | 4.434.805                       | 17,29      |
| Banten               | 2.451.383                                   | 34,02      | 4.035.052                                   | 55,99      | 720.275                         | 9,99       |
| Bali                 | 99.233                                      | 3,70       | 1.454.640                                   | 54,26      | 1.127.134                       | 42,04      |
| Nusa Tenggara Barat  | 850.539                                     | 26,20      | 2.154.843                                   | 66,37      | 241.106                         | 7,43       |
| Nusa Tenggara Timur  | 153.446                                     | 5,27       | 1.798.753                                   | 61,80      | 958.505                         | 32,93      |
| Kalimantan Barat     | 718.641                                     | 22,34      | 1.964.183                                   | 61,05      | 534.450                         | 16,61      |
| Kalimantan Tengah    | 256.811                                     | 16,98      | 1.097.070                                   | 72,53      | 158.788                         | 10,50      |
| Kalimantan Selatan   | 849.948                                     | 35,16      | 1.407.684                                   | 58,23      | 159.950                         | 6,62       |
| Kalimantan Timur     | 448.046                                     | 20,09      | 1.542.346                                   | 69,15      | 240.143                         | 10,77      |
| Kalimantan Utara     | 72.065                                      | 17,67      | 284.209                                     | 69,71      | 51.451                          | 12,62      |
| Sulawesi Utara       | 119.103                                     | 7,30       | 1.229.069                                   | 75,31      | 283.796                         | 17,39      |
| Sulawesi Tengah      | 386.743                                     | 21,50      | 1.251.313                                   | 69,57      | 160.594                         | 8,93       |
| Sulawesi Selatan     | 2.003.081                                   | 37,94      | 3.010.726                                   | 57,02      | 265.948                         | 5,04       |
| Sulawesi Tenggara    | 361.585                                     | 23,09      | 1.113.344                                   | 71,11      | 90.727                          | 5,79       |
| Gorontalo            | 227.354                                     | 29,39      | 504.662                                     | 65,24      | 41.508                          | 5,37       |
| Sulawesi Barat       | 223.153                                     | 27,23      | 533.757                                     | 65,14      | 62.514                          | 7,63       |
| Maluku               | 228.557                                     | 21,16      | 665.371                                     | 61,59      | 186.395                         | 17,25      |
| Maluku Utara         | 200.459                                     | 26,85      | 454.943                                     | 60,93      | 91.293                          | 12,23      |
| Papua                | 67.592                                      | 10,81      | 378.908                                     | 60,62      | 178.534                         | 28,56      |
| Papua Barat          | 37.459                                      | 11,32      | 172.965                                     | 52,26      | 120.565                         | 36,43      |
| Papua Selatan        | 41.906                                      | 13,31      | 162.852                                     | 51,74      | 110.003                         | 34,95      |
| Papua Tengah         | 128.577                                     | 11,66      | 638.616                                     | 57,94      | 335.089                         | 30,40      |
| Papua Pegunungan     | 284.184                                     | 21,89      | 838.382                                     | 64,56      | 175.956                         | 13,55      |
| Papua Barat Daya     | 48.405                                      | 13,53      | 209.403                                     | 58,54      | 99.899                          | 27,93      |
| Luar Negeri          | 125.110                                     | 18,64      | 427.871                                     | 63,73      | 118.385                         | 17,63      |
| Jumlah               | 40.971.906                                  | 24,95      | 96.214.691                                  | 58,59      | 27.040.878                      | 16,47      |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lanjutan Lampiran 73**

| Provinsi             | Perolehan Suara Partai Politik |                   |                  |                  |                  |                |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                      | PBB                            | Demokrat          | PSI              | Perindo          | PPP              | Partai Ummat   |
|                      | (1)                            | (14)              | (15)             | (16)             | (17)             | (18)           |
| Aceh                 | 25.134                         | 224.351           | 22.809           | 8.349            | 230.749          | 18.274         |
| Sumatera Utara       | 18.262                         | 551.861           | 104.735          | 176.044          | 93.038           | 33.520         |
| Sumatera Barat       | 14.340                         | 258.149           | 15.385           | 11.251           | 124.748          | 34.396         |
| Riau                 | 13.761                         | 285.992           | 77.468           | 63.693           | 98.679           | 18.143         |
| Jambi                | 5.457                          | 197.962           | 34.649           | 28.989           | 58.114           | 10.135         |
| Sumatera Selatan     | 22.808                         | 480.801           | 92.503           | 47.948           | 55.280           | 21.537         |
| Bengkulu             | 3.663                          | 27.368            | 17.214           | 29.775           | 9.460            | 3.838          |
| Lampung              | 8.431                          | 428.727           | 93.721           | 48.052           | 69.049           | 15.393         |
| Kep. Bangka Belitung | 22.996                         | 16.873            | 7.219            | 8.091            | 72.724           | 2.040          |
| Kepulauan Riau       | 3.155                          | 54.173            | 45.857           | 14.004           | 9.927            | 5.193          |
| DKI Jakarta          | 14.735                         | 381.130           | 611.570          | 145.003          | 186.289          | 45.244         |
| Jawa Barat           | 89.013                         | 1.779.410         | 744.452          | 239.510          | 1.197.820        | 108.348        |
| Jawa Tengah          | 25.133                         | 1.372.784         | 580.751          | 162.035          | 874.749          | 85.528         |
| D. I. Yogyakarta     | 3.250                          | 49.203            | 71.998           | 10.234           | 47.873           | 55.510         |
| Jawa Timur           | 38.917                         | 1.621.940         | 712.635          | 267.757          | 1.204.062        | 75.566         |
| Banten               | 30.017                         | 627.819           | 246.571          | 100.540          | 290.030          | 27.665         |
| Bali                 | 1.805                          | 174.476           | 60.722           | 10.531           | 5.232            | 2.160          |
| Nusa Tenggara Barat  | 28.195                         | 220.438           | 46.894           | 212.059          | 191.199          | 9.482          |
| Nusa Tenggara Timur  | 8.306                          | 342.001           | 129.806          | 86.108           | 54.666           | 3.745          |
| Kalimantan Barat     | 4.706                          | 134.940           | 74.358           | 45.082           | 114.087          | 10.091         |
| Kalimantan Tengah    | 4.042                          | 154.407           | 21.397           | 27.215           | 18.776           | 2.014          |
| Kalimantan Selatan   | 7.585                          | 138.909           | 20.058           | 14.806           | 102.434          | 11.600         |
| Kalimantan Timur     | 5.789                          | 110.752           | 29.931           | 10.268           | 38.578           | 5.139          |
| Kalimantan Utara     | 988                            | 63.863            | 3.053            | 1.385            | 8.208            | 354            |
| Sulawesi Utara       | 2.980                          | 327.386           | 17.317           | 21.438           | 8.242            | 821            |
| Sulawesi Tengah      | 12.354                         | 254.852           | 20.924           | 31.068           | 28.346           | 4.924          |
| Sulawesi Selatan     | 9.408                          | 416.719           | 87.631           | 27.990           | 382.292          | 12.048         |
| Sulawesi Tenggara    | 19.723                         | 159.282           | 7.274            | 6.006            | 118.350          | 3.134          |
| Gorontalo            | 1.552                          | 14.090            | 2.469            | 5.843            | 70.720           | 1.077          |
| Sulawesi Barat       | 1.365                          | 104.369           | 3.328            | 15.003           | 13.083           | 795            |
| Maluku               | 6.193                          | 70.184            | 20.904           | 25.690           | 22.322           | 1.358          |
| Maluku Utara         | 6.777                          | 34.575            | 5.929            | 18.311           | 8.395            | 2.506          |
| Papua                | 3.133                          | 42.346            | 21.789           | 12.836           | 8.029            | 3.066          |
| Papua Barat          | 885                            | 13.212            | 5.192            | 3.718            | 4.191            | 1.962          |
| Papua Selatan        | 1.587                          | 5.311             | 5.387            | 4.257            | 7.343            | 642            |
| Papua Tengah         | 16.978                         | 7.660             | 90.402           | 6.918            | 41.570           | 4.813          |
| Papua Pegunungan     | 60                             | 90.227            | 96.512           | 2.746            | 6.750            | 66             |
| Papua Barat Daya     | 1.003                          | 44.618            | 9.355            | 4.601            | 3.373            | 418            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>484.486</b>                 | <b>11.283.160</b> | <b>4.260.169</b> | <b>1.955.154</b> | <b>5.878.777</b> | <b>642.545</b> |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Nadhiful Hakim  
Tempat,tanggal,lahir : Pati, 08 September 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Desa Tlogorejo, Kecamatan  
Tlogowungu Kabupaten Pati 5161  
Nomor Telepon : 089525349033  
Email : [hakimnadhiful@gmail.com](mailto:hakimnadhiful@gmail.com)

### B. Data Pendidikan

#### 1. Sekolah Formal

- a. MI Tahfidzul Qur'an Raudlatul Falah (2015)
- b. SMP Islam Takhasus Raudlatul Falah (2018)
- c. SMA Islam Raudlatul Falah (2021)
- d. UIN Walisongo Semarang (2021-sekarang)

#### 2. Pendidikan non Formal

- a. Pondok Pesantren Anak-Anak Tahfidzul Qur'an Raudlatul Falah Pati
- b. Pondok Pesantren Remaja Tahfidzul Qur'an Raudlatul Falah Pati
- c. Pondok Pesantren Fathul Ulum Assalam Kwagean Kediri
- d. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang

C. Pengalaman Magang

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Agama Batang
3. Pengadilan Negeri Batang
4. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Jateng

D. Riwayat Organisasi

1. Media Dakwah Center PPF
2. JQH Fakultas Syariah UIN Walisongo
3. Amanat Research Institute

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 24 Maret 2025

Muhammad Nadhiful Hakim